

RENCANA KERJA BALAI BESAR KSDA NTT TAHUN 2021



BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM NUSA TENGGARA TIMUR
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

RENCANA KERJA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM

NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021



**BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
NUSA TENGGARA TIMUR**

DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

**RENCANA KERJA BALAI BESAR
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2021**

Tim Penyusun:

Penanggung Jawab : Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya
Alam Nusa Tenggara Timur

ISBN :

Ketua : Kepala Bagian Tata Usaha

Penyunting : Kepala Sub Bagian Program dan Kerjasama

Penulis : Kriswoyo, S.E., M. Si, Saturnino Xavier, S.Hut,
M.Si, Oktan TH Poy, SST, Rani Fatmasari, S.Hut,
Sindi Nursiamdini, S.Hut

Desain Grafis : Kriswoyo, S.E., M. Si

Ilustrasi Cover : Kriswoyo, S.E., M. Si

Tata Letak : Kriswoyo, S.E., M. Si, Sindi Nursiamdini, S.Hut

Diterbitkan oleh:

Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem
Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

Jalan SK. Lerik, Kelapa Lima, Kota Kupang

Tlp: 0380832211 Fax: 0380825318

Email: bbksdantt@gmail.com; bbksda_ntt@yahoo.co.id



BURUNG PELIKAN/ *Pelecanus conspicillatus* L.
Lokasi : TWAL TELUK KUPANG, BBKSDA NTT



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

**BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
NUSA TENGGARA TIMUR**

**KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM NUSA TENGGARA TIMUR
Nomor : SK.195 /K.5/TU/REN/12/2020**

TENTANG

**RENCANA KERJA
BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021**

**KEPALA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
NUSA TENGGARA TIMUR,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah, perlu disusun Rencana Kerja Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur Tahun 2021;
- b. bahwa rencana kerja merupakan dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu alokasi serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT sebagai Unit Pelaksana Teknis di bawah Direktorat Jenderal KSDAE dipandang perlu menetapkan Rencana Kerja Balai Besar KSDA NTT Tahun 2021 dengan Keputusan Kepala Balai Besar KSDA NTT.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya.
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1994 tentang Pengesahan United Nations Convention on Biological Diversity;
3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang;

4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pengesahan Nagoya Protocol on Access to Genetic Resources and the Fair and Equitable Sharing of Benefits Arising from Their Utilization to The Convention on Biological Diversity (Protokol Nagoya tentang Akses pada Sumber Daya Genetik dan Pembagian Keuntungan yang Adil dan Seimbang yang Timbul dari Pemanfaatannya atas Konvensi Keanekaragaman Hayati);
8. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi;
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2014 tentang Pengesahan ASEAN Agreement on Transboundary Haze Pollution;
11. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2014 tentang Konservasi Tanah dan Air;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1999 tentang Pemanfaatan Jenis Tumbuhan dan Satwa Liar;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Kehutanan;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015;
20. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
21. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1978 tentang Pengesahan Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora;
22. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1987 tentang Pengesahan Amandemen 1979 atas Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora, 1973;
23. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat;

24. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 1991 tentang Pengesahan Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat;
25. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 17);
26. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2020;
27. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.41/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2019 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011-2030;
28. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
29. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.39/Menlhk-Setjen/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2015-2019;
30. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.43/Menlhk/Setjen/Set.1/8/2019 tentang Mekanisme Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
31. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.51/MENLHK/SETJEN/KUM.1/10/2017 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);
32. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.82/MENLHK/SETJEN/SET.1/11/2019 tentang Rencana Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020.
33. Keputusan Kepala Balai Besar KSDA NTT Nomor SK. 101/BBKSDA-16.1/2020 tentang Rencana Strategis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI BESAR KSDA NTT TENTANG RENCANA KERJA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021
- KESATU : Menetapkan Rencana Kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, sebagaimana tercantum dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Rencana Kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 disusun sebagai acuan dalam melaksanakan program, kegiatan, dan anggaran pembangunan bidang konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tahun 2020 pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam NTT.

KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021, dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Kupang

Pada tanggal : 30 Desember 2020

Kepala Balai Besar KSDA NTT,



Ir. Firdaus Batubara, M.Si.

NIP. 19610620 198901 1 001

Tembusan :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
2. Inspektorat Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
4. Sekretaris Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem;
5. Para Direktur lingkup Ditjen KSDAE;
6. Kepala Biro Perencanaan Setjen Kementerian LHK;
7. Pejabat Struktural Lingkup Balai Besar KSDA NTT.

Kata Pengantar



Rencana Kerja (Renja) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 disusun sebagai implementasi amanat Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Peyusunan Dokumen ini mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu alokasi serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistem yang lebih berdaya guna dan berhasil serta memantapkan pelaksanaan akuntabilitas kinerja dalam mencapai target/ sasaran dan indikator kinerja pembangunan bidang konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya.

Penetapan Renja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 mengacu pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan 2020-2024, Renstra Direktorat Jenderal KSDAE 2020-2024 dan Renstra Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur tahun 2020-2024 yang merupakan bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE. Dokumen perencanaan tahunan ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang. Dengan demikian, Dokumen Renja ini juga merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan reformasi

birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam kerangka tertib perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pemantauan dan tertib pelaporan.

Rencana Kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 besar harapan kami dapat benar-benar dipedomani dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Tahun Anggaran 2021, sehingga apa yang menjadi tujuan dan sasaran kita bersama dapat tercapai dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran strategis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur tahun 2020-2024 yang masih dalam pembahasan. Kepada para pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan ini kami sampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan atas kesediaannya meluangkan waktu, tenaga dan pemikiran. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa senantiasa memberikan rahmat dan hidayahNya kepada kita sekalian untuk dapat berpartisipasi di bidang tugas kita masing-masing dalam rangka mewujudkan cita-cita luhur bangsa Indonesia.

Kupang, Desember 2020

Kepala Balai Besar,



Dr. Timbul Batubara, M.Si.

NIP. 19610620 198901 1 001

Daftar Isi

KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xvii
RINGKASAN EKSEKUTIF	xxi
BAB. I	
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
I. Kawasan Hutan Konservasi	3
II. Sarana Pendukung Pengelolaan Kawasan Hutan Konservasi	40
III. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia	42
BAB. II	
ALOKASI ANGGARAN DAN EVALUASI KEBERHASILAN BALAI BESAR KSDA NTT	59
A. Rencana Strategis	59
B. Sasaran Strategis	62
C. Analisis SWOT	65
I. Target Jangka Menengah (2020-2024)	72
II. Target Tahunan	78
III. Anggaran/ Pembiayaan	81
BAB.3	
AKUNTABILITAS KINERJA	83
A. Capaian Kinerja Organisasi	83
I. Pengukuran Kinerja	84
II. Analisis Capaian Kinerja	89
III. Analisis Efektivitas Kinerja Tahun 2020	89
IV. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	90

BAB. IV

RENCANA KERJA TAHUN 2021	121
A. STRATEGI DALAM MENDUKUNG PRIORITAS NASIONAL	121
B. DUKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KSDAE TERHADAP PRIORITAS NASIONAL	123
I. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021	133
II. PENGARUSTAMAAN	137

BAB. V

PENUTUP	141
----------------------	-----

LAMPIRAN RENCANA KERJA BALAI BESAR KSDA NTT TAHUN 2021	143
---	-----

A. OUTPUT LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER (5419.EAC.970) TAHUN ANGGARAN 2021.....	143
I. GAMBARAN UMUM	143
II. PENERIMA MANFAAT	145
III. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN.....	145
IV. BIAYA YANG DIPERLUKAN.....	146
V. TARGET CAPAIAN KINERJA KEGIATAN.....	151
B. OUTPUT LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL (5419.EAD DAN 5419.EAE) TAHUN ANGGARAN 2021	151
I. GAMBARAN UMUM	151
II. PENERIMA MANFAAT	152
III. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN.....	152
IV. BIAYA YANG DIPERLUKAN	153
V. TARGET CAPAIAN KINERJA KEGIATAN.....	154
C. OUTPUT LAYANAN PERKANTORAN (5419.EAA.994) TAHUN ANGGARAN 2021	154
I. GAMBARAN UMUM	154
II. PENERIMA MANFAAT	156
III. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN.....	156
IV. BIAYA YANG DIPERLUKAN	157
V. TARGET CAPAIAN KINERJA KEGIATAN.....	168
D. OUTPUT LUAS KEBIJAKAN BIDANG KEHUTANAN (5420.PBV) DAN OUTPUT DATA DAN INFORMASI PUBLIK (5420.QMA) TAHUN ANGGARAN 2021.....	168
I. GAMBARAN UMUM	168
II. PENERIMA MANFAAT	170

III.	STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN.....	170
IV.	KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN.....	171
V.	BIAYA YANG DIPERLUKAN	172
VI.	TARGET CAPAIAN KINERJA KEGIATAN.....	178
E.	OUTPUT PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI (5421) TAHUN ANGGARAN 2021.....	179
I.	LATAR BELAKANG.....	179
II.	Gambaran Umum Proyek	179
III.	PENERIMA MANFAAT	181
IV.	STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN.....	181
V.	KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN	181
VI.	USULAN ANGGARAN PELAKSANAAN PROYEK	182
VII.	LOKASI DAN TARGET PELAKSANAAN PROYEK	213
F.	OUTPUT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK (5422) TAHUN ANGGARAN 2021	214
I.	GAMBARAN UMUM	214
II.	PENERIMA MANFAAT	215
III.	STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN.....	215
IV.	BIAYA YANG DIPERLUKAN.....	216
G.	OUTPUT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI (5423)	
	TAHUN ANGGARAN 2021.....	224
I.	GAMBARAN UMUM PROYEK	224
II.	PENERIMA MANFAAT	225
III.	STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN.....	225
IV.	ANALISIS KELAYAKAN.....	226
V.	ANALISIS KESIAPAN IMPLEMENTASI DI TAHUN 2021.....	227
VI.	BIAYA YANG DIPERLUKAN.....	228
VII.	LOKASI DAN TARGET PELAKSANAAN PROYEK.....	234

Daftar Tabel

Tabel 1.	Rekapitulasi Hutan Konservasi Berdasarkan Fungsinya.....	4
Tabel 2.	Daftar Hutan Konservasi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur	6
Tabel 3.	Daftar KPHK pada Hutan Konservasi	9
Tabel 4.	Daftar Kawasan yang ditetapkan sebagai Target Peningkatan Nilai METT.....	10
Tabel 5.	Hasil Penilaian METT Hutan Konservasi Prioritas Lingkup Balai Besar KSDA NTT.....	11
Tabel 6.	Rencana Pengelolaan Kawasan.....	12
Tabel 7.	Rencana Penataan Blok	13
Tabel 8.	Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam	15
Tabel 9.	Dokumen DED pada Taman Wisata Alam.....	16
Tabel 10.	Perambahan Kawasan	16
Tabel 11.	Daerah Penyangga Hutan Konservasi.....	18
Tabel 12.	Sebaran Tenaga Polisi Kehutanan BBKSDA NTT Tahun 2020	28
Tabel 13.	Kondisi Sarana Prasarana Pengamanan	29
Tabel 14.	Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan	30
Tabel 15.	Kebakaran Hutan pada Kawasan Hutan Konservasi Periode Tahun 2016-2020	31
Tabel 16.	Kelompok Masyarakat Peduli Api.....	32

Tabel 17.	Kelompok Masyarakat Mitra Polhut (MMP)	33
Tabel 18.	Kelompok Tani Hutan (KTH).....	35
Tabel 19.	Kelompok Kemitraan Konservasi BBKSDA NTT	37
Tabel 20.	Kondisi sarana prasarana gedung pengelolaan kawasan s/d 31 Desember 2020	40
Tabel 21.	Kondisi Sarana Prasarana Pengelolaan Kawasan s/d 31 Desember 2020	41
Tabel 22.	Kondisi sebaran pegawai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur berdasarkan jabatan s/d 31 Desember 2020	50
Tabel. 23.	Redesign Program Baru lingkup Ditjen KSDAE.....	63
Tabel 24.	Target Kinerja Ditjen KSDAE 2020-2024 berdasarkan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program	64
Tabel 25.	Faktor Internal (kekuatan-kelemahan) dan Faktor Eksternal (peluang-ancaman) Penyelenggaraan Konservasi Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	66
Tabel 26.	IFAS (Internal Strategic Factors Analysis Summary) dan EFAS (Eksternal Strategic Factors Analysis Summary).....	66
Tabel 27.	Matriks SWOT	69
Tabel 28.	Alternatif Strategi Melalui SWOT Penyelenggaraan Konservasi Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	70
Tabel. 29.	Strategi dan Kegiatan Melalui SWOT Penyelenggaraan Konservasi Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur	71
Tabel 30.	Sasaran Program 1 - Dukungan Manajemen	73
Tabel 31.	Sasaran Program 2 - Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	73
Tabel 32.	Sasaran Program 3 - Kualitas Lingkungan Hidup.....	74
Tabel 33.	Indikator Keluaran Kegiatan dan Rencana Kegiatan BBKSDA NTT Tahun 2020	75
Tabel 34.	Hubungan Sasaran Program Ditjen KSDAE dan Perjanjian Kinerja BBKSDA NTT 2020.	79
Tabel 35.	Perjanjian Kinerja Tahun 2020	79
Tabel 37.	Efektifitas pencapaian kinerja BBKSDA NTT pada Tahun 2020.....	90
Tabel 38.	Efisiensi pencapaian kinerja BBKSDA NTT pada Tahun 2020.....	90
Tabel 14.	Perbandingan target dan realisasi kinerja Nilai Minimal SAKIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam di Tahun 2020.	92
Tabel 39.	Perbandingan nilai SAKIP Ditjen KSDAE Tahun 2019-2020	92
Tabel 40.	Perbandingan Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020	92

Tabel 41.	Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK.....	93
Tabel 42.	Analisis efisiensi pencapaian IKK.....	94
Tabel 43.	Perbandingan target dan realisasi kinerja terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam.....	98
Tabel 44.	Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK.....	99
Tabel 45.	Perbandingan target dan realisasi kinerja terjaminnya efektivitas pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Dan Taman Buru.....	103
Tabel 46.	Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK.....	104
Tabel 47.	Perbandingan target dan realisasi kinerja terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik di Tahun 2020.....	108
Tabel 48.	Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK.....	109
Tabel 49.	Analisis efisiensi pencapaian IKK.....	109
Tabel 50.	Perbandingan target dan realisasi kinerja terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik di Tahun 2020	112
Tabel 51.	Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK.....	112
Tabel 52.	Analisis efisiensi pencapaian IKK.....	113
Tabel 53.	Perbandingan target dan realisasi kinerja terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik di Tahun 2020.....	115
Tabel 54.	Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK.....	116
Tabel 55.	Analisis efisiensi pencapaian IKK.....	116
Tabel 56.	Kondisi DIPA BBKSDA NTT tahun 2020	117
Tabel 57.	Anggaran dan realisasi tahun 2020 berdasarkan Jenis Belanja.....	118
Tabel 58.	Perbandingan prosentase penyerapan anggaran tahun 2019 dan 2020	119
Tabel 60.	Target Indikator Kinerja Program Tahun 2021	123
Tabel 61.	Alokasi anggaran Ditjen KSDAE dalam mendukung Prioritas Nasional.....	123
Tabel 62.	Proyek Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan Program Prioritas yang mendukung.....	124
Tabel 63.	Proyek Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan Program Prioritas yang mendukung Prioritas	126

Tabel 64.	Proyek Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan Program Prioritas yang mendukung Prioritas	127
Tabel 71.	Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur 2020-2024.....	134
Tabel 72.	Rincian Pagu Anggaran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur 2021 per Kegiatan (x Rp.1.000,-).....	136
Tabel 73.	Pagu Alokasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 per Jenis Belanja & Sumber Dana(x Rp.1.000,-)	136
Tabel 74.	Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kerangka Acuan Kerja/ <i>Term of Reference Output</i> Layanan Dukungan Manajemen Satker (5419.EAC.970)	146
Tabel 76.	Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kerangka Acuan Kerja/ <i>Term of Reference Output</i> Layanan Sarana Dan Prasarana Internal (5419.EAC)	153
Tabel 78.	Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ <i>Term of Reference Output</i> Layanan Perkantoran (5419.EAA.994)	157
Tabel 80.	Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kerangka Acuan Kerja (KAK)/ <i>Term of Reference Output</i> Kebijakan Bidang Kehutanan (5420.PBV) Dan Output Data Dan Informasi Publik (5420.QMA)	172

Daftar Gambar

Gambar 1.	Luas Hutan Konservasi Berdasarkan Fungsinya	5
Gambar 2.	Kondisi Perambahan Kawasan Periode 2016 s/d 2020.....	17
Gambar 3.	Komposisi Tenaga Pengamanan Hutan	27
Gambar 4.	Struktur Organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur sesuai Permenhut No. P.02/Menhut-II/2007.....	44
Gambar 5.	Struktur Organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur dengan RKW, sesuai Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur No. SK. K.5/TU/PEG/1/2021	45
Gambar 6.	Grafik kondisi pegawai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur berdasarkan jabatan s/d 31 Desember 2020	47
Gambar 7.	Grafik Kondisi pegawai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur berdasarkan golongan s/d 31 Desember 2020.....	48
Gambar 8.	Grafik Kondisi pegawai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur berdasarkan pendidikan s/d 31 Desember 2020	48

Gambar 9. Grafik kondisi pegawai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur berdasarkan pendidikan s/d 31 Desember 2020.....	49
Gambar 10. Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024.....	60
Gambar 11. Identifikasi dan Klasifikasi Faktor.....	65
Gambar 12. Diagram SWOT.....	68
Grafik 1. Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Periode Renstra tahun 2019 s/d 2020.....	83
Grafik 2. Hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis kegiatan pada Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem satuan kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2020.....	85
Grafik 3. Perbandingan pagu anggaran dan realisasi tahun 2020 berdasarkan jenis belanja.....	119
Grafik 4. Perbandingan pagu anggaran dan realisasi tahun 2019 – 2020.....	120

Ringkasan Eksekutif

Rencana Kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 merupakan penjabaran tahun kedua pelaksanaan Rencana Strategis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Nusa Tenggara Timur 2020-2024. Saat ini pengelolaan kawasan konservasi tidak hanya untuk tujuan konservasi semata dimana pengelolaan kawasan konservasi dikembangkan utamanya untuk perlindungan hidupan liar (*conservation for protecting wildlife*), namun kini konservasi juga mencakup tujuan sosial dan ekonomi (*conservation for community welfare*), restorasi, rehabilitasi dan tujuan-tujuan sosial ekonomi dan budaya. Sejak abad ke-20, upaya konservasi lebih ditekankan pada aspek perlindungan, pengawetan, serta pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan lingkungan. Hal ini sejalan dengan tiga sasaran konservasi, sebagaimana ditekankan



Koloni Kalong
Lokasi : TWA Menipo
Apdon Amfoni

dalam *World Conservation Strategy*, yaitu: (1) perlindungan sistem penyangga kehidupan; (2) pengawetan sumber-sumber plasma nutfah; serta (3) pemanfaatan secara lestari sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya. Pengelolaan keanekaragaman hayati dilaksanakan pada tiga tingkatan, yaitu pada level ekosistem, spesies, dan pada level sumberdaya genetik. Pengelolaan keanekaragaman hayati ini bertujuan untuk mencapai multi manfaat, yaitu manfaat ekonomi, sosial, serta manfaat ekologi.

Agar upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya dapat berjalan pada arah yang benar, mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat sumberdaya alam hayati, maka diperlukan pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kehutanan bidang KSDAE tahun 2021 di seluruh unit kerja lingkup Direktorat Jenderal KSDAE. Pedoman dan acuan dimaksud berupa Rencana Kerja (Renja) Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2021. Renja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur disusun sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Renja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu alokasi anggaran, serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kehutanan bidang KSDAE. Renja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang KSDAE.

Renja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur disusun sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas penyelenggaraan pembangunan kehutanan bidang KSDAE. Dokumen perencanaan tahunan ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang.

Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Program Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistem adalah terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di tapak serta pengelolaan keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan.

Sasaran program tersebut diindikasikan pencapaiannya dengan enam indikator kinerja program. Upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja programnya akan dilaksanakan melalui sebelah kegiatan yaitu: (1) Kegiatan Pemolaan dan Penataan Pengelolaan di Kawasan Konservasi; (2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi Melalui Kemitraan dengan Masyarakat; (3) Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan; (4) Kegiatan Pemulihan Kawasan Konservasi Terdegradasi yang Dipulihkan Kondisi Ekosistemnya; (5) Kegiatan Pemanfaatan Satwa Liar dan Tumbuhan Alam; (6) Kegiatan

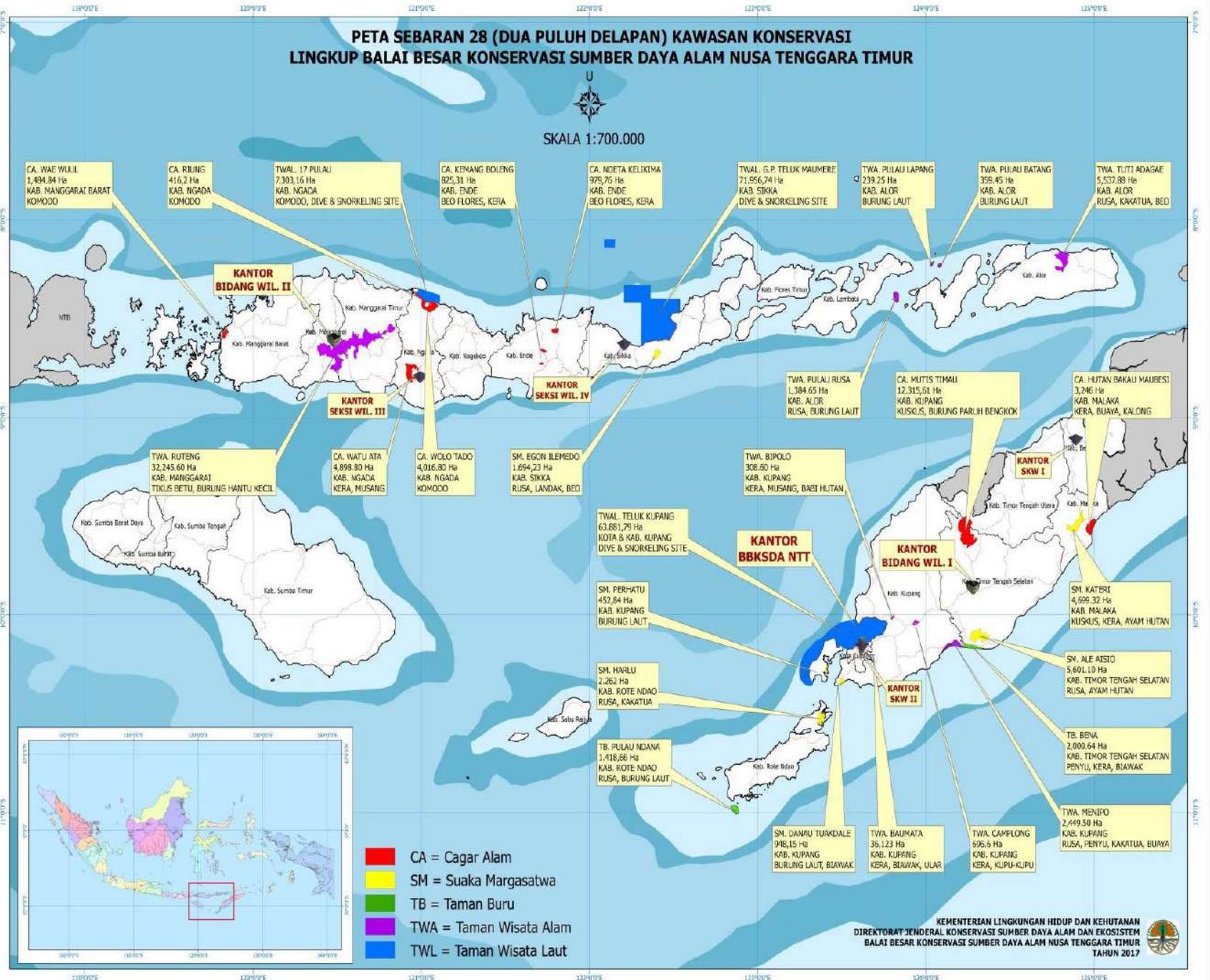
Peningkatan Populasi Spesies Terancam Punah; (7) Pengembangan Ekowisata dan Wisata Bahari pada Kawasan Konservasi; (8) Pengelolaan Kawasan Ekosistem Esensial; (9) Peningkatan Sarana Prasarana Wildlife Rescue Unit (WRU); (10) Pembinaan Desa di Daerah Penyangga Kawasan Konservasi; (11) Terwujudnya Reformasi dan Tata Kelola Kepemerintah yang Baik dalam Rangka Mendukung Pencapaian Prioritas Nasional.

Pembiayaan pelaksanaan program dan kegiatan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2021, sebagaimana pagu alokasi anggaran tahun 2021, direncanakan sebesar Rp. 37.031.508.000,- (tiga puluh tujuh milyar tiga puluh satu juta lima ratus delapan ribu rupiah). Alokasi pagu anggaran tersebut direncanakan untuk membiayai gaji dan tunjangan, operasional perkantoran serta belanja non operasional perkantoran dalam rangka pencapaian target-target prioritas yang telah ditetapkan.

RENCANA KERJA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021

PETA SEBARAN 28 (DUA PULUH DELAPAN) KAWASAN KONSERVASI
LINGKUP BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM NUSA TENGGARA TIMUR

SKALA 1:700.000



KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017



Sumber Air Panas
Lokasi : TWA Tuti Adagae
Kriswoyo



Sumber Air Panas
Lokasi : TWA Tuti Adagae
Kriswoyo

BAB. I

Pendahuluan

A. Latar Belakang

Rencana Kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 merupakan tahun kedua dalam periode pembangunan jangka menengah tahun 2020-2024. Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur bertanggung jawab dalam penyelenggaraan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya sebagaimana tertuang dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2015 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Dalam menyelenggarakan upaya konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya, Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur antara lain menjalankan mandat pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta beberapa konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Pemerintah Republik Indonesia.

Bukit Savana
Lokasi : TWA 17 Pulau
BBKSDA NTT



Agar upaya konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dapat berjalan pada arah yang benar, mencapai tujuan dan sasaran secara efektif dan efisien, serta pencapaian multi manfaat sumberdaya alam hayati, maka diperlukan pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan kehutanan bidang KSDAE tahun 2021 di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur.

Sebagai tahun awal Rencana Strategis Ditjen KSDAE 2020-2024, penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 ini difokuskan pada penyesuaian rencana 5 (lima) tahun kedepan dan optimalisasi pemanfaatan seluruh sumber daya baik dari pemerintah, swasta maupun masyarakat untuk mengejar pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional dalam RPJM sebelumnya.

Renja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur juga disusun sebagai amanat dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), serta Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2004 tentang Rencana Kerja Pemerintah. Disamping itu, Rencana Kerja Tahun 2021 didasarkan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2020 tentang Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.

Dokumen perencanaan tahunan ini diharapkan dapat menjadi instrumen dalam upaya-upaya pencapaian tujuan dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dari Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, beserta kegiatan dan indikator kinerja yang telah ditetapkan secara berjenjang. Dengan demikian, penyusunan Renja ini juga merupakan bagian dari upaya untuk melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam kerangka tertib administrasi perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pemantauan, dan tertib administrasi pelaporan. Renja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu alokasi, serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kehutanan bidang KSDAE. Dalam penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021, pendekatan perencanaan dan penganggaran yang digunakan adalah tematik, holistik, integratif, dan spasial, yaitu:

- a. Tematik, yaitu tema-tema yang menjadi prioritas dalam suatu jangka waktu tertentu. Secara Nasional Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 mempunyai tema utama “Mempercepat Pemulihan Ekonomi dan Reformasi Sosial” yang dilaksanakan dalam Tujuh Prioritas Nasional;
- b. Holistik, yaitu penjabaran tematik dari program Presiden ke dalam perencanaan dan penganggaran yang komprehensif mulai dari hulu sampai ke hilir dalam suatu rangkaian kegiatan;
- c. Integratif, yaitu upaya keterpaduan pelaksanaan perencanaan program Presiden yang dilihat dari peran Kementerian/ Lembaga, daerah dan pemangku kepentingan lainnya dan upaya keterpaduan dari berbagai sumber pembiayaan;
- d. Spasial, yaitu kegiatan pembangunan yang direncanakan secara fungsional lokasinya harus berkaitan satu dengan lain dalam satu kesatuan wilayah dan keterkaitan antarwilayah.

Rencana Kerja Pemerintah memiliki poin utama untuk mencapai tujuan kerja pemerintah setahun kedepan dengan membuat prioritas nasional. Prioritas Nasional ditetapkan mulai pada tahun 2017 dan terdapat 23 Prioritas Nasional. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah mendukung 14 Prioritas Nasional dari 23 Prioritas nasional, 21 Proyek Prioritas Nasional dan 47 Kegiatan prioritas Nasional. Prioritas Nasional di Tahun 2018 dan Tahun 2019 dilakukan penajaman atau refocusing. Pada Tahun 2018 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung 9 dari 10 Prioritas Nasional, 13 Program Prioritas, dan 23 Kegiatan Prioritas sedangkan di Tahun 2019 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mendukung 3 dari 5 Prioritas Nasional, 13 Program Prioritas dan 23 Kegiatan Prioritas. Tahun 2021, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terdapat di dalam Prioritas Nasional yang sama dengan Tahun 2020 namun terdapat perbedaan detail di dalam nomenklatur. Tujuannya yaitu untuk menyinkronisasikan realisasi rencana kerja tahun sebelumnya dengan rencana kerja tahun berikutnya sesuai dengan RPJMN dan Rencana Strategis Tahun 2020-2024. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan mengintegrasikan pembangunan dalam rencana kerja pemerintah Tahun 2021, dimana posisi pembangunan LHK diintegrasikan dalam 3 dari 5 prioritas nasional : 1) pembangunan manusia dan pengentasan kemiskinan, 2) nilai tambah sektor riil, industrialisasi, dan kesempatan kerja, dan 3) ketahanan pangan, air, energi dan lingkungan hidup. Pembangunan tematik Kementerian Lingkungan hidup dan Kehutanan tahun 2021 mendukung RKP 2021 meliputi Kesetaraan Gender, Tata Kelola, Kerentanan Bencana dan Perubahan Iklim, Modal Sosial Budaya, dan Transformasi Digital. Target Pembangunan Tahun 2021 yaitu pertumbuhan ekonomi 5.3-5.5%, tingkat kemiskinan 8-9%, tingkat pengangguran terbuka 4.7-5.1%, indeks pembangunan manusia 72.5, dan indeks gini 0.375-0.38.

I. Kawasan Hutan Konservasi

Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan wilayah kepulauan yang terletak di selatan katulistiwa pada posisi 8° - 12° LS dan 118° - 125° BT. Luas wilayah daratan NTT sekitar 47.350,00 km² atau 2,48 % luas daratan Indonesia, dan luas wilayah perairan sekitar 200.000 km² di luar perairan Zone Ekonomi Eksklusif Indonesia (BPS NTT, 2015)

Jumlah pulau besar dan kecil di NTT sebanyak 1192 pulau, namun hanya 432 pulau yang sudah mempunyai nama dan memiliki koordinat jelas sehingga diketahui letaknya. Dari ribuan pulau tersebut, hanya 43 pulau yang berpenghuni tetap dan sisanya masih kosong. Berdasarkan luas wilayahnya, terdiri dari 5 (lima) pulau besar yakni pulau Flores, Sumba, Timor, Alor dan Lembata. Diantara pulau-pulau besar tersebut tersebar pulau-pulau kecil seperti pulau Adonara, Palue, Bidadari, Rajjua, Rote, Sawu, Semau, Komodo, Rinca, dan Salura. Nusa Tenggara Timur memiliki 5 (lima) pulau terdepan yakni pulau Alor, Manggudu, Batek, Ndana Rote dan Ndana Sabu. Kelima pulau tersebut merupakan beranda selatan Indonesia dan berbatasan langsung dengan 2 (dua) negara tetangga yakni Republik Demokrasi Timor Leste dan Australia

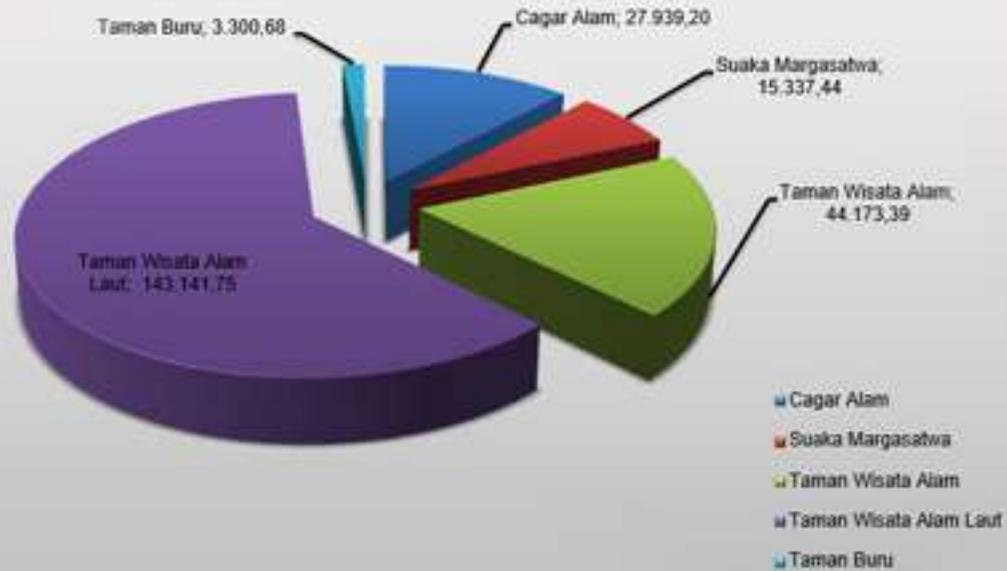
Sesuai Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2020 tanggal 14 Mei 2020 tentang Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan luas kawasan hutan di Nusa Tenggara Timur berturut-turut

didominasi Hutan Lindung 38,35%, KSA/KPA/TB daratan dan perairan 28,95%, Hutan Produksi 16,59%, Hutan Produksi Terbatas 9,75% serta Hutan Produksi yang Dapat Dikonversi 6,37%.

Tabel 1.
Rekapitulasi Hutan Konservasi Berdasarkan Fungsinya

URAIAN	JUMLAH KAWASAN	LUAS KAWASAN (HA)
1	2	3
Luas Hutan Konservasi Cagar Alam	8	27.939.20
Luas Hutan Konservasi Suaka Margasatwa	6	15.337.44
Luas Hutan Konservasi Taman Wisata Alam	9	44.173.39
Luas Hutan Konservasi Taman Buru	2	3.300.68
Luas Hutan Konservasi Taman Wisata Alam Laut	3	143.141.75
Total	28	233.892.45





Gambar 1.
Luas Hutan Konservasi Berdasarkan Fungsinya



Tabel 2.
Daftar Hutan Konservasi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur

No	Fungsi	Nama Kawasan	Dasar Hukum				Keterangan
			Status	No. SK	Tanggal	Luas (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8
CAGAR ALAM							
1	CA	Watu Ata	Penetapan	MenLHK Nomor:SK.357/ Menlhk/Setjen/PLA.o/5/2016	11 Mei 2016	4,335.58	Bentuk dan luas berubah karena sebagian menjadi Hutan Lindung
2	CA	Wolo Tado	Penetapan	MenLHK Nomor:SK.357/ Menlhk/Setjen/PLA.o/5/2016	11 Mei 2016	4,262.77	Bentuk dan luas berubah karena penyesuaian batas pantai dengan Peta RBI
3	CA	Wae Wuul	Penetapan	MenLHK Nomor: SK.357/ Menlhk/Setjen/PLA.o/5/2016	11 Mei 2016	1,484.85	Luas berbeda karena proses rektifikasi (pendekatan) dari peta analog ke peta digital
4	CA	Hutan Bakau Maubesi	Penetapan	MenLHK Nomor: SK.357/ Menlhk/Setjen/PLA.o/5/2016	11 Mei 2016	3,181.38	Luas berbeda karena proses rektifikasi (pendekatan) dari peta analog ke peta digital
5	CA	Mutis Timau	Penunjukan Kolektif	MenLHK Nomor: SK.4617/ MENLHK-KTL/KUH/ PLA.2/9/2017 MenLHK Nomor: SK.357/ Menlhk/Setjen/PLA.o/5/2016	14 Mei 2014	12,315.61	Tata batas fungsi tahun 2013.
6	CA	Ndeta Kelikima	Penunjukan Kolektif	MenLHK Nomor: SK.357/ Menlhk/Setjen/PLA.o/5/2016	14 Mei 2014	979.76	Inven Trayek Tahun 2010
7	CA	Kemang Bolong	Penunjukan Kolektif	MenLHK Nomor: SK.357/ Menlhk/Setjen/PLA.o/5/2016	11 Mei 2016	963.05	Berubah bentuk dan luas Sesuai SK.MenLHK Nomor:SK.8105/ MenLHK- PKTL/ PLA.2/11/2018 tanggal 23 November 2018 tentang Peta Perkembangan Pengukuhan Kawasan Hutan Provinsi NTT sampai dengan Tahun 2017
8	CA	Riung	Penunjukan Kolektif	Menhut No.SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014	14 Mei 2014	416.20	
TOTAL LUAS CAGAR ALAM						28,183.32	
SUAKA MARGASATWA							

No	Fungsi	Nama Kawasan	Dasar Hukum				Keterangan
			Status	No. SK	Tanggal	Luas (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8
9	SM	Kateri	Penetapan	Menhut No. SK.688/Menhut-II/2009	16 Okt 2009	4,699.32	Sesuai dengan SK penetapan
10	SM	Ale Aisio	Tata Batas Definitif (Temu gelang)/ penunjukan Kolektif	Menhut No. SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014	14 Mei 2014	5,601.10	Sesuai dengan Berita Acara Tata Batas
11	SM	Danau Tuakdale	Penunjukan Kolektif	Menhut No.SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014	14 Mei 2014	948.15	Tata batas tahun 2009 belum temu gelang
12	SM	Egon llemedo	Penunjukan Kolektif	Menhut No.SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014	14 Mei 2014	1,694.23	Tata batas fungsi tahun 2012, dokumen dalam proses pengesahan
13	SM	Harlu	Penunjukan Kolektif	Menhut No.SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014	14 Mei 2014	2,262	Tata batas fungsi tahun 2011 dan 2013, dokumen dalam proses pengesahan
14	SM	Perhatu	Penunjukan Kolektif	Menhut No.SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014	14 Mei 2014	452.84	
TOTAL LUAS SUAKA MARGASATWA						15,657.64	
TAMAN WISATA ALAM							
15	TWA	Pulau Rusa	Penetapan	Menhut No. 8820/Kpts-II/2002	24 Sept 2002	1,384.65	Sesuai dengan SK penetapan
16	TWA	Camplong	Penetapan	Menhut No.SK.347/Menhut-II/2010	25 Mei 2010	696.60	Sesuai dengan SK penetapan
17	TWA	Menipo	Penetapan	Menhut No.SK.348/Menhut-II/2010	25 Mei 2010	2,449.50	Sesuai dengan SK penetapan
18	TWA	Ruteng	Tata Batas Definitif (Temu gelang)/ penunjukan Kolektif	Menhut No. SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014	14 Mei 2014	32,245.60	Sesuai dengan Berita Acara Tata Batas
19	TWA	Tuti Adagae	Tata Batas Definitif (Temu gelang)/ penunjukan Kolektif	Menhut No. SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014	14 Mei 2014	5,537.88	Sesuai dengan Berita Acara Tata Batas

RENCANA KERJA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021

No	Fungsi	Nama Kawasan	Dasar Hukum				Keterangan
			Status	No. SK	Tanggal	Luas (Ha)	
1	2	3	4	5	6	7	8
20	TWA	Pulau Lapang	Tata Batas Definitif (Temugelang)/ penunjukan Kolektif	Menhut No. SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014	14 Mei 2014	239.25	Sesuai dengan Berita Acara Tata Batas
21	TWA	Pulau Batang	Tata Batas Definitif (Temugelang)/ penunjukan Kolektif	Menhut No. SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014	14 Mei 2014	359.45	Sesuai dengan Berita Acara Tata Batas
22	TWA	Baumata	Penunjukan Kolektif	Menhut No.SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014	14 Mei 2014	36.21	Tata batas sementara tahun 2009, dijadikan acuan tata batas definitive
23	TWA	Bipolo	Penunjukan Kolektif	Menhut No.SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014	14 Mei 2014	308.60	Tata batas fungsi tahun 2013, dokumen dalam proses pengesahan
TOTAL LUAS TAMAN WISATA ALAM						43.257.74	
TAMAN WISATA ALAM LAUT							
24	TWAL	Tujuh Belas Pulau	Penunjukan Kolektif	Menhut No.SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014	14 Mei 2014	7303.16	
25	TWAL	Teluk Kupang	Penunjukan Kolektif	Menhut No.SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014	14 Mei 2014	63,881.79	
26	TWAL	Gugus Pulau Teluk Maumere	Penunjukan Kolektif	Menhut No.SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014	14 Mei 2014	71,956.74	Tata batas belum tuntas, wilayah darat tahun 2012, wilayah laut belum.
TOTAL LUAS TAMAN WISATA ALAM LAUT						143,141.69	
TAMAN BURU							
27	TB	Bena	Penetapan	Menhut No. 74/Kpts-II/1996	27 Feb 1996	2,000.64	Sesuai dengan SK penetapan
28	TB	Pulau Ndana	Penunjukan Kolektif	Menhut No.SK.3911/MENHUT-VII/KUH/2014	14 Mei 2014	1,418.66	Tata batas fungsi tahun 2011, dokumen dalam proses pengesahan
TOTAL LUAS TAMAN WISATA ALAM LAUT						3,419.30	
TOTAL LUAS KAWASAN BALAI BESAR KSDA NTT						233,659.69	

Tabel 3.
Daftar KPHK pada Hutan Konservasi

NO	Nama KPHK	Wilayah Kerja
1	2	3
1	Gunung Mutis	CA Mutis
2	Ndeta Kelikima	CA Ndeta Kelikima, CA Kimang Boleng
3	Tuti Adagae	TWA Tuti Adagae, TWA Pulau Lapang, TWA Pulau Batang, TWA Pulau Rusa
4	Teluk Kupang	TWAL Teluk Kupang, SM Danau Tuadale, TWA Baumata, SM Perhatu
5	Wae Wuul	CA Wae Wuul
6	Harlu	SM Harlu, TB Pulau Ndana
7	Teluk Maumere	TWAL GPT Maumere, SM Egon Ilimedo
8	Watu Ata	CA Watu Ata
9	Camplong	TWA Camplong , TWA Bipolo
10	Ale Aisio	SM Ale Aisio, TB Bena, TWA Menipo
11	Ruteng	TWA Ruteng
12	Kateri	SM Kateri, CA Hutan Bakau Maubesi
13	Riung	CA Wolo Tadho, CA Riung, TWAL 17 Pulau



BURUNG PELIKAN/ *Pelecanus conspicillatus* L.
Lokasi : TWAL TELUK KUPANG
BBKSDA NTT



Biawak Komodo/ *Varanus komodoensis*
Lokasi : Pulau Ontoloe
BBKSDA NTT

Tabel 4.
Daftar Kawasan yang ditetapkan sebagai Target Peningkatan Nilai METT

No. 1	Kawasan 2	Keterangan 3	No. 1	Kawasan 2	Keterangan 3
1	CA Mutis Timau		9	SM Kateri	
2	CA Watu Ata		10	SM Egon Ilemedo	
3	CA Wolo Tado		11	TWAL Tujuh Belas Pulau	
4	CA Riung		12	TWA Ruteng	
5	CA Wae Wuul		13	TWA Baumata	
6	CA Maubesi		14	TWA Camplong	
7	SM Harlu		15	TWA Menipo	
8	SM Ale Aisio		16	TWAL GPT Maumere	



Tabel 5.
Hasil Penilaian METT Hutan Konservasi Prioritas Lingkup Balai Besar KSDA NTT

No.	Kawasan	Tahun 2015		Tahun 2017		Tahun 2018		Tahun 2019		Keterangan
		Nilai	Skor METT							
1	2	3	4	5	6					7
1	CA Hutan Bakau Maubesi	42	44%	51	52%	-		79	78%	Nilai Meningkatkan
2	CA Mutis Timau	37	41%	37	41%	-		-	-	Nilai Tetap
3	CA Riung	26	35%	22	28%	-		-	-	Nilai Menurun
4	CA Wae Wuul	36	47%	39	51%	-		56	53%	Nilai Meningkatkan
5	CA Watu Ata	31	33%	28	35%	-		-	-	Nilai Menurun
6	CA Wolo Tado	34	44%	30	38%	-		38	53%	Nilai Meningkatkan
7	SM Ale Aisio	34	44%	44	51%	-		56	62%	Nilai Meningkatkan
8	SM Egon Ilimedo	32	42%	38	48%	-		50	63%	Nilai Meningkatkan
9	SM Harlu	35	44%	45	55%	-		56	66%	Nilai Meningkatkan
10	SM Kateri	36	46%	34	45%	-		-	-	Nilai Menurun
11	TWA Ruteng	51	55%	63	66%	72	76%	72	76%	Nilai Meningkatkan
12	TWAL Tujuh Belas Pulau	34	53%	34	53%	-		-	-	Nilai Tetap
13	TWA Baumata	-	-	44	48%	-		-	-	Usulan Penilaian Pertama
14	TWA Camplong	-	-	55	60%	64	69%	67	72%	Nilai Meningkatkan
15	TWA Menipo	-	-	51	55%	62	67%	67	72%	Nilai Meningkatkan
16	TWAL GPT Maumere	-	-	36	38%	-		-	-	Usulan Penilaian Pertama
	Rata-Rata	35,67	43,83%	40,69	47,75%	66,00	70,67%	60,11	66,11%	

Tabel 6.
Rencana Pengelolaan Kawasan

No	Kawasan	Tahun Penyusunan	Periode Rencana	Pengesahan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	CA Mutis Timau	-	-	-	
2	CA Kemang Boleng	-	-	-	
3	CA Hutan Bakau Maubesi	2018	2019-2029	27 Mei 2019	SK.214/KSDAE/SET/KSA.1/5/2019
4	CA Wae Wuul	-	-	-	
5	CA Watu Ata	2019	2020-2029	Dalam Proses	Sudah diajukan
6	CA Wolo Tado	-	-	-	
7	CA Ndeti Kelikima	-	-	-	
8	CAL Riung	-	-	-	
9	SM Ale Asio	2018	2019-2028	27 Mei 2019	SK.212/KSDAE/SET/KSA.1/5/2019
10	SM Danau Tuakdale	-	-	-	
11	SM Harlu	2016	2017-2026	22 Desember 2017	SK.473/KSDAE/SET/KUM.1/12/2017 Disahkan ditahun berikutnya
12	SM Kateri	-	-	-	
13	SM Perhatu	-	-	-	
14	SM Egon Ilemedo	2019	2020-2029	Dalam Proses	Sudah diajukan
15	TB Bena	2019	2020-2029	Dalam Proses	Sudah diajukan
16	TB Pulau Ndana	-	-	-	
17	TWA Baumata	2016	2017-2026	20 Oktober 2017	SK.365/KSDAE/SET/KUM.1/10/2017 Disahkan ditahun berikutnya
18	TWA Bipolo	2020	2021-2030	Dalam Proses	Sudah diajukan
19	TWA Camplong	2016	2017-2026	20 Oktober 2017	SK.350/KSDAE/SET/KUM.1/10/2017 Disahkan ditahun berikutnya
20	TWA Pulau Batang	-	-	-	
21	TWA Pulau Lapang	-	-	-	
22	TWA Menipo	2016	2017-2026	29 November 2017	SK.350/KSDAE/SET/KSA.1/9/2017 Disahkan ditahun berikutnya
23	TWA Pulau Rusa	-	-	-	
24	TWA Ruteng	2015	2015-2024	29 Agustus 2016	SK.239/KSDAE/SET/KSA.1/8/2016 Disahkan ditahun berikutnya

No	Kawasan	Tahun Penyusunan	Periode Rencana	Pengesahan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
25	TWA Tuti Adagae	-	-	-	
26	TWAL Tujuh Belas Pulau Riung	2016	2017-2026	29 November 2017	SK.351/KSDAE/SET/KSA.1/11/2017 Disahkan ditahun berikutnya
27	TWAL GPT Maumere	2016	2017-2026	24 Oktober 2017	SK.372/KSDAE/SET/KSA.1/10/2017 Disahkan ditahun berikutnya
28	TWAL Teluk Kupang	2017	2018-2027	6 April 2018	SK.178/KSDAE/SET/KSA.1/4/2018 Disahkan 16 April 2018

Tabel 7.
Rencana Penataan Blok

No	Kawasan	Tahun Penyusunan	Pengesahan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	CA Mutis Timau	-	-	-
2	CA Kemang Boleng	2019	16 Maret 2020	SK.94/KSDAE/SET/KSA.o/3/2020
3	CA Hutan Bakau Maubesi	2017	22 Januari 2018	SK.38/KSDAE/SET/KSA.o/1/2018
4	CA Wae Wuul	2017	17 Januari 2018	SK.29/KSDAE/SET/KSA.o/1/2018
5	CA Ndeti Kelikima	-	-	-
6	CA Watu Ata	2018	25 Juni 2019	SK.268/KSDAE/SET/KSA.o/6/2019
7	CA Wolo Tado	2018	14 Juni 2019	SK.258/KSDAE/SET/KSA.o/6/2019
8	CA Riung	-	-	-
9	SM Ale Asio	2016	17 November 2017	SK.405/KSDAE/SET/KSA.o/11/2017
10	SM Danau Tuakdale	-	-	-
11	SM Harlu	2016	22 November 2017	SK.400/KSDAE/SET/KSA.o/11/2017
12	SM Perhatu	-	-	-
13	SM Egon Ilemedo	2017	16 Januari 2018	SK.11/KSDAE/SET/KSA.o/1/2018
14	SM Kateri	2018	17 Juli 2019	SK.309/KSDAE/SET/KSA.o/7/2019
15	TB Bena	2017	16 Januari 2018	SK.3/KSDAE/SET/KSA.o/1/2018
16	TB Pulau Ndana	2019	18 Februari 2020	SK.62/KSDAE/SET/KSA.o/2/2020
17	TWA Baumata	2015	22 Maret 2016	SK.94/ KSDAE/SET/KSDAE.o/3/2016
18	TWA Camplong	2015	14 Maret 2016	SK.78/KSDAE/SET/KSDAE.o/3/2016
19	TWA Bipolo	2018	14 Juni 2019	SK.257/KSDAE/SET/KSA.o/6/2019

No	Kawasan	Tahun Penyusunan	Pengesahan	Keterangan
1	2	3	4	5
20	TWA Pulau Batang	2019	18 Februari 2020	SK.69/KSDAE/SET/KSA.o/2/2020
21	TWA Pulau Lapang	2019	18 Februari 2020	SK.67/KSDAE/SET/KSA.o/2/2020
22	TWA Pulau Menipo	2015	14 Maret 2016	SK.83/KSDAE/SET/KSDAE.o/3/2016
23	TWA Pulau Rusa	2019	18 Februari 2020	SK.70/KSDAE/SET/KSA.o/2/2020
24	TWA Ruteng	2015	20 Juli 2016	SK.208/KSDAE/SET/KSA.o/7/2016
25	TWA Tuti Adagae	2019	18 Februari 2020	SK.66/KSDAE/SET/KSA.o/2/2020
26	TWAL 17 Pulau	2015	22 Maret 2016	SK.96/ KSDAE/SET/KSDAE.o/3/2016
27	TWAL GPT Maumere	2015	22 Maret 2016	SK.95/ KSDAE/SET/KSDAE.o/3/2016
28	TWAL Teluk Kupang	2017	22 November 2017	SK.424/ KSDAE/SET/KSDAE.o/3/2017



Udang/ Periclimenes sp.
Lokasi : TWAL Gugus Pulau Teluk Maumere
BBKSDA NTT



Amblyglyphidodon aureus
Lokasi : TWAL Gugus Pulau Teluk Maumere
BBKSDA NTT

Tabel 8.
Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam

No	Kawasan	Tahun Penyusunan	Pengesahan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	TWA Baumata	2019	Dalam Proses	S.1483/K.5/BIDTEK/KSA/12/2019 Tanggal 20 Desember 2019
2	TWA Bipolo	-	-	-
3	TWA Egon Ilemedo	-	-	-
4	TWA Pulau Batang	-	-	-
5	TWA Pulau Lapang	-	-	-
6	TWA Pulau Menipo	2017	29 Maret 2018	SK.15/PJLHK/PJLWA/KSA.3/3/2018
7	TWA Pulau Rusa	-	-	-
8	TWA Ruteng	2014	13 Oktober 2015	SK.71/PJLHK/PJLWA/KSA.3/10/2016
9	TWA Tuti Adagae	-	-	-
10	TWAL Tujuh Belas Pulau	2014	25 Juli 2015	SK.50/PJLHK/PJLWA/KSA.3/7/2016
11	TWAL GPT Maumere	2017	29 Maret 2018	SK.16/PJLHK/PJLWA/KSA.3/3/2018
12	TWAL Teluk Kupang	2017	29 Maret 2018	SK.17/PJLHK/PJLWA/KSA.3/3/2018
13	TWA Camplong	2018	-	Dalam proses Dit PJLHK



Ikan Badut/ *Amphiprion percula*
Lokasi : TWAL Gugus Pulau Teluk Maumere
Kartika Dewi



Sotong/ *Sepia sp.*
Lokasi : TWAL Gugus Pulau Teluk Maumere
Kartika Dewi

Tabel 9.
Dokumen DED pada Taman Wisata Alam

No	Kawasan	Tahun Penyusunan	Pengesahan	Keterangan
1	2	3	4	5
1	TWA Menipo	2017	17 Oktober 2017	-
2	TWA Camplong	2017	17 Oktober 2017	-
3	TWA Ruteng	2017	28 September 2017	-
4	TWA Tujuh Belas Pulau	2017	28 September 2017	-

Tabel 10.
Perambahan Kawasan

No	Kawasan	Luas Perambahan (Ha)					Keterangan
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CA Mutis Timau	46.00	46.00	46.00	46.00	46.00	
2	CA Watu Ata	1.793.21	1.793.21	1.793.21	1.793.21	1.793.21	
3	CA Wolo Tado	83.00	83.00	83.00	83.00	83.00	
4	CA Kemang Boleng	133.00	133.00	133.00	133.00	133.00	
5	CA. Ndeti Kelikima	379.50	379.00	379.00	379.00	379.00	
6	CA. Wae Wuul	14.10	14.10	14.10	14.10	14.10	
7	CA. Riung	53.00	53.00	53.00	53.00	53.00	
8	SM Kateri	2,426.00	455,10	455,10	455,10	455,10	
9	SM Egon Ilemedo	0	0	0	0	0	
10	SM Harlu	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	
11	TWA Camplong	0.1	0.1	0.1	0.1	0.1	
12	TWA Ruteng	3,976.16	3,976.16	3,976.16	3,976.16	3,976.16	
13	TWA Tuti Adagae	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	1,307.00	
14	TWA Pulau Lapang	5.00	5.00	5.00	5.00	5.00	
15	TWAL GPT Maumere	4,949.72	4,949.72	4,949.72	4,949.72	4,949.72	
16	TWAL Tujuh Belas Pulau	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	
Jumlah		15,196.29	13,225.39	13,225.39	13,225.39	13,225.39	

Sesuai surat Kepala BBKSDA NTT Nomor : S.1075/K.5/BIDTEK/KSA/11/2016 Tanggal 18 November 2016 Hal Rekapitulasi keterangan Penggunaan Kawasan Konservasi



Gambar 2. Kondisi Perambahan Kawasan Periode 2016 s/d 2020



Nudy branch
Lokasi : TWAL Gugus Pulau Teluk Maumere
Kartika Dewi



Scorpion fish
Lokasi : TWAL Gugus Pulau Teluk Maumere
Kartika Dewi

Tabel 11.
Daerah Penyangga Hutan Konservasi

No.	Nama Kawasan	Kabupaten	Kecamatan	Nama Desa	Ket.
1	2	3	4	5	6
I	Bidang KSDA Wil I				
1	TWAL Teluk Kupang	Kab Kupang	Kupang Barat	Tablolong Tesabela Lifuleo Bolok	35 ds
			Semau	Uiasa Hansisi Bokonusan	
			Kupang Tengah	Tarus Noelbaki Oebelo	
			Kupang Timur	Oesao Baubau Naibonat Nunkurus Merdeka Tuapukan	
			Sulamu	Pariti Sulamu Oeteta Pit'ai Bipolo	
		Kota Kupang	Alak	Namosain Alak Nunhila Fatufeto Nunbaun Sabu Nunbau Delha	

No.	Nama Kawasan	Kabupaten	Kecamatan	Nama Desa	Ket.
1	2	3	4	5	6
			Kelapa Lima	Oesapa Kelapa Lima Pasir Panjang Lasiana Oeba Solor Todekiser Lailai Besi Koepan	
2	TWA Baumata	Kupang	Taibenu	Oelnasi Neketuka Oeltua Kuaklalo Bokong	5 ds
3	TWA Camplong	Kupang	Fatuleu	Camplong I Camplong II Naunu Silu Oebola Dalam	5 ds Enclave
4	TWA Bipolo	Kupang	Sulamu	Pariti Nunkurus Bipolo Oeteta	4 ds
5	TWA Pulau Menipo	Kupang	Amarasi Timur	Enoraen	1 ds
6	CA Hutan Bakau Maubesi	Belu	Malaka Tengah	Kletek	16 ds
				Fahiluka Harakakae	
			Kobalima	Lakekun Barat Lakekun Lakekun Utara Litamali	

RENCANA KERJA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021

No.	Nama Kawasan	Kabupaten	Kecamatan	Nama Desa	Ket.
1	2	3	4	5	6
				Sisi Rai Nawe Alas Selatan Babulu Selatan Babulu Alar Kotabiru Alas Utara Kobalima timur	
7	CA Mutis Timau	TTS	Fatumnasi	Fatumnasi Nenas Mutis Nuapin	12 ds
			Tobu	Tutem Pubasu Tune Saubalan Bonleu	Enclave
		TTU	Miomaffo Barat	Fatuneno Saenam Noepesu Manusasi	
8	SM Kateri	Kab. Malaka	Malaka Tengah	Kateri Umakatahan Wehali Kamanasa Bakiruk Barada Umanen Lawalu	9 ds
			Kobalima	Lakekun Barat	

No.	Nama Kawasan	Kabupaten	Kecamatan	Nama Desa	Ket.
1	2	3	4	5	6
			Sasi Tamean	Kereana	
9	SM Perhatu	Kupang	Semau	Semau Hansisi	2 ds
10	SM Danau Tuakdale	Kupang	Kupang Barat	Lifuleo Tablolong Sumlili Tesabela	4 ds
11	SM Ale Aisio	TTS	Amanuban Selatan	Bena Oebelo Oekiu Noemuke Batnun	8 ds
			Kualin	Kiufatu Toineke Nunusunu	
12	SM Harlu	Rote Ndao	Landu Leko	Daiama Daeurendale Pukuafu Tenalai	4 ds
13	TB Bena	TTS	Amanuban Selatan	Bena Oebelo	2 ds
14	TB Pulau Ndana	Rote Ndao	Rote Barat Daya	Oenggauk Nemberala Sedeoen Bo'a Oeseli Oebou Batutua Oetefu	8 ds

RENCANA KERJA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021

No.	Nama Kawasan	Kabupaten	Kecamatan	Nama Desa	Ket.
1	2	3	4	5	6
II	Bidang KSDA Wil II				
15	TWA Tuti Adagae	Alor	Alor Timur Laut	Taramana Air Mancur Kamot Waisika Nailang Pido Kenarimbala	7 ds Enclave Enclave Enclave Enclave
16	TWA Pulau Rusa	Alor	Pantar Barat Laut	Marica Alumang Kayang Beang Onong	4 ds
17	TWA Pulau Batang	Alor	Pantar Barat	Bilang Merang Baraler	2 ds
18	TWA Pulau Lapang	Alor	Pantar Barat	Baranusa Leer / Baraleer	2 ds
19	TWA Ruteng	Manggarai	Langke Rembong	Carep Tenda Waso Golo Dukal Pau Watu Wae Ri'i Longko Ranaka Poco Likang Cumbi Bangka Lao Jaong Golo Lambo	73 ds / kelurahan

No.	Nama Kawasan	Kabupaten	Kecamatan	Nama Desa	Ket.
1	2	3	4	5	6
				Ngkaer Pongkor Ulu Belang Umung Lungar Mocok Gara Golo Muntas Koak Tado Langgo	
		Manggarai Timur	Poco Ranaka	Golo lobos	
				Kel. Mandosawu Bangka Pau Kel. Nggalak lelung Golo Nderu Ngkiong Dora Urung Dora	
				Rende Nao Ulu Wae Colol Pocolia Wejang Mawe Wejang Mali	Enclave Tangkul
			Borong	Benteng Riwu Golo Lalong Gurung Liwut Golo Leda Waling Golo Meleng	

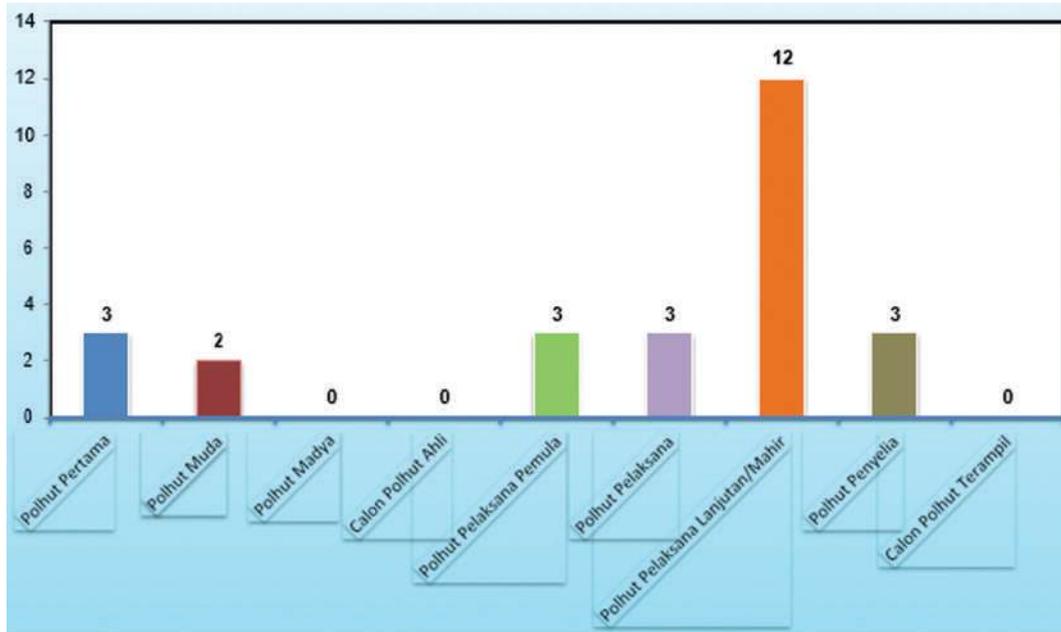
RENCANA KERJA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021

No.	Nama Kawasan	Kabupaten	Kecamatan	Nama Desa	Ket.
1	2	3	4	5	6
				Compang Teber Golo Rutuk Bangka Kempo Compang Loni	
				Bangka Loni Golo Lani Sita Sano Lokom Rana Mese Rondo Woing	Enclave Caring
				Golo Ros Torok Golo Satar Lahing Bea Ngencung	Enclave Ros
			Sambi Rampas	Satar Nawang Compang Lawi Compang Congkar	Enclave Rewas
			Kota Komba	Mokel Golo Meni Golo Nderu	
			Elar	Golo Wuas Benteng Pau Teno Mese Golo Linus Kel. Lempang Haji Sangan Kalo Golo Munde Rana Gapang Haju Ngendong	

No.	Nama Kawasan	Kabupaten	Kecamatan	Nama Desa	Ket.
1	2	3	4	5	6
20	CA Wae Wuul	Manggarai Barat	Komodo	Warloka Macang Tanggar	2 ds
21	SM Egon Ilemedo	Sikka	Waigete	Hoder Egon	15 ds
			Mapitara	Egon Gahar Natakoli	
			Doreng	Kloangpopot Wolomotong Waturerak Wogalirit	
22	TWAL GPT Maumere	Sikka	Alok	Pemana Gunung Sari Samparong	17 ds
			Alok Timur	Koja doi Koja gete Parumaan	
			Kewapante	Waiara	
			Waigete	Wairbleler Egon Hoder Nangatobong Wairterang Runut	
			Talibura	Nangahale Talibura Darat Pantai Bangkoor	

RENCANA KERJA BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
NUSA TENGGARA TIMUR TAHUN 2021

No.	Nama Kawasan	Kabupaten	Kecamatan	Nama Desa	Ket.
1	2	3	4	5	6
23	CA Wolo Tado	Ngada	Riung	Rawang Kalo Taen Torong Nanga Mese Benteng Tengah Tadho Latung Wangka	7 ds
24	CA Riung	Ngada	Riung	Latung Sambinasi	2 ds
25	TWAL Tujuh Pulau	Ngada	Riung	Nangamese Lengko Sambi Tadho	3 ds
26	CA Watu Ata	Ngada	Bajawa	Bajawa Bomari Naru Susu Beiwali Wawowae	8 ds
			Aimere	Keligejo Aimere Timur	
27	CA Kemang Boleng	Ende	Ende Detusoko Nanga Panda Maurole Wolo Waru	Wologai Tengah Mbotulaka	5 kec
28	CA Ndeta Kelikima	Ende	Hangal Ade Tiwasora		2 ds



Gambar 3.
Komposisi Tenaga Pengamanan Hutan



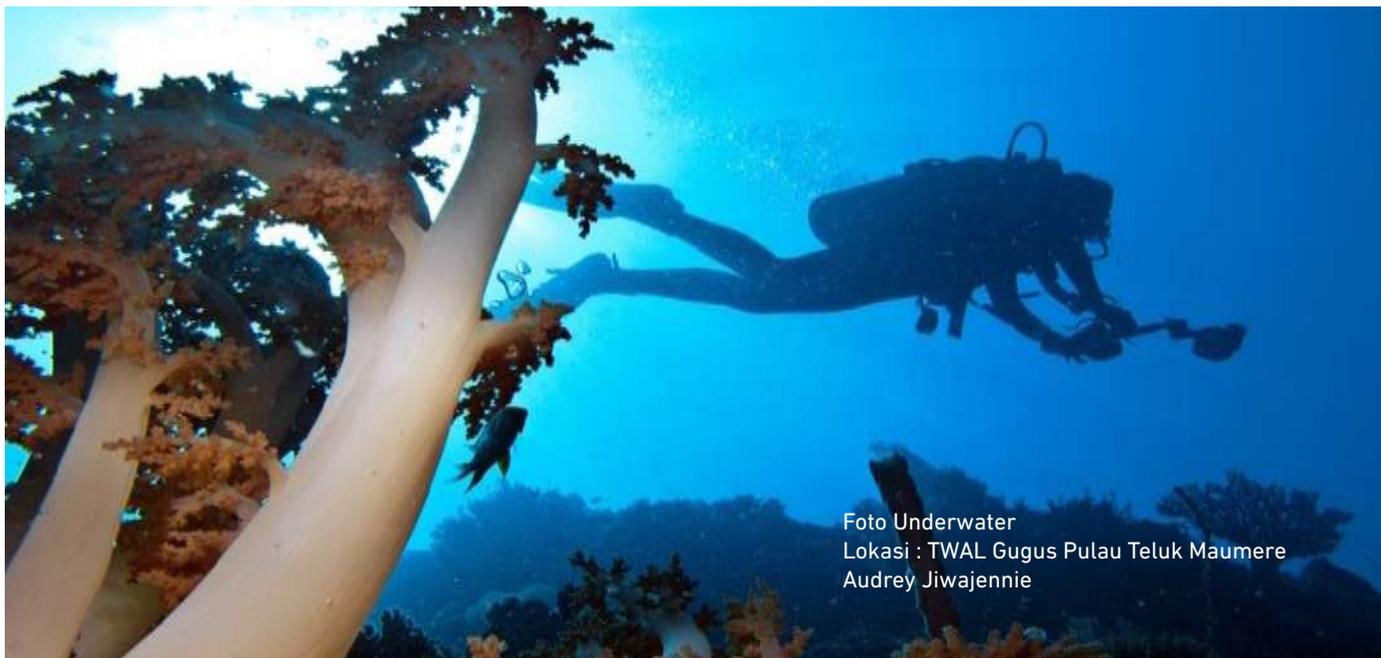
Tabel 12.
Sebaran Tenaga Polisi Kehutanan BBKSDA NTT Tahun 2020

1	POLHUT									10
	Polhut Ahli				Polhut Terampil					
	Pertama	Muda	Madya	Calon Polhut	Pelaksana Pemula	Pelaksana	Pelaksana Lanjutan	Penyelia	Calon Polhut	
Kantor Balai	2	1	-	-	-	-	-	-	-	3
Bidang KSDA Wil I	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1
SKW I	-	-	-	-	1	1	2	1	-	4
SKW II	-	-	-	-	1	-	6	1	-	9
Bidang KSDA Wil II	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
SKW III	-	-	-	-	-	1	3	-	-	4
SKW IV	1	1	-	-	1	1	-	-	-	4
Jumlah	3	2	0	0	3	3	12	3	2	26



Tabel 13.
Kondisi Sarana Prasarana Pengamanan

No	Jenis Sarana	Jumah	Kondisi
1	2	3	4
1	Senjata Genggam (Pistol)	4 buah	Baik
2	Senapan Semi Otomatis (PM1A1)	25 buah	Baik
3	Mobil Patroli	11 buah	Baik
4	Sepeda Motor Patroli	68 buah	Kondisi Baik 32 unit, kondisi rusak berat 36 buah
5	Speed boat / Motor Tempel	6 buah	Baik
6	Perahu Kayu	4 buah	Baik
6	Pos jaga	26 buah	Permanen 18 unit (kondisi baik), Semi Permanen 1 unit (kondisi baik 1 unit), Darurat 4 unit (kondisi baik), lainnya 3 unit (kondisi baik)
7	Menara pengintai	1 buah	Rusak Berat



Tabel 14.
Sarana Prasarana Pengendalian Kebakaran Hutan

NO	JENIS SARANA	JUMLAH	KETERANGAN
1	2	3	4
1	Mobil Pengangkut Alat Pemadam	2 Unit	
2	Skop	40 buah	
3	Garu	40 buah	
4	Gapyok	40 buah	
5	Golok	70 buah	
6	Sepatu boot	25 pasang	
7	Sarung tangan	160 pasang	
8	Pompa jinjing	3 buah	
9	Selang/hoze	100 meter	
10	Topi (Helmet)	30 buah	
11	Lampu Kepala (Headlamp)	30 buah	
12	Kacamata (Gogle)	30 buah	
13	Kain Penutup mulut & Leher	30 buah	
14	Sarung Tangan	30 buah	
15	Sabuk Perlengkapan (Kopel Rim)	30 buah	
16	Tempat air/Peples	36 buah	
17	Sepatu (Boot)	30 buah	
18	Pakaian Pelindung	30 buah	
19	Gepyok Pemukul api	60 buah	
20	Pompa Punggung	50 buah	

Catatan : hampir seluruh sarana prasarana pengendalian kebakaran hutan sudah ditempatkan di Resort Konservasi Wilayah

Tabel 15.
Kebakaran Hutan pada Kawasan Hutan Konservasi Periode Tahun 2016-2020

No	Lokasi Kebakaran	Luas Kebakaran (ha)					Lokasi
		Tahun					
		2016	2017	2018	2019	2020	
1	2	3	4	5	6	7	8
1	CA Mutis Timau	5	5	3.620	260.1	-	
2	CA Wae Wuul	5.82 5.77	65.3	-	40.6	90.59	Desa Warloka dan Desa Macang Tanggar Kec. Komodo Kab. Manggarai Barat
3	CA Hutan Bakau Maubesi	-	-	0.0006	-	-	
4	CA Watu Ata	-	0.75	0.750	-	0.75	Desa Wawowae Kec. Bajawa Kab. Ngada
5	CA Wolo Tado	5.14	24.08	1.500	-	18.75	Desa Latung, Desa Tadho, Desa Lengkosambi Kec. Riung Kab. Ngada
6	CA Riung	-	2.12	2	-	-	
7	TB Bena	-	35.79	1.520	-	-	
8	TWA Menipo	-	-	-	-	-	
9	TWA Baumata	-	0.2	0.020	1	4.41	Desa Baumata Kec. Taebenu Kab. Kupang
10	TWA Bipolo	-	-	0.001	1	-	
11	TWA Ruteng	-	-	1	6.7	-	
12	TWA Camplong	-	0.005	0.237	10.752	12.30	Kel. Camplong I, Kec Fatuleu Kab. Kupang
13	TWAL Tujuh Belas Pulau	-	-	-	-	-	
14	SM Kateri	-	4.731	-	-	-	
15	SM Perhatu	0.003	-	-	-	-	
16	SM Danau Tuakdale	0.001	-	-	-	-	
17	SM Harlu	-	-	0.001	-	-	
18	TWA Pulau Rusa	-	-	-	8	-	
19	TWA Pulau Lapang	-	-	-	2	-	
20	TWA Tuti Adagae	-	-	-	10	0.50	Desa Kenarimbala Kec. Alor Timur Laut Kab. Alor
Total Luas		21.734	133.25	15.38	340.152	127.30	

Tabel 16.
Kelompok Masyarakat Peduli Api

No	Nama kelompok/kawasan	Tahun terbentuk	Tugas kelompok
1	2	3	4
I.	BIDANG KSDA WILAYAH I		
1	MPA "PANAT PAH" di Desa Camplong II, Kec. Fatuleu, Kab. Kupang / RKW TWA Camplong Jumlah : 25 orang	2013	Mitra dalam penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
2	MPA di Desa Daiama, Kecamatan LanduLeko, Kab Rote Ndao / RKW SM Harlu Jumlah : 30 orang	2013	Membantu upaya pengendalian kebakaran di sekitar kawasan
3	MPA di Desa Toineke, Kec. Kualin, Kab. TTS / RKW TB Benadan SM Ale Aisio Jumlah : 30 orang	2012	Mitra dalam penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
4	MPA di DesaLekun Barat, Kec. Malaka Tengah, Kab. Belu / RKW SM Kateri Jumlah : 25 orang	2013	Mitra dalam penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
5	MPA di Desa Fatumnasi, Kec. Fatumnasi, Kab. TTS / RKW CA Mutis Jumlah : 25 orang	2013	Mitra dalam penanggulangan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan
II.	BIDANG KSDA WILAYAH II		
1	MPA Wae Wuul/CA Wae Wuul	2010	Melapor, mencegah dan memadamkan api
2	MPA Riung / TWA Tujuh Belas Pulau, CA Riung, dan CA Wolo Tadho	2010	Melapor, mencegah dan memadamkan api
3	MPA Watu Ata / CA Watu Ata	2013	Melapor, mencegah dan memadamkan api
4	MPA Egon Lestari / SM Egon Ilemedo	2013	Melapor, mencegah dan memadamkan api
5	MPA Koja Doi / TWA Gugus Pulau Teluk Maumere	2013	Melapor, mencegah dan memadamkan api

Tabel 17.
Kelompok Masyarakat Mitra Polhut (MMP)

No	Nama kelompok/kawasan	Tahun terbentuk	Tugas kelompok
1	2	3	4
1	MMP RKW CA HUTAN BAKAU MAUBESI	12 Mei 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
2	MMP RKW SM KATERI	9 Mei 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
3	MMP RKW CA MUTIS TIMAU	8 Mei 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
4	MMP RKW SM ALE AISIO dan TB BENA	28 Mei 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
5	MMP RKW TWA MENIPO	19 Mei 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
6	MMP TWA BAUMATA, TWAL TELUK KUPANG, SM DANAU TUADALE, dan SM PERHATU	26 Mei 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
7	MMP RKW TWA CAMPLONG	19 Mei 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
8	MMP RKW TWA BIPOLO	26 Mei 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
9	MMP RKW SM HARLU	5 Juni 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
10	MMP RKW CA WAE WUUL	8 Maret 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
11	MMP RKW TWA RUTENG I	8 Maret 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
12	MMP RKW TWA RUTENG II	21 Maret 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
13	MMP RKW TWA RUTENG III	21 Maret 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
14	MMP RKW TWA RUTENG IV	8 Maret 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
15	MMP RKW TWAL 17 PULAU, CA WOLO TADHO, dan CA RIUNG	14 Maret 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT

No	Nama kelompok/kawasan	Tahun terbentuk	Tugas kelompok
1	2	3	4
16	MMP RKW CA WATU ATA	4 Maret 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
17	MMP RKW CA KIMANG BOLENG	11 Maret 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
18	MMP RKW NDETA KELIKIMA	28 Maret 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
19	MMP RKW TWAL TELUK MAUMERE	11 April 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
20	MMP RKW CA EGON ILE MEDO	3 April 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
21	MMP RKW TWA PULAU LAPANG dan PULAU BATANG	24 Juni 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
22	MMP RKW TWA PULAU RUSA	24 Juni 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT
23	MMP RKW TWA TUTI ADAGAE	25 Juni 2018	Melakukan Patroli Pengamanan Bersama Petugas BBKSDA NTT



Kakatua Kecil Jambul Kuning/ *Cacatua sulphurea parvula*
Lokasi : TWA Menipo
BBKSDA NTT



Kelelawar/ *Pteropus vampyrus*
Lokasi : TWA Menipo
BBKSDA NTT

Tabel 18.
Kelompok Tani Hutan (KTH)

No	Nama Kelompok	Alamat KTH	Jumlah Anggota	Tanggal Terbentuk	SK Pembentukan
1	2	3	4	5	6
1	SINAR MUTIS	Desa Fatumnasi	26	25 June 2016	SK Kades Fatumnasi No.10/KEP/DES.Ftm/2016
2	MONE FETO ETFE	Desa Oekie, Kec. Amanuban Selatan, TTS	20	22 October 2018	SK Kades Oekiu No. 14 Tahun 2018
3	PALOIL PAH MUTIS	Desa Nenas, Kec. Fatumnasi, Kab. TTS	25	5 September 2020	Surat Keputusan Kepala Desa Nenas Nomor : 14/SKEP/DS.NENAS/09/2020
4	NEKMESE (tenun)	Desa Nenas, Kec. Fatumnasi, Kab. TTS	25	5 September 2020	Surat Keputusan Kepala Desa Nenas Nomor : 15/SKEP/DS.NENAS/09/2020
5	Kateri Lestari	Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka, NTT	15	November 2020	Surat Keputusan Kepala Desa Kamanasa Nomor : Ds.Kms.140/SK/17/XII.2020 tanggal November 2020
6	MAJU BERSAMA	Desa Daiama, Kec. Landu Leko, Rote Ndao	20	22 October 2018	SK Kades Daiama No.SK.23/KEP/DD/2018
7	SANGA SODA	Desa Lifuleo, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang	18	2 October 2020	Surat Keputusan Kepala Desa Lifuleo Nomor : 10/SKEP/DL/2020
8	MANGKENG HERBAL	Kel. Waso Kec. Langke Rembong, Manggarai	12	23 April 2018	SK.LURAH WASO No.KWS.470/304.1/IV/2018
9	SADAR LESTARI	Desa Wejang Mawe, Kec. Poco Ranaka Timur, Manggarai Timur	18	8 January 2018	SK Kades Wejang Mawe No.16 Tahun 2018
10	CUNCANG WEK ULUWAE	Desa Uluwae, Kec. Poco Ranaka Timur	15	9 April 2018	BA Pembentukan Kelompok No BA.56/K.5/BKW II/SKW III/KSA/4/2018
11	MAJU BERSAMA	Desa Macang Tanggar. Kec. Komodo, Kab. Mangarai Barat	10	9 September 2020	Surat Keputusan Kepala Desa Macang Tanggar Nomor : Pem.042.2/432/IX/2020

No	Nama Kelompok	Alamat KTH	Jumlah Anggota	Tanggal Terbentuk	SK Pembentukan
1	2	3	4	5	6
12	SUMBER USAHA	Desa Macang Tanggar. Kec. Komodo, Kab. Mangarai Barat	10	9 September 2020	Surat Keputusan Kepala Desa Macang Tanggar Nomor : 10 tanggal 9 September 2020
13	DANAU DHOLAT	Desa Macang Tanggar. Kec. Komodo, Kab. Mangarai Barat	10	9 September 2020	Surat Keputusan Kepala Desa Macang Tanggar Nomor : 11 tanggal 9 September 2020
14	MAJU BERSAMA	Desa Kloangpopot, Kec. Doreng. Kab. Sikka	17	28 Maret 2018	BA : DKLP.005/242/IV/2018



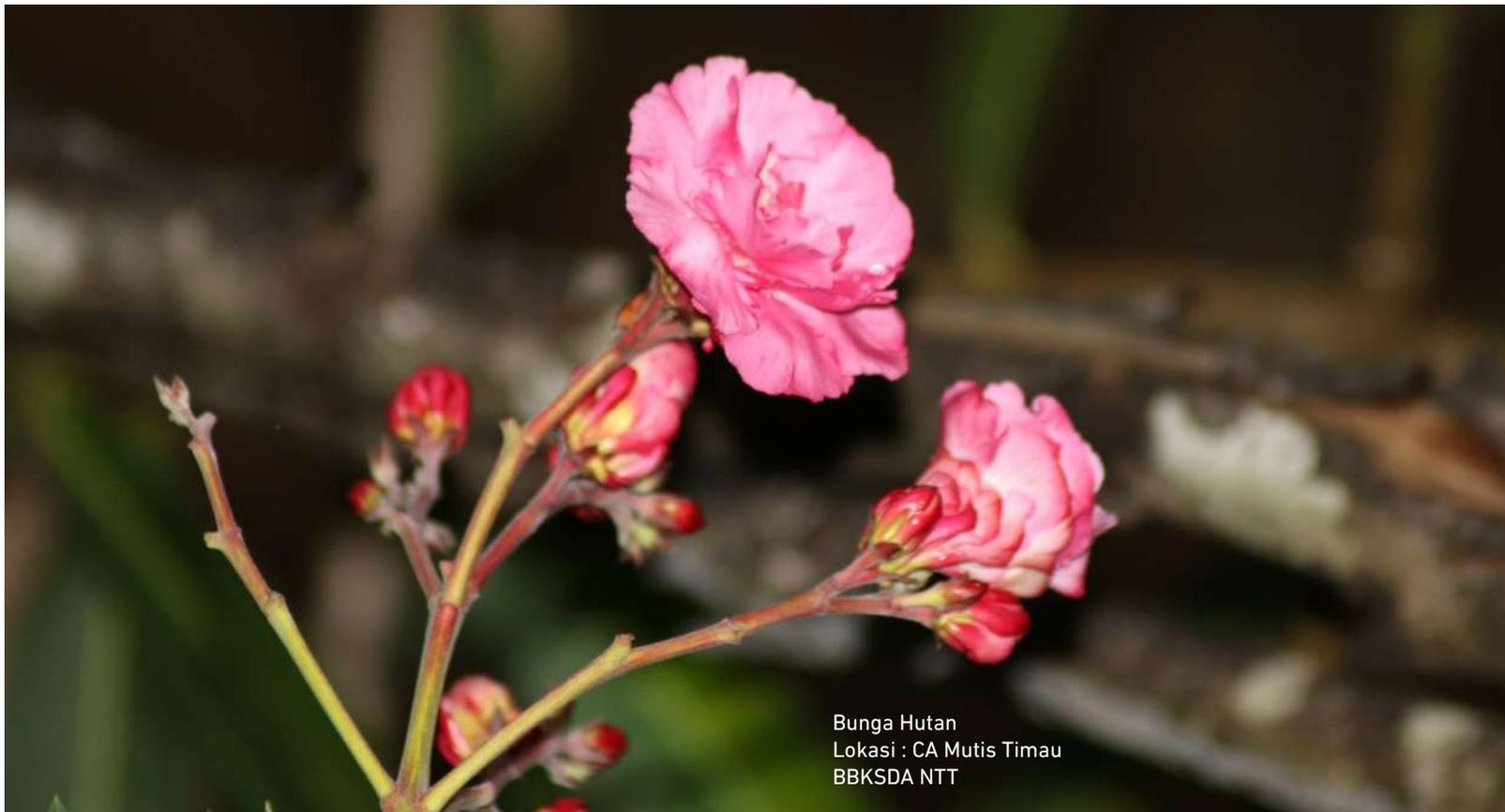
Buaya Muara/ *Crocodylus porosus*
Lokasi : TWA Menipo
BBKSDA NTT

Tabel 19.
Kelompok Kemitraan Konservasi BBKSDA NTT

No	Nama Kelompok	Dasar	Ketua	Lokasi Pemanfaatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
1	Kelompok tani dan ekowisata "Nekabua Baumata", Desa Baumata, Kecamatan Taebenu, Kabupaten Kupang	Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 01/SK/DBM//2019 tanggal 28 Juni 2019	Johanes Ludji	TWA Baumata	Jasa Wisata
2	Kelompok tani dan ekowisata "Oenaek", Desa Camplong II, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang	Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 445/22/SKEP/DCII/VI/2019 tanggal 28 Juni 2019	Zadrah Ferdinand Lunggu	TWA Camplong	Jasa Wisata
3	Kelompok tani dan ekowisata "Buaya Putih", Desa Enoraen, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang	Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 09/SKEP/ENR/6/2019 tanggal 29 Juni 2019	Sefron Takumau	TWA Menipo	Jasa Wisata
4	Kelompok tani rumput laut, Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada	Surat Keputusan Lurah Nangamese Nomor : 06/Kep/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019	Abdul Rahman Melang	TWAL 17 Pulau	Budidaya Rumput Laut
5	Kelompok tani tripang, Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung, Kabupaten Ngada	Surat Keputusan Lurah Nangamese Nomor : 07/Kep/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019	Nurdin Saleng D. Malewa	TWAL 17 Pulau	Bidang pemanfaatan hasil laut teripang
6	Kelompok tani lebah madu, Kelurahan Nangamese, Kecamatan Riung	Surat Keputusan Lurah Nangamese Nomor : 08/Kep/10/2019 tanggal 1 Oktober 2019	Zainudin Melang	TWAL 17 Pulau	Bidang pemanfaatan madu alam
7	Kelompok tani mangrove Menipo, Desa Enoraen, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang	Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 07/SKEP/ENR/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019	Jidron Taopan	TWA Menipo	Pembibitan Mangrove
8	Kelompok tenun tradisional Menipo, Desa Enoraen, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang	Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 06/SKEP/ENR/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019	Yakomina Talan	TWA Menipo	Kreasi tenun tradisional

No	Nama Kelompok	Dasar	Ketua	Lokasi Pemanfaatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
9	Kelompok seni tari tradisional Menipo, Desa Enoraen, Kecamatan Amarasi Timur, Kabupaten Kupang	Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : 08/SKEP/ENR/10/2019 tanggal 25 Oktober 2019	Alex Taunay	TWA Menipo	Seni tari tradisional
10	Kelompok masyarakat kemitraan konservasi "Tahat Toen", Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan	Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : SK.53.96.55.09/145/539/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019	Felipus Asbanu	TB Bena	Pemanfaatan sumberdaya perikanan Danau Kubai dan daun gebang
11	Kelompok masyarakat kemitraan konservasi "Taim Monit", Desa Bena, Kecamatan Amanuban Selatan, Kabupaten Timor Tengah Selatan	Surat Keputusan Kepala Desa Nomor : SK.53.96.55.09/145/540/XII/2019 tanggal 6 Desember 2019	Semi Boimau	TB Bena	Pemanfaatan sumberdaya perikanan Danau Kubai dan gebang
12	Kelompok masyarakat "Kita Sama", Kelurahan Sulamu, Kecamatan Sulamu, Kabupaten Kupang	Surat Keputusan Lurah Sulamu Nomor : 35/421/KSL/XII/2019 tanggal 7 Desember 2019	Halindun Usman K. Kiah	TWAL Teluk Kupang	Budidaya rumput laut dan pemanfaatan hasil laut
13	Kelompok masyarakat "Koja Bahari" di Desa Kojadoi, Kecamatan Alok Timur, Kabupaten Sikka	Surat Keputusan Kepala Desa Koja Doi Nomor : DKD.145/006/X/2019 tanggal 21 Oktober 2019	Ramadhan	TWAL Teluk Maumere	Keramba jaring apung budidaya ikan kerapu tikus
14	Kelompok masyarakat Dalek Esa di Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang	Surat Keputusan Kepala Desa Tanah Merah Nomor : Nomor : 15/SKEP/2020 tanggal 9 November 2020	Joni J Mesakh	TWAL Teluk Kupang	Perikanan Tangkap
15	Kelompok Masyarakat "Pantai Nunsui" di Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang	Surat Keputusan Lurah Oesapa Nomor : 011/SKEP/KOSP/2020, tanggal 6 November 2020	Zeth Yohanes Faggi	TWAL Teluk Kupang	Perikanan Tangkap
16	Kelompok Masyarakat Hamoris Alas Wemer di Desa Lakuken Barat dan Kamanasa, Kecamatan Malaka, Kabupaten Malaka	Surat Keputusan Camat Malaka Tengah Nomor : Kc.Mtg.816/195.a/XII/2020 tanggal 6 Desember 2020	Agustinus Klau, S.Pd	SM Kateri	Pemulihan Ekosistem

No	Nama Kelompok	Dasar	Ketua	Lokasi Pemanfaatan	Keterangan
1	2	3	4	5	6
17	Kelompok Masyarakat Wehali Haburas Kateri di Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka	Surat Keputusan Kepala Desa Wehali Nomor : DS.WHL/300/28/2020 tanggal 6 Desember 2020	Mario Prereira	SM Kateri	Pemulihan Ekosistem
18	Kelompok Masyarakat Kateri Lestari di Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka	Surat Keputusan Kepala Desa Kamanasa Nomor : DS. KMS.140/SK/17/XII/2020 tanggal 16 November 2020	Apolinario De Araujo	SM Kateri	Perikanan Tradisional



Bunga Hutan
Lokasi : CA Mutis Timau
BBKSDA NTT

II. Sarana Pendukung Pengelolaan Kawasan Hutan Konservasi

Dalam rangka pengelolaan kawasan, diperlukan dukungan sarana-prasarana khususnya berupa gedung pengelola kawasan baik pada tingkat Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur, Bidang KSDA Wilayah, Seksi Konservasi Wilayah serta Resort Konservasi Wilayah yang merupakan garda terdepan pengelolaan KSA dan KPA pada wilayah kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur. Kondisi terkini terkait sarana prasarana gedung pengelolaan kawasan diuraikan pada tabel 3 berikut :

Tabel 20.
Kondisi sarana prasarana gedung pengelolaan kawasan s/d 31 Desember 2020

Nama Jabatan	Rumah Dinas	Gedung Kantor	Operasional roda 2	Operasional roda 4
1. Ka.BBKSDA,	√	√	√	√
2. KBTU	√		-	√
3. Subbag Umum	-		√	√
4. Subbag Evlap DH	-		-	√
5. Subbag PK	-		-	√
6. Bidang Teknis KSDA	√	√	-	√
7. Seksi P ₂	√		-	√
8. Seksi P ₃	-		√	√
9. Bidang KSDA Wil. I	√	√	√	√
10. SKW I	√	√	√	√
11. SKW II	-	√	√	√
12. Bidang KSDA Wil. II	√	√	√	√
13. SKW III	√	√	√	√
14. SKW IV	√	√	√	√
Jumlah kebutuhan	14	8	14	14
Kondisi	9	8	9	14
Kekurangan	5	0	5	0

Catatan :

√ Sudah tersedia - Belum tersedia Tidak dibutuhkan

Tabel 21.
Kondisi Sarana Prasarana Pengelolaan Kawasan s/d 31 Desember 2020

Nama Jabatan	Pondok Jaga	Operasio-nal Roda 2	Operasio-nal Roda 4	Operasional Patroli KM	Papan Nama Kawasan
1. RKW SM Kateri	√	√	√		√
2. RKW CA Hutan Bakau Maubesi	√	√	-	√	√
3. RKW CA Mutis	√	√	-		√
4. RKW SM Ale Aisio dan TB Bena	√	√	-		√
5. RKW TWA Baumata, TWAL Teluk Kupang, SM Danau Tuadale, SM Perhatu & Pel. Laut Tenau & Bolok	√	√	-	√	√
6. RKW TWA Camplong dan TWA Bipolo	√	√	-		√
7. RKW TB Pulau Ndana	-	√	-	-	-
8. RKW TWA Manipo	√	√	-	√	√
9. RKW SM Harlu	√	√	-		√
10. RKW TWA Ruteng Wilayah I	√	√	-		√
11. RKW TWA Ruteng Wilayah II	√	√	-		√
12. RKW TWA Ruteng Wilayah III	√	√	-		√
13. RKW TWA Ruteng Wilayah IV	-	√	-		-
14. RKW CA Watu Ata	-	-	-		√
15. RKW CA Wae Wuul	√	-	-	√	√
16. RKW TWAL 17 Pulau, CA Wolo Tadho & CA Riung	√	√	-	√	√
17. RKW CA Kimang Boleng	√	√	-		-
18. RKW CA Ndeta Kelikima	-	√	-		√
19. RKW TWAL GPT Maumere	√	√	-		√
20. RKW CA Egon Ilimedo	-	√	-		√
21. RKW TWA Pulau Lapang dan TWA Pulau Batang	-	-	-	√	√
22. RKW TWA Pulau Rusa	-	√	-	√	√
23. RKW TWA Tuti Adagae	√	√	-		√
Jumlah kebutuhan	23	23	23	8	23
Kondisi eksisting	16	19	1	5	20
Kekurangan	7	4	22	3	3

Catatan :

√ Sudah tersedia - Belum tersedia Tidak dibutuhkan



Danau Ranamese
Lokasi : TWA Menipo
BBKSDA NTT

III. Kelembagaan dan Sumber Daya Manusia

Berdasarkan Permenhut No. P.02/Menhut-II/2007 yang telah diubah dengan P.51/Menhut-II/2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Konservasi Sumber Daya Alam, BB KSDA NTT memiliki tugas untuk melaksanakan penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya dan pengelolaan kawasan CA, SM, TWA dan TB, koordinasi teknis pengelolaan tahura dan hutan lindung serta konservasi tumbuhan dan satwa liar diluar kawasan konservasi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Tugas pokok tersebut dijabarkan dalam fungsi sebagai berikut :

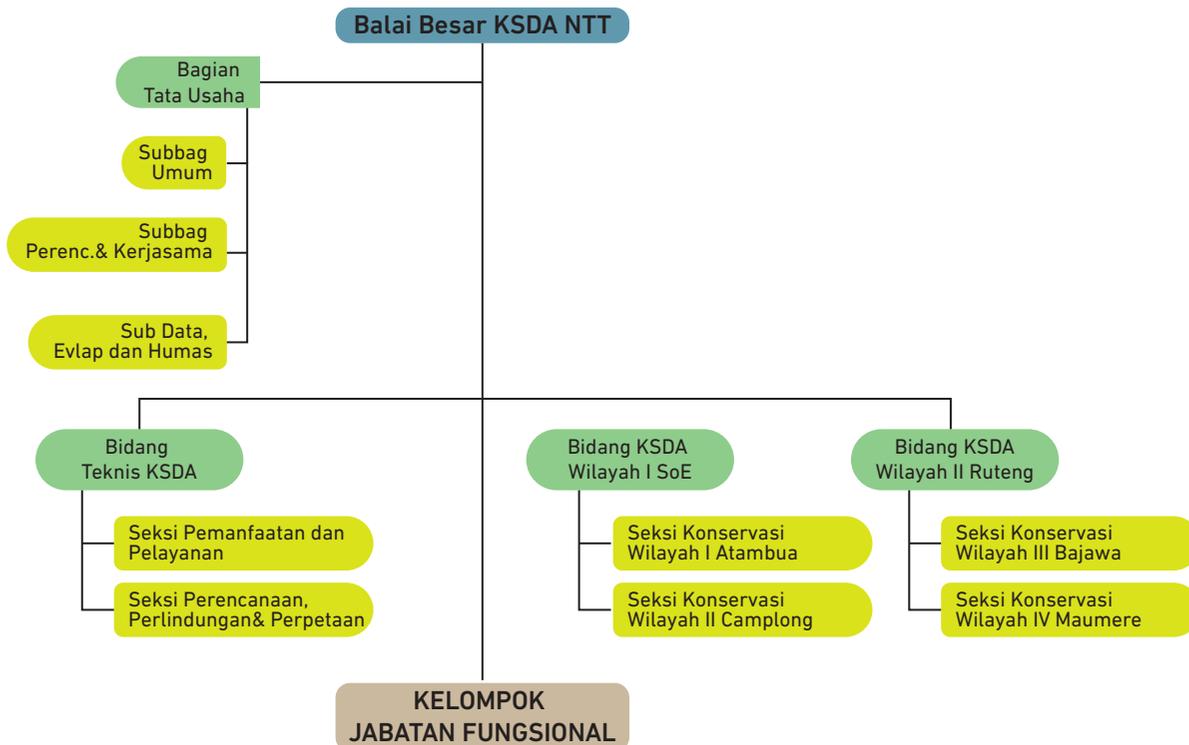
- a. penataan blok, penyusunan rencana kegiatan, pemantauan dan evaluasi pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- b. pengelolaan kawasan cagar alam, suaka margasatwa, taman wisata alam, dan taman buru, serta konservasi tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;



TWA 17 Pulau
BKSDA NTT

- c. koordinasi teknis pengelolaan taman hutan raya dan hutan lindung;
- d. penyidikan, perlindungan dan pengamanan hutan, hasil hutan dan tumbuhan dan satwa liar di dalam dan di luar kawasan konservasi;
- e. pengendalian kebakaran hutan;
- f. promosi, informasi konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
- g. pengembangan bina cinta alam serta penyuluhan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya;
- h. kerja sama pengembangan konservasi sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya serta pengembangan kemitraan;
- i. pemberdayaan masyarakat sekitar kawasan konservasi;
- j. pengembangan dan pemanfaatan jasa lingkungan dan pariwisata alam;
- k. pelaksanaan urusan tata usaha dan rumah tangga.

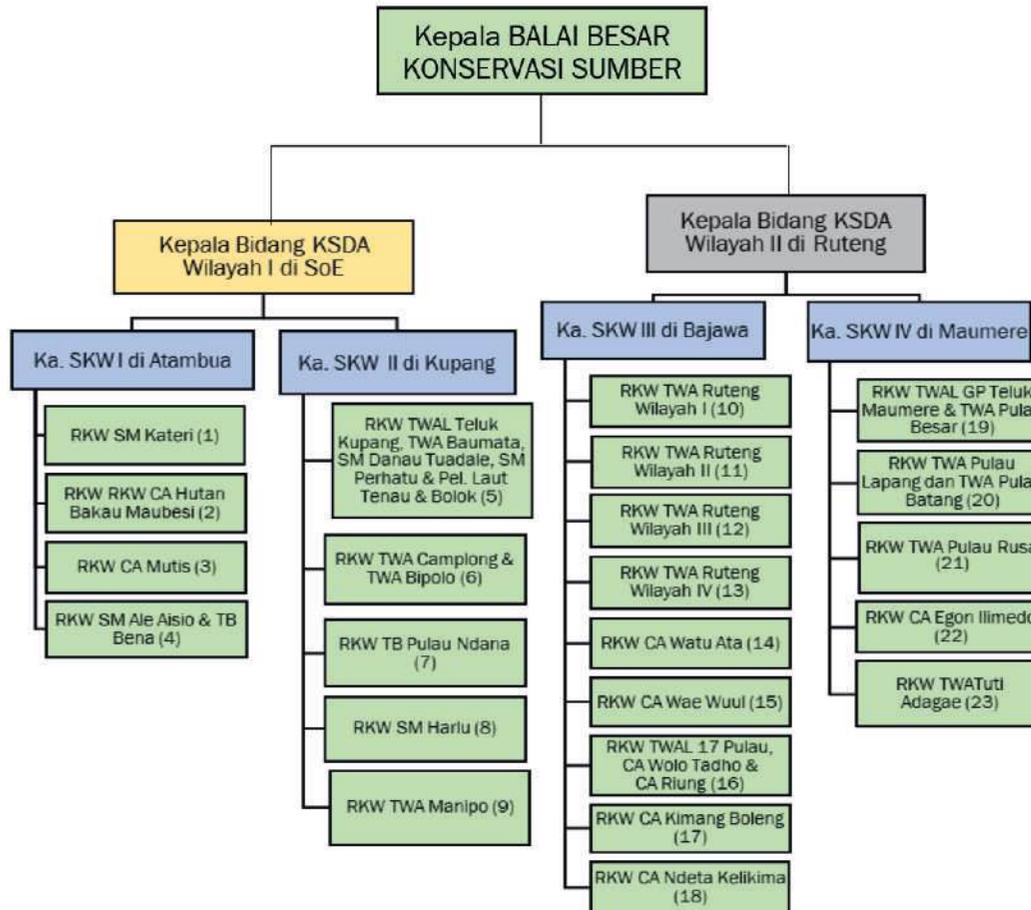
Struktur Organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur diuraikan pada gambar 2 berikut :



Gambar 4.
Struktur Organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur
sesuai Permenhut No. P.02/Menhut-II/2007

Untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan wilayah pada Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur sebagaimana diatur pada Pasal 33 ayat (1) Permenhut No. P.02/Menhut-II/2007, selanjutnya Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur membentuk 21 unit RKW. Kepala RKW merupakan jabatan non struktural yang dibina oleh Kepala SKW I sampai dengan IV. Pada umumnya wilayah tanggungjawab 1 RKW meliputi 1 unit kawasan hutan konservasi. Namun pada beberapa kawasan yang letaknya berdekatan, dalam pengelolaannya digabung dalam 1 wilayah RKW. Sedangkan pada kawasan yang wilayahnya cukup luas, dalam pengelolaannya justru dilakukan oleh beberapa RKW.

Gambar Struktur Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur yang meliputi 23 RKW, diuraikan pada gambar 3 berikut :



Gambar 5.
Struktur Organisasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur dengan RKW, sesuai Keputusan Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur No. SK. K.5/TU/PEG/1/2021

Pegawai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur per 31 Desember 2020 berjumlah 205 orang, terdiri dari:

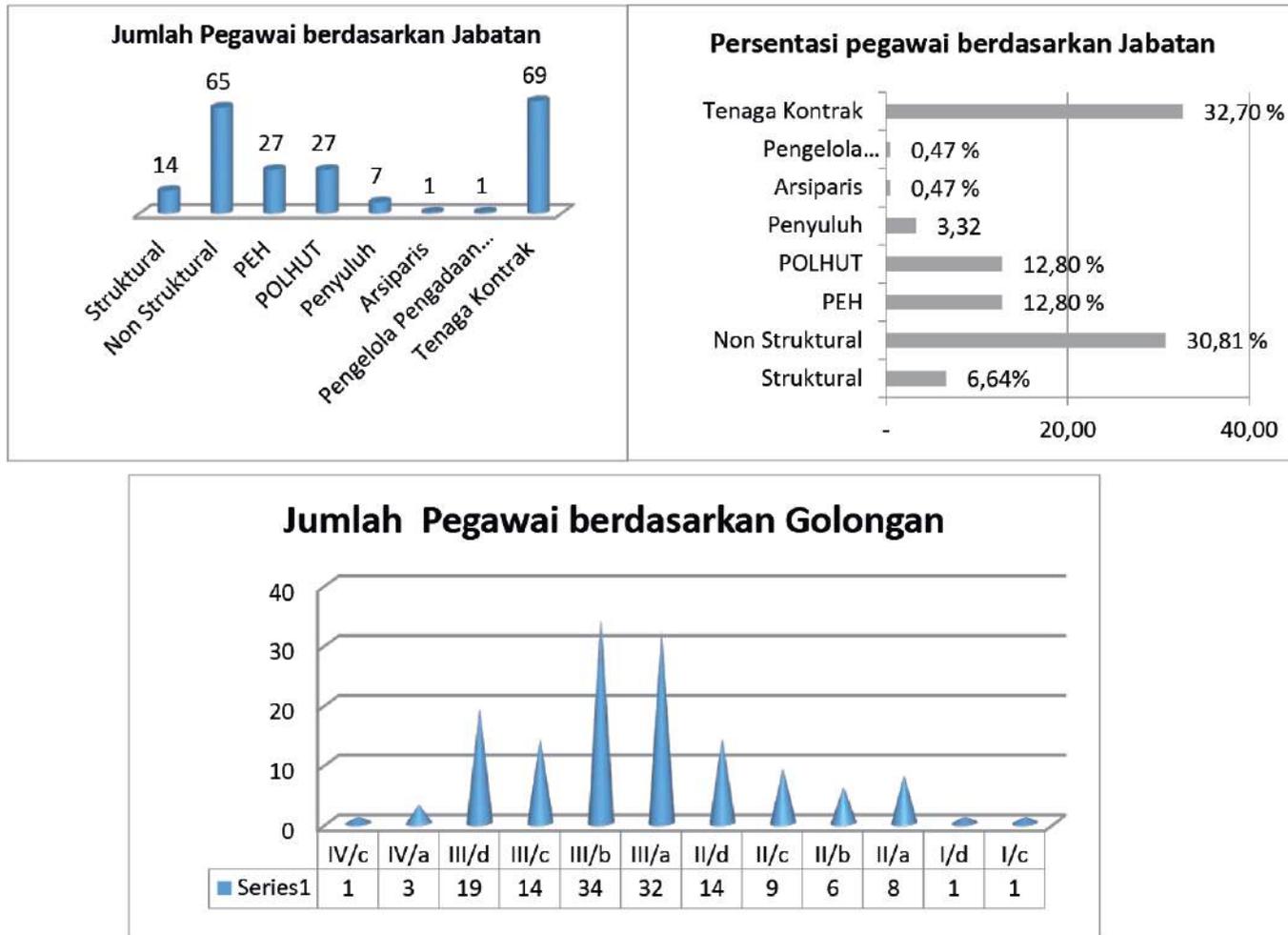
Berdasarkan status kepegawaiannya :

- a. Pegawai Negeri Sipil (PNS) : 136 orang;
- b. Tenaga kontrak : 69 orang.

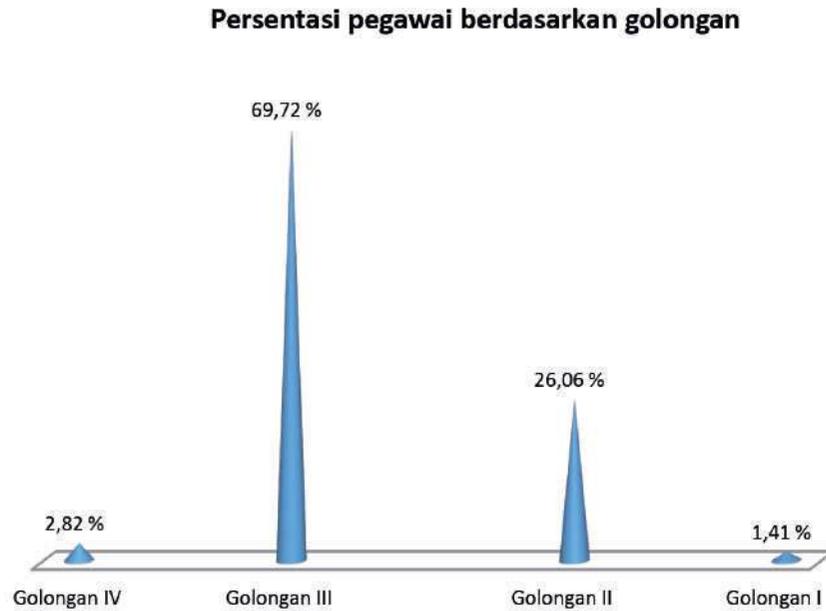
Berdasarkan jabatannya :

- a. Pejabat struktural : 14 orang;
- b. Pejabat fungsional terdiri dari : 63 orang;
 - 1). Pengendali Ekosistem Hutan (PEH) : 27 orang;
 - 2). Polhut : 29 orang;
 - 3). Penyuluh Kehutanan : 7 orang;
 - 4). Calon Arsiparis : 1 orang;
 - 5). Calon Pengelola Pengadaan Barang/Jasa : 1 orang.
- c. Pejabat Non Struktural : 65 orang.
- d. Tenaga kontrak : 69 orang.

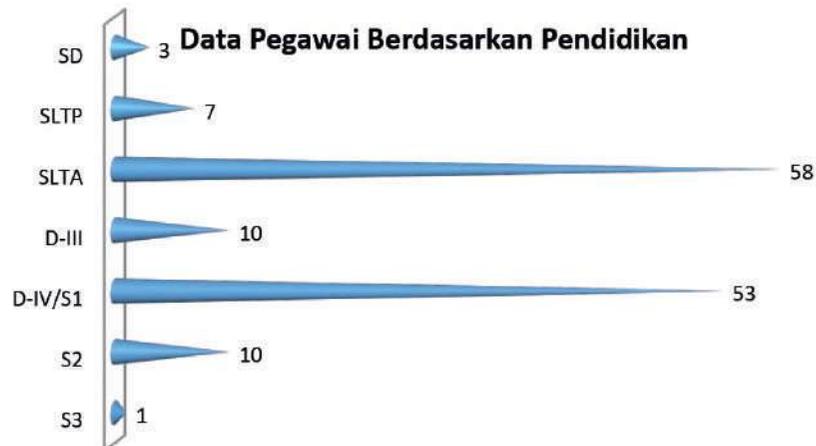
Kondisi pegawai berdasarkan jabatan, pendidikan, pangkat serta distribusinya diuraikan pada gambar 4 s/d 6 dan tabel 4 berikut :



Gambar 6.
Grafik kondisi pegawai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur berdasarkan jabatan s/d 31 Desember 2020

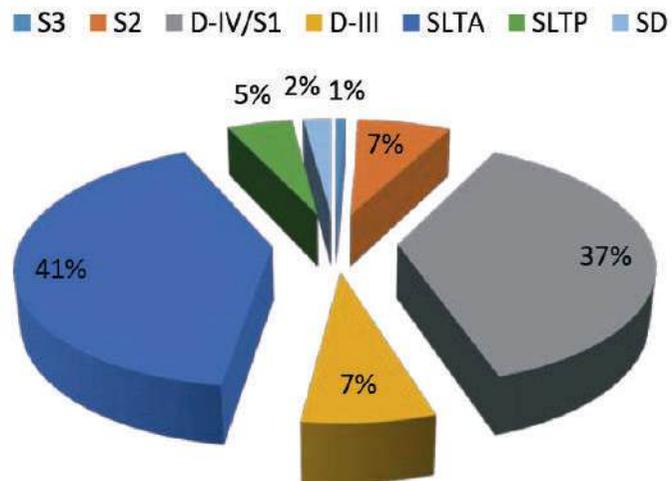


Gambar 7.
Grafik Kondisi pegawai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur berdasarkan golongan s/d 31 Desember 2020



Gambar 8.
Grafik Kondisi pegawai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur berdasarkan pendidikan s/d 31 Desember 2020

Persentasi jumlah pegawai berdasarkan pendidikan



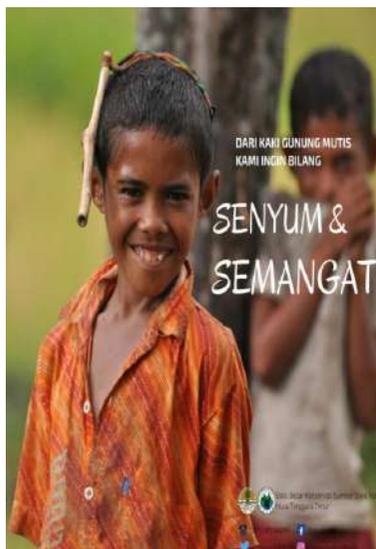
Gambar 9.
Grafik kondisi pegawai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur berdasarkan pendidikan s/d 31 Desember 2020



Tabel 22.
Kondisi sebaran pegawai Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur berdasarkan jabatan s/d 31 Desember 2020

No./Nama Jabatan	Struktural	Non Struktural	Polhut	PEH	Penyuluh	Calon Arsiparis	Calon Pengelola Pengadaan barang & Jasa	Tenaga kontrak	Jumlah	Prosen
1. Ka.BBKSDA, KBTU, Kabid Teknis KSDA	3	-	-	-	-	-	-	-	3	1,42
2. Subbag Umum	1	14	-	-	-	1	1	11	28	13,27
3. Subbag DEPK	1	2	-	2	1	-	-	-	6	2,84
4. Subbag PK	1	1	-	2	-	-	-	-	4	1,90
5. Seksi P2	1	2	1	2	-	-	-	1	7	3,32
6. Seksi P3	1	3	3	6	1	-	-	-	14	6,64
7. Bidang KSDA Wil. I	1	-	1	1	2	-	-	3	8	3,79
8. SKW I	1	1	1	2	-	-	-	2	7	3,32
9. RKW SM Kateri	-	1	1	1	-	-	-	2	5	2,37
10. RKW CA Hutan Bakau Maubesi	-	-	-	2	-	-	-	3	5	2,37
11. RKW CA Mutis	-	-	1	-	-	-	-	3	4	1,90
12. RKW SM Ale Aisio dan TB Bena	-	-	2	-	-	-	-	3	5	2,37
13. SKW II	1	3	5	2	1	-	-	1	13	6,16
14. RKW TWAL Teluk Kupang, TWA Baumata SM Danau Tuadale, SM Perhatu & Pel. Laut Tenau & Bolok	-	1	2	-	-	-	-	3	6	2,84
15. RKW TWA Camplong dan TWA Bipolo	-	3	1	-	-	-	-	2	6	2,84
16. RKW TB Pulau Ndana	-	1	-	-	-	-	-	2	3	1,42
17. RKW TWA Manipo	-	1	1	-	-	-	-	2	4	1,90
18. RKW SM Harlu	-	1	-	-	-	-	-	3	4	1,90
19. Bidang KSDA Wil. II	1	8	1	3	-	-	-	5	18	8,53
20. SKW III	1	-	-	-	-	-	-	3	4	1,90
21. RKW TWA Ruteng Wilayah I	-	2	1	-	-	-	-	1	4	1,90
22. RKW TWA Ruteng Wilayah II	-	3	1	-	-	-	-	2	6	2,84
23. RKW TWA Ruteng Wilayah III	-	4	-	-	-	-	-	2	6	2,84
24. RKW TWA Ruteng Wilayah IV	-	2	-	-	-	-	-	2	4	1,90

No./Nama Jabatan	Struktural	Non Struktural	Polhut	PEH	Penyuluh	Calon Arsiparis	Calon Pengelola Pengadaan barang & Jasa	Tenaga kontrak	Jumlah	Prosen
25. RKW CA Watu Ata	-	2	-	-	-	-	-	1	3	1,42
26. RKW CA Wae Wuul	-	1	1	2	-	-	-	1	5	2,37
27. RKW TWAL 17 Pulau, CA Wolo Tadho & CA Riung	-	3	-	-	-	-	-	3	6	2,84
28. RKW CA Kimang Boleng	-	-	1	-	-	-	-	1	2	0,95
29. RKW CA Ndeti Kelikima	-	2	-	-	-	-	-	-	2	0,95
30. SKW IV	1	-	-	2	2	-	-	3	8	3,79
31. RKW TWAL GPT Maumere	-	1	2	-	-	-	-	2	5	2,37
32. RKW TWA Pulau Lapang dan TWA Pulau Batang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
33. RKW TWA Pulau Rusa	-	-	1	-	-	-	-	-	1	0,47
34. RKW CA Egon Ilimedo	-	2	-	-	-	-	-	2	4	1,90
35. RKW TWA Tuti Adagae	-	1	-	-	-	-	-	-	1	0,47
Jumlah	14	65	27	27	7	1	1	69	211	100,00
TOTAL	PNS		142		Kontrak			69	211	



Senyum sahabat anak Mutis.
Lokasi : CA MUTIS



Rusa Timor/ *Rusa timorensis*
Lokasi : TWA Menipo
BBKSDA NTT



Patroli Pengamanan Hutan
bersama MMP:
TWA Ruteng





kondisi bawah laut TWAL 17 Pulau
Lokasi : TWAL 17 Pulau
BBKSDA NTT



Upacara adat
Lokasi : TWA Ruteng
BBKSDA NTT



Patroli Pengamanan
Kawasan
BBKSDA NTT



Landscape Kawasan
Lokasi : TWA Menipo
BBKSDA NTT



Landscape Bawah Laut
Lokasi : TWA Gugus Pulau Teluk
Maumere
BBKSDA NTT

BAB. II

Alokasi Anggaran dan Evaluasi Keberhasilan Balai Besar KSDA NTT

A. Rencana Strategis

Renstra BBKSDA NTT Tahun 2020-2024 merupakan perencanaan jangka menengah yang berisi gambaran sasaran atau kondisi yang akan dicapai dalam kurun waktu lima tahun serta strategi yang akan dilakukan untuk mencapai sesuai dengan tugas, fungsi dan peran yang diamanahkan. Penyusunan Renstra BBKSDA NTT telah mengacu pada Renstra Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 dan Renstra Ditjen KSDAE Tahun 2020-2024. BBKSDA NTT sebagai unit pelaksana teknis mendukung kebijakan pembangunan nasional serta kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KemenLHK).

Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden dalam rangka mewujudkan pembangunan nasional sebagaimana tertuang dalam Perpres Nomor 18 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) Tahun 2020-2024. Visi tersebut diwujudkan melalui 9 (sembilan) Misi yang dikenal sebagai Nawacita Kedua.





Gambar 10.
Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2020-2024

Dengan berpedoman pada rumusan Visi dan Misi Presiden dan Wakil Presiden di atas, dan berkenaan dengan Misi ke-4 yakni: “Mencapai Lingkungan Hidup yang Berkelanjutan”, maka untuk itu, pernyataan Misi tersebut dijadikan sebagai acuan dalam merumuskan lebih lanjut pernyataan Visi dan Misi KLHK.

Visi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan :


Terwujudnya Keberlanjutan Sumber Daya Hutan dan Lingkungan Hidup untuk Kesejahteraan Masyarakat” dalam mendukung: “Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-Royong.


Dengan memperhatikan Misi Presiden dan Wakil Presiden serta berpedoman pada tugas, fungsi dan kewenangan KLHK, sebagaimana telah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan dan Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2020 tentang Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, maka misi KLHK yaitu:

- 1) Mewujudkan hutan yang lestari dan lingkungan hidup yang berkualitas;
- 2) Mengoptimalkan manfaat ekonomi sumber daya hutan dan lingkungan secara berkeadilan dan berkelanjutan;
- 3) Mewujudkan keberdayaan masyarakat dalam akses kelola hutan baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara; dan
- 4) Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik.

Berdasarkan misi tersebut maka Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merumuskan tujuan pembangunan tahun 2020-2024, yaitu :

- 1) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup dan kehutanan serta ketahanan terhadap perubahan iklim;
- 2) Meningkatkan pemanfaatan potensi ekonomi dari sumber daya hutan dan lingkungan hidup;
- 3) Meningkatkan akses kelola hutan bagi masyarakat baik laki-laki maupun perempuan secara adil dan setara dengan tetap menjaga keberadaan dan kelestarian fungsi hutan;
- 4) Meningkatkan tata kelola, inovasi dan daya saing bidang lingkungan hidup dan kehutanan.

B. Sasaran Strategis

Sasaran strategis pembangunan KLHK adalah kondisi yang ingin dicapai oleh KLHK pada akhir periode perencanaan yakni suatu capaian indikator kinerja pada tataran dampak (impact) sebagai akibat kumulatif dari terealisasinya program pembangunan yang telah dilaksanakan oleh seluruh unit kerja lingkup KLHK selama tahun 2020-2024.

Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah:

- 1) Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (*HCV - High Conservation Values*);
- 2) Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan *Bioprospecting*, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
- 3) Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
- 4) Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Sedangkan pada tingkat Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Ditjen KSDAE) dalam rangka mendukung program dan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dirumuskan sasaran program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagai berikut: (1) Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati, (2) Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL. (3) Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari. (4) Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi. (5) Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi dan (6) Meningkatnya tata kelola yang baik di lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem.

Sasaran tersebut memiliki indikator sebagai berikut yang ditargetkan tercapai pada tahun 2024 yaitu: (1) Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati (70 juta hektar), (2) Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran (10,5 Triliun Rupiah), (3) Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL (1.100 Milyar Rupiah), (4) Jumlah Desa di kawasan konservasi yang mendapatkan kegiatan pemberdayaan masyarakat (4.500 Desa), (5) Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 juta ha kawasan konservasi (2,5 poin), dan (6) Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE (80 poin).

Berdasarkan Redesign Sistem Program dan Penganggaran pada Tahun 2020, terdapat revisi jumlah Program di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yaitu dari 13 Program menjadi 6 Program. Sedangkan Direktorat Jenderal KSDAE mengalami perubahan program yang semula dari 1 (satu) Program yaitu Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan 6 (enam) kegiatan, sekarang menjadi 3 (tiga) Program yaitu Program Dukungan Manajemen dengan 1 (satu) kegiatan, Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan dengan 4 (empat) kegiatan dan Program Kualitas Lingkungan Hidup dengan 1 (satu) kegiatan.

Tabel. 23.
Redesign Program Baru lingkup Ditjen KSDAE

No	Program Awal	Kegiatan	No	Program Baru	Kegiatan
1.	Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE 2. Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam 3. Pengelolaan Kawasan Konservasi 4. Konservasi Spesies dan Genetik 5. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi 6. Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial 	1.	Dukungan Manajemen	1. Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE
			2.	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam 2. Pengelolaan Kawasan Konservasi 3. Konservasi Spesies dan Genetik 4. Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi
			3.	Kualitas Lingkungan Hidup	1. Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial

Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program pada Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2020-2024 disajikan sebagai berikut:

Tabel 24.

Target Kinerja Ditjen KSDAE 2020-2024 berdasarkan Sasaran Program dan Indikator Kinerja Program

No	Sasaran Program dan Indikator Kinerja	Satuan	Baseline 2019	Target Kinerja 2020-2024				
				2020	2021	2022	2023	2024
029.WA Sasaran Program Dukungan Manajemen: Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsive dan berpelayanan prima								
1.	Nilai Sakip Ditjen KSDAE	Poin	78	78	78,5	79	79,5	80
029.FF Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Meningkatnya Ruang Perlindungan Keanekaragaman Hayati								
2.	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati	Hektar	28	15,6	29,4	39,7	51,7	70
029.FF Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Meningkatnya Nilai Ekspor Pemanfaatan TS								
3.	Jumlah Nilai Ekspor Pemanfaatan TSL dari hasil penangkapan	Triliun Rupiah	2	2	4,05	6,15	8,3	10,5
029.FF Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Meningkatnya Pengelolaan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan Pemanfaatan TSL secara lestari								
4.	Jumlah Nilai PNBP dari Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL	Milyar Rupiah	283	200	410	630	860	1.100
029.FF Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Meningkatnya Ruang Usaha bagi Masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi								
5.	Jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif	Desa	378	500	1.500	2.500	3.500	4.500
029.FF Sasaran Program Pengelolaan Hutan Berkelanjutan: Meningkatnya Efektivitas Pengelolaan Hutan Konservasi								
6.	Nilai Efektivitas Pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 juta Ha Kawasan Konservasi	Poin	56	52,5	55	57,5	60	62,5
029.FF Sasaran Program Kualitas Lingkungan Hidup: Terselenggaranya Inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar Kawasan Konservasi								
7.	Luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	Juta Hektar	0,9	8	18	28	38	43

C. Analisis SWOT

Kompleksnya permasalahan dalam penyelenggaraan konservasi menyebabkan terjadinya degradasi, fragmentasi habitat, konflik satwa liar dengan manusia, konflik tenurial, perdagangan gelap TSL. Fragmentasi habitat dalam waktu yang lama dapat menyebabkan terjadinya Island Habitat. Upaya konservasi yang dilakukan untuk meminimalkan permasalahan tersebut melalui tugas pokok dan fungsi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur diidentifikasi melalui isu-isu strategis sebagai berikut :

1. Kerusakan Habitat
2. Perdagangan Ilegal Satwa Liar
3. Konflik Satwa dan Manusia
4. Konflik tenurial
5. Letak geografis kawasan
6. Pengelolaan Pengunjung Kawasan Konservasi belum optimal
7. Pengelolaan Sampah di Kawasan Konservasi
8. Pemanfaatan Jasa Lingkungan yang belum optimal
9. Keterbatasan Sumber Daya (SDM, Sarpras dan Anggaran)

Berdasarkan ekstraksi isu-isu strategis di atas, maka dapat dipetakan menurut kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman guna terwujudnya kelestarian keanekaragaman hayati.



Gambar 11.
Identifikasi dan Klasifikasi Faktor

Identifikasi dan klasifikasi faktor internal (kekuatan dan kelemahan) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) berdasarkan isu strategis di atas seperti pada Tabel berikut.

Tabel 25.
Faktor Internal (kekuatan-kelemahan) dan Faktor Eksternal (peluang-ancaman)
Penyelenggaraan Konservasi Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur

Faktor-Faktor Strategis Internal	Faktor-Faktor Strategis Eksternal
Kekuatan (Strengths/S) :	Peluang (Opportunities/O) :
<ol style="list-style-type: none"> Potensi keanekaragaman hayati tinggi Sudah ada SK penunjukkan dan penetapan status fungsi kawasan hutan Keindahan <i>landscape</i> dan potensi jasa lingkungan kawasan konservasi Satwa endemik NTT 	<ol style="list-style-type: none"> Adanya dukungan dari pemerintah daerah Adanya dukungan masyarakat Dukungan LSM/NGO dalam Adanya konsep pengelolaan berbasis tiga pilar (keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, pemerintah setempat) dalam penyelenggaraan konservasi di BBKSDA NTT
Kelemahan (Weaknesses/W):	Ancaman (Threats/T) :
<ol style="list-style-type: none"> Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem belum optimal Kapasitas SDM belum memadai Kurangnya penyadartahuan kepada masyarakat tentang konservasi Terbatasnya sarana prasarana 	<ol style="list-style-type: none"> Pengembangan wilayah pembangunan Pertambahan jumlah penduduk Pengetahuan masyarakat tentang konservasi masih belum memadai Pencemaran lingkungan Kondisi dan topografi alam yang ekstrim

Hasil indentifikasi klasifikasi faktor-faktor tersebut selanjutnya dapat dilakukan perhitungan bobot dan rating seperti pada Tabel berikut.

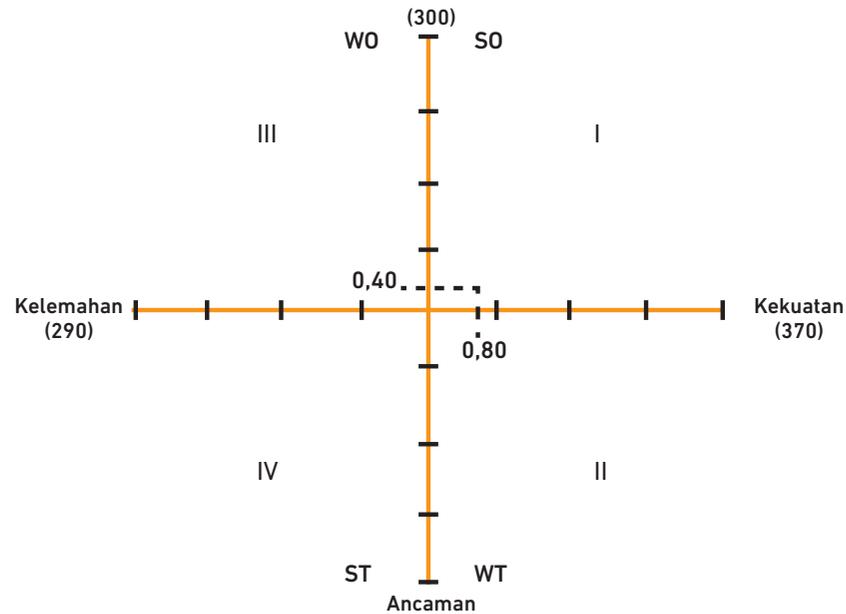
Tabel 26.
IFAS (Internal Strategic Factors Analysis Summary) dan
EFAS (Eksternal Strategic Factors Analysis Summary)

IFAS (Internal Strategic Factors Analysis Summary)	Bobot	Rating	Bobot x Rating
Kekuatan (Strengths/S) :			
1. Potensi keanekaragaman hayati tinggi	0,40	4,00	1,60
2. Sudah ada SK penunjukkan dan penetapan status fungsi kawasan hutan	0,20	3,00	0,60
3. Keindahan <i>landscape</i> dan potensi jasa lingkungan kawasan konservasi	0,30	4,00	1,20
4. Satwa endemik NTT	0,10	3,00	0,30
Jumlah	1,00		3,70

IFAS (Internal Strategic Factors Analysis Summary)	Bobot	Rating	Bobot x Rating
Kelemahan (<i>Weaknesses/W</i>):			
1. Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem belum optimal	0,30	3,00	0,90
2. Kapasitas SDM belum memadai	0,30	2,00	0,60
3. Kurangnya penyadartahuan kepada masyarakat tentang konservasi	0,20	4,00	1,80
4. Terbatasnya sarana prasarana	0,20	3,00	0,60
Jumlah	1,00		2,90
Peluang (<i>Opportunities/O</i>):			
1. Adanya dukungan dari pemerintah daerah	0,40	4,00	1,60
2. Adanya dukungan masyarakat	0,20	3,00	0,60
3. Dukungan LSM/NGO	0,20	2,00	0,40
4. Adanya konsep pengelolaan berbasis tiga pilar (keterlibatan tokoh agama, tokoh adat, pemerintah setempat) dalam penyelenggaraan konservasi di BBKSDA NTT	0,20	2,00	0,40
Jumlah	1,00		3,00
Ancaman (<i>Threats/T</i>):			
1. Pengembangan wilayah pembangunan	0,30	3,00	0,90
2. Pertambahan jumlah penduduk	0,20	2,00	0,40
3. Pengetahuan masyarakat tentang konservasi masih kurang	0,30	3,00	0,90
4. Pencemaran lingkungan	0,10	2,00	0,20
5. Kondisi dan topografi alam yang ekstrem	0,10	2,00	0,20
Jumlah	1,00		2,60

Faktor kekuatan mendapat skor 3,70 namun tidak signifikan sebab kelemahan memiliki skor 2,90 sehingga selisih 0,80 dan selisih tersebut sangat sedikit jika tidak dimaksimalkan kekuatan yang ada saat ini maka kelemahan semakin besar dan berpengaruh pada proses penyelenggaraan konservasi untuk mewujudkan kelestarian keanekaragaman hayati. Faktor peluang memiliki skor 3,00 namun tidak signifikan sebab ancaman memiliki skor 2,60 sehingga hanya memiliki selisih skor 0,40 dan selisih tersebut jika tidak memaksimalkan peluang untuk mendapatkan nilai manfaat maka ancaman semakin besar dan berpengaruh terhadap upaya konservasi keanekaragaman hayati.

Berdasarkan hasil pembobotan pada Tabel sebelumnya selanjutnya dibuat diagram SWOT dan perhitungan strateginya memerlukan pengesahan dari adanya posisi dalam salib sumbu yaitu antara kekuatan dan kelemahan, maupun peluang dan ancaman yang semuanya digambarkan dalam garis-garis positif dan negatif seperti Gambar berikut.



Gambar 12.
Diagram SWOT

Kuadran (I) merupakan situasi yang sangat menguntungkan, artinya penyelenggaraan konservasi di Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur memiliki peluang dan kekuatan, namun peluang tersebut harus dimanfaatkan. Pada kuadran (II) ternyata memiliki ancaman namun masih memiliki kekuatan dari faktor internal sehingga peluang dan kekuatan yang ada harus dimaksimalkan. Kuadran (III) memiliki peluang yang sangat besar namun di sisi lain memiliki beberapa kelemahan dari faktor internal sehingga harus ada upaya meminimalkan masalah-masalah di internal untuk fokus merebut peluang. Kuadran (IV) merupakan situasi yang sangat riskan dan tidak menguntungkan, artinya pengelola menghadapi ancaman sekaligus memiliki kelemahan internal.

Pada kuadran keempat (IV) terdapat ancaman berupa pengembangan wilayah pembangunan serta penambahan jumlah penduduk yang akan berdampak pada penyelenggaraan konservasi akibat kebutuhan ruang / wilayah. Di sisi lain pengetahuan masyarakat tentang konservasi yang masih kurang, adanya pencemaran lingkungan, kondisi dan topografi alam yang ekstrem juga menjadi ancaman serius. Ancaman ini perlu strategi untuk mengatasi permasalahan yakni melalui penyadartahuan masyarakat tentang pentingnya konservasi dan manfaatnya bagi kelangsungan hidup manusia baik yang dirasakan secara langsung maupun tidak langsung. Selanjutnya Matrik SWOT dapat dilihat pada pada Tabel berikut.

Tabel 27.
Matriks SWOT

<p style="text-align: center;">IFAS</p>	<p>Kekuatan (Strengths/S) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Potensi keanekaragaman hayati tinggi 2. Sudah ada SK penunjukkan dan penetapan status fungsi kawasan hutan 3. Keindahan landscape dan potensi jasa lingkungan kawasan konservasi 4. Satwa endemik NTT 	<p>Kelemahan (Weaknesses/W):</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Penyelenggaraan konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistem belum optimal 2. Kapasitas SDM belum memadai 3. Kurangnya penyadartahuan kepada masyarakat tentang konservasi 4. Terbatasnya sarana prasarana
	<p>EFAS</p>	<p>Strategi SO :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan kerja sama dan koordinasi untuk mengintegrasikan program antara BBKSDA NTT, pemerintah daerah dan LSM/ NGO dalam penyelenggaraan konservasi SDAHE 2. Peningkatan peran serta masyarakat dengan pendekatan tiga pilar dalam pengelolaan penyelenggaraan konservasi
<p>Ancaman (Threats/T) :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan wilayah pembangunan 2. Pertambahan jumlah penduduk 3. Pengetahuan masyarakat tentang konservasi masih kurang 4. Pencemaran lingkungan 5. Kondisi dan topografi alam yang ekstrem 	<p>Strategi ST :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pengelolaan potensi keanekaragaman hayati dan jasa lingkungan untuk memberi manfaat kepada masyarakat 2. Peningkatan peranan unsur tiga pilar dalam upaya peningkatan pengetahuan masyarakat tentang konservasi dan upaya penanganan pencemaran lingkungan 	<p>Strategi WT :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi penyelenggaraan kawasan konservasi serta peningkatan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat 2. Penyadartahuan kepada masyarakat tentang manfaat hutan dan pentingnya konservasi untuk kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya

Data tersebut pada Tabel di atas dapat dibuat alternatif strategi melalui SWOT seperti pada Tabel berikut.

Tabel 28.
Alternatif Strategi Melalui SWOT Penyelenggaraan Konservasi Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur

Strategi	Kode Bobot	Jumlah Nilai	Pilihan Prioritas
SO			
1. Mengoptimalkan kerja sama dan koordinasi untuk mengintegrasikan program antara BBKSDA NTT, pemerintah daerah dan LSM/NGO dalam penyelenggaraan kawasan konservasi	$S_1+S_2+S_3+S_4+O_1+O_2+O_3+O_4$	6,7	1
2. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dengan pendekatan unsur tiga pilar	$S_1+S_3+S_4+O_2+O_3+O_4+O_5$	6,10	2
ST			
1. Mengoptimalkan pengelolaan potensi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan jasa lingkungan dengan mengangkat isu konservasi menjadi hal yang penting yang bermanfaat berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat	$S_1+S_3+S_4+T_3+T_4+T_5$	4,40	6
2. Mengoptimalkan peranan unsur tiga pilar dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang konservasi	$S_1+S_3+S_4+T_2+T_3+T_4$	5,00	3
WO :			
1. Mengoptimalkan kapasitas SDM dalam mendukung penyelenggaraan konservasi	$W_2+W_3+W_4+O_1+O_2+O_3$	4,60	5
2. Mengoptimalkan penyadartahuan masyarakat tentang konservasi dengan pendekatan tiga pilar	$W_2+W_3+W_4+O_1+O_2+O_3+O_4$	4,90	4
WT			
1. Mengoptimalkan penyelenggaraan konservasi dan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat	$W_1+W_2+W_3+W_4+T_3+T_4+T_5$	4,20	7
2. Mengoptimalkan penyadartahuan masyarakat tentang pentingnya konservasi untuk kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	$W_2+W_3+W_4+T_2+T_3+T_4+T_5$	3,70	8

Berdasarkan hasil analisis factor internal dan eksternal dengan menggunakan SWOT, maka alternatif strategi untuk penyelenggaraan konservasi di wilayah kerja Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur dengan urutan prioritas sebagai berikut :

1. Mengoptimalkan kerja sama dan koordinasi untuk mengintegrasikan program pembangunan antara BBKSDA NTT, pemerintah daerah dan LSM/NGO.

2. Mengoptimalkan peran serta masyarakat dengan pendekatan unsur tiga pilar.
3. Mengoptimalkan peranan unsur tiga pilar dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang konservasi.
4. Meningkatkan penyadartahuan masyarakat tentang konservasi dengan pendekatan tiga pilar.
5. Meningkatkan kapasitas SDM dalam mendukung penyelenggaraan konservasi.
6. Mengoptimalkan pengelolaan potensi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan jasa lingkungan dengan mengangkat isu konservasi menjadi hal yang penting yang bermanfaat berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat.
7. Mengoptimalkan penyelenggaraan konservasi dan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat.
8. Meningkatkan penyadartahuan masyarakat tentang pentingnya konservasi untuk kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Tabel. 29.
Strategi dan Kegiatan Melalui SWOT Penyelenggaraan Konservasi
Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur

No.	Strategi	Kegiatan
1	Mengoptimalkan kerja sama dan koordinasi untuk mengintegrasikan program pembangunan antara BBKSDA NTT, pemerintah daerah dan LSM/NGO	Koordinasi Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi dengan para pihak Koordinasi pengembangan daerah wisata alam berkelanjutan Peningkatan kerja sama strategis yang tak terelakkan Pengembangan kerja sama penguatan fungsi pengelolaan kawasan Koordinasi tiga pilar (tokoh adat, agama dan pemerintah) Evaluasi kerja sama
2	Mengoptimalkan peran serta masyarakat dengan pendekatan unsur tiga pilar	Penyusunan rencana pemberdayaan masyarakat Identifikasi social budaya masyarakat Koordinasi dengan tokoh adat dan tokoh agama di sekitar kawasan konservasi Koordinasi dengan pemerintah kabupaten/ desa di sekitar kawasan konservasi Pembentukan forum komunikasi tiga pilar (tokoh adat, agama dan pemerintah) Pembentukan kelompok masyarakat penyangga dan kemitraan konservasi Pendamping kelompok kemitraan konservasi Monitoring dan evaluasi

No.	Strategi	Kegiatan
3	Mengoptimalkan peranan unsur tiga pilar dalam upaya peningkatan pemahaman masyarakat tentang konservasi	Rapat koordinasi Pertemuan rutin komunikasi unsur tiga pilar Bimbingan teknis terkait pengetahuan konservasi
4	Meningkatkan penyadartahuan masyarakat tentang konservasi dengan pendekatan tiga pilar	Penyuluhan dan sosialisasi penyadartahuan tentang KSDAHE kepada unsur tiga pilar Pelatihan peningkatan kapasitas forum komunikasi tiga pilar Pembinaan rutin forum komunikasi tiga pilar
5	Meningkatkan kapasitas SDM dalam mendukung pengelolaan konservasi	Pelatihan teknis Seminar/workshop Pembinaan pegawai Anjongsana pengkayaan wawasan pengelolaan
6	Mengoptimalkan pengelolaan potensi keanekaragaman hayati dan pemanfaatan jasa lingkungan dengan mengangkat isu konservasi menjadi hal yang penting yang bermanfaat berkelanjutan bagi kehidupan masyarakat	Inventarisasi potensi flora fauna Survey potensi objek daya tarik wisata Pengembangan objek wisata Penataan blok Rencana pengelolaan Desain tapak
7	Mengoptimalkan penyelenggaraan konservasi dan peran serta masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat	Peningkatan kapasitas kelompok terkait komunikasi publik Pendampingan kelompok
8	Meningkatkan penyadartahuan masyarakat tentang pentingnya konservasi untuk kelestarian sumber daya alam hayati dan ekosistemnya	Penyuluhan dan sosialisasi penyadartahuan tentang KSDAHE

I. Target Jangka Menengah (2020-2024)

Di dalam Renstra BBKSDA NTT Tahun 2020-2024 Indikator Kinerja yang menjadi lingkup tugas dan tanggung jawab Balai Besar KSDA NTT berada pada posisi mendukung pencapaian visi-misi, agenda serta program kegiatan pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Terhadap Indikator Kinerja Kegiatan yang telah ditetapkan Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, akan dilakukan upaya-upaya sebagaimana ditetapkan sebagai output kegiatan Konservasi Sumber Daya Alam Hayati (KSDAH). Balai Besar KSDA NTT berkomitmen untuk melaksanakan 14 Indikator Kinerja Kegiatan sebagaimana

diuraikan pada tabel Rincian Target Kegiatan dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024.

Selanjutnya indikator-indikator dan target kinerja dari setiap sasaran program adalah :

Tabel 30.
Sasaran Program 1 - Dukungan Manajemen

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi (SAKIP) Direktorat Jenderal KSDA dan Ekosistem minimal 78,00 (Poin)	78	78,5	79	79,5	80
		Terselenggaranya layanan perkantoran yang optimal dalam mendukung penyelenggaraan tata kelola kepemimpinan yang baik (layanan)	1	1	1	1	1

Tabel 31.
Sasaran Program 2 - Pengelolaan Hutan Berkelanjutan

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	Luas Kawasan Hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman tinggi secara partisipatif (Hektar)	0	15.731,25	135.838,5	37.474,95	27.605,88
		Jumlah unit kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi (Unit KK)	12.315,61	2796,95	0	1.848,80	0
	Pengelolaan Kawasan Konservasi	Jumlah Desa di kawasan konservasi yang mendapatkan akses pemanfaatan KK dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (Desa)	5	30	60	90	125
		Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani (hektar)	17.668,59	17.668,59	17.668,59	17.668,59	17.668,59

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
		Jumlah luas area KK yang ditangani melalui kemitraan dan pemulihan Ekosistem (Hektar)	183	996	996	996	996
		Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (Unit KK)	1	1	1	1	1
	Konservasi Spesies dan Genetik	Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif (Hektar)	345.519,61	214.402,30	135.838,50	39.323,75	27.605,88
		Jumlah entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (Entitas)	1	1	1	1	1
		Jumlah entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman spesies dan genetik TSL (Entitas)	1	1	1	1	1
	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	Jumlah Unit Pemanfaatan Jasa Lingkungan Non Wisata Alam (Entitas)	1	1	0	0	1

Tabel 32.
Sasaran Program 3 - Kualitas Lingkungan Hidup

No	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Tahun				
			2020	2021	2022	2023	2024
1	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi (Hektar)	333.204	185,767	0	0	0
		Jumlah Ekosistem Esensial yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (Unit KEE)	0	1	0	1	0

Dalam upaya mendorong pelaksanaan dan pencapaian sasaran program Ditjen KSDAE dengan terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi non taman nasional di tingkat tapak serta pengelolaan keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan, serta beberapa aspek yang bersifat kondisional pada wilayah Nusa Tenggara Timur, Indikator pencapaian kinerja pada BBKSDA NTT akan diukur dengan sebagai berikut:

Tabel 33.
Indikator Keluaran Kegiatan dan Rencana Kegiatan BBKSDA NTT Tahun 2020

No.	Kegiatan	Output	Indikator Keluaran Kegiatan (IKK)	Rencana Kegiatan BBKSDA NTT 2020
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	Nilai atas evaluasi pelaksanaan RKA-K/L 78,0 (poin)	<ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan RKAKL dan Renja tahun 2021 • Penyusunan laporan pemantauan kegiatan dan anggaran • Penyusunan Laporan Kinerja, Laporan Kerja, Laporan Statistik Tahun 2019 • Penyusunan SPIP Online dan Data Sidak
		Layanan Sarana dan Prasarana Internal	Jumlah Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi = xx unit (unit)	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi 1 Unit • Pengadaan Peralatan Fasilitas Perkantoran 7 Unit
		Layanan Perkantoran	Realisasi pembayaran Gaji dan Tunjangan = xx% (Persen)	<ul style="list-style-type: none"> • Pembayaran gaji, tunjangan, operasional dan pemeliharaan perkantoran 2020
2	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional didalam Kawasan Konservasi	Luas KK sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di Dalam Kawasan Konservasi (Hektar)	<ul style="list-style-type: none"> • Evaluasi kesesuaian fungsi
		Dokumen Pemolaan Kawasan Konservasi	Jumlah Dokumen Pemolaan Kawasan Konservasi (Dokumen)	<ul style="list-style-type: none"> • Konsultasi publik dalam rangka revisi Blok TWAL Teluk Kupang • Penandaan batas blok kawasan di Pulau Timor Sepanjang 20 Km; • Penyusunan dan Penadatangan PKS

No.	Kegiatan	Output	Indikator Keluaran Kegiatan (IKK)	Rencana Kegiatan BBKSDA NTT 2020
3	Pengelolaan Kawasan Konservasi	Luas area Kawasan Konservasi yang ditangani permasalahannya	Luas area Kawasan Konservasi yang ditangani permasalahannya (Hektar)	<ul style="list-style-type: none"> Pembibitan untuk pemulihan ekosistem; Penanaman Pengkayaan di TWA Ruteng; Pemulihan terumbu karang di TWAL Gugus Pulau Teluk Maumere
		Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (Desa)	<ul style="list-style-type: none"> Inventarisasi dan verifikasi kegiatan pemanfaatan kawasan konservasi; Pembentukan Kelompok Kemitraan; Penandatanganan PKS dalam rangka pemanfaatan kawasan melalui skema kemitraan; Pelatihan keterampilan dan pendampingan desa binaan di Timor dan Flores
		Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (Unit Kawasan Konservasi)	<ul style="list-style-type: none"> Penyusunan RPJP SM Kateri; Penyusunan RPJP TWA Bipolo; Penyusunan RPJP CA Wolo Tadho; Patroli Rutin Pengamanan Kawasan (Smart Patrol) Pada Seksi Konservasi Wilayah I; Patroli Rutin Pengamanan Kawasan (Smart Patrol) Pada Seksi Konservasi Wilayah II; Patroli Rutin Pengamanan Kawasan (Smart Patrol) Pada Seksi Konservasi Wilayah III; Patroli Rutin Pengamanan Kawasan (Smart Patrol) Pada Seksi Konservasi Wilayah IV; Patroli perlindungan dan pengamanan kawasan bersama MMP; Pengurusan Administrasi Penggunaan Senjata Api; Operasi gabungan peredaran TSL

No.	Kegiatan	Output	Indikator Keluaran Kegiatan (IKK)	Rencana Kegiatan BBKSDA NTT 2020
4	Konservasi Spesies dan Genetik	Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL (Hektar)	<ul style="list-style-type: none"> • Monitoring Populasi Kakatua Kecil Jambul Kuning di TWA Menipo dan SM Harlu (KPHK); • Pemantauan sarang Elang Flores di CA Wae Wuul, CA Watu Ata, CA Wolo Tado, CA Ndeta Kelikima dan CA Kimeng Boleng, TWAL Teluk Maumere dan SM Egon Ilemedo, TWA Ruteng; • Monitoring Populasi Buaya di Teluk Kupang, TWA Menipo dan CA Maubesi; • Konservasi Penyu di Pulau Timor; • Konservasi Penyu di TWAL Teluk Maumere; • Inventarisasi Rusa di TWA Menipo, TB Ndana, SM Harlu, CA Wae Wuul; • Monitoring Sponge (Anti Kanker) di TWAL Teluk Kupang; • Survey Potensi TSL terkait dasar usulan kuota pemanfaatan; • Pelatihan penanggulangan konflik satwa bersama masyarakat di Pulau Timor dan Flores; • Operasional, Sosialisasi/Respon Konflik Satwa; • Penanganan Barang Bukti TSL; • Operasional pemeliharaan satwa dipenampungan; • Operasional Gabungan Penanganan Satwa

No.	Kegiatan	Output	Indikator Keluaran Kegiatan (IKK)	Rencana Kegiatan BBKSDA NTT 2020
5	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	Jumlah Destinasi Wisata Alam yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan	Jumlah destinasi yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan (Destinasi)	<ul style="list-style-type: none"> Perencanaan kapal operasional wisata di TWAL 17 Pulau; Pembangunan Front Office Ticketing dan tambatan perahu di TWAL 17 Pulau; Penerbitan buletin BBKSDA NTT; Promosi berupa pameran di 3 lokasi; Promosi wisata
6	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi (Hektar)	<ul style="list-style-type: none"> Identifikasi dan Survey Potensi Keanekaragaman Hayati Ekosistem Darat/Perairan

II. Target Tahunan

Target tahunan atau biasa disebut dengan Perjanjian Kinerja (PK) adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi dalam hal ini Direktur Jenderal KSDAE kepada pimpinan instansi yang lebih rendah yaitu Kepala BBKSDA NTT untuk melaksanakan kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja. Melalui PK, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada output yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk dampak (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja bertujuan tujuan untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi serta efektifitas dan efisiensi kinerja; sebagai wujud nyata komitmen antara pemberi amanah dan penerima amanah dengan kinerja yang terukur berdasarkan tugas pokok dan fungsi serta sumber daya yang tersedia; sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan target kinerja organisasi.

Tabel 34.
Hubungan Sasaran Program Ditjen KSDAE dan Perjanjian Kinerja BBKSDA NTT 2020

No	Program Baru	Kegiatan	Indikator Kegiatan
1	Dukungan Manajemen	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Ditjen KSDAE	1 IKK
2	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	2 IKK
		Pengelolaan Kawasan Konservasi	3 IKK
		Konservasi Spesies dan Genetik	3 IKK
		Pemanfaatan Jasa Lingkungan Hutan Konservasi	1 IKK
3	Kualitas Lingkungan Hidup	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	1 IKK

Tabel 35.
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTPUT	TARGET
1	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE 78 poin	1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I	1 layanan
			2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal	1 layanan
			3. Layanan Perkantoran	1 layanan
2	Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam	1. Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam kawasan konservasi	1. Luas Kawasan sebagai penyediaan Data Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di dalam Kawasan Konservasi	21,707 hektar
		2. Jumlah simpul data Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan	1. Dokumen Pemolaan Kawasan Konservasi	1 dokumen
3	Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru	1. Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani	1. Luas area Kawasan Konservasi yang ditangani permasalahannya	130 hektar

No	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	OUTPUT	TARGET
		2. Jumlah Desa di sekitar kawasan konservasi yang mendapatkan kemitraan konservasi pada blok/zona tradisional atau Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	1. Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	35 Desa
		3. Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	1. Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	1 Unit KK
4	Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik	1. Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	1. Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	12 Hektar
5	Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi	1. Jumlah Destinasi Wisata Alam <i>Science, Academic, Voluntary, Education</i>	1. Jumlah Destinasi Wisata Alam yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan	1 Destinasi
6	Terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial	1. Luas Kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai kehati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	1. Luas Kawasan sebagai penyediaan Data Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	12 Hektar

III. Anggaran/ Pembiayaan

Anggaran BBKSDA NTT tahun 2020 semula ditetapkan sebesar Rp. 32.213.973.000,- namun dalam perjalanan mengalami penghematan anggaran pada beberapa jenis kegiatan sebesar Rp. 5.114.378.000,-. Akhirnya hingga tanggal 31 Desember 2020, pagu BBKSDA NTT sebesar Rp. Rp.27.099.595.000,-

Tabel 36. Anggaran BBKSDA NTT Tahun 2020

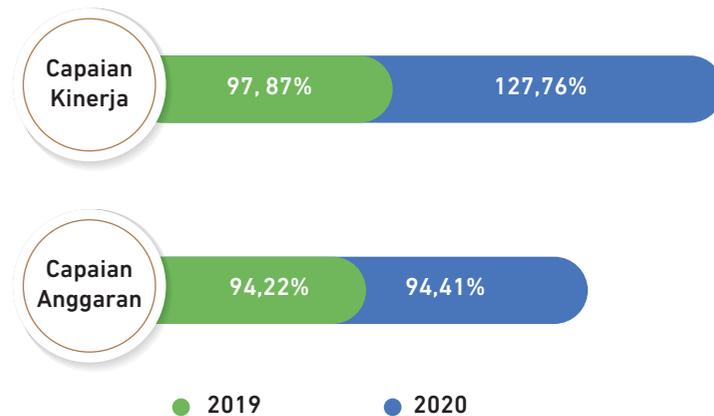
No	Kegiatan	Satuan	Anggaran 2020		Penghematan
			Januari	Desember (Revisi ke-9)	
1	Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tuga Teknis Lainnya Ditjen Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem	Rp.	23.639.000.000	22.587.225.000	1.051.775.000
2	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	Rp.	809.400.000	546.150.000	263.250.000
3	Pengelolaan Kawasan Konservasi	Rp.	3.820.103.000	2.466.315.000	1.353.788.000
4	Konservasi Spesies dan Genetik	Rp.	1.419.670.000	1.041.095.000	378.575.000
5	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	Rp.	2.355.000.000	391.610.000	1.963.390.000
6	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	Rp.	170.800.000	67.200.000	103.600.000
Jumlah		Rp.	32.213.973.000	27.099.595.000	5.114.378.000

BAB.3

Akuntabilitas Kinerja

Pada Bab ini, disajikan Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 yang merupakan bentuk pertanggungjawaban kinerja atas pelaksanaan tugas dan fungsi pada Tahun 2020. Akuntabilitas Kinerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur memuat capaian kinerja beserta analisisnya atas target-target kinerja yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020. Selain itu, realisasi anggaran yang digunakan untuk mencapai target kinerja pada Tahun 2020 juga disajikan.

A. Capaian Kinerja Organisasi



Grafik 1.
Capaian Kinerja dan Capaian Anggaran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Periode Renstra tahun 2019 s/d 2020

Grafik di atas menunjukkan bahwa capaian kinerja dan realisasi kinerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur tahun 2019 s/d 2020 mengalami perubahan. Capaian kinerja meningkat dari 97,87% menjadi 127,76%, begitu juga capaian anggaran mengalami peningkatan dari 94,22% menjadi 94,41%. Beberapa faktor yang mempengaruhi capaian kinerja dan realisasi kinerja antara lain yaitu:

- a. Perencanaan dan pelaksanaan kegiatan belum dapat dioptimalkan, dikarenakan adanya pandemi Covid-19 di awal Triwulan pertama Tahun 2020 sampai dengan akhir tahun 2020.
- b. Terdapat kegiatan yang memerlukan penyelesaian namun diluar kewenangan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur.
- c. Terdapat beberapa kegiatan yang penyelesaiannya membutuhkan waktu lebih dari satu tahun anggaran.

I. Pengukuran Kinerja

Guna mengetahui keberhasilan dan/atau kegagalan pencapaian sasaran strategis yang telah ditetapkan, dilakukan pengukuran kinerja dan analisis akuntabilitas kinerja. Metode pengukuran kinerja menggunakan formula sederhana yaitu menentukan persentase pencapaian kinerja, untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja maka disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk analisis deskriptif setiap capaian indikator dan perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Dalam melakukan pengukuran kinerja digunakan formulasi

Pengukuran Kinerja sebagai berikut :

$$\text{Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

Apabila diasumsikan semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendahnya pencapaian kinerja, maka digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Pencapaian rencana tingkat capaian} = \frac{(\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana}))}{\text{Rencana/Target}} \times 100\%$$

Jika terdapat beberapa indikator kinerja yang memiliki capaian sangat tinggi, maka pengukuran nilai capaian indikator kinerja menggunakan pembatasan maksimal yaitu sebesar 150% dengan tujuan agar dapat menggambarkan capaian kinerja yang sesungguhnya dari Direktorat Jenderal KSDAE.

Untuk menetapkan berhasil tidaknya suatu kegiatan, maka digunakan kriteria skala pengukuran ordinal yang ditetapkan oleh Lembaga Administrasi Negara yaitu:

- Nilai capaian < 55,00% : kategori kurang baik atau TIDAK BERHASIL
- Nilai capaian 56,00% - 70,00% : kategori sedang atau CUKUP BERHASIL
- Nilai capaian 71,00% - 85,00% : kategori baik atau BERHASIL
- Nilai capaian > 86,00% : kategori sangat baik atau SANGAT BERHASIL

Setelah dilakukan analisis pengukuran kinerja, hasil analisis dituangkan dalam Formulir Pengukuran Kinerja

Grafik 2.

Hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis kegiatan pada Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem satuan kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2020

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA
TINGKAT SATUAN KERJA BALAI BESAR KSDA NTT

Unit Organisasi Eselon I : Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem
Unit Satuan Kerja : Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur
Tahun Anggaran : 2020
Sasaran Kegiatan : Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan konservasi di tapak serta pengelolaan keanekaragaman hayati di dalam dan di luar kawasan hutan

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
1	Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE	Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE 78 poin	1. Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (1 Layanan)	1 Layanan, • Nilai SAKIP DITJEN KSDAE 79,37 (101,76 %) • Penyusunan RKAKL dan Renja 2021 • Penyusunan Laporan Kinerja 2019, Laporan Renja 2019, Laporan Statistik 2019,	101,76
			2. Layanan Sarana dan Prasarana Internal (1 Layanan)	1 Layanan, • Nilai SAKIP DITJEN KSDAE 79,37 (101,76 %) • Pengadaan Perangkat pengolah data dan komunikasi 7 unit • Pengadaan Peralatan dan fasilitas kantor 3 unit	

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
			3. Layanan Perkantoran (1 layanan)	1 Layanan, • Nilai SAKIP DITJEN KSDAE 79,37 (101,76 %) • Pembayaran gaji dan tunjangan Tahun 2020 untuk 139 pegawai dan penyelenggaraan operasional dan pemeliharaan perkantoran	
2	Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam	1. Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam kawasan konservasi	1. Luas Kawasan sebagai penyediaan Data Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di dalam Kawasan Konservasi (21,707 Hektar)	4.800 Hektar, • Sosialisasi bersama masyarakat adat Mutis dalam rangka usulan perubahan sebagian fungsi CA. Mutis Timau seluas 4.800 Ha (40 % dari luas total)	150
		2. Jumlah simpul data Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan	1. Dokumen Pemolaan Kawasan Konservasi (1 dokumen)	2 Dokumen, • Revisi Dokumen zonasi /blok 1 dokumen di kawasan TWAL Teluk Kupang • Dokumen penandaan batas zona/ blok TWA Menipo sepanjang 20 km	100
3	Terjaminnya efektivitas pengelolaan kawasan suaka alam, kawasan pelestarian alam, dan taman buru	1. Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani	1. Luas area Kawasan Konservasi yang ditangani permasalahan (130 hektar)	130 Hektar, • emulihan ekosistem seluas 130 hektar di RKW TWA Ruteng Wilayah I Gololusung di Kelurahan Bangka Leda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan RKW TWA Ruteng Wilayah II Ranaka di Kelurahan Mandosawu, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur	100

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
		2. Jumlah Desa di sekitar kawasan konservasi yang mendapatkan kemitraan konservasi pada blok/zona tradisional atau Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	1. Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif (5 Desa)	8 Desa, <ul style="list-style-type: none"> • Terdiri dari desa 1. Desa Tanah Merah, Kec. Kupang Tengah, Kab. Kupang 2. Kelurahan Oesapa, Kec. Kelapa Lima, Kota Kupang 3. Desa Lakuken Barat, Kec. Malaka, Kab. Malaka 4. Desa Wehali, Kec. Malaka Tengah, Kab Malaka 5. Desa Kamanasa, Kec Malaka Tengah, Kab Malaka 6. Desa Nenas, Kec. Fatumnasi, Kab. TTS 7. Desa Macang Tanggar. Kec. Komodo, Kab. Mangarai Barat 8. Desa Lifuleo, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang 	150
		3. Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	1. Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya (1 Unit KK)	28 KK, <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dokumen RPJP 2 dokumen; • Perlindungan dan pengamanan kawasan berupa Patroli Rutin Pengamanan Kawasan, dan Patroli Perlindungan dan Pengamanan kawasan bersama MMP di 21 Resort Kawasan Konservasi (28 Unit KK) 	150
4	Terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik	1. Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif	1. Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL (12 Hektar)	1654 Hektar, <ul style="list-style-type: none"> • Kegiatan Inventarisasi Rusa di TWA Menipo seluas 540 hektar berada di wilayah Resort Menipo SKW II. • Kegiatan Inventarisasi Rusa di SM Harlu seluas 1084 hektar berada di wilayah Resort Rote SKW II. 	150

NO.	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET	REALISASI	%
5	Terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi	1. Jumlah Destinasi Wisata Alam <i>Science, Academic, Voluntary, Education</i>	1. Jumlah Destinasi Wisata Alam yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan (1 Destinasi)	1 Destinasi, Pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dan kontrak pembangunan sarana prasarana wisata berupa kegiatan perencanaan kapal operasional wisata di TWAL 17 Pulau	100
6	Terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial	1. Luas Kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai kehati tinggi secara partisipatif di luar Kawasan Konservasi	1. Luas Kawasan sebagai penyediaan Data Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi (12 Hektar)	500 Ha, Identifikasi dan Survey Potensi Kehati Ekosistem di luar KK seluas 500 hektar di Pulau Longos (Kecamatan Masang Pacar dan Kecamatan Boleng, Kab. Manggarai Barat)	150
Rata-rata Capaian IKK					127,97

Jumlah Anggaran Kegiatan Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020 : Rp 27,099,595,000,-
Jumlah Realisasi Anggaran Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Tahun 2020 : Rp 25,584,843,902,-
(94,41%)

Capaian kinerja merupakan capaian sasaran strategis yang diukur berdasarkan persentase rata-rata capaian IKK pada tiap program yang telah dijalankan. Dari informasi yang tersaji pada tabel diatas dapat diketahui bahwa capaian kinerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 sebesar 127,97%. Dari 9(sembilan) IKK, semua IKK dapat tercapai, bahkan 6(enam) IKK melebihi dari target.

II. Analisis Capaian Kinerja

Sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Direktur Jenderal KSDAE Nomor P.2/KSDAE/SET/REN.2/4/2017 tentang Pedoman Penyusunan dan Reviu atas Dokumen Laporan Kinerja Lingkup Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, maka untuk melengkapi gambaran setiap capaian kinerja perlu disajikan evaluasi kinerja dalam bentuk penyajian laporan dengan menggunakan infografis, foto-foto hasil kegiatan serta narasi yang merupakan analisis perbandingan ataupun analisis yang menjelaskan makna angka-angka hasil capaian tersebut bagi masyarakat (tidak dibatasi hanya pada capaian numeriknya saja), serta perhitungan tingkat efektifitas dan efisiensi pencapaian kinerja. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut :

- 1) *Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini.*
- 2) *Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir.*
- 3) *Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi.*
- 4) *Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada).*
- 5) *Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan.*
- 6) *Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.*
- 7) *Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.*
- 8) *Keluaran (output), hasil (outcome) dan dampak (impact) dari capaian kinerja.*

Perbandingan Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020 pada pencapaian kinerja BBKSDA NTT tahun 2020 dan efisiensi penggunaan sumber daya dalam pencapaian kinerja sasaran strategis pada tiap program dilakukan dengan pengukuran efektifitas dan efisiensi kinerja.

III. Analisis Efektivitas Kinerja Tahun 2020

Pengukuran tingkat efektivitas pencapaian kinerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2020 dilakukan melalui perbandingan nilai capaian kinerja Tahun 2019 dan capaian tahun 2020. Dari hasil perbandingan tersebut dapat diketahui kemajuan efektivitas pelaksanaan kinerja yang dilaksanakan pada Tahun 2020. Kriteria efektivitas yang digunakan, yaitu:

- a. Rasio > 1 , menunjukkan terjadinya peningkatan efektivitas pencapaian kinerja yang melampaui kinerja tahun sebelumnya.
- b. Rasio $= 1$, menunjukkan peningkatan efektivitas pencapaian kinerja Tahun 2020 adalah tetap atau sama dengan kinerja tahun sebelumnya.

- c. Rasio < 1, menunjukkan efektivitas pencapaian kinerja menurun artinya efektivitas kinerja Tahun 2020 lebih rendah dibandingkan efektivitas kinerja tahun sebelumnya.

Tabel 37.
Efektifitas pencapaian kinerja BBKSDA NTT pada Tahun 2020

Program	Capaian Kinerja (%)		Rasio	Keterangan
	2019	2020		
Dukungan Manajemen; Pengelolaan Hutan Berkelanjutan; Kualitas Lingkungan Hidup	94,22	127,97	1,36	Efektivitas meningkat

Tabel diatas menunjukkan rasio pencapaian kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebesar 1,36 artinya pencapaian target-target kinerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2020 mengalami peningkatan efektivitas dibanding 2019.

IV. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Pengukuran efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan melalui perbandingan antara capaian kinerja atau realisasi fisik (*output*) dengan realisasi masukan (*input*) yang dapat berupa anggaran yang digunakan. Berdasarkan hasil perbandingan tersebut dapat diketahui tingkat efisiensi pencapaian kinerja (penggunaan sumber daya) dan juga efisiensi kegiatan yang dilaksanakan pada Tahun 2020.

Kriteria efisiensi yang digunakan, yaitu :

- Rasio > 1 atau = 1, menunjukkan penggunaan sumber daya dalam pelaksanaan kegiatan berjalan secara efisien.
- Rasio < 1, menunjukkan penggunaan sumber daya kurang efisien artinya dalam mendukung pencapaian kinerja Tahun 2020 sumber daya (Anggaran) yang digunakan belum sepenuhnya mendukung capaian kinerja Tahun 2020.

Tabel 38.
Efisiensi pencapaian kinerja BBKSDA NTT pada Tahun 2020

Program	Capaian Kinerja (%)	Realisasi Anggaran (%)	Rasio	Keterangan
Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem	127,97	94,41	1,36	Efisien

Dari tabel dapat diketahui rasio efisiensi pencapaian kinerja sebesar 1,36. Kondisi ini diartikan bahwa pencapaian kinerja Program Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Satker Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur pada Tahun 2020 berjalan secara efisien. Untuk mengetahui permasalahan dan

Sasaran kinerja yang ingin dicapai dalam terwujudnya reformasi dan tata kelola pemerintahan yang baik dalam rangka mendukung pencapaian nasional yaitu diukur dengan pencapaian kinerja berupa Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00 poin. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh nilai 79,37 poin atau 101,76% dari target 78 point. Capaian ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 14.
Perbandingan target dan realisasi kinerja Nilai Minimal SAKIP
Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam di Tahun 2020.

Target	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
78 Poin	79,37 Poin	101,76	22.587.225.000	21.240.753.133	97,32%

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian IKK Nilai SAKIP Direktorat Jenderal KSDAE minimal 78,00 poin adalah sebesar 101,76%. Anggaran untuk mendukung IKK ini sebesar Rp. 22.587.225.000,- dan direalisasikan sebesar 97,32% atau Rp. 21.240.753.133,-. Perbandingan Nilai SAKIP Ditjen KSDAE tahun 2020 dengan tahun sebelumnya terangkum pada tabel di bawah ini.

Tabel 39.
Perbandingan nilai SAKIP Ditjen KSDAE Tahun 2019-2020

Indikator Kinerja Kegiatan	2019	2020
Nilai Minimal SAKIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Minimal 78,00 Poin	78,44 Poin	79,37 poin

Analisis efektivitas dilakukan dengan membandingkan nilai SAKIP Ditjen KSDAE Tahun 2020 dengan tahun sebelumnya sebagaimana dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 40.
Perbandingan Kinerja Tahun 2019 dan Tahun 2020

Indikator Kinerja	Capaian 2019 (%)	Capaian 2020 (%)	Rasio	Keterangan
Nilai Minimal SAKIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Minimal 78,00 Poin	100,56	101,76	1,01	Efektif

Berdasarkan tabel diatas, diketahui bahwa rasio nilai SAKIP 1,01. Hal ini dapat diartikan kinerja tahun ini tetap efisien dibanding seperti tahun sebelumnya.

Sasaran kegiatan “Terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE” dengan Indikator Kinerja Kegiatan “Nilai Minimal SAKIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Minimal 78,00 Poin”, BBKSDA NTT telah membagi dalam 3 output kegiatan yang dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 41.
Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK

Nama Output	Anggaran				Output			
	Pagu (Rp.)	Total Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Target	Realisasi		Total Progres (%)	Kegiatan
					Volume	%		
Layanan Dukungan Manajemen Eselon I (Layanan)	695.225.000	686.686.680	98,77	1 layanan	1 layanan	100,00	101,76	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan RKAKL dan Renja tahun 2021 - Penyusunan laporan pemantauan kegiatan dan anggaran - Penyusunan Laporan Kinerja 2019, Laporan Renja 2019 dan Laporan Statistik 2019 - Penyusunan Laporan Keuangan - Bimtek Penyusunan SPIP Online dan Data SIDAK
Layanan Sarana dan Prasarana Internal (Layanan)	53.000.000	52.632.550	99,31	1 layanan	1	100,00	100,00	<ul style="list-style-type: none"> - Pengadaan Perangkat pengolah data dan komunikasi 7 unit - Pengadaan Peralatan dan fasilitas kantor 3 unit

Nama Output	Anggaran				Output			
	Pagu (Rp.)	Total Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Target	Realisasi		Total Progres (%)	Kegiatan
					Volume	%		
Layanan Perkantoran (Layanan)	21.839.000.000	20.501.433.903	93,88	1 layanan	1	100,00	93,88	- Pembayaran Gaji dan Tunjangan, Operasional dan Pemeliharaan Kantor Tahun 2020
Rata-rata IKK							98,55	-

Dari tabel diatas diketahui bahwa semua jenis kegiatan yang mendukung IKK Nilai Minimal SAKIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Minimal 78,00 Poin telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat pada rata-rata capaian output yaitu 98,55%.

Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan perbandingan realisasi keluaran (*output*) dan masukan (*input*) dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKK sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 42.
Analisis efisiensi pencapaian IKK

Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Rasio	Keterangan
Nilai Minimal SAKIP Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Minimal 78,00 Poin	97,32	98,55	1,02	Efisien

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas, diketahui bahwa penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKK ini telah berjalan secara efisien. Hal ini dibuktikan dengan optimalnya masukan (*input*) berupa penggunaan anggaran yaitu 97,32% untuk mencapai keluaran (*output*) 98,55%. Dari pelaksanaan seluruh kegiatan, diperoleh keluaran (*output*) kegiatan berupa penyusunan RKAKL dan RENJA tahun 2021, penyusunan laporan pemantauan kegiatan dan anggaran, penyusunan laporan kinerja 2019, laporan renja 2019 dan laporan statistik 2019, penyusunan laporan keuangan, bimtek penyusunan SPIP online dan data SIDAK, pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi 7 unit, pengadaan peralatan dan fasilitas kantor 3 unit, pembayaran gaji dan tunjangan, operasional dan pemeliharaan kantor tahun 2020.

Layanan Dukungan Manajemen Eselon I

Penyusunan kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Satker Ditjen KSDAE didasarkan atas tugas dan fungsi Sekretariat yang meliputi program dan anggaran, data dan informasi, keuangan, perlengkapan rumah tangga, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, perundang-undangan, kerjasama teknis dan lainnya.

1. Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran
 Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagai sub sistem pembangunan kehutanan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam perencanaan pembangunan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Rencana Strategis dan Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rencana tersebut setiap tahunnya dijabarkan dalam bentuk RKA-K/L yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan dari setiap sasaran dan tujuan yang akan dicapai sebagaimana termuat pada rencana strategis bidang KSDAE. Untuk tahun 2020, kegiatan yang dilaksanakan adalah penyusunan RKAKL dan Rencana Kerja tahun 2021 melalui pengumpulan data dan informasi di wilayah serta koordinasi dan konsultasi ke tingkat pusat.
2. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi
 Kegiatan yang dilakukan adalah penyusunan laporan pemantauan kegiatan dan anggaran yang secara rutin diinput melalui berbagai aplikasi seperti SMART DJA dan e- Monev Bappenas. Sebagai upaya melaksanakan reformasi birokrasi dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik, dalam kerangka tertib administrasi perencanaan, tertib pelaksanaan, tertib pemantauan, dan tertib administrasi pelaporan maka disusun Laporan Kinerja, Laporan Capaian Renja, dan Buku Statistik. Kegiatan pada tahun 2020 adalah berupa penyusunan Laporan Kinerja, Laporan Capaian Renja, dan Buku Statistik Tahun 2020. Adapun kegiatan dalam rangka mendukung penyusunan Laporan Kinerja, Laporan Capaian Renja, dan Buku Statistik Tahun 2020. Buku Statistik ini juga merupakan upaya penyampaian informasi dan kehumasan kepada masyarakat.
 Balai Besar KSDA NTT mengelola akun-akun media sosial dan call center. Media tersebut juga menjadi corong penyampaian publikasi dan penerima laporan atau pengaduan dari masyarakat menyangkut kinerja konservasi sumber daya alam di Provinsi NTT. Bentuk publikasi lain yang dilaksanakan adalah pengumpulan bahan dan pembuatan publikasi berupa leaflet TWA Bipolo dan SM Perhatu. Dalam beberapa momen, akun media sosial BBKSDA NTT juga turut berpartisipasi untuk menyebarkan informasi lingkungan hidup dan kehutanan dari Biro Humas KLHK maupun Ditjen KSDAE.
 Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah proses integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, kehandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan

perundang-undangan yang diselenggarakan secara menyeluruh terhadap proses perancangan dan pelaksanaan kebijakan, serta perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan anggaran lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan satuan kerja Balai Besar KSDA NTT.

Satuan Tugas (Satgas) SPIP Balai Besar KSDA NTT telah ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala Balai Besar KSDA NTT Nomor : SK.34/K.5/TU/SET/1/2020 tanggal 6 Januari 2020. Satgas tersebut bertugas untuk mengoordinasikan pelaksanaan seluruh tahapan penyelenggaraan SPIP dan memfasilitasi seluruh kebutuhan atas pedoman dan materi yang diperlukan untuk melaksanakan SPIP.

3. Pengelolaan keuangan

Kegiatan yang dilakukan untuk mendukung pengelolaan keuangan yang tertib dan akuntabel adalah pendampingan administrasi dan laporan keuangan ke wilayah, serta melakukan konsultasi dan koordinasi dengan Kementerian Keuangan maupun Eselon I KLHK di pusat. Pendampingan pelaksanaan administrasi dan keuangan dimaksudkan untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara sesuai ketentuan yang telah ditetapkan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan pemahaman dalam pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara. Sasaran kegiatan ini yaitu terwujudnya laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan yang terukur dan akuntabel pada setiap pengelola keuangan dan pelaksana kegiatan di lingkungan Balai Besar KSDA NTT, agar dapat berkontribusi positif untuk mempertahankan predikat Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Realisasi PNBPN menurut jenis penerimaan sampai dengan Desember 2020 adalah sebesar Rp.41.906.760,-. Jumlah ini belum mampu mencapai target sebesar Rp.571.950.000,-. Faktor utama penyebab kurangnya PNBPN ini adalah terjadinya pandemi COVID19 yang mengakibatkan penutupan dan pembukaan kembali secara terbatas (berdasarkan kuota) taman wisata alam di NTT.

4. Pengelolaan kepegawaian

Balai Besar KSDA NTT melaksanakan pengelolaan kepegawaian melalui peningkatan kapasitas SDM, dukungan untuk ikut serta dalam pelatihan/ workshop/ seminar/ rapat/ sosialisasi di pusat maupun provinsi lain, pengurusan dan pengiriman berkas pejabat fungsional, dan pendampingan administrasi keuangan di wilayah. Sehubungan dengan adanya pandemi COVID19 dan kebijakan pemerintah pusat untuk penanganan persebarannya, Balai Besar KSDA NTT juga mengalokasikan konsumsi penambah daya tahan tubuh untuk pegawai yang melaksanakan Work From Office.

Sampai dengan 31 Desember 2020 jumlah pegawai Balai Besar KSDA NTT adalah 137 ASN, 65 tenaga kontrak, dan 8 bakti rimbawan. Pejabat fungsionalnya terdiri dari 26 Polhut, 27 PEH, 7 Polhut, 1 arsiparis, dan 1 pejabat pengadaan barang/ jasa.

5. Pelayanan umum dan perlengkapan

Kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pelayanan umum dan perlengkapan adalah penatausahaan BMN dan persediaan, serta koordinasi dan konsultasi unsur pimpinan baik ke pusat maupun ke wilayah.

Layanan Sarana dan Prasarana Internal

Untuk mendukung layanan sarana dan prasarana internal dalam rangka peningkatan pelayanan oleh instansi pemerintah kepada masyarakat, Balai Besar KSDA NTT mengalokasikan belanja pada output ini untuk pembelian meubeler kantor dan peralatan elektronik perkantoran. Item yang direalisasikan adalah rak penyimpanan, lemari arsip, mesin potong rumput, mimbar podium, televisi, kursi sofa, AC, dan printer.

Layanan Perkantoran

Penyusunan kegiatan layanan perkantoran didasarkan atas tugas dan fungsi sekretariat pada Unit Pelaksana Teknis Balai Besar KSDA NTT yang meliputi program dan anggaran, data dan informasi, keuangan, perlengkapan rumah tangga, kepegawaian, organisasi dan tata laksana, perundang-undangan, kerjasama teknis, dan lainnya. Untuk tahun anggaran 2020, Balai Besar KSDA NTT melaksanakan komponen dari output layanan perkantoran adalah gaji dan tunjangan, serta operasional dan pemeliharaan kantor.

Untuk komponen operasional dan pemeliharaan kantor, rincian kegiatan yang dilakukan meliputi : keperluan sehari-hari perkantoran, langganan daya dan jasa, pemeliharaan sarana kantor, pemeliharaan sarana gedung/kantor, pembayaran pelaksanaan operasional kantor, pembuatan kartu pas bandara dan sewa ruangan, sewa rumah dinas, honorarium tenaga kontrak, proses harga dasar bangunan negara, sewa perahu operasional RKW, operasional resort unggulan, konsultasi/ koordinasi/ supervisi DEPK, pemeriksaan BMN, penatausahaan kearsipan gudang, pembayaran biaya festival Menipo, pencegahan dan penanganan pandemi Covid19, virtual meeting, pendampingan administrasi kepegawaian, monitoring aset BMN, pendampingan administrasi keuangan, dan pembayaran PBB tanah rumah dinas.

Untuk pemeliharaan gedung dan bangunan dilakukan baik di lingkup balai (aula, gedung eks SPORC, gedung utama, bidang teknis, pagar kantor, dan garasi kendaraan, rumah dinas, garasi, dan pagar kompleks perumahan, kandang satwa), kantor BKW I (kantor, rumah dinas, taman kantor), kantor BKW II (kantor, guest house, pagar kantor, lanskap halaman).

Pemeliharaan gedung dan bangunan juga dilakukan pada SKW I (rumah dinas), SKW II (kantor, kandang satwa), SKW III (kantor, rumah dinas), SKW IV (kantor, rumah dinas).Sedangkan untuk lingkup RKW dilakukan pemeliharaan pos jaga, loket karcis (Riung), pondok kerja dan barak polhut (Ruteng), rumah dinas di Ruteng dan Ende.

Pandemi covid-19 yang disebabkan oleh virus Corona belum usai juga sejak kemunculannya di Wuhan, Cina pada akhir Desember 2019 dan mulai melanda Indonesia sejak Maret 2020. Virus yang belum ada obat maupun vaksinnnya ini tidak menunjukkan penurunan penderitanya. Untuk di Indonesia, grafik orang terpapar virus ini terus meningkat bahkan belum mengalami fase gelombang kedua. Berbagai upaya preventif yang telah ditempuh untuk memangkas rantai penyebaran COVID-19 dari tingkat kantor Balai, Bidang KSDA Wilayah, Seksi Konservasi Wilayah, Resort Konservasi Wilayah, hingga hunian.

2 SASASARAN KEGIATAN TERJAMINNYA EFEKTIVITAS PEMOLAAN DAN PENATAAN PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI, SERTA KETERSEDIAAN DATA DAN INFORMASI KONSERVASI ALAM

Sasaran kegiatan “Terjaminnya Efektivitas Pemolaan Dan Penataan Pengelolaan Kawasan Konservasi, Serta Ketersediaan Data Dan Informasi Konservasi Alam” dengan 2(dua) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

- 1) Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam kawasan konservasi,
- 2) Jumlah simpul data Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan.

Tabel 43.

Perbandingan target dan realisasi kinerja terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam kawasan konservasi	21,71 Ha	4.800 Ha	150	150.500.000	146.092.330	97,07
Jumlah simpul data Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan	1 dokumen	1 dokumen	100	395.650.000	365.488.100	92,38

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa :

- 1) Capaian IKK Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif di dalam kawasan konservasi adalah sebesar 150%. Anggaran untuk mendukung IKK ini sebesar Rp. 150.500.000,- dan direalisasikan sebesar 97,07% atau Rp. 146.092.330,-,

2) Capaian IKK Jumlah simpul data Keanekaragaman Hayati yang dikembangkan adalah sebesar 100%. Anggaran untuk mendukung IKK ini sebesar Rp. 395.650.000,- dan direalisasikan sebesar 92,38% atau Rp. 365.488.100,-,

2(dua) output kegiatan yang merupakan bagian dari sasaran kegiatan Terjaminnya efektivitas pemolaan dan penataan pengelolaan kawasan konservasi, serta ketersediaan data dan informasi konservasi alam telah dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 44.
Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK

Nama Output	Anggaran				Output			
	Pagu (Rp.)	Total Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Target Volume	Realisasi		Total Progres (%)	Kegiatan
					%			
Luas Kawasan sebagai penyediaan Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional didalam Kawasan Konservasi (Hektar)	150.500.000	146.092.330	97,07	21,71 Ha	4.800 Ha	100	100	- Sosialisasi bersama masyarakat adat Mutis dalam rangka usulan perubahan sebagian fungsi CA. Mutis Timau seluas 4.800 Ha (40 % dari luas total)
Dokumen Pemolaan Kawasan Konservasi (Dokumen)	395.650.000	365.488.100	92,38	1	1	100	100	- Realisasi dokumen pemolaan kawasan konservasi sebanyak 2 dokumen, yang terdiri dari dokumen

Nama Output	Anggaran				Output			
	Pagu (Rp.)	Total Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Target Volume	Realisasi		Total Progres (%)	Kegiatan
					%			
								Revisi Dokumen zonasi / blok 1 dokumen di kawasan TWAL Teluk Kupang, dan Dokumen penandaan batas zona/ blok TWA Menipo sepanjang 20 km

Luas Kawasan Sebagai Penyedia Data, Informasi, dan Rencana Konservasi Nasional di Dalam Kawasan Konservasi

Dalam output ini pada awalnya kegiatan yang akan dilakukan meliputi evaluasi kesesuaian fungsi untuk kawasan SM Harlu, dengan target output sebesar 21,71 Ha. Evaluasi kesesuaian fungsi SM Harlu ini pada dasarnya mempertimbangkan dinamika pemanfaatan kawasan dan sekitarnya. Pengembangan Destinasi Mulut Seribu dan adanya kebutuhan lahan budidaya rumput laut menjadi faktor utama perlunya peninjauan kembali terhadap tata ruang di SM Harlu.

Akan tetapi dengan adanya pandemi Covid19, kegiatan evaluasi kesesuaian fungsi SM Harlu kemudian direvisi menjadi virtual meeting, belanja barang dalam rangka penanganan Covid19, dan sosialisasi bersama masyarakat adat Mutis dalam rangka usulan perubahan sebagian fungsi CA Mutis Timau.

Virtual meeting yang diselenggarakan adalah “Ketahanan Pangan Masyarakat Sekitar Kawasan Konservasi Berkelanjutan, One Thought On Menuju Ketahanan Pangan Berbasis Masyarakat”. Dengan narasumber pakar bidang ketahanan pangan lokal, webinar ini menyajikan informasi aktual dan faktual bagaimana hutan mampu menyokong pangan serta pengembangan pangan lokal untuk kehidupan manusia. Pendaftar webinar sebanyak 1.113 orang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, dan saat acara diikuti 794 peserta dan 600 orang melalui tayangan langsung.

Ketahanan pangan lokal menuju ketahanan pangan nasional yang berbasis masyarakat di sekitar kawasan konservasi ini sinergis dengan upaya penanganan pandemi Covid19. Di sisi lain, faktor lain yang harus diperhatikan untuk mencegah penyebaran virus corona adalah dengan menciptakan kondisi lingkungan yang higienis serta adanya tambahan asupan penambah daya tahan tubuh. Memperhatikan hal ini, Balai Besar KSDA NTT kemudian mengakomodir melalui belanja desinfektan, suplemen, APD, masker, dan hand sanitizer.

CA Mutis Timau bukanlah berfungsi untuk kegiatan wisata alam, namun telah menjadi destinasi yang dikenal masyarakat. Masyarakat yang bermukim di sekitarnya memanfaatkan sumberdaya alam di dalamnya. Memperhatikan dinamika ini, Balai Besar KSDA NTT telah melakukan rangkaian kegiatan dalam rangka evaluasi kesesuaian fungsi. Menyambung kegiatan yang telah diselenggarakan sebelumnya, pada tahun 2020 ini dilaksanakan sosialisasi bersama masyarakat adat Mutis untuk memperoleh saran dan pertimbangan dari sudut pandang budaya terhadap rencana perubahan sebagian fungsi CA Mutis Timau yang berdasarkan hasil survey lapangan seluas ± 9.000 Ha.

Namun dari hasil diskusi dengan Masyarakat adat Mutis, masyarakat adat meminta untuk ditinjau kembali luas kawasan yang akan diusulkan menjadi Taman Wisata Alam, tokoh adat menyarankan agar hanya 40% (± 4.800 Ha) luas CA Mutis Timau yang diusulkan untuk dilakukan perubahan sebagian fungsi.

Dokumen Pemolaan Kawasan Konservasi

Kegiatan yang rencananya akan dilakukan untuk mendukung output pemolaan kawasan konservasi adalah penyusunan dokumen blok pengelolaan (CA Mutis Timau, CA Riung, CA Ndeti Kelikima, dan SM Perhatu), penandaan batas blok kawasan di Pulau Timor, pelaksanaan kerjasama di kawasan konservasi (penyusunan dan penandatanganan kerjasama, bimbingan teknis kerjasama, dan evaluasi kerjasama). Sehubungan dengan dinamika pemanfaatan kawasan konservasi dan perkembangan Covid19 maka dilakukan penyesuaian anggaran dan kegiatan menjadi konsultasi publik dalam rangka revisi Blok TWAL Teluk Kupang, penandaan batas blok kawasan di Pulau Timor, pelaksanaan kerjasama, dan belanja dalam rangka penanganan pandemi.

Sampai dengan tahun 2020, sebanyak 23 dokumen blok pengelolaan kawasan telah disusun dan disahkan. Kawasan yang belum mempunyai dokumen blok pengelolaan adalah CA Riung, CA Ndeti Kelikima, CA Mutis Timau, SM Danau Tuadale, dan SM Perhatu yang diharapkan dapat diselesaikan di tahun 2021.

Sebagai wujud pemantapan kawasan, Balai Besar KSDA NTT mengupayakan penandaan batas blok di TWA Menipo. Kawasan ini disebut sebagai destinasi baru wisata di NTT dengan predikat rumah biodiversitas Pulau Timor. Blok TWA Menipo telah disahkan melalui Surat Keputusan Direktur Jenderal KSDAE Nomor : SK.83/KSDAE/SET/KSDAE.3/ 2016. Dengan adanya penandaan batas blok ini diharapkan akan mendukung efektivitas pengelolaan kawasan.

Masih terkait dengan efektivitas pengelolaan kawasan, Balai Besar KSDA NTT juga turut menyelenggarakan kerjasama penguatan fungsi KSA/KPA dan kerjasama dalam rangka pembangunan strategis yang tidak dapat dielakkan. Pada tahun 2020 ini telah diselenggarakan penandatanganan dua perjanjian kerjasama yaitu :

- 1) PKS antara Balai Besar KSDA NTT dengan PT Industri Kapal Nusantara tentang Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan Berupa Pemanfaatan Alur Perairan Taman Wisata Alam Laut Teluk Kupang Untuk Menunjang Kegiatan Industri Galangan Kapal Dan Maritim Terpadu di Provinsi Nusa Tenggara Timur;
- 2) PKS antara Balai Besar KSDA NTT dengan Dinas PUPR Provinsi NTT tentang Pembangunan Strategis Yang Tidak Dapat Dielakkan berupa Peningkatan dan Pemeliharaan Jalan Provinsi (eksisting) Yang Melintasi Kawasan Konservasi pada Cagar Alam Mutis Timau, Suaka Margasatwa Kateri, Taman Wisata Alam Bipolo, Taman Wisata Alam Menipo di Pulau Timor, serta Cagar Alam Wolo Tado, Cagar Alam Riung, Cagar Alam Kemang Boleng, Taman Wisata Alam Ruteng di Pulau Flores Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Untuk evaluasi penyelenggaraan kerjasama dilaksanakan dengan sasaran PKS antara Balai Besar KSDA NTT dengan WCS-IP. Kegiatan yang berlangsung pada tanggal 27 Agustus 2020 menghasilkan rumusan antara lain menyangkut perbaikan komunikasi antarpihak dan repatriasi kura-kura leher ular Rote akan diupayakan secepatnya dengan berpedoman pada protokol kesehatan pencegahan COVID19. Rencana Kegiatan Tahunan (RKT 2020) telah dilaksanakan pada tanggal 29 September 2020 secara virtual. Diharapkan melalui kerjasama penguatan fungsi kawasan ini dan dengan adanya rencana kerja tahunan, repatriasi kura-kura leher ular Rote dapat segera terwujud.

3 SASASARAN KEGIATAN TERJAMINNYA EFEKTIVITAS PENGELOLAAN KAWASAN SUAKA ALAM, KAWASAN PELESTARIAN ALAM, DAN TAMAN BURU

Sasaran kegiatan “Terjaminnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Dan Taman Buru” dengan 3(tiga) Indikator Kinerja Kegiatan, yaitu :

- 1) Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangan,
- 2) Jumlah Desa di sekitar kawasan konservasi yang mendapatkan kemitraan konservasi pada blok/zona tradisional atau Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif,
- 3) Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya.

Tabel 45.
Perbandingan target dan realisasi kinerja terjaminnya efektivitas pengelolaan Kawasan Suaka Alam,
Kawasan Pelestarian Alam, Dan Taman Buru

Indikator Kinerja Kegiatan	Target	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani	130 Ha	130 Ha	100	640.300.000	631.150.975	98,57
Jumlah Desa di sekitar kawasan konservasi yang mendapatkan kemitraan konservasi pada blok/zona tradisional atau Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	5 Desa	8 Desa	150	536.995.000	457.342.555	85,17
Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya	1 Unit KK	28 Unit KK	150	1.289.020.000	1.270.196.488	98,54

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa :

1. Capaian IKK Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani adalah sebesar 100%. Anggaran untuk mendukung IKK ini sebesar Rp. 640.300.000,- dan direalisasikan sebesar 98,57% atau Rp. 631.150.975,-
2. Capaian IKK Jumlah Desa di sekitar kawasan konservasi yang mendapatkan kemitraan konservasi pada blok/zona tradisional atau Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif adalah sebesar 150%. Anggaran untuk mendukung IKK ini sebesar Rp. 536.995.000,- dan direalisasikan sebesar 85,17% atau Rp. 457.342.555,-
3. Capaian IKK Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya adalah sebesar 150 %. Anggaran untuk mendukung IKK ini sebesar Rp. 1.289.020.000,- dan direalisasikan sebesar 98,54% atau 1.270.196.488,-.

3(tiga) output kegiatan yang merupakan bagian dari sasaran kegiatan Terjaminnya Efektivitas Pengelolaan Kawasan Suaka Alam, Kawasan Pelestarian Alam, Dan Taman Buru telah dirangkum dalam tabel berikut.

Tabel 46.
Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK

Nama Output	Anggaran						Output	
	Pagu (Rp.)	Total Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Target	Realisasi		Total Progres (%)	Kegiatan
					Volume	%		
Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani	640.300.000	631.150.975	98,57	130 Ha	130 Ha	100	100	<ul style="list-style-type: none"> Pemulihan ekosistem seluas 130 hektar dari target 130 hektar berupa: Pemeliharaan tanaman 130 hektar di RKW TWA Ruteng Wilayah I Gololusang di Kelurahan Bangka Leda, Kecamatan Langke Rembong, Kabupaten Manggarai dan RKW TWA Ruteng Wilayah II Ranaka di Kelurahan Mandosawu, Kecamatan Poco Ranaka, Kabupaten Manggarai Timur
Jumlah Desa di sekitar kawasan konservasi yang mendapatkan kemitraan konservasi pada blok/ zona tradisional atau Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif	536.995.000	457.342.555	85,17	5 Desa	8 Desa	100	150	<ul style="list-style-type: none"> Desa Tanah Merah, Kecamatan Kupang Tengah, Kabupaten Kupang Kelurahan Oesapa, Kecamatan Kelapa Lima, Kota Kupang Desa Lakuken Barat dan Kamanasa, Kecamatan Malaka, Kabupaten Malaka Desa Wehali, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka Desa Kamanasa, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka Desa Nenas, Kec. Fatumnasi, Kab. TTS Desa Macang Tanggar. Kec. Komodo, Kab. Mangarai Barat Desa Lifuleo, Kec. Kupang Barat, Kab. Kupang

Nama Output	Anggaran				Output			
	Pagu (Rp.)	Total Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Target	Realisasi		Total Progres (%)	Kegiatan
					Volume	%		
Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolannya	1.289.020.000	1.270.196.488	98,54	1 Unit KK	28 Unit KK	100	150	Kegiatan yang dilakukan, antara lain: <ul style="list-style-type: none"> • Penyusunan dokumen RPJP 2 dokumen; • Perlindungan dan pengamanan kawasan berupa Patroli Rutin Pengamanan Kawasan, dan Patroli Perlindungan dan Pengamanan kawasan bersama MMP di 21 Resort Kawasan Konservasi (28 Kawasan Konservasi)

Luas opened area di kawasan konservasi yang ditangani

Terhadap hutan konservasi yang mengalami degradasi dapat dilakukan kegiatan pemulihan ekosistem. Demikian pula yang terjadi di TWA Ruteng. Oleh karenanya di tahun 2020 Balai Besar KSDA NTT mengalokasikan penanaman dan pengkayaan jenis dalam rangka pemulihan ekosistem. Sayangnya dengan adanya pandemi COVID19, kegiatan ini mengalami realokasi anggaran.

Melalui tenaga bakti rimbawan, Balai Besar KSDA NTT kemudian melaksanakan pemeliharaan dan monitoring/pemantauan tanaman. Sasaran pelaksanaan kegiatan monitoring/pemantauan tanaman dalam rangka pemulihan ekosistem tahun 2020 adalah jumlah bibit sebanyak 81.250 batang yang tertanam pada Blok RHL TWA Ruteng, Resort Konservasi Wilayah TWA Ruteng Wilayah I Golo Lusang dan Resort Konservasi Wilayah TWA Ruteng Wilayah II di Robo dengan luas areal RHL 130 Ha. Jenis tanaman yang digunakan dalam kegiatan pemeliharaan adalah Lince timung (*Ixora sp.*), Ngantol (*Glochidion perakense*), Namut (*Celtis tetandra*), dan Cambir Poco (*Schleichera sp.*).

Jumlah Desa yang Mendapatkan Akses Pengelolaan Kawasan Konservasi dan Peningkatan Usaha Ekonomi Produktif

Dalam rangka pelaksanaan output jumlah desa yang mendapatkan akses pengelolaan kawasan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif, Balai Besar KSDA NTT melakukan inventarisasi dan verifikasi pemanfaatan kawasan konservasi, pembentukan kelompok kemitraan, bantuan ekonomi produktif di Flores dan Timor, dan pembelian HHBK dari masyarakat untuk penanganan Covid19.



Kegiatan inventarisasi dan verifikasi (inver) pemanfaatan kawasan konservasi dilakukan pada kawasan TWAL Teluk Kupang dan SM Kateri. Melalui inver diharapkan akan diperoleh data dan informasi yang akurat mengenai area yang dapat dialokasikan sebagai area kemitraan konservasi sesuai dengan peraturan yang berlaku dan dokumen-dokumen pengelolaan kawasan konservasi serta melakukan penilaian/verifikasi terhadap kelayakan prakondisi, subyek dan obyek kemitraan konservasi.

Untuk kawasan TWAL Teluk Kupang, inver berlokasi di Kelurahan Oesapa(Kota Kupang) dan Desa Tanah Merah (Kabupaten Kupang). Masyarakat pada kedua wilayah tersebut sebagian berprofesi sebagai nelayan yang beroperasi di dalam perairan Teluk Kupang. Masyarakat menyatakan telah memanfaatkan sumber daya perairan secara turun temurun. Jenis alat tangkap yang digunakanpun ramah lingkungan berupa bagan tancap, jaring, kail, rawai, pukut. Hasil tangkapan berupa ikan kakap, ikan kerapu, ikan tenggiri, ikan Kombong, ikan marlin, ikan gandola, ikan teri, ikan ranal.

Gangguan di SM Kateri telah berlangsung sejak akhir tahun 2000 yang mengakibatkan kerusakan yang cukup parah karena aktifitas perambahan yang dilakukan oleh warga masyarakat bekas pengungsi Timor-Timur. Total

luas open area SM Kateri pada dua desa Kamanasa dan Wehali adalah seluas 260,69 Ha (Desa Kamanasa 166,49 Ha dan di desa Wehali seluas 94,2 Ha). Kegiatan berkebun yang telah dilakukan sejak tahun 2000 tidak hanya bertanam jagung, tetapi juga bertanam kacang hijau, kacang tanah, pisang, asam dan mente.

Pemanfaatan oleh masyarakat warga baru desa Kamanasa dan Wehali di SM Kateri dapat dialihkan sebagian dengan penanaman kembali tanaman asli seperti asam dan kemiri, melalui program kemitraan konservasi pemulihan ekosistem pada blok rehabilitasi. Dalam tahap awal dapat dilakukan program pemulihan ekosistem seluas 100 Ha pada dua desa tersebut dengan melibatkan para pihak terkait, termasuk warga lokal guna menghindari kecemburuan sosial.

Bantuan ekonomi produktif untuk menunjang kegiatan kelompok tani diserahkan kepada kelompok-kelompok tani hutan di Pulau Flores dan Pulau Timor. Bantuan ini diserahkan kepada 7 (tujuh) kelompok tani, yakni KTH Maju Bersama (Desa Macang Tanggar), Sumber Usaha, Danau Dholat, Sanga Soda, Paloil Pah, Nekmese, dan Nekabua Baumata.

Peningkatan produktivitas kelompok distimulasi oleh Balai Besar KSDA NTT melalui pembelian produk-produk Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) dalam rangka penanganan pandemi Covid19. Jenis HHBK yang dibelanjakan antara lain madu hutan dan minyak kala kode untuk kemudian disumbangkan kepada tenaga medis melalui RSUD Prof. Dr. WZ Johannes.

Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan Efektivitas Pengelolaannya

Dalam rangka mendukung peningkatan penilaian efektivitas kawasan maka Balai Besar KSDA NTT melakukan penyusunan Rencana Pengelolaan Jangka Panjang (RPJP) untuk kawasan SM Kateri dan TWA Bipolo tahun 2020-2029.

Kegiatan lain yang dapat meningkatkan efektivitas pengelolaan adalah perlindungan kawasan hutan konservasi yang diupayakan secara partisipatif. Kegiatan patroli dilaksanakan dengan menggunakan SMART atau Spatial Monitoring and Reporting Tool yang berbasis resort sebagai unit pengelolaan terkecil di tingkat tapak. Setiap resort melaksanakan patroli rutin sebanyak empat kali untuk memantau monitoring kondisi pal batas, pengambilan data potensi sebaran satwa liar dan tumbuhan, pengambilan data potensi jasa lingkungan, monitoring gangguan terhadap kawasan, serta pengambilan data sosial dan ekonomi masyarakat di sekitar kawasan. Dalam kegiatan patroli ini juga disertai anjongsana kepada masyarakat yang bermukim di sekitar kawasan dan anjangkarya kepada masyarakat yang tengah beraktivitas di dalam hutan konservasi. Anjongsana dan anjangkarya ini media petugas untuk sosialisasi konservasi sumber daya alam dan ekosistem sekaligus memperoleh informasi dari masyarakat.

Patroli rutin juga dilakukan oleh petugas resort bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP). MMP adalah kelompok masyarakat sekitar hutan yang membantu Polhut dalam pelaksanaan perlindungan hutan dibawah

koordinasi, pembinaan dan pengawasan intansi pembina. (Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Kehutanan RI No. P4.56/Menhut-II/2014 Tentang Masyarakat Mitra Polisi Kehutanan).

Kegiatan perlindungan dan pengamanan kawasan bersama Masyarakat Mitra Polhut (MMP) diimplementasikan dalam bentuk patroli di 23 Resort Konservasi Wilayah (RKW). Melalui patroli bersama MMP selain bertujuan sebagai upaya preventif gangguan kawasan juga untuk mengumpulkan data potensi kawasan, pengendalian sampah di dalam dan sekitar kawasan, dan pemantauan tanda batas kawasan. Dalam kegiatan patroli tersebut disertai pula kegiatan sosialisasi kepada masyarakat di sekitar kawasan konservasi.

Terlepas dari patroli rutin, dalam rangka mendukung efektivitas pengelolaan melalui pelibatan parapihak maka diselenggarakan pertemuan tiga pilar. Forum tiga pilar ini terdiri dari unsur pemerintah setempat, adat, dan agama. Setiap kendala yang dijumpai dalam pengelolaan kawasan dimusyawarahkan dengan wadah tiga pilar dan dihindari penyelesaiannya secara represif.

4 SASASARAN KEGIATAN TERJAMINNYA EFEKTIVITAS UPAYA KONSERVASI SPESIES DAN SUMBERDAYA GENETIK

Sasaran kinerja yang ingin dicapai dalam terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik di Tahun 2020 yaitu diukur dengan pencapaian kinerja berupa Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh 1.654 Hektar atau 150% dari target 335,936 Hektar. Capaian ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 47.
Perbandingan target dan realisasi kinerja terjaminnya efektivitas
upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik di Tahun 2020

Target	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
335.936 Hektar	1.654 Hektar	150	1.041.095.000	1.018.498.940	97,83

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian IKK Luas kawasan hutan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi secara partisipatif adalah sebesar 150%. Anggaran untuk mendukung IKK ini sebesar Rp. 1.041.095.000,- dan direalisasikan sebesar 97,83% atau Rp. 1.018.498.940,-.

Tabel 48.
Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK

Nama Output	Anggaran						Output	
	Pagu (Rp.)	Total Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Target	Realisasi		Total Progres (%)	Kegiatan
					Volume	%		
Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL (hektar)	1.041.095.000	1.018.498.940	97,83	335.936 Hektar	1.654 Hektar	100	150	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan Inventarisasi Rusa di TWA Menipo seluas 540 hektar berada di wilayah Resort Menipo SKW II. Kegiatan Inventarisasi Rusa di SM Harlu seluas 1084 hektar berada di wilayah Resort Rote SKW II.

Dari tabel diatas diketahui bahwa semua jenis kegiatan yang mendukung IKK Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat pada capaian output yaitu 150%. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan perbandingan realisasi keluaran (*output*) dan masukan (*input*) dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKK sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 49.
Analisis efisiensi pencapaian IKK

Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Rasio	Keterangan
Luas kawasan yang diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	97,83	150	1,53	Efisien

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas, diketahui bahwa penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKK ini telah berjalan secara efisien. Hal ini dibuktikan dengan optimalnya masukan (*input*) berupa penggunaan anggaran yaitu 97,83% untuk mencapai keluaran (*output*) 150%. Dari pelaksanaan seluruh kegiatan, diperoleh

keluaran (output) berupa Kegiatan Inventarisasi Rusa di TWA Menipo seluas 540 hektar berada di wilayah Resort Menipo SKW II, Kegiatan Inventarisasi Rusa di SM Harlu seluas 1084 hektar berada di wilayah Resort Rote SKW II.



LANGKAH II (PUKUL 18.00 WITA)

- Melaporkan kepada Bapak Dirjen KSDAE dan Direktur KKH terkait Paus mati terdampar di TWAL Tl.Kupang
- Identifikasi morfologi dan pemeriksaan fisik bangkai Paus Biru untuk memastikan penyebab kematian

Informasi Spesies, Status Perlindungan dan Morfologis :

Jenis : Paus Biru (*Balaenoptera musculus*),
Jenis kelamin diduga betina,
Umur diperkirakan 70 – 80 tahun,
Ukuran panjang diperkirakan 29 meter,
Lingkar badan diperkirakan 17 meter
Status perlindungan : dilindungi (PP Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa)

Dalam kaitan penyelenggaraan output Luas Kawasan yang Diverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL, Balai Besar KSDA NTT melaksanakan penanganan konflik satwa liar-manusia, monitoring buaya muara, konservasi penyu, inventarisasi satwa, survey potensi TSL untuk usulan kuota, dan penanganan barang bukti.

Balai Besar KSDA NTT melalui Unit Penanganan Satwa secara aktif telah merespons laporan dari masyarakat mengenai keberadaan buaya muara. Patroli dan sosialisasi ditunaikan tidak hanya di Pulau Timor, namun hingga Pulau Lembata dan Pulau Sumba. Suatu kebahagiaan tersendiri untuk tahun 2020 karena angka terjadinya

serangan buaya muara kepada manusia menurun dibandingkan tahun 2019. Sebagai tanda tali kasih kepada korban serangan buaya muara, Balai Besar KSDA NTT menyampaikan santunan guna meringankan beban material dan psikis korban maupun keluarganya.

Respons UPS tidak hanya terbatas kepada konflik buaya muara dengan manusia. Di tahun 2020, UPS menjadi garda terdepan Balai Besar KSDA NTT dalam penanganan bangkai mamalia laut terdampar yaitu paus biru dan penyu belimbing di kawasan TWAL Teluk Kupang, serta penanganan barang bukti burung anis kembang hasil sitaan di Jawa Timur yang berasal dari NTT untuk dilepasliarkan di TWA Ruteng.

Seyogyanya di tahun 2020 Balai Besar KSDA NTT akan melaksanakan monitoring rutin terhadap kakatua kecil jambul kuning di TWA Menipo dan SM Harlu, dan monitoring buaya di TWAL 17 Pulau, CA Wae Wuul, dan KEE Hutan Lindung Pota. Akan tetapi dengan adanya COVID19 maka kegiatan tersebut disesuaikan kembali dengan prioritas penanganan pandemi.

Untuk inventarisasi rusa Timor diselenggarakan Balai Besar KSDA NTT di kawasan TB Bena, SM Harlu, TWA Menipo, dan CA Wae Wuul. Keberadaan rusa Timor di hutan konservasi peranannya vital karena menjadi mamalia besar yang di rantai makanan bertindak sebagai produsen makanan.

Pemanfaatan TSL secara legal telah diatur oleh peraturan perundang-undangan. Jenis dan jumlah TSL yang dapat dimanfaatkan pada wilayah kerja Balai Besar KSDA NTT setiap tahunnya telah ditentukan melalui peraturan Direktur Jenderal. Jenis dan jumlah TSL ini ditetapkan dengan dasar survey untuk dasar usulan kuota.

Lokasi survey potensi TSL sebagai dasar usulan kuota ini dilaksanakan di desa Barada, Kecamatan Malaka Tengah, Kabupaten Malaka. Tujuannya adalah diperoleh data terkait potensi TSL utk tujuan usulan kuota. Terutama utk kegiatan pemberdayaan masyarakat sekitar SM Kateri khususnya di desa Barada. Hasil survey sepanjang 5 km menunjukkan potensi TSL yg ditemukan di sekitar Desa Barada antara lain :

- 1) Anggrek : Vanda insignis (24 perjumpaan), Dendrobium discolor (12 perjumpaan), Dendrobium sp (18 perjumpaan), anggrek lain-lain (22 perjumpaan) dengan penyebaran di pohon jati, pohon asam, pohon lontar, pohon kesambi;
- 2) Burung : Anis timor 8 kali perjumpaan, kutilang 3 kali perjumpaan, trucukan 4 kali perjumpaan, decu belang 9 kali perjumpaan, decu timor 5 kali perjumpaan, tuwur asia 4 kali perjumpaan, gemak hutan 5 kali perjumpaan, dan ayam hutan merah 3 kali perjumpaan;
- 3) Hasil hutan bukan kayu : madu Apis dorsata dan suweg.

Harapannya, dengan adanya usulan kuota masyarakat dapat memanfaatkan TSL yang ada di sekitar kawasan SM Kateri baik untuk komersial, souvenir, maupun tujuan penangkaran yang merupakan bagian dari kegiatan pemberdayaan masyarakat di SM Kateri

5 SASASARAN KEGIATAN TERJAMINNYA EFEKTIVITAS PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN HUTAN KONSERVASI

Sasaran kinerja yang ingin dicapai dalam terjaminnya efektivitas pemanfaatan jasa lingkungan hutan konservasi di Tahun 2020 yaitu diukur dengan pencapaian kinerja berupa jumlah destinasi wisata alam *science, academic, voluntary, education*. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh 1 destinasi wisata atau 150% dari target 335,936 Hektar. Capaian ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 50.
Perbandingan target dan realisasi kinerja terjaminnya efektivitas upaya konservasi spesies dan sumberdaya genetik di Tahun 2020

Target	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
1 Destinasi	1 Destinasi	100	391.610.000	387.466.759	98,94

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian IKK berupa jumlah destinasi wisata alam *science, academic, voluntary, education* adalah sebesar 100%. Anggaran untuk mendukung IKK ini sebesar Rp. 391.610.000,- dan direalisasikan sebesar 98,94% atau Rp. 387.466.759,-.

Tabel 51.
Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK

Nama Output	Anggaran						Output	
	Pagu (Rp.)	Total Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Target	Realisasi		Total Progres (%)	Kegiatan
					Volume	%		
Alam yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan (Destinasi)	391.610.000	387.466.759	98,94	1 Destinasi	1 Destinasi	100	100	<ul style="list-style-type: none"> Kegiatan yang dilakukan adalah pelaksanaan pengadaan barang/ jasa dan kontrak pembangunan sarana prasarana wisata berupa kegiatan perencanaan kapal operasional wisata di TWAL 17 Pulau

Dari tabel diatas diketahui bahwa semua jenis kegiatan yang mendukung IKK jumlah destinasi wisata alam *science, academic, voluntary, education* telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat pada capaian output yaitu 100%. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan perbandingan realisasi keluaran (*output*) dan masukan (*input*) dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKK sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 52.
Analisis efisiensi pencapaian IKK

Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Rasio	Keterangan
jumlah destinasi wisata alam <i>science, academic, voluntary, education</i>	98,94	100	1,01	Efisien

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas, diketahui bahwa penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKK ini telah berjalan secara efisien. Hal ini dibuktikan dengan optimalnya masukan (*input*) berupa penggunaan anggaran yaitu 98,94% untuk mencapai keluaran (*output*) 100%. Dari pelaksanaan seluruh kegiatan, diperoleh keluaran (*output*) berupa pelaksanaan pengadaan barang/jasa dan kontrak pembangunan sarana prasarana wisata berupa kegiatan perencanaan kapal operasional wisata di TWAL 17 Pulau.

Dalam rangka meningkatkan perlindungan kawasan perairan TWAL 17 Pulau, Balai Besar KSDA NTT merencanakan pengadaan kapal operasional wisata. Namun dengan adanya realokasi anggaran untuk penanganan COVID19, maka kegiatan tersebut urung dilaksanakan dan hanya sampai pada tahap perencanaan. Hal yang sama terjadi pula dalam pembangunan *front office ticketing* di TWAL Teluk Maumere.

Adanya COVID19 juga telah mengakibatkan penutupan kawasan taman wisata alam yang kemudian dibuka kembali (reaktivasi) secara bertahap. Untuk reaktivasi kawasan, Balai Besar KSDA NTT memfasilitasi seluruh UPT KSDAE di NTT untuk turut menyampaikan informasi kesiapan masing-masing kawasan. Balai Besar KSDA NTT juga menyusun protokol kegiatan ekowisata dalam tatanan normal baru dan secara aktif menyampaikan kepada masyarakat melalui media sosial. Dari data yang dihimpun melalui aplikasi SIDAK, tercatat bahwa total kunjungan pada lima TWA adalah sebanyak 3.372 dengan rincian 3.211 pengunjung domestik dan 161 pengunjung mancanegara. Angka ini turun signifikan jika dibandingkan tahun 2019, bahkan merupakan data terendah dalam lima tahun terakhir. Penyebab utamanya adalah adanya pandemi COVID19 yang dalam rangka pencegahan penyebarannya maka kawasan TWA ditutup sejak 20 Maret dan kemudian dibuka kembali secara bertahap. Hingga akhir 2020, kawasan yang belum dibuka adalah TWA Camplong karena masih menunggu rekomendasi dari Bupati Kupang.

WEBINAR
Pengembangan Bioprospecting
Tumbuhan dan Satwa Liar
di Nusa Tenggara Timur

Keynote Speaker

Ir. Wiratno, M.Sc.
Direktur KSDAE

Narasumber

Prof. Ir. Fredrik L. Beni, M.Si, Ph.D.
Rektor UNDANA

Ir. Timbul Balubara, M.Si
Kepala BBKSDA NTT

Dr. Agus Triyanto, ST, M.Sc.
Wakil Dekan I FPIK UNDIP

Bambang Supartono, SP, M.Si, M.Pir
Kabag Humas PT. Sidomuncul

Free E-Sertifikat

zoom
Kamis, 26 November 2020
14.00 WIB/15.00 WITA
Registrasi
<https://bit.ly/33gYBMV>

081138104999 | @bbk_sda_ntt | @bbk_sda_ntt_official | @bbk_sda_ntt



Media promosi dan informasi lainnya yang disusun oleh Balai Besar KSDA NTT adalah leaflet taman wisata alam dan konservasi alam, buku *Ring of Beauty*, dan lomba foto konservasi kemerdekaan. Lomba foto konservasi kemerdekaan adalah inovasi Balai Besar KSDA NTT untuk menampung bakat netizen bidang fotografi alam dan menjadi usaha mempererat hubungan emosional dengan masyarakat. Animo masyarakat sungguh positif dengan jumlah partisipan sebanyak 61 orang.

Aspek pemanfaatan berkelanjutan lain yang dikembangkan oleh Balai Besar KSDA NTT adalah konservasi ex-situ yang dapat menunjang kegiatan pendidikan maupun wisata konservasi ex-situ. Balai Besar KSDA NTT memfasilitasi penangkaran rusa di Kantor Kejaksaan Tinggi NTT. Maksud dan tujuan dari Kegiatan Penangkaran Rusa (*Rusa timorensis*) di Kantor Kejaksaan Tinggi NTT adalah sebagai bentuk edukasi hukum terkait penangkaran Rusa di Provinsi NTT dan sekaligus ikon wisata di Provinsi NTT mengingat saat ini BBKSDA NTT sedang menggalakkan TWA Menipo sebagai ikon wisata baru di Pulau Timor dengan salah satu ikon satwa berupa Rusa Timor.

Pemanfaatan sumberdaya hayati kawasan konservasi dapat pula diwujudkan melalui pemanfaatan bioprospeksi. Dalam kehidupan masyarakat di sekitar kawasan, pemanfaatan ini berupa kearifan lokal atau etnobotani, diantaranya pemanfaatan sebagai sumber obat-obatan. Pemanfaatan sumberdaya hayati untuk kepentingan bioprospeksi berpotensi menjadi daya tarik wisata alam maupun wisata komunitas lokal di sekitar hutan konservasi.

Bioprospeksi ini menawarkan kesempatan untuk mengetahui mengenai informasi biologi dan kimia sebelum punahnya suatu spesies dan atau hilangnya pengetahuan tradisional. Penemuan ini dapat menjadi jalan bagi penemuan obat yang dapat meningkatkan kesehatan manusia. Bioprospeksi dapat memberikan peran terhadap upaya konservasi keanekaragaman hayati melalui manfaat lestari bagi industri bioteknologi modern dan manfaat bagi masyarakat tradisional yang tinggal di sekitar kawasan konservasi. Melalui pengembangan kegiatan bioprospecting diharapkan tumbuhan obat yang terdapat di hutan Indonesia terutama di kawasan hutan konservasi dapat berlangsung secara lestari dan berkelanjutan.

6 SASASARAN KEGIATAN TERSELENGGARANYA PEMBENTUKAN DAN PEMBINAAN PENGELOLAAN KAWASAN EKOSISTEM ESENSIAL

Sasaran kinerja yang ingin dicapai dalam terselenggaranya pembentukan dan pembinaan pengelolaan kawasan ekosistem esensial (KEE) di Tahun 2020 yaitu diukur dengan pencapaian kinerja berupa luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai kehati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja diperoleh 500 Hektar atau 150% dari target 333,203 Hektar. Capaian ini dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 53.

Perbandingan target dan realisasi kinerja kinerja luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai kehati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi di Tahun 2020

Target	Realisasi	%	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%
333,203 hektar	500 hektar	150	67.200.000	67.198.709	100

Dari tabel di atas, dapat diketahui bahwa capaian IKK berupa luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai kehati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi adalah sebesar 150%. Anggaran untuk mendukung IKK ini sebesar Rp. 67.200.000,- dan direalisasikan sebesar 100% atau Rp. 67.198.709,-.

Tabel 54.
Analisis program/ kegiatan yang mendukung pencapaian target IKK

Nama Output	Anggaran					Output		
	Pagu (Rp.)	Total Realisasi (Rp.)	Realisasi (%)	Target	Realisasi		Total Progres (%)	Kegiatan
					Volume	%		
Luas Kawasan sebagai penyedia Data, Informasi dan Rencana Konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi (Hektar)	67.200.000	67.198.709	100	333,203 hektar	500 hektar	100	150	<ul style="list-style-type: none"> identifikasi dan survey potensi kehati ekosistem di luar KK seluas 500 hektar di Pulau Longos (Kecamatan Masang Pacar dan Kecamatan Boleng, Kab. Manggarai Barat)

Dari tabel diatas diketahui bahwa semua jenis kegiatan yang mendukung IKK luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai kehati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi telah dilaksanakan dengan baik. Hal ini terlihat pada capaian output yaitu 150%. Analisis efisiensi penggunaan sumber daya dilakukan dengan perbandingan realisasi keluaran (*output*) dan masukan (*input*) dalam pelaksanaan kegiatan yang mendukung IKK sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 55.
Analisis efisiensi pencapaian IKK

Indikator Kinerja	Realisasi Anggaran (%)	Capaian Kinerja (%)	Rasio	Keterangan
luas kawasan yang diinventarisasi dan diverifikasi dengan nilai kehati tinggi secara partisipatif di luar kawasan konservasi	100	150	1,5	Efisien

Berdasarkan hasil analisis pada tabel diatas, diketahui bahwa penggunaan sumber daya dalam pencapaian IKK ini telah berjalan secara efisien. Hal ini dibuktikan dengan optimalnya masukan (input) berupa penggunaan anggaran yaitu 100% untuk mencapai keluaran (output) 150%. Dari pelaksanaan seluruh kegiatan, diperoleh keluaran (output) berupa identifikasi dan survey potensi kehati ekosistem di luar KK seluas 500 hektar di Pulau Longos (Kecamatan Masang Pacar dan Kecamatan Boleng, Kab. Manggarai Barat).

Selain di dalam hutan konservasi, terdapat area-area di luarnya yang ternyata bernilai konservasi penting. Beberapa jenis satwa dilindungi yang berhabitat di luar hutan konservasi di NTT antara lain kura-kura leher ular Rote dan juga biawak komodo. Sehubungan dengan hal ini maka pada tahun 2020, Balai Besar KSDA NTT melaksanakan kegiatan Identifikasi dan Survey Potensi Keanekaragaman Hayati Ekosistem Darat/ Perairan.

Salah satu wilayah di Pulau flores yang memiliki potensi flora dan fauna khas adalah Pulau Longos. Secara geografis Pulau Longos terletak di bagian utara Pulau Flores dan secara administrasi pemerintahan berada di Kecamatan Macang Pacar dan Kecamatan Boleng, Kab. Manggarai Barat dengan luas wilayah ± 500 Ha. Umumnya Pulau Longos merupakan perwakilan ekosistem hutan pantai yang dihuni oleh berbagai spesies flora seperti bakau (*Rhizophora. sp*) dan fauna seperti Komodo (*Varanus komodoensis*).

Pulau Longos merupakan wilayah di luar kawasan konservasi (*ex-situ*), salah satu kendala utama dalam upaya pengelolaan di luar kawasan konservasi (*ex situ*) karena kurangnya data dan informasi terkait potensi keanekaragaman hayati dan ekosistemnya sehingga diperlukan suatu survey dan identifikasi guna memperoleh data dan Informasi awal sebagai upaya mengetahui sebaran flora dan fauna didalamnya sehingga dapat dijadikan sebagai base data dan sebagai data penunjang lainnya yang komprehensif untuk tujuan pengelolaan kawasan *ex situ* lebih lanjut.

Realisasi Anggaran

Anggaran BBKSDA NTT digunakan untuk membiayai kegiatan pembangunan di bidang KSDAE yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal KSDAE melalui 3 Program baru yaitu : *Dukungan Manajemen; Pengelolaan Hutan Berkelanjutan; dan Kualitas Lingkungan Hidup*. Berdasarkan Surat Pengesahan DIPA Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2020 Nomor : SP DIPA- 029.05.2.239881/2020 tanggal 12 Desember 2019, jumlah alokasi anggaran BBKSDA NTT sebesar Rp. 32.213.973.000, selanjutnya mengalami revisi anggaran sebanyak 9(sembilan) kali.

Berikut Tabel Perubahan komposisi Anggaran BBKSDA NTT Tahun 2020 berdasarkan jenis belanja.

Tabel 56.
Kondisi DIPA BBKSDA NTT tahun 2020

Jenis Belanja	Semula	Menjadi	Revisi
51 Belanja Pegawai	17.179.000.000	15.779.000.000	1.400.000.000
52 Belanja Barang	12.602.573.000	11.193.985.000	1.408.588.000
53 Belanja Modal	2.432.400.000	126.610.000	2.305.790.000
Jumlah	32.213.973.000	27.099.595.000	5.114.378.000

Meskipun revisi anggaran selama tahun 2020 pada BBKSDA NTT cukup banyak tetapi tidak berdampak signifikan dalam pada pencapaian target-target kinerja dalam Perjanjian Kinerja. Hal ini dapat terlihat pada angka serapan anggaran dan capaian kinerja. Dari kondisi ini memberikan dampak yang positif dalam mendukung pembangunan kehutanan dan lingkungan hidup khususnya di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Sedangkan berdasarkan jenis belanja struktur anggaran BBKSDA NTT Tahun 2020 terbagi tiga yaitu belanja barang, belanja modal dan belanja pegawai. Sama seperti tahun-tahun sebelumnya bahwa dalam struktur anggaran tahun 2020 didominasi oleh belanja pegawai dengan persentase 58,2 % pagu anggaran merupakan belanja pegawai. Kemudian belanja barang dan belanja modal dengan persentase masing-masing 41,3% dan 0,5%. Sedangkan realisasi anggaran terbanyak pada belanja modal yaitu sebesar 98,11% dan yang terendah pada belanja pegawai sebesar 92,46%.

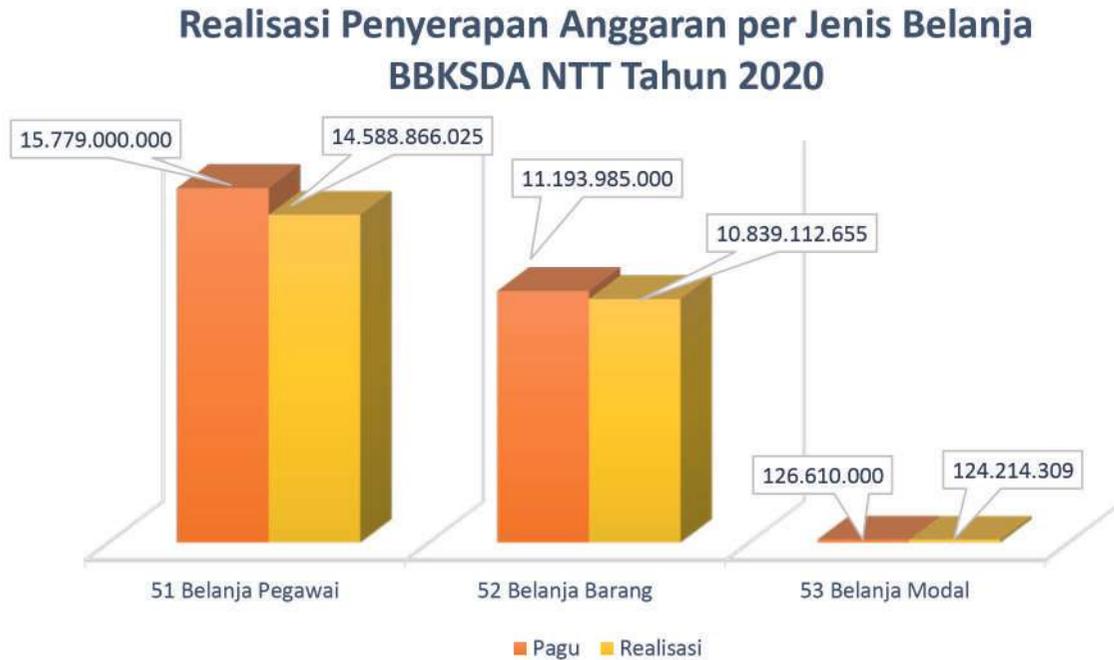
Berikut tersaji prosentase penyerapan anggaran menurut jenis belanja pada tabel di bawah ini:

Tabel 57.
Anggaran dan realisasi tahun 2020 berdasarkan Jenis Belanja

Jenis Belanja	Pagu	Realisasi	Prosentase
51 Belanja Pegawai	15.779.000.000	14.588.866.025	92.46 %
52 Belanja Barang	11.193.985.000	10.839.112.655	96.83 %
53 Belanja Modal	126.610.000	124.214.309	98.11 %

Dari tabel diatas terlihat bahwa 58,2% anggaran BBKSDA NTT dilakukan untuk membiayai belanja pegawai. Hal ini disebabkan pada komponen belanja pegawai digunakan untuk pembiayaan gaji pegawai BBKSDA NTT dan biaya operasional perkantoran mempunyai beban yang lebih besar dengan jumlah pegawai sebanyak 137 orang PNS, tenaga kontrak 65 orang dan 8 orang bakti rimbawan.

Gambaran realisasi penyerapan anggaran per jenis belanja dan sumber dana tahun 2020 disajikan dalam Grafik berikut:



Grafik 3.
Perbandingan pagu anggaran dan realisasi tahun 2020 berdasarkan jenis belanja

Sedangkan perbandingan persentase penyerapan anggaran antara tahun 2019 dan tahun 2020 dapat dilihat pada grafik berikut.

Tabel 58.
Perbandingan prosentase penyerapan anggaran tahun 2019 dan 2020

Jenis Belanja	2019		2020	
	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)	Pagu (Rp)	Realisasi (Rp)
Belanja Barang	11.916.249.000	11.410.803.698	15.779.000.000	14.588.866.025
Belanja Pegawai	16.625.776.000	16.447.013.065	11.193.985.000	10.839.112.655
Belanja Modal	823.660.000	821.988.000	126.610.000	124.214.309
Jumlah	29.365.685.000	28.679.804.763	27.099.595.000	25.552.192.989

Dari tabel diatas diatas diketahui bahwa tahun 2020 pada BBKSDA NTT mengalami pengurangan jumlah anggaran sebesar Rp. 2.266.090.000,-. Penurunan terbanyak terjadi pada anggaran jenis belanja pegawai. Akan tetapi pada belanja barang terjadi peningkatan. Untuk perbandingan anggaran dan realisasi sejak tahun 2019 – 2020 dapat dilihat pada grafik berikut.



Grafik 4.
Perbandingan pagu anggaran dan realisasi tahun 2019 – 2020

BAB. IV

Rencana Kerja Tahun 2021

A. STRATEGI DALAM Mendukung Prioritas Nasional

Penyusunan Rencana Kerja Tahun 2021 ini memperhatikan arah pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan dalam mendukung pembangunan nasional tahun 2021. Target pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan yang mendukung target pembangunan nasional pada tahun 2021 diantaranya:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) sebesar 68,96
2. Penurunan emisi GRK sebesar 24,14 %
3. Penurunan intensitas emisi GRK sebesar 26,37 %
4. Luas minimal kawasan berfungsi lindung (kumulatif) sebesar 65 juta hektar
5. Rehabilitasi lahan kritis di kawasan Ibu Kota Negara seluas 5.600 hektar

Pelepasan kawasan hutan untuk Ibu Kota Negara seluas 175.000 hektar Dukungan Kementerian LHK pada Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021 tersebut telah sejalan dengan Rencana Strategis KLHK 2020-2024 dimana ada empat Sasaran Strategis meliputi pilar ekologi, pilar ekonomi, pilar sosial tata kelola yang bertujuan untuk menyeimbangkan pembangunan nasional dan kelestarian lingkungan hidup dan hutan. Pencapaian target pembangunan bidang lingkungan hidup dan kehutanan terhadap target pembangunan nasional tahun 2021 dilaksanakan melalui empat Sasaran Strategis dan dua puluh Indikator Kinerja Utama (IKU). Adapun rumusan sasaran strategis untuk tingkat Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator

- yang didukung Direktorat Jenderal KSDAE yaitu (1) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values).
2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yang didukung Direktorat Jenderal KSDAE yaitu (1) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, (2) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK.
 3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yang didukung Direktorat Jenderal KSDAE yaitu (1) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat.
 4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yang didukung Direktorat Jenderal KSDAE yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (3) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (4) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Sasaran Pembangunan bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem, terbagi dalam 3 (tiga) program dengan 7 (tujuh) sasaran program seperti tercantum pada tabel berikut ini:

Tabel 59.
Program dan Sasaran Program bidang KSDAE

No	Program	Sasaran Program
1	Dukungan Manajemen	1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan bidang LHK yang akuntabel, responsif
2	Pengelolaan Hutan Berkelanjutan	2 Meningkatkan ruang perlindungan keanekaragaman hayati 3 Meningkatkan nilai ekspor pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar 4 Meningkatkan pengelolaan jasa lingkungan kawasan konservasi dan pemanfaatan TSL secara lestari 5 Meningkatkan ruang usaha bagi masyarakat di sekitar kawasan konservasi 6 Meningkatkan efektivitas pengelolaan hutan konservasi
3	Kualitas Lingkungan Hidup	7 Terselenggaranya inventarisasi dan verifikasi nilai keanekaragaman hayati tinggi diluar kawasan konservasi

Sasaran Program tersebut kemudian didukung dengan indikator kinerja program dengan target pada Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 60.
Target Indikator Kinerja Program Tahun 2021

No	Indikator Kinerja Program	Target 2021	Satuan
1	Nilai SAKIP pada Direktorat Jenderal KSDAE	78,5	Poin
2	Luas Kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati	13,8	Juta Hektar
3	Jumlah nilai ekspor pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran	2,05	Triliun Rupiah
4	Jumlah nilai PNBP dan pemanfaatan jasa lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL	210	Miliar Rupiah
5	Jumlah desa yang mendapatkan akses pemanfaatan Kawasan Konservasi	500	Desa
6	Nilai efektivitas pengelolaan Kawasan Konservasi pada 27 juta Ha Kawasan Konservasi	55	Poin
7	Luas kawasan yang terverifikasi sebagai Perlindungan Keanekaragaman Hayati di luar Kawasan Konservasi	10	Juta Hektar

B. DUKUNGAN DIREKTORAT JENDERAL KSDAE TERHADAP PRIORITAS NASIONAL

Pembangunan Nasional Tahun 2021 menetapkan 7 (tujuh) prioritas nasional yang merupakan fokus pembangunan secara nasional, dalam rangka mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Direktorat Jenderal KSDAE mendukung 3 (tiga) dari 7 (tujuh) prioritas nasional. Prioritas nasional tersebut antara lain Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan Berkualitas dan Berkeadilan (PN 1), Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan (PN 2), dan Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim (PN 6). Dalam rangka mendukung Prioritas Nasional, pada tahun 2021 Direktorat Jenderal KSDAE mengalokasikan sebesar Rp. 660,5 Miliar dari total alokasi anggaran sebesar Rp. 1,925 Trilyun pada tabel sebagai berikut:

Tabel 61.
Alokasi anggaran Ditjen KSDAE dalam mendukung Prioritas Nasional

Prioritas Nasional	Alokasi 2021 (Ribu Rupiah)
o1 Memperkuat ketahanan ekonomi untuk pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan	408.217.693
o2 Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan	14.650.000
o6 Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim	237.639.110
Grand Total	660.506.803

Pada Prioritas Nasional 1 Memperkuat Ketahanan Ekonomi untuk Pertumbuhan yang Berkualitas dan Berkeadilan. Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 1, yang terkait dengan Direktorat Jenderal KSDAE adalah:

- i. Meningkatnya daya dukung dan kualitas sumber daya ekonomi sebagai modalitas bagi pembangunan ekonomi yang berkelanjutan, yang diupayakan melalui peningkatan kuantitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi, dengan indikator luas minimal kawasan berfungsi lindung.
- ii. Meningkatnya nilai tambah, lapangan kerja, investasi, ekspor dan daya saing perekonomian yang diupayakan melalui peningkatan nilai tambah, lapangan kerja dan investasi di sektor riil dan industrialisasi, dengan indikator meningkatnya destinasi wisata alam berkelanjutan berbasis kawasan hutan prioritas.

Tabel 62.
Proyek Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan Program Prioritas yang mendukung

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Rincian Output	Total (Ribu Rupiah)
02-Peningkatan kualitas/ketahanan air untuk mendukung pertumbuhan ekonomi	01-Pemantapan kawasan berfungsi Lindung (Kumulatif)	01-Inventarisasi jasa lingkungan tinggi	001-Kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan Konservasi	8.280.876
			001-Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	37.263.618
		02-Perlindungan dan pengamanan kawasan Lindung Nasional secara partisipatif	001-Fasilitasi usaha ekonomi produktif di Kawasan Konservasi	74.609.196
			001-Rekomendasi kebijakan pemolaan, informasi konservasi alam, dan kerjasama	5.150.000
			002-Area terbuka (Opened Area) di Kawasan Konservasi	95.174.335
			002-Kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	9.839.617
			003-Ekosistem Esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	2.945.250
			006-Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	95.951.787

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Rincian Output	Total (Ribu Rupiah)
o6-Peningkatan nilai tambah, lapangan kerja, dan investasi di program sektor rill dan industrialisasi	o1-Peningkatan industri pengelolaan berbasis pertanian, kemaritiman dan non agro yang terintegrasi hulu hilir	o4-Pengembangan industri berbasis Kehutanan	o02-Entitas pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan	4.500.572
			o01-Destinas wisata alam prioritas yang dikembangkan	27.260.000
	o3-Peningkatan daya saing destinasi dan industri pengolahan pariwisata, termasuk pariwisata alam, yang didukung penguatan rantai pasok	o1-Pengembangan 25 Kawasan Hutan untuk mendukung destinasi pariwisata prioritas	o01-Entitas pemanfaatan jasa lingkungan non wisata alam yang dikembangkan	1.500.000
			o01-Pengembangan kapasitas kelompok masyarakat dalam rangka Ekowisata (wisata alam, save)	9.652.000
			o02-Destinas Wisata Alam Science, Academic, Voluntary, Education yang dikembangkan	8.927.790
			o03-Destinas wisata alam bahari	1.900.000
			o04-Pengembangan Wisata Alam	25.262.652
Grand Total				408.217.693

Prioritas Nasional 2 Mengembangkan Wilayah untuk Mengurangi Kesenjangan dan Menjamin Pemerataan Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 2 adalah menurunnya kesenjangan antar wilayah dengan mendorong transformasi dan akselerasi pembangunan wilayah Kawasan Timur Indonesia (KTI) yaitu Kalimantan, Nusa Tenggara, Sulawesi, Maluku, dan Papua dengan tetap menjaga momentum pertumbuhan di wilayah Jawa, Bali dan Sumatera. Selain itu harus mempercepat pemulihan dampak pandemi Covid-19 dengan melanjutkan transformasi sosial ekonomi, mengoptimalkan keunggulan kompetitif wilayah, dan meningkatkan pemerataan kualitas hidup antar wilayah. Prioritas pengembangan wilayah difokuskan pada perwujudan kerja sama investasi, perdagangan dan investasi sektor-sektor industri dan pariwisata wilayah timur, dengan tetap menjaga daya saing sektor perkebunan, perikanan, pertanian, serta potensi pertumbuhan wilayah barat.

Arah kebijakan dan strategi dalam prioritas ini yang terkait dengan Ditjen KSDAE adalah kebijakan mengenai pengembangan kawasan perkotaan, khususnya pemindahan Ibu Kota Negara (IKN) yang termasuk dalam program prioritas pembangunan wilayah Kalimantan, dalam hal ini Kalimantan Timur, yang dilaksanakan dengan strategi, yaitu: (1) penyiapan lahan Ibu Kota Negara dari kawasan hutan untuk pembangunan Ibu Kota

Negara seluas 175.000 hektar; (2) Pemulihan ekosistem pada kawasan konservasi Tahura Bukit Soeharto (yang menjadi/terkena lokasi Ibu Kota Negara) seluas 1.200 hektar.

Tabel 63.

Proyek Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan Program Prioritas yang mendukung Prioritas

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Rincian Output	Total (Rp)
04-Pembangunan Wilayah Kalimantan	03-Pengembangan Kawasan Perkotaan	01-Pengembangan Kota Besar, Kota Sedang, Kota Kecil	001-Area IKN yang dilakukan pemulihan ekosistem	8600.000
			003-Kawasan Ibu Kota Negara (IKN) dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	6.050.000
Grand Total				14.650.000

Prioritas Nasional 6 Membangun Lingkungan Hidup, Meningkatkan Ketahanan Bencana, dan Perubahan Iklim. Sasaran pembangunan dalam Prioritas Nasional (PN) 6, yang terkait dengan Ditjen KSDAE adalah Peningkatan kualitas lingkungan hidup, yang diupayakan dengan meningkatnya kualitas lingkungan meliputi:



- i. Pencegahan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) Luas area dengan nilai konservasi tinggi (high conservation value/HCV) yang Program Prioritas Kegiatan Prioritas Proyek Prioritas Nasional Rincian Output Total (Ribuan Rupiah) 04- 03- 01- 001-Area IKN 8.600.000 Pembangunan Pengembangan Pengembangan yang dilakukan Wilayah Kawasan Kota Besar, pemulihan Kalimantan Perkotaan Kota Sedang, ekosistem Kota Kecil 003-Kawasan Ibu 6.050.000 Kota Negara (IKN) Dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi Grand Total 14.650.000 12 8 dipertahankan secara nasional; (2) Luas kawasan konservasi yang dikelola seluas 27 juta hektar; (3) luas Kawasan konservasi perairan yang dikelola meningkat.
- ii. Pemulihan pencemaran dan kerusakan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan indikator yaitu: (1) jumlah spesies TSL terancam punah yang ditingkatkan populasinya.

Tabel 64.

Proyek Prioritas Nasional, Kegiatan Prioritas dan Program Prioritas yang mendukung Prioritas

Program Prioritas	Kegiatan Prioritas	Proyek Prioritas Nasional	Rincian Output	Total (Rp)
01-Peningkatan kualitas lingkungan hidup	01-Pencegahan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	07-Penyediaan data dan informasi keanekaragaman hayati dan ekosistem	002-Layanan Balai kliring keanekaragaman hayati	760.000
			001-Kebijakan inventarisasi dan verifikasi kawasan dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi di luar Kawasan Konservasi	1.120.075
	03-Pemulihan pencemaran dan kerusakan Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	04-Pemulihan habitat spesies terancam punah	002-Kebijakan Ekosistem Esensial yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	2.226.750
			001-Entitas perlindungan dan pengawetan keanekaragaman hayati yang di kembangkan	8.219.391
			001-Kawasan perlindungan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	73.535.414
	05-Peningkatan populasi spesies tumbuhan dan satwa liar terancam punah	001-Pusat konservasi satwa yang dibangun	142.147.400	
		002-Kebijakan perlindungan dan pemanfaatan SDG dan keanekaragaman hayati	9.630.080	
Grand Total				237.639.110









Landscape Jeti
Lokasi : TWA Menipo
BBKSDA NTT



I. PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2021

Pagu alokasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 didasarkan pada hasil Pertemuan Tiga Pihak (Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, Kementerian Keuangan dan Kementerian LH dan Kehutanan) sebesar **Rp.30.727.048.000,-**. Pagu alokasi tersebut merupakan bagian dari upaya pencapaian sasaran Program Konservasi Sumberdaya Alam dan Ekosistem, serta pencapaian indikator kinerja program yang dilaksanakan melalui enam kegiatan, yaitu: (1) Kegiatan Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam; (2) Kegiatan Pengelolaan Kawasan Konservasi; (3) Kegiatan Konservasi Spesies dan Genetik; (4) Kegiatan Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi; (5) Kegiatan Pembinaan Konservasi Kawasan Ekosistem Esensial; dan (6) Kegiatan Dukungan Manajemen;



Penyu Lekang/ *Lepidochelys olivacea*
Lokasi : Menipo
BBKSDA NTT

KAKA TUA JAMBUL KUNING
Lokasi:
Taman Wisata Alam Menipo
Dokumentasi oleh:
Abdon Amfoni

Tabel 71.

Indikator Kinerja Kegiatan Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur 2020-2024

No	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan
1	Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim	Meningkatnya ruang perlindungan keanekaragaman hayati	Luas kawasan yang terverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman hayati	65 Juta Ha	Luas kawasan sebagai penyedia data, informasi dan rencana konservasi Nasional di dalam Kawasan Konservasi	12.707 Ha
					Luas Kawasan sebagai penyedia data, informasi dan rencana konservasi Nasional di luar Kawasan Konservasi	12 Ha
					Luas area Kawasan Konservasi yang ditangani permasalahannya	130 Ha
2	Tercapainya optimalisasi manfaat ekonomi sumberdaya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung daya tampung lingkungan	Meningkatnya nilai ekspor pemanfaatan TSL	Jumlah nilai ekspor pemanfaatan TSL dari hasil penangkaran	10,5 triliun rupiah	Luas kawasan yang diverifikasi sebagai perlindungan keanekaragaman spesies dan genetik TSL	12 Ha
		Meningkatnya pengelolaan jasa lingkungan Kawasan Konservasi dan pemanfaatan TSL secara lestari	Jumlah nilai PNPB dari pemanfaatan jasa lingkungan Kawasan Konservasi dan TSL	700 Milyar Rupiah	Jumlah destinasi wisata alam yang disiapkan sebagai lokasi kunjungan	1 destinasi

No	Sasaran Strategis	Sasaran Program	Indikator Kinerja Program	Target Kinerja Program	Indikator Kinerja Kegiatan	Target Kinerja Kegiatan
3	Terjaganya keberadaan fungsi dan distribusi hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan	Meningkatnya ruang usaha bagi masyarakat di sekitar Kawasan Konservasi	Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif	4.500 Desa	Jumlah Desa yang mendapatkan akses pengelolaan Kawasan Konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif	130 Ha
4	Terselenggaranya tata kelola dan inovasi pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan yang adaptif	Meningkatnya efektivitas pengelolaan hutan konservasi	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	552 Unit KK	Jumlah Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	1 unit KK

Pengalokasian anggaran tidak lagi mengacu pada *money follow function*, tetapi telah bertransformasi menjadi *money follow program* yang artinya pengalokasian anggaran lebih ditekankan pada pencapaian keberhasilan program-program prioritas sehingga tidak perlu semua tugas dan fungsi (tusi) harus mendapatkan pengalokasian anggaran secara merata. Penganggaran berbasis Program Prioritas Nasional merupakan pendekatan dalam sistem perencanaan dan penganggaran yang menunjukkan alokasi penganggaran hanya mengacu pada pencapaian target prioritas yang dicanangkan oleh Presiden bersama Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional. Dengan penerapan pendekatan penganggaran berbasis prioritas nasional, maka titik berat pembiayaan sesuai lokasi target prioritas nasional di masing-masing Satuan Kerja.

Dalam penyusunan RKA dengan pendekatan penganggaran berbasis program prioritas nasional diperlukan Rencana Kerja yang matang sehingga kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dapat terpetakan dengan baik dan mendukung program prioritas nasional tersebut. Untuk tahun 2020, pagu alokasi anggaran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur sebesar **Rp.30.727.048.000,-** dengan rincian per kegiatan sebagaimana tabel berikut.

Tabel 72.
Rincian Pagu Anggaran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur 2021
per Kegiatan (x Rp.1.000,-)

No	KEGIATAN	BELANJA PEGAWAI	BELANJA OPERASIONAL	BELANJA NON OPERASIONAL	BELANJA MODAL	TOTAL	%
1	Pemolaan dan Informasi Konservasi Alam	-	-	566.694	-	566.694	1,8%
2	Pengelolaan Kawasan Konservasi	-	-	3.100.076	-	3.100.076	10,1%
3	Konservasi Spesies dan Genetik	-	-	1.081.360	-	1.081.360	3,5%
4	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi	-	-	2.893.640	120.000	3.013.640	9,8%
5	Pembinaan Konservasi Ekosistem Esensial	-	-	552.078	-	552.078	1,8%
6	Dukungan Manajemen	13.989.320	4.660.000	660.140	3.103.704	22.413.200	72,9%
Total		13.989.320	4.660.000	8.853.988	3.223.704	30.727.048	100%
%		45,5%	15,2%	28,8%	10,5%	100%	

Dari Pagu Alokasi Anggaran Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur tersebut, pada tahun anggaran 2021 ini seluruh Layanan Perkantoran (Belanja Pegawai dan Operasional) dikumpulkan di satu kegiatan yaitu Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, sehingga anggaran yang ada di satuan kerja adalah Anggaran Belanja Non Operasional. Hal ini turut mendukung arahan Presiden RI tentang proses penganggaran *money follow program* (prioritas nasional) pada RKP tahun 2020.

Tabel 73.
Pagu Alokasi Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 per Jenis Belanja
& Sumber Dana(x Rp.1.000,-)

Sumber Dana	Belanja Pegawai Operasional	Belanja Barang		Belanja Modal		Jumlah	%
		Non Operasional	Operasional	Non Operasional			
a RM (Rupiah Murni)	13.989.320	4.660	9.937.328	-	3.223.740	27.155.048	89,69
b RMP (Rupiah Murni Pendamping)	-	-	-	-	-	-	0
c PNB (Penerimaan Negara Bukan Pajak)	-	-	3.122.000	-	-	3.122.000	10,31

Sumber Dana	Belanja Pegawai Operasional	Belanja Barang		Belanja Modal		Jumlah	%
		Non Operasional	Operasional	Non Operasional			
d HLN (Hibah Luar Negeri)	-	-	-	-	-	-	0
e SBSN (Surat Berharga Syariah Negara)	-	-	-	-	-	-	0
TOTAL	13.989.320	4.660	13.059.328	-	3.223.740	30.277.048	100,00
%	46,20	0,02	43,13	0,00	10,65	100,00	

Belanja Non Operasional senilai Rp. 13.059.328,- atau sebesar 43.13% dari total pagu alokasi digunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan teknis yang bersifat prioritas nasional dan kegiatan lainnya sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021.

II. PENGARUSTAMAAN

Pengarusutamaan (mainstreaming) dalam RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan sebagai bentuk pendekatan inovatif yang akan menjadi katalis pembangunan untuk menuju masyarakat sejahtera dan berkeadilan. Di dalam Rencana Strategis (Renstra) KLHK 2020-2024 ini terdapat 4 (empat) pengarusutamaan (mainstreaming) yang memiliki peran vital dalam pembangunan nasional dengan tetap memperhatikan kelestarian lingkungan serta partisipasi dari masyarakat, dengan rinciannya sebagai berikut: 1. Pengarusutamaan Kesetaraan Gender, Pengarusutamaan Gender (PUG) merupakan strategi untuk mengintegrasikan perspektif gender ke dalam pembangunan, mulai dari penyusunan kebijakan, perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta pemantauan dan evaluasi. Tujuan dari PUG adalah menjamin terciptanya akses, partisipasi, kontrol, dan manfaat pembangunan bidang KSDAE untuk masyarakat secara seimbang antara perempuan dan laki-laki. Arah kebijakan PUG adalah perwujudan kesetaraan gender, yang diupayakan dengan strategi yaitu: (1) mengurangi kesenjangan antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses dan mengontrol sumber daya, salah satu contoh yang dilakukan Ditjen KSDAE adalah unit pelaksana teknis lingkup Ditjen KSDAE bekerja sama dengan kelompok petani hutan yang mayoritas perempuan dalam pemberian akses kemitraan konservasi untuk pemanfaatan HHBK; (2) penyediaan dan pemanfaatan data terpilah serta sarana dan prasarana yang responsif gender, dengan melaporkan jumlah masyarakat per jenis kelamin yang terlibat dalam pemberdayaan dan pembangunan lingkup Ditjen KSDAE serta memberikan sarana dan prasarana ramah ibu seperti ruang laktasi di kantor, ramah disabilitas seperti penyediaan akses masuk dan keluar kantor bagi disabilitas; (3) penguatan pemahaman dan komitmen pemangku kepentingan, koordinasi dalam pelaksanaan PUG, baik pelaksanaan perencanaan dan penganggaran yang responsif gender (PRG) maupun penguatan kebijakan dan regulasi yang responsif gender, Ditjen KSDAE rutin membuat Gender Budget Statement (GBS) pada setiap penyusunan anggaran serta melakukan tagging output yang responsif gender



yaitu output terkait layanan dukungan manajemen dan output kemitraan konservasi dan peningkatan usaha ekonomi produktif bagi masyarakat sekitar kawasan konservasi; dan (4) berpartisipasi di seluruh proses pembangunan dan pengambilan keputusan serta dalam memperoleh manfaat pembangunan, Ditjen KSDAE selalu mengikutsertakan perempuan dalam kegiatan lapangan maupun proses seleksi jabatan, perempuan sangat berperan dalam pengambilan keputusan dari tingkat Direktur sampai ke tingkat staf, dari tingkat Pusat sampai ke tingkat Daerah. 2. Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan, Pengarusutamaan Pembangunan Berkelanjutan merupakan strategi pembangunan yang dapat memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan generasi masa depan, dengan mengedepankan kesejahteraan sosial, ekonomi dan lingkungan. Pembangunan berkelanjutan mencakup 17 tujuan yang saling terkait termasuk kerentanan bencana dan perubahan iklim, serta tata kelola pemerintahan yang baik. RPJMN Tahun 2020-2024 telah mengarusutamakan 118 target Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB/SDGs), dengan Ditjen KSDAE berkontribusi pada Tujuan 15 Ekosistem Daratan dalam indikator perlindungan keanekaragaman hayati dan kawasan konservasi secara berkelanjutan, dan Tujuan 8 Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi dalam indikator peningkatan ekspor 134 tumbuhan dan satwa liar serta pendapatan/multiplier effect dari pemanfaatan jasa lingkungan antara lain wisata alam. 3. Pengarusutamaan Modal Sosial dan Budaya, Pengarusutamaan modal sosial budaya merupakan internalisasi nilai dan pendayagunaan kekayaan budaya untuk mendukung seluruh proses pembangunan. Pengetahuan tradisional (local knowledge), kearifan lokal (local wisdom), pranata sosial di masyarakat sebagai penjelmaan nilai-nilai sosial budaya komunitas harus menjadi pertimbangan dalam proses perencanaan serta penyusunan

Air Terjun
Lokasi : TWA Ruteng
BBKSDA NTT

kebijakan dan program pembangunan nasional. Pengarusutamaan sosial budaya ini bertujuan dan berorientasi pada penghargaan atas khazanah budaya masyarakat, sekaligus upaya pelestarian dan pemajuan kebudayaan bangsa. Ditjen KSDAE mendorong peningkatan target kemitraan konservasi dan pemberdayaan masyarakat pada 5 tahun mendatang. 4. Pengarusutamaan Transformasi Digital. Pengarusutamaan transformasi digital merupakan upaya untuk mengoptimalkan peranan teknologi digital dalam meningkatkan daya saing bangsa dan sebagai salah satu sumber pertumbuhan ekonomi Indonesia ke depan. Strategi pengarusutamaan transformasi digital terdiri dari aspek pemantapan ekosistem (supply), pemanfaatan (demand), dan pengelolaan big data. Ditjen KSDAE mendorong situation room (sitroom) di pusat dan seluruh UPT, di samping itu pengelolaan Balai Kliring Keanekaragaman Hayati menjadi tanggung jawab Ditjen KSDAE 5 tahun mendatang.



BAB. V

Penutup

Rencana Kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 merupakan pedoman dan acuan dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE tahun 2021 di seluruh unit kerja lingkup Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur. Rencana kerja tahunan ini merupakan penjabaran tahun pertama dari Rencana Strategis Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2020-2024. Rencana kerja ini merupakan pedoman dan acuan dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Tahun 2020 bagi seluruh unit kerja di lingkup Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur. Namun demikian, apabila sekiranya diperlukan penyempurnaan dikarenakan adanya penyesuaian-penyesuaian dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2021 serta Rancangan APBN Tahun 2020, maka

Biawak Komodo/
Varanus komodoensis
BBKSDA NTT



akan dilakukan penyempurnaan setelah adanya hasil pembahasan dengan lembaga legislatif. Rencana Kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 juga digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen Penetapan Kinerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2021.

Perlu diperhatikan bahwa Rencana Kerja Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 disusun dengan mengacu pada prioritas pembangunan nasional dan pagu alokasi serta memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan lingkungan hidup dan kehutanan bidang KSDAE. Visi, misi, tujuan, sasaran strategis, arah kebijakan, program, kegiatan beserta seluruh indikator kinerja yang merupakan ukuran keberhasilan pencapaian kinerjanya, perlu mendapat perhatian secara serius agar mandat yang diberikan oleh negara dan masyarakat dapat dicapai secara optimal.

LAMPIRAN RENCANA KERJA BALAI BESAR KSDA NTT TAHUN 2021

RENCANA KERJA
TAHUN ANGGARAN 2021
BALAI BESAR KONSERVASI
SUMBER DAYA ALAM
NUSA TENGGARA TIMUR

A. OUTPUT LAYANAN DUKUNGAN MANAJEMEN SATKER (5419.EAC.970) TAHUN ANGGARAN 2021

JUMLAH ANGGARAN : Rp 660.140.000,00

I. GAMBARAN UMUM

Sebagai wujud implementasi dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor: 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang mengamanatkan bahwa dalam menyusun anggaran Kementerian Negara/Lembaga digunakan 3 (tiga) pendekatan penganggaran, yaitu:

- a. Penyatuan anggaran rutin dan pembangunan dalam format *I-account (unified budget)*.
- b. Pendekatan penyusunan pengeluaran jangka menengah - KPJM (*medium term expenditure framework*).
- c. Pendekatan penyusunan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*).

Pembaharuan sistem penganggaran diharapkan dapat mewujudkan pelaksanaan anggaran yang lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel. Sesuai dengan PP Nomor: 90 Tahun 2010 Pasal 5 ayat (3), dalam penganggaran berbasis kinerja (PBK) diperlukan indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. Indikator kinerja merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur Kinerja. Standar biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-K/L. Evaluasi Kinerja

merupakan penilaian terhadap capaian Sasaran Kinerja, konsistensi perencanaan dan implementasi, serta realisasi penyerapan anggaran.

Bahan perumusan strategi dan kebijakan pembangunan serta bahan perencanaan dan evaluasi kinerja dapat bersumber pada Statistik Ditjen dan Statistik Setditjen KSDAE. Untuk dapat menghasilkan data yang berkualitas, maka seluruh tahapan mulai dari pengumpulan data, pengolahan dan penyajian harus memenuhi kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, sebab mutu data sangat dipengaruhi oleh prosedur/tatacara pengumpulan data, kelengkapan dokumen, konsistensi dalam pelaporan serta jadwal pelaporan yang tepat.

Saat ini masih banyak instansi pemerintah bekerja tanpa ukuran dan target kinerja yang jelas, akibat ketiadaan ukuran kinerja dan target-targetnya pada awal periode pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu diperlukan suatu penetapan kinerja yang merupakan komitmen rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh instansi pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu output dalam melaksanakan evaluasi kinerja yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan dokumen perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagai sub sistem pembangunan kehutanan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam perencanaan pembangunan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Rencana Strategis dan Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rencana tersebut setiap tahunnya dijabarkan dalam bentuk RKA-K/L yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan dari setiap sasaran dan tujuan yang akan dicapai sebagaimana termuat pada rencana strategis bidang KSDAE.

Perlu dilakukan koordinasi program dan anggaran, data dan informasi serta evaluasi Bidang KSDAE sebagai langkah untuk mencapai keselarasan dan keterpaduan dalam penyusunan rencana, program dan kegiatan Pembangunan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di pusat dan daerah.

Keterkaitan Program dengan Kegiatan :

Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari Ditjen KSDAE bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Satker adalah reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE yang pada akhirnya dapat berperan dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penyusunan kegiatan Layanan Dukungan Manajemen Satker Ditjen KSDAE didasarkan atas tugas dan fungsi Sekretariat yang meliputi Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Perundang-Undangan, Kerjasama Teknis dan lainnya.

II. PENERIMA MANFAAT

1. Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya seluruh pegawai Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur.
2. Masyarakat umum yang ingin mengetahui informasi mengenai Pembangunan Kehutanan Bidang KSDAE.
3. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak dibidang kehutanan pada umumnya dan konservasi pada khususnya.

III. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Metoda pelaksanaan output Nilai SAKIP (Sistem Akuntansi Kinerja Instansi Pemerintah) Ditjen KSDAE 78 Poin dilaksanakan pada Bagian Tata Usaha Sub Bagian Program dan Kerjasama, Sub Bagian Data, Evlap dan Humas dan Sub Bagian Umum. Kegiatan yang direncanakan yaitu :

- a. Penyusunan rencana program dan penyusunan rencana anggaran terdiri dari :
 - Penyusunan rencana program dan anggaran tahun 2021
 - Koordinasi, konsultasi dalam rangka program dan kerja sama
- b. Pelaksanaan pemantauan dan evaluasi terdiri dari :
 - Penyusunan laporan pemantauan kegiatan dan anggaran
 - Penyelenggaraan SPIP
 - Penyusunan laporan kinerja
 - Penyusunan laporan capaian renja
 - Pengelolaan Data Informasi dan Kehumasan
- c. Pengelolaan keuangan terdiri dari :
 - Pengelolaan PNBP wisata alam
 - Penyusunan laporan keuangan
- d. Pengelolaan kepegawaian terdiri dari :
 - Peningkatan Kapasitas SDM
 - Pengelolaan data kepegawaian
 - Supervisi dan uji petik DUPAK
 - Workshop peningkatan kapasitas SDM

- e. Pelayanan umum, pelayanan rumah tangga dan perlengkapan terdiri dari :
- Penatausahaan BMN
 - Perjalanan pimpinan
2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan akan dilaksanakan dengan tata waktu sebagai berikut :

Kode	Aktivitas	Bulan pada tahun 2021											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
o51	Penyusunan Rencana Program dan Penyusunan Rencana Anggaran												
o52	Pelaksanaan Pemantauan dan Evaluasi												
o53	Pengelolaan Keuangan												
o54	Pengelolaan Kepegawaian												
o55	Pelayanan umum dan Perlengkapan												

IV. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Kegiatan ini memerlukan biaya dengan sumber dana anggaran DIPA BA 29 Tahun 2020 dengan rincian sebagaimana pada berikut :

Tabel 74.
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kerangka Acuan Kerja/ *Term of Reference Output*
Layanan Dukungan Manajemen Satker (5419.EAC.970)

Kode	Uraian	Vol.	Sat.	Harga Sat.	Jumlah	SD
5419.EAC.970	Layanan Dukungan Manajemen Satker	1	LAYANAN		660.140.000	
o51	Penyusunan Rencana Program dan Anggaran				172.740.000	
A	Penyusunan RKAKL dan Renja tahun 2022 (2 DOKUMEN, RKAKL dan RENJA)				172.740.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				172.740.000	RM
	• Pengumpulan data bahan di BKW I	15	OT	2.500.000	37.500.000	
	• Pengumpulan data bahan di BKW II	12	OT	5.000.000	60.000.000	
	• Perjalanan kegiatan pembahasan program, anggaran dan kerja sama	9	OT	8.360.000	75.240.000	
o52	Pelaksanaan Evaluasi dan Kehumasan				247.300.000	

Kode	Uraian	Vol.	Sat.	Harga Sat.	Jumlah	SD
A	Penyusunan laporan pemantauan kegiatan dan anggaran (DOKUMEN LKJ, LCR, STATISTIK, SPIP)				148.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				148.000.000	RM
	> BALAI BESAR				22.000.000	
	• Perjalanan ke Bidang KSDA Wilayah I	2	OT	3.000.000	6.000.000	
	• Perjalanan ke Bidang KSDA Wilayah II	1	OT	5.000.000	5.000.000	
	• Perjalanan ke Seksi Konservasi Wilayah I/ Resort	1	OT	3.000.000	3.000.000	
	• Perjalanan ke Seksi Konservasi Wilayah II/ Resort	1	OT	1.000.000	1.000.000	
	• Perjalanan ke Seksi Konservasi Wilayah III/ Resort	1	OT	4.000.000	4.000.000	
	• Perjalanan ke Seksi Konservasi Wilayah IV/ Resort	1	OT	3.000.000	3.000.000	
	>> BKW I			0	24.000.000	
	• Perjalanan BKW I ke balai	1	OT	3.000.000	3.000.000	
	• Perjalanan BKW I ke Seksi/kawasan	1	OT	2.500.000	2.500.000	
	• Perjalanan SKW I ke balai	1	OT	2.500.000	2.500.000	
	• Perjalanan SKW I ke Resort/kawasan	1	OT	2.000.000	2.000.000	
	• Perjalanan SKW II ke resort/kawasan	1	OT	2.000.000	2.000.000	
	• Perjalanan SKW I dan II ke bidang	2	OT	1.000.000	2.000.000	
	• Perjalanan koordinasi RKW ke Polsek/ Babinsa/Tokoh Adat [10 resor x 2 kali]	20	OT	500.000	10.000.000	
	>> BKW II			0	71.000.000	
	• Perjalanan BKW II ke balai	2	OT	6.000.000	12.000.000	
	• Perjalanan BKW II ke Seksi/kawasan	1	OT	5.000.000	5.000.000	
	• Perjalanan BKW II ke Seksi/kawasan	1	OT	2.500.000	2.500.000	
	• Perjalanan BKW II ke Seksi/kawasan	1	OT	1.500.000	1.500.000	
	• Perjalanan SKW III ke balai	1	OT	5.000.000	5.000.000	
	• Perjalanan SKW III ke bidang	2	OT	2.000.000	4.000.000	
	• Perjalanan SKW III ke Resort/kawasan (4 Kawasan)	4	OT	2.000.000	8.000.000	

Kode	Uraian	Vol.	Sat.	Harga Sat.	Jumlah	SD
	• Perjalananan SKW IV ke balai	2	OT	3.000.000	6.000.000	
	• Perjalananan SKW IV ke bidang	2	OT	3.000.000	6.000.000	
	• Perjalananan SKW IV ke resort/kawasan	2	OT	4.000.000	8.000.000	
	• Perjalananan SKW IV ke resort/kawasan (2 Kawasan)	2	OT	1.000.000	2.000.000	
	• Perjalananan koordinasi RKW ke Polsek/ Babinsa/ Tokoh Adat [11 resor x 2 kali]	22	OT	500.000	11.000.000	
	>> MONITORING DAN EVALUASI KEGIATAN			0	31.000.000	
	• Perjalananan ke Wilayah Kerja Pulau Timor	2	OT	3.000.000	6.000.000	
	• Perjalananan ke Wilayah Kerja Pulau Flores dan Alor	2	OT	5.000.000	10.000.000	
	• Perjalananan dalam rangka rapat evaluasi kinerja	2	OT	7.500.000	15.000.000	
B	Penyelenggaraan SPIP				24.000.000	
521211	Belanja Bahan				3.000.000	RM
	• Penggandaan materi/laporan	60	EKSPL	50.000	3.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				21.000.000	RM
	• Perjalanan ke bidang KSDA Wilayah I	4	OT	2.750.000	11.000.000	
	• Perjalanan ke bidang KSDA Wilayah II	2	OT	5.000.000	10.000.000	
C	Penyusunan Laporan Kinerja dan Capaian Renja Tahun 2020				3.000.000	
521211	Belanja Bahan				3.000.000	RM
	• Penggandaan bahan/laporan kinerja	2500	LEMBAR	400	1.000.000	
	• Pendjilidan laporan kinerja	10	EKSPL	50.000	500.000	
	• Penggandaan bahan/laporan renja	2500	LEMBAR	400	1.000.000	
	• Pendjilidan laporan renja	10	EKSPL	50.000	500.000	
D	Pengelolaan Data Informasi dan Kehumasan				11.300.000	
521211	Belanja Bahan				11.300.000	RM
	• Penggandaan buku statistik 2020	2000	LEMBAR	400	800.000	
	• Pendjilidan buku statistik 2020	10	EKSPL	50.000	500.000	
	• Penyelenggaraan publikasi dan kehumasan	20	KEG	500.000	10.000.000	

Kode	Uraian	Vol.	Sat.	Harga Sat.	Jumlah	SD
E	Perjalanan Ketatusahaan				61.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				61.000.000	RM
	• Perjalanan koordinasi ke UPT	4	OT	5.000.000	20.000.000	
	• Perjalanan ketatusahaan	4	OT	8.000.000	32.000.000	
	• Perjalanan duta konservasi di dalam Kabupaten	2	OT	500.000	1.000.000	
	• Perjalanan duta konservasi antar Kabupaten	1	OT	2.000.000	2.000.000	
	• Perjalanan duta konservasi ke Provinsi	1	OT	6.000.000	6.000.000	
053	Pengelolaan Keuangan, Umum, dan Perlengkapan				168.850.000	
A	Pengelolaan PNBP (DOKUMEN LAP. KEUANGAN SEMESTER I DAN II, BMN DAN PERSEDIAAN SEMESTER I DAN II)				16.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				16.000.000	RM
	• Pembinaan pengelolaan PNBP di TWA Ruteng	1	OT	5.000.000	5.000.000	
	• Pembinaan pengelolaan PNBP di TWAL 17 Pulau	1	OT	4.500.000	4.500.000	
	• Pembinaan pengelolaan PNBP di TWAL Gugus Pulau Teluk Maumere	1	OT	4.000.000	4.000.000	
	• Pembinaan pengelolaan PNBP di TWA Camplong dan TWA Menipo	1	OT	2.500.000	2.500.000	
B	Penyusunan Laporan Keuangan				33.850.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				33.850.000	RM
	• Perjalanan ke BKW I	1	OT	3.000.000	3.000.000	
	• Perjalanan ke BKW II	1	OT	5.000.000	5.000.000	
	• Perjalanan ke SKW I	1	OT	3.000.000	3.000.000	
	• Perjalanan ke SKW II	1	OT	850.000	850.000	
	• Perjalanan ke SKW III	1	OT	3.500.000	3.500.000	
	• Perjalanan ke SKW IV	1	OT	3.500.000	3.500.000	
	• Perjalanan rekonsiliasi ke pusat/provinsi lain	2	OT	7.500.000	15.000.000	
C	Perjalanan pimpinan				89.000.000	

Kode	Uraian	Vol.	Sat.	Harga Sat.	Jumlah	SD
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				89.000.000	RM
	• Perjalanan pimpinan dalam rangka konsultasi/koordinasi ke pusat dan provinsi lain	4	OT	10.000.000	40.000.000	
	• Perjalanan pimpinan dalam rangka koordinasi ke UPT (Koordinator UPT)	3	OT	6.000.000	18.000.000	
	• Perjalanan pimpinan dalam rangka supervisi SMART RBM ke Timor	3	OT	3.000.000	9.000.000	
	• Perjalanan pimpinan dalam rangka supervisi SMART RBM/Patrol Gabungan ke Flores/Alor	2	OT	6.000.000	12.000.000	
	• Perjalanan pimpinan dalam rangka supervisi SMART RBM ke Rote	2	OT	3.000.000	6.000.000	
	• Perjalanan dinas melaksanakan tugas ke wilayah kerja	2	OT	2.000.000	4.000.000	
D	Pengurusan HDNO rumah dinas				30.000.000	
522191	Belanja Jasa Lainnya				30.000.000	RM
	• Pembuatan desain rumah dinas dan pengurusan IMB	1	PAKET	20.000.000	20.000.000	
	• Pengurusan sertifikat tanah	1	PAKET	10.000.000	10.000.000	
054	Pengelolaan Kepegawaian				71.250.000	
A	Peningkatan Kapasitas SDM (DOKUMEN SIMPEG)				37.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				37.000.000	RM
	• Perjalanan pegawai dalam rangka mengikuti pelatihan/workshop/seminar/rapat/sosialisasi di pusat/provinsi lain	5	OT	7.400.000	37.000.000	
B	Pengelolaan Data Kepegawaian				23.250.000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat				5.000.000	RM
	• Pengiriman berkas/dokumen kepegawaian	1	TAHUN	5.000.000	5.000.000	
521211	Belanja Bahan				4.250.000	RM
	• Penggandaan berkas kepegawaian	1	TAHUN	4.250.000	4.250.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				14.000.000	RM

Kode	Uraian	Vol.	Sat.	Harga Sat.	Jumlah	SD
	• Perjalanan dalam rangka pengurusan berkas kepegawaian	2	OT	7.000.000	14.000.000	
C	Pendampingan Administrasi Kepegawaian				11.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				11.000.000	RM
	• Perjalanan ke SKW I dalam rangka Pendampingan Administrasi Kepegawaian	1	OT	3.000.000	3.000.000	
	• Perjalanan ke SKW III dalam rangka Pendampingan Administrasi Kepegawaian	1	OT	4.000.000	4.000.000	
	• Perjalan ke SKW IV dalam rangka Pendampingan Administrasi Kepegawaian	1	OT	4.000.000	4.000.000	

V. TARGET CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Tercapainya Layanan dukungan manajemen satker pada tahun 2021.

B. OUTPUT LAYANAN SARANA DAN PRASARANA INTERNAL (5419.EAD DAN 5419.EAE) TAHUN ANGGARAN 2021

JUMLAH ANGGARAN : Rp 3.103.740.000,00

I. GAMBARAN UMUM

Sebagai wujud implementasi dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor: 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/ Lembaga, yang mengamanatkan bahwa dalam menyusun anggaran Kementerian Negara/ Lembaga digunakan 3 (tiga) pendekatan penganggaran, yaitu :

1. Penyatuan anggaran rutin dan pembangunan dalam format *I-account (unified budget)*;
2. Pendekatan penyusunan pengeluaran jangka menengah - KPJM (*medium term expenditure framework*);
3. Pendekatan penyusunan penganggaran berbasis kinerja (*performance based budgeting*).

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagai sub sistem pembangunan kehutanan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam perencanaan pembangunannya mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah/Rencana Strategis dan Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rencana tersebut setiap tahunnya dijabarkan dalam bentuk RKA-K/L yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan dari setiap sasaran dan tujuan yang akan dicapai sebagaimana termuat pada rencana strategis bidang KSDAE.

Terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2020 lingkup Ditjen KSDAE dalam bingkai Rencana Strategis Kementerian Kehutanan tahun 2020 – 2024, perlu dilakukan koordinasi program dan anggaran, data dan informasi serta evaluasi Bidang KSDAE sebagai langkah untuk mencapai keselarasan dan keterpaduan dalam penyusunan rencana, program dan kegiatan Pembangunan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di pusat dan daerah.

Keterkaitan Program dengan Kegiatan:

Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari Ditjen KSDAE bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya adalah terwujudnya reformasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE yang pada akhirnya dapat berperan dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penyusunan kegiatan Dukungan manajemen dan Pelaksanaan Tugas Lainnya Ditjen KSDAE didasarkan atas tugas dan fungsi Sekretariat yang meliputi Program dan Anggaran, Data dan Informasi, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Kepegawaian, Organisasi dan Tata laksana, Perundang-Undangan, Kerjasama Teknis dan lainnya. Dalam rangka mendukung efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE maka diperlukan pembangunan gedung dan bangunan sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja para pegawainya.

Untuk meningkatkan kinerja pelayanan pemerintah khususnya dibidang Konservasi sumber Daya Alam dan Ekosistem, maka dibutuhkan sarana prasarana yang mendukung demi kelancaran terhadap proses pelayanan terhadap masyarakat. Oleh sebab itu kebutuhan akan gedung yang nyaman untuk melaksanakan aktivitas pelayanan kepada masyarakat sangat diperlukan demi menunjang kinerja pemerintah.

Fasilitas dan peralatan elektronik perkantoran Kantor diperlukan untuk mendukung kinerja pemerintah dalam hal ini kantor Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur khususnya dalam penyelenggaraan pengelolaan KSA dan KPA serta pelayanan masyarakat.

II. PENERIMA MANFAAT

Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur, yaitu tercapaian target kinerja berupa ketersediaan fasilitas dan peralatan elektronik perkantoran.

III. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

Metoda pelaksanaan dilaksanakan oleh penyedia (pihak ke tiga) dengan mekanisme pengadaan barang dan jasa. Kegiatan yang akan dilakukan yaitu :

1. Pengadaan perangkat pengolah data dan komunikasi terdiri dari Peralatan elektronik perkantoran (*pricelist* terlampir).
2. Pengadaan peralatan fasilitas perkantoran terdiri dari Meubeler kantor dan peralatan elektronik (*pricelist* terlampir) serta Honorarium Tenaga Kontrak (PPNPN).

IV. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Kegiatan ini memerlukan biaya dengan sumber dana anggaran DIPA BA 29 Tahun 2021 dengan rincian sebagaimana pada :

Tabel 76.
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kerangka Acuan Kerja/Term of Reference Output
Layanan Sarana Dan Prasarana Internal (5419.EAC)

KODE	URAIAN	VOL.	SAT.	HARGA SAT.	JUMLAH	SD
5419.EAD.001	Layanan Sarana Internal	8	UNIT		506.505.000	5419.EAD.001
996	Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi				72.490.000	996
A	Peralatan elektronik perkantoran				72.490.000	A
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				72.490.000	532111
	• Laptop	5	UNIT	9.800.000	49.000.000	
	• Scanner	2	UNIT	8.500.000	17.000.000	
	• Printer Portable	1	UNIT	6.490.000	6.490.000	
997	Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran				434.015.000	997
A	Meubeler kantor				434.015.000	A
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				434.015.000	533111
	• Pembangunan panggung utama HKAN 2021	1	KEG	434.015.000	434.015.000	
5419.EAE	Layanan Prasarana Internal	1	UNIT		2.597.235.000	
5419.EAE.001	Layanan Prasarana Internal	1	UNIT		2.597.235.000	
998	Pembangunan dan Renovasi Gedung dan Bangunan				2.597.235.000	
A	Sarana dan Prasarana Kantor/Gedung				2.597.235.000	

KODE	URAIAN	VOL.	SAT.	HARGA SAT.	JUMLAH	SD
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				2.465.985.000	
	• Pembangunan panggung utama HKAN 2021	1	KEG	192.986.000	192.986.000	

V. TARGET CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Tercapainya Layanan internal pada tahun 2021.

C. OUTPUT LAYANAN PERKANTORAN (5419.EAA.994) TAHUN ANGGARAN 2021

JUMLAH ANGGARAN : Rp 18.649.320.000,00

I. GAMBARAN UMUM

Sebagai wujud implementasi dari UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 90 Tahun 2010 tentang Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga, yang mengamanatkan bahwa dalam menyusun anggaran Kementerian Negara/Lembaga digunakan 3 (tiga) pendekatan penganggaran, yaitu:

1. Penyatuan anggaran rutin dan pembangunan dalam foAat *I-account (unified budget)*.
2. Pendekatan penyusunan pengeluaran jangka menengah - KPJM (*medium teA expenditure framework*).
3. Pendekatan penyusunan penganggaran berbasis kinerja (*perfoAance based budgeting*).

Pembaharuan sistem penganggaran ini diharapkan dapat mewujudkan pelaksanaan anggaran yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Sesuai dengan PP Nomor 90 Tahun 2010 Pasal 5 ayat (3), dalam penganggaran berbasis kinerja (PBK) diperlukan indikator kinerja, standar biaya dan evaluasi kinerja. Indikator kinerja merupakan instrumen yang digunakan untuk mengukur Kinerja. Standar biaya adalah satuan biaya yang ditetapkan baik berupa standar biaya masukan maupun standar biaya keluaran sebagai acuan perhitungan kebutuhan anggaran dalam RKA-K/L. Evaluasi Kinerja merupakan penilaian terhadap capaian Sasaran Kinerja, konsistensi perencanaan, dan implementasi, serta realisasi penyerapan anggaran.

Bahan perumusan strategi dan kebijakan pembangunan serta bahan perencanaan dan evaluasi kinerja dapat bersumber pada Statistik Ditjen dan Statistik Setditjen KSDAE. Untuk dapat menghasilkan data yang berkualitas, maka seluruh tahapan mulai dari pengumpulan data, pengolahan dan penyajian harus memenuhi kaidah-kaidah yang telah ditetapkan, sebab mutu data sangat dipengaruhi oleh prosedur/tatacara pengumpulan data, kelengkapan dokumen, konsistensi dalam pelaporan serta jadwal pelaporan yang tepat.

Saat ini masih banyak instansi pemerintah bekerja tanpa ukuran dan target kinerja yang jelas, akibat ketiadaan ukuran kinerja dan target-targetnya pada awal periode pelaksanaan anggaran. Oleh karena itu diperlukan suatu penetapan kinerja yang merupakan komitmen rencana kinerja tahunan yang akan dicapai oleh instansi pemerintah sebagai upaya untuk meningkatkan efektivitas implementasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Salah satu output dalam melaksanakan evaluasi kinerja yaitu Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP). LAKIP merupakan dokumen perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan-tujuan dan sasaran-sasaran yang telah ditetapkan, melalui suatu media pertanggungjawaban secara periodik.

Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebagai sub sistem pembangunan kehutanan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam perencanaan pembangunan mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau Rencana Strategis dan Kebijakan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Rencana tersebut setiap tahunnya dijabarkan dalam bentuk RKA-K/L yang memuat program, kegiatan dan sub kegiatan dari setiap sasaran dan tujuan yang akan dicapai sebagaimana terdapat pada rencana strategis bidang KSDAE.

Terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah dan Rencana Kerja Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2021 lingkup Ditjen KSDAE dalam bingkai Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020-2024, perlu dilakukan koordinasi program dan anggaran, data dan infoAasi serta evaluasi Bidang KSDAE sebagai langkah untuk mencapai keselarasan dan keterpaduan dalam penyusunan rencana, program dan kegiatan Pembangunan Bidang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem di pusat dan daerah.

Keterkaitan Program dengan Kegiatan :

Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur sebagai bagian dari Direktorat Jenderal KSDAE bertanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Sasaran yang ingin dicapai dari pelaksanaan Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya adalah terwujudnya refoAasi tata kelola pemerintahan yang baik di lingkungan Direktorat Jenderal KSDAE yang pada akhirnya dapat berperan dalam mewujudkan reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik di lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Penyusunan kegiatan Layanan Perkantoran didasarkan atas tugas dan fungsi Sekretariat yang meliputi Program dan Anggaran, Data dan InfoAasi, Keuangan, Perlengkapan Rumah Tangga, Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Perundang-Undangan, Kerjasama Teknis dan lainnya.

Dalam rangka mendukung efektifitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Sekretariat Direktorat Jenderal KSDAE maka diperlukan pembangunan gedung dan bangunan sehingga diharapkan dapat lebih meningkatkan kinerja para pegawainya.

II. PENERIMA MANFAAT

1. Pegawai Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya seluruh pegawai Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur.
2. Masyarakat umum yang ingin mengetahui infoAasi mengenai Pembangunan Kehutanan Bidang KSDAE.
3. Lembaga-lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang kehutanan pada umumnya dan konservasi pada khususnya.

III. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Metoda pelaksanaan output Layanan Perkantoran dilaksanakan setiap bulan untuk membiayai pembayaran gaji dan tunjangan serta operasional perkantoran. Kegiatan yang direncanakan yaitu :

- a. Gaji dan Tunjangan
- b. Operasional dan Pemeliharaan Kantor terdiri dari :
 - Keperluan Sehari-Hari Perkantoran
 - Langganan Daya dan Jasa
 - Pemeliharaan Sarana Kantor
 - Pemeliharaan Sarana Gedung/Kantor
 - Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor
 - Pembuatan Kartu Pas Bandara dan Sewa Ruangan
 - Perjalanan Pimpinan
 - Sewa Rumah Dinas Eselon III dan IV
 - Honorarium Tenaga Kontrak (PPNPN)
 - Proses PBB dan BMN Satker
 - Sewa Perahu Untuk Operasional SM Harlu, TB Pulau Ndana, TWAL Gugus Teluk Maumere dan Alor
 - Operasional Resort atau Pos Badan Pelabuhan (Resort Unggulan)

2. Tahapan dan Waktu Pelaksanaan

Tahapan Pelaksanaan Kegiatan akan dilaksanakan dengan tata waktu yaitu :

Kode	Aktivitas	Bulan pada tahun 2021											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
001	Pembayaran Gaji dan Tunjangan												
002	Operasional perkantoran												

IV. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Kegiatan ini memerlukan biaya dengan sumber dana anggaran DIPA BA 29 Tahun 2021 dengan rincian sebagaimana pada tabel :

Tabel 78.
Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference Output
Layanan Perkantoran (5419.EAA.994)

KODE	URAIAN	VOL.	SAT.	HARGA SAT.	JUMLAH	SD
5419.EAA.994	Layanan Perkantoran	1	PERSEN		18.649.320.000	
001	Gaji dan Tunjangan				13.989.320.000	
A	Pembayaran gaji dan tunjangan				13.989.320.000	
511111	Belanja Gaji Pokok PNS				6.056.877.000	RM
	• Belanja Gaji Pokok PNS	1	TAHUN	5.084.230.000	5.084.230.000	
	• Belanja Gaji Pokok PNS (gaji ke 13 dan 14)	1	BULAN	972.647.000	972.647.000	
511119	Belanja Pembulatan Gaji PNS				156.000	RM
	• Belanja Pembulatan Gaji PNS	1	TAHUN	146.000	146.000	
	• Belanja Pembulatan Gaji PNS (gaji ke 13 dan 14)	1	BULAN	10.000	10.000	
511121	Belanja Tunj. Suami/Istri PNS				644.190.000	RM
	• Belanja Tunj. Suami/Istri PNS	1	TAHUN	572.871.000	572.871.000	
	• Belanja Tunj. Suami/Istri PNS (gaji ke 13 dan 14)	1	BULAN	71.319.000	71.319.000	
511122	Belanja Tunj. Anak PNS				151.401.000	RM
	• Belanja Tunj. Anak PNS	1	TAHUN	129.842.000	129.842.000	
	• Belanja Tunj. Anak PNS (gaji ke 13 dan 14)	1	BULAN	21.559.000	21.559.000	
511123	Belanja Tunj. Struktural PNS				140.102.000	RM

KODE	URAIAN	VOL.	SAT.	HARGA SAT.	JUMLAH	SD
	• Belanja Tunj. Struktural PNS	1	TAHUN	122.712.000	122.712.000	
	• Belanja Tunj. Struktural PNS (gaji ke 13 dan 14)	1	BULAN	17.390.000	17.390.000	
511124	Belanja Tunj. Fungsional PNS				382.885.000	RM
	• Belanja Tunj. Fungsional PNS	1	TAHUN	335.425.000	335.425.000	
	• Belanja Tunj. Fungsional PNS (gaji ke 13 dan 14)	1	BULAN	47.460.000	47.460.000	
511125	Belanja Tunj. PPh PNS				16.162.000	RM
	• Belanja Tunj. PPh PNS	1	TAHUN	13.385.000	13.385.000	
	• Belanja Tunj. PPh PNS (gaji ke 13 dan 14)	1	BULAN	2.777.000	2.777.000	
511126	Belanja Tunj. Beras PNS				341.258.000	RM
	• Belanja Tunj. Beras PNS	1	TAHUN	341.258.000	341.258.000	
511129	Belanja Uang Makan PNS				1.021.201.000	RM
	• Belanja uang makan PNS	1	TAHUN	1.021.201.000	1.021.201.000	
511151	Belanja Tunjangan Umum PNS				202.375.000	RM
	• Belanja Tunjangan Umum PNS	1	TAHUN	170.660.000	170.660.000	
	• Belanja Tunjangan Umum PNS (gaji ke 13 dan 14)	1	BULAN	31.715.000	31.715.000	
512411	Belanja Pegawai (Tunjangan Khusus/ Kegiatan/Kinerja)				5.032.713.000	RM
	• Tunjangan Kinerja PNS	1	TAHUN	5.032.713.000	5.032.713.000	
002	Operasional dan Pemeliharaan Kantor				4.660.000.000	
A	Keperluan Sehari-Hari Perkantoran				429.405.000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran				140.000.000	RM
	• Fotocopy, surat kabar/majalah, dan bahan konsumsi [140 PEG x 1 TAHUN]	140	OT	1.000.000	140.000.000	
521131	Belanja Barang Operasional - Penanganan Pandemi COVID-19				67.600.000	RM
	• Belanja barang operasional penanganan pandemi Covid 19	130	OT	520.000	67.600.000	
521211	Belanja Bahan				145.345.000	RM

KODE	URAIAN	VOL.	SAT.	HARGA SAT.	JUMLAH	SD
	• Rapat koordinasi antar UPT Kemen LHK Wilayah NTT (Korwil)	23	KEG	1.180.000	27.140.000	
	• Biaya untuk menjamu tamu pimpinan	1	TAHUN	44.300.000	44.300.000	
	• Biaya kegiatan Hari Bakti Rimbawan tahun 2021	1	KEG	10.905.000	10.905.000	
	• Rapat RKW dengan unsur 3 pilar (Pemerintah, Agama dan Adat) [21 RESOR x 10 KALI]	210	OT	300.000	63.000.000	
521811	Belanja Barang Persediaan Barang Konsumsi				61.460.000	RM
	• ATK, bahan cetakan dan alat rumah tangga [140 PEG x 1 TAHUN]	140	OT	439.000	61.460.000	
521841	Belanja Barang Persediaan - Penanganan Pandemi COVID-19				15.000.000	RM
	• Belanja barang persediaan penanganan pandemi covid 19	1	TAHUN	15.000.000	15.000.000	
B	Langganan Daya dan Jasa				346.070.000	
521114	Belanja Pengiriman Surat Dinas Pos Pusat				47.200.000	RM
	• Pengiriman surat dinas Kantor Balai Besar KSDA NTT	1	TAHUN	25.000.000	25.000.000	
	• Pengiriman surat dinas Kantor Bidang KSDA Wilayah I	1	TAHUN	6.000.000	6.000.000	
	• Pengiriman surat dinas Kantor Bidang KSDA Wilayah II	1	TAHUN	6.000.000	6.000.000	
	• Pengiriman surat dinas Kantor Seksi KSDA Wilayah I	1	TAHUN	2.400.000	2.400.000	
	• Pengiriman surat dinas Kantor Seksi KSDA Wilayah II	1	TAHUN	1.800.000	1.800.000	
	• Pengiriman surat dinas Kantor Seksi KSDA Wilayah III	1	TAHUN	3.000.000	3.000.000	
	• Pengiriman surat dinas Kantor Seksi KSDA Wilayah IV	1	TAHUN	3.000.000	3.000.000	
522111	Belanja Langganan Listrik				126.200.000	RM
	• Langganan listrik kantor Balai Besar KSDA NTT	1	TAHUN	70.000.000	70.000.000	

KODE	URAIAN	VOL.	SAT.	HARGA SAT.	JUMLAH	SD
	• Langganan listrik kantor Bidang KSDA Wilayah I	1	TAHUN	6.000.000	6.000.000	
	• Langganan listrik kantor Bidang KSDA Wilayah II	1	TAHUN	5.000.000	5.000.000	
	• Langganan listrik kantor Seksi Konservasi Wilayah I	1	TAHUN	3.600.000	3.600.000	
	• Langganan listrik kantor Seksi Konservasi Wilayah II	1	TAHUN	4.800.000	4.800.000	
	• Langganan listrik kantor Seksi Konservasi Wilayah III	1	TAHUN	3.600.000	3.600.000	
	• Langganan listrik kantor Seksi Konservasi Wilayah IV	1	TAHUN	4.200.000	4.200.000	
	• Langganan listrik kantor Resort Konservasi pada Bidang KSDA Wilayah I (9 Meteran)	1	TAHUN	10.000.000	10.000.000	
	• Langganan listrik kantor Resort Konservasi pada Bidang KSDA Wilayah II (11 Meteran)	1	TAHUN	12.000.000	12.000.000	
	• Langganan listrik ruangan pengawasan peredaran TSL Bandara El Tari Kupang	1	TAHUN	7.000.000	7.000.000	
522112	Belanja Langganan Telepon				129.000.000	RM
	• Langganan telepon/internet kantor Balai Besar KSDA NTT	1	TAHUN	45.000.000	45.000.000	
	• Langganan telepon/internet kantor Bidang KSDA Wilayah I	1	TAHUN	19.800.000	19.800.000	
	• Langganan telepon/internet kantor Bidang KSDA Wilayah II	1	TAHUN	13.000.000	13.000.000	
	• Langganan telepon/internet kantor Seksi Konservasi Wilayah I	1	TAHUN	12.000.000	12.000.000	
	• Langganan telepon/internet kantor Seksi Konservasi Wilayah II	1	TAHUN	10.200.000	10.200.000	
	• Langganan telepon/internet kantor Seksi Konservasi Wilayah III	1	TAHUN	12.000.000	12.000.000	
	• Langganan telepon/internet kantor Seksi Konservasi Wilayah IV	1	TAHUN	12.000.000	12.000.000	

KODE	URAIAN	VOL.	SAT.	HARGA SAT.	JUMLAH	SD
	• Langganan telepon/internet kantor RKW Bidang KSDA Wilayah II	1	TAHUN	5.000.000	5.000.000	
522113	Belanja Langganan Air				43.670.000	RM
	• Langganan air kantor Balai Besar KSDA NTT	1	TAHUN	8.070.000	8.070.000	
	• Langganan air kantor Bidang KSDA Wilayah I	1	TAHUN	6.000.000	6.000.000	
	• Langganan air kantor Bidang KSDA Wilayah II	1	TAHUN	6.000.000	6.000.000	
	• Langganan air kantor Seksi Konservasi Wilayah I	1	TAHUN	3.000.000	3.000.000	
	• Langganan air kantor Seksi Konservasi Wilayah II	1	TAHUN	9.600.000	9.600.000	
	• Langganan air kantor Seksi Konservasi Wilayah III	1	TAHUN	3.000.000	3.000.000	
	• Langganan air kantor Seksi Konservasi Wilayah IV	1	TAHUN	3.000.000	3.000.000	
	• Langganan air kantor RKW pada BKW I (10 resort)	1	TAHUN	2.500.000	2.500.000	
	• Langganan air kantor RKW pada BKW II (11 Resort)	1	TAHUN	2.500.000	2.500.000	
C	Pemeliharaan Sarana Kantor				907.890.000	
521211	Belanja Bahan				5.315.000	RM
	• Belanja bahan dalam rangka proses penghapusan BMN	1	KEG	5.315.000	5.315.000	
522191	Belanja Jasa Lainnya				28.385.000	RM
	• Pengurusan Mutasi Kendaraan Bermotor	1	PAKET	28.385.000	28.385.000	
523121	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin				828.240.000	RM
	• Biaya Pemeliharaan dan Operasional Personal Komputer/PC Unit/Desktop	12	UNIT	500.000	6.000.000	
	• Biaya Pemeliharaan dan Operasional Laptop	46	UNIT	500.000	23.000.000	
	• Biaya Pemeliharaan dan Operasional AC Split	22	UNIT	500.000	11.000.000	

KODE	URAIAN	VOL.	SAT.	HARGA SAT.	JUMLAH	SD
	• Biaya Pemeliharaan dan Operasional AC Standing	2	UNIT	1.000.000	2.000.000	
	• Biaya Pemeliharaan dan Operasional Printer	55	UNIT	500.000	27.500.000	
	• Biaya Pemeliharaan dan Operasional Genset lebih kecil dari 1 Kva	3	UNIT	500.000	1.500.000	
	• Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Pejabat Eselon II	2	UNIT	30.000.000	60.000.000	
	• Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4	1	UNIT	30.000.000	30.000.000	
	• Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4	8	UNIT	28.000.000	224.000.000	
	• Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 4 (double gardan)	8	UNIT	30.000.000	240.000.000	
	• Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 2	42	UNIT	3.000.000	126.000.000	
	• Biaya Pemeliharaan dan Operasional Kendaraan Roda 3	1	UNIT	3.000.000	3.000.000	
	• Biaya Pemeliharaan dan Operasional Speedboat	1	UNIT	20.240.000	20.240.000	
	• Biaya Pemeliharaan dan Operasional Perahu Motor	3	UNIT	18.000.000	54.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				45.950.000	RM
	• Perjalanan Penatausahaan BMN ke SKW I	2	OT	3.000.000	6.000.000	
	• Perjalanan Penatausahaan BMN ke BKW I	1	OT	2.500.000	2.500.000	
	• Perjalanan Penatausahaan BMN ke SKW III dan BKW II	1	OT	6.500.000	6.500.000	
	• Perjalanan Penatausahaan BMN ke SKW IV	2	OT	4.000.000	8.000.000	
	• Perjalanan proses penghapusan BMN ke SKW I	2	OT	3.500.000	7.000.000	
	• Perjalanan proses penghapusan BMN ke SKW IV	1	OT	6.000.000	6.000.000	

KODE	URAIAN	VOL.	SAT.	HARGA SAT.	JUMLAH	SD
	• Perjalanan proses penghapusan BMN ke Bidang Wilayah II	1	OT	7.000.000	7.000.000	
	• Perjalanan proses penghapusan BMN di Kota Kupang	2	OT	1.475.000	2.950.000	
D	Pemeliharaan Sarana Gedung/Kantor				68.120.000	
523111	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan				53.360.000	RM
	> KANTOR BALAI				27.840.000	
	• Pemeliharaan Gedung I Kantor Balai (Aula)	238	M2	40.000	9.520.000	
	• Pemeliharaan Gedung III Kantor Balai (Gedung Utama)	400	M2	40.000	16.000.000	
	• Pemeliharaan garasi kendaraan BBKSDA NTT	58	M2	40.000	2.320.000	
	>> KANTOR BKW I			0	17.960.000	
	• Pemeliharaan kantor BKW I	70	M2	40.000	2.800.000	
	• Pemeliharaan kantor SKW II	70	M2	40.000	2.800.000	
	• Pemeliharaan pos jaga Resort Kateri, Wemasa, Fatumnasi, Menipo, Camplong, Kupang [6 UNIT x 24 M2]	144	M2	40.000	5.760.000	
	• Pemeliharaan rumah dinas BKW I	70	M2	40.000	2.800.000	
	• Pemeliharaan rumah dinas SKW I	45	M2	40.000	1.800.000	
	• Pemeliharaan taman kantor BKW I	1	PAKET	2.000.000	2.000.000	
	>> PEMELIHARAAN KANDANG SATWA			0	7.560.000	
	• Pemeliharaan kandang satwa buaya 1	169	M2	40.000	6.760.000	
	• Pemeliharaan kandang satwa buaya 2	20	M2	40.000	800.000	
523119	• Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan Lainnya				14.760.000	RM
	• Pemeliharaan rumah dinas Kepala Balai Besar di Kupang	179	M2	40.000	7.160.000	
	• Pemeliharaan rumah dinas KBTU di Kupang	70	M2	40.000	2.800.000	
	• Pemeliharaan rumah dinas Kabid Teknis di Kupang	70	M2	40.000	2.800.000	

KODE	URAIAN	VOL.	SAT.	HARGA SAT.	JUMLAH	SD
	• Pemeliharaan rumah dinas Kepala Seksi Pemanfaatan dan Pelayanan di Kupang	50	M2	40.000	2.000.000	
E	Pembayaran Terkait Pelaksanaan Operasional Kantor				553.990.000	
521115	Belanja Honor Operasional Satuan Kerja				553.990.000	RM
	> PENGELOLA KEUANGAN				293.860.000	
	• Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran	12	OB	3.420.000	41.040.000	
	• Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan SPM	12	OB	1.520.000	18.240.000	
	• Verifikator keuangan yang diperbantukan pada PPSPM (Operator)	12	OB	500.000	6.000.000	
	• Verifikator keuangan yang diperbantukan pada PPSPM (Operator)	3	OB	500.000	1.500.000	
	• Pejabat Pembuat Komitmen I	12	OB	2.000.000	24.000.000	
	• Pejabat Pembuat Komitmen II	12	OB	2.000.000	24.000.000	
	• Pejabat Pembuat Komitmen III	12	OB	1.700.000	20.400.000	
	• Pejabat Pembuat Komitmen IV	12	OB	1.700.000	20.400.000	
	• Pejabat Pembuat Komitmen V	8	OB	1.850.000	14.800.000	
	• Bendahara Pengeluaran	12	OB	1.320.000	15.840.000	
	• Bendahara Pengeluaran Pembantu I	9	OB	1.080.000	9.720.000	
	• Bendahara Pengeluaran Pembantu II	12	OB	1.080.000	12.960.000	
	• Bendahara Pengeluaran Pembantu III	12	OB	570.000	6.840.000	
	• Bendahara Pengeluaran Pembantu IV	12	OB	570.000	6.840.000	
	• Staf Pengelola KPA	36	OB	980.000	35.280.000	
	• Staf Pengelola di PPK I	24	OB	500.000	12.000.000	
	• Staf Pengelola di PPK II	24	OB	500.000	12.000.000	
	• Staf Pengelola di PPK III	12	OB	500.000	6.000.000	
	• Staf Pengelola di PPK IV	12	OB	500.000	6.000.000	
	>> PENGELOLA SAI			0	24.600.000	
	• Penanggung jawab (UAKPA/Barang)	12	OB	350.000	4.200.000	
	• Operator (UAKPA/Barang) wilayah [2 Org x 12 BULAN]	24	OB	150.000	3.600.000	

KODE	URAIAN	VOL.	SAT.	HARGA SAT.	JUMLAH	SD
	• Operator (UAKPA/Barang), satker [2 Org x 12 BULAN]	24	OB	150.000	3.600.000	
	• Anggota/Petugas (UAKPA/Barang), satker dan wilayah [10 Org x 12 BULAN]	120	OB	110.000	13.200.000	
	>> PENGELOLA BMN			0	6.600.000	
	• Honor pengurus/penyimpan BMN/ pengelola barang persediaan (4 Org x 11 BULAN)	44	OB	150.000	6.600.000	
	>> OPERASIONAL PENYULUH KEHUTANAN			0	33.600.000	
	• Biaya Operasional Penyuluh [7 Org x 12 BULAN]	84	OB	400.000	33.600.000	
	>> HONOR PENGADAAN BARANG/JASA			0	10.080.000	
	• Pejabat Pengadaan Barang/Jasa [2 Org x 12 BULAN]	24	OB	420.000	10.080.000	
	>> PENGELOLA PNBP			0	26.850.000	
	• Bendahara Penerima	1	OB	450.000	450.000	
	• Anggota (Juru Pungut PNBP) TSL	12	OB	250.000	3.000.000	
	• Anggota (Juru Pungut PNBP) di TWA Camplong	12	OB	250.000	3.000.000	
	• Anggota (Juru Pungut PNBP) di TWA Menipo	12	OB	250.000	3.000.000	
	• Anggota (Juru Pungut PNBP) TWA Ruteng di Ranaka	12	OB	200.000	2.400.000	
	• Anggota (Juru Pungut PNBP) TWA Ruteng di Ranamese	12	OB	200.000	2.400.000	
	• Anggota (Juru Pungut PNBP) di TWAL 17 Pulau	12	OB	300.000	3.600.000	
	• Anggota (Juru Pungut PNBP) di TWAL 17 Pulau	24	OB	250.000	6.000.000	
	• Anggota (Juru Pungut PNBP) di TWAL Gugus Pulau Teluk Maumere	12	OB	250.000	3.000.000	
	>> PETUGAS KEBERSIHAN DAN PENGAMANAN LINGKUNGAN KANTOR			0	158.400.000	
	• Upah petugas kebersihan kantor balai [2 Org x 288 HOK]	576	HOK	60.000	34.560.000	

KODE	URAIAN	VOL.	SAT.	HARGA SAT.	JUMLAH	SD
	• Upah petugas kebersihan kantor balai [3 Org x 240 HOK]	720	HOK	60.000	43.200.000	
	• Upah petugas pengaman kantor balai [1 Org x 288 HOK]	288	HOK	60.000	17.280.000	
	• Upah petugas pengaman kantor balai [2 Org x 240 HOK]	480	HOK	60.000	28.800.000	
	• Upah petugas kebersihan Kantor BKW II	288	HOK	60.000	17.280.000	
	• Upah petugas pengemudi kapal di TWAL 17 Pulau	288	HOK	60.000	17.280.000	
F	Pembuatan Kartu Pas Bandara dan Sewa Ruang				51.620.000	
521211	Belanja Bahan				5.420.000	RM
	• Pembuatan kartu Pas Bandara Eltari Kupang	1	KEG	2.020.000	2.020.000	
	• Pembuatan kartu Pas Bandara Maumere	2	ORG	150.000	300.000	
	• Pembuatan kartu Pas Bandara Labuan Bajo	4	ORG	150.000	600.000	
	• Pembuatan kartu Pas Bandara Ruteng	1	ORG	300.000	300.000	
	• Pembuatan kartu Pas Bandara Atambua	2	ORG	150.000	300.000	
	• Pembuatan kartu Pas Bandara Sumba Timur	3	ORG	150.000	450.000	
	• Pembuatan kartu Pas Bandara Sumba Barat Daya	2	ORG	200.000	400.000	
	• Pembuatan kartu Pas Bandara Ende	1	ORG	300.000	300.000	
	• Pembuatan kartu Pas Bandara Bajawa	1	ORG	300.000	300.000	
	• Pembuatan kartu Pas Bandara Larantuka	1	ORG	150.000	150.000	
	• Pembuatan kartu Pas Bandara Alor	1	ORG	300.000	300.000	
522141	Belanja Sewa				46.200.000	RM
	• Sewa ruangan di Bandara Eltari untuk pengamanan peredaran TSL	1	TAHUN	40.700.000	40.700.000	

KODE	URAIAN	VOL.	SAT.	HARGA SAT.	JUMLAH	SD
	• Sewa Tanah Kantor RKW Teluk Kupang	1	TAHUN	2.500.000	2.500.000	
	• Sewa kantor Resort Eban	1	TAHUN	3.000.000	3.000.000	
G	Sewa Rumah Dinas Eselon III dan IV				118.000.000	
522141	Belanja Sewa				118.000.000	RM
	• Sewa rumah dinas eselon III di Soe	1	UNIT	23.600.000	23.600.000	
	• Sewa rumah dinas eselon IV di Kupang	4	UNIT	23.600.000	94.400.000	
H	Honorarium Tenaga Kontrak (PPNPN)				1.891.500.000	
521111	Belanja Keperluan Perkantoran				1.891.500.000	RM
	• Honorarium tenaga kontrak pengemudi, pramubakti, kebersihan dan keamanan [15 Org x 13 BULAN]	195	OB	2.000.000	390.000.000	
	• Honorarium tenaga kontrak pengamanan kawasan [27 Org x 13 BULAN]	351	OB	2.000.000	702.000.000	
	• Honorarium tenaga administrasi/ teknis S1 [6 Org x 13 BULAN]	78	OB	2.200.000	171.600.000	
	• Honorarium tenaga kontrak administrasi/ teknis D3 [7 Org x 13 BULAN]	91	OB	2.100.000	191.100.000	
	• Honorarium tenaga kontrak driver/ pengelola speedboard [1 Org x 13 BULAN]	13	OB	2.000.000	26.000.000	
	• Honorarium tenaga kontrak konservasi penyu [4 Org x 13 BULAN]	52	OB	2.000.000	104.000.000	
	• Honorarium tenaga bakti rimbawan S1 [3 Org x 13 BULAN]	39	OB	3.100.000	120.900.000	
	• Honorarium tenaga bakti rimbawan D3 [4 Org x 13 BULAN]	52	OB	2.900.000	150.800.000	
	• Honorarium tenaga bakti rimbawan SMK [1 Org x 13 BULAN]	13	OB	2.700.000	35.100.000	
I	Sewa Perahu Untuk Operasional Resort Konservasi Wilayah				29.000.000	
522141	Belanja Sewa				29.000.000	RM

KODE	URAIAN	VOL.	SAT.	HARGA SAT.	JUMLAH	SD
	• Sewa Perahu di Resort Alor, Maumere, Rote, Maubesi	4	RESOR	7.250.000	29.000.000	
J	Operasional resort unggulan				20.000.000	
521211	Belanja Bahan				20.000.000	RM
	• Operasional Resort Unggulan [5 RESOR x 1 TAHUN]	5	RESOR	4.000.000	20.000.000	
K	Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan				4.575.000	
522191	Belanja Jasa Lainnya				4.575.000	RM
	• Pembayaran pajak Bumi dan Bangunan	1	PAKET	4.575.000	4.575.000	
L	Pengadaan Seragam Dinas ASN				97.760.000	
521211	Belanja Bahan				75.200.000	RM
	• Pengadaan pakaian dinas (pegawai, pengemudi, pramu bakti, PPNPN)	376	PSNG	200.000	75.200.000	

V. TARGET CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Tercapainya layanan perkantoran sebanyak 12 bulan layanan pada tahun 2021.

D. OUTPUT LUAS KEBIJAKAN BIDANG KEHUTANAN (5420.PBV) DAN OUTPUT DATA DAN INFORMASI PUBLIK (5420.QMA) TAHUN ANGGARAN 2021

JUMLAH ANGGARAN : Rp 566.694.000,00

I. GAMBARAN UMUM

Sesuai pasal 4 UU 41 tahun 1999 tentang Kehutanan dinyatakan bahwa semua hutan di dalam wilayah Republik Indonesia termasuk kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Salah satu wewenang yang diberikan kepada pemerintah dalam penguasaan hutan oleh negara tersebut adalah mengatur dan mengurus segala sesuatu yang berkaitan dengan hutan, kawasan hutan dan hasil hutan. Implementasi dari pengurusan tersebut meliputi kegiatan penyelenggaraan: Perencanaan kehutanan, Pengelolaan hutan, Penelitian dan pengembangan, pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan, dan Pengawasan. Salah satu bagian pokok dalam perencanaan kehutanan adalah penyusunan Rencana Pengelolaan. Rencana Pengelolaan Kawasan Konservasi menjadi acuan pengelola dalam melaksanakan pengelolaannya.

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 jo Peraturan Pemerintah Nomor : 108 tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, pada pasal 14 – 20 menguraikan pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, dalam rangka penyelenggaraan pengelolaan, agar kawasan dapat berfungsi sesuai fungsi dengan statusnya dan sesuai dengan tuntutan arah pembangunan, diharuskan melakukan penataan kawasan sebagai pedoman arah pengelolaan kawasan konservasi. Blok pengelolaan dilakukan pada KSA dan KPA selain taman nasional. Penataan kawasan dimaksud diantaranya adalah pembagian kawasan kedalam zona atau blok pengelolaan.

Mengingat pentingnya penataan zona dan blok sebagai dasar perencanaan pengelolaan dan pengembangan kawasan konservasi, maka dalam Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan periode 2015 – 2019 telah ditetapkan salah satu indikator kinerja kegiatan (IKK) dari program konservasi sumberdaya alam dan ekosistemnya yaitu tersusunnya 150 dokumen penataan zonasi taman nasional maupun penataan blok non taman nasional.

Selain dari pada itu berkenaan dengan pelaksanaan Peraturan Presiden No 9 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Kebijakan Satu Peta (KSP) pada Tingkat Ketelitian Peta Skala 1:50.000, Direktorat Jenderal KSDAE mendapat tugas untuk membuat Peta Zonasi/Blok Kawasan Konservasi (KK) skala 1:50.000. Tugas tersebut diselesaikan dalam kurun waktu 3 (tiga) tahun (2016-2018).

Peta zona/blok Kawasan konservasi yang tersedia pada saat ini (*eksisting*) merupakan lampiran Dokumen Penataan Zona/Blok Kawasan Konservasi yang telah disahkan oleh Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem. Dokumen Penataan Zona/Blok Kawasan Konservasi disusun oleh Unit Pelaksana Teknis Balai Taman Nasional/Balai Konservasi Sumber Daya Alam melalui tahapan antara lain : inventarisasi potensi, penyusunan rancangan zona/blok, konsultasi publik, penilaian dan pengesahan dokumen.

Selanjutnya Peta zona/blok Kawasan konservasi yang tersedia pada saat ini (*eksisting*) dikompilasi dengan Peta Batas Kawasan Konservasi skala 1:50.000 yang bersumber dari Dit Pengukuhan Ditjen PKTL. Langkah terakhir adalah proses integrasi dengan Peta Rupa Bumi skala 1:50.000 yang bersumber dari Badan Informasi Geospasial (BIG). Peta zona/blok yang telah diintegrasikan pada skala 1:50.000 akan dilakukan verifikasi oleh BIG.

Sampai tahun 2016 Kawasan konservasi yang ada di wilayah Indonesia dari jumlah total kawasan konservasi sebanyak 556 KK, yang telah memiliki penataan zona/blok sebanyak 171 KK. Oleh karena itu diperlukan upaya percepatan penyusunan Zona atau Blok guna sebagai dasar pengelolaan kawasan konservasi dan juga untuk memenuhi target IKK serta pelaksanaan KSP tahap I tahun 2016.

Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur mengelola 28 (dua puluh) kawasan konservasi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tujuan dari kegiatan ini adalah :

- a. Menyediakan dokumen blok pengelolaan kawasan
- b. Meningkatkan kerjasama dalam pengelolaan KSA dan KPA

II. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat kegiatan adalah:

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, khususnya Direktorat Teknis lingkup Direktorat Jenderal KSDAE.
2. Pemangku kepentingan lainnya yang membidangi kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem khususnya bidang pemolaan dan informasi konservasi alam
3. Balai Besar KSDA NTT
4. Pemangku kepentingan yang membidang kegiatan konservasi sumber daya alam dan ekosistem di tingkat daerah.

III. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode pelaksanaan

Metode Pelaksanaan kegiatan Penyusunan dokumen Penataan blok pengelolaan kawasan pada Balai Besar KSDA NTT adalah sebagai berikut :

- a. Persiapan
Dilakukan dengan cara pembentukan tim kerja, rapat persiapan dan pembuatan rencana kerja
 - b. Pengumpulan data dan analisa
Dilakukan dengan cara survey potensi kawasan untuk mengumpulkan data keperluan penataan kawasan
 - c. Penyusunan Rancangan Dokumen
Menganalisa dengan metode yang sesuai dengan kawasan konservasi
 - d. Konsultasi Publik
Melakukan konsultasi publik hasil rancangan dengan mengundang stakeholder terkait untuk mendapat masukan dan informasi dalam rangka penyempurnaan dokumen
 - e. Pembahasan ke Pusat
Dilakukan dengan cara pembahasan dan presentasi dalam penilaian dan pengesahan dokumen.
2. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Kawasan Konservasi
Metode pelaksanaan Kerjasama penyelenggaraan KSA dan KPA pada Balai Besar KSDA Nusa Tenggara Timur adalah sebagai berikut :

- Koordinasi awal dengan Mitra
- Melakukan pencermatan terhadap proposal pemohon
- Memproses permohonan kerjasama Mitra
- Penyusunan draft PKS
- Penandatanganan PKS setelah mendapat persetujuan dari Dirjen KSDAE
- Penyusunan RPP dan RKT
- Pelaksanaan Kegiatan Kerjasama
- Monitoring dan Evaluasi Kerjasama

IV. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Waktu pencapaian keluaran dari Kegiatan direncanakan mulai dari Januari 2021 sampai dengan bulan Desember 2021.

No	Uraian	Jadwal											
		Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mei.	Juni	Juli	Agust.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.
A	Kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi												
1	Penyusunan Dokumen Penataan Blok Pengelolaan Kawasan CA Riung												
2	Penyusunan Dokumen Penataan Blok Pengelolaan Kawasan CA Mutis Timau												
3	Penyusunan Dokumen Penataan Blok Pengelolaan Kawasan SM Perhatu												
4	Penyusunan Dokumen Penataan Blok Pengelolaan Kawasan SM Danau Tuakdale												
5	Pemantauan/monitoring fungsi di SM Kateri, CA Watu Ata, TWA Menipo, SM Egon Ilemedo, CA Wae Wuul, CA Kemang Boleng II												
6	Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan SM Harlu												

No	Uraian	Jadwal											
		Jan.	Feb.	Mar.	Apr.	Mei.	Juni	Juli	Agust.	Sept.	Okt.	Nov.	Des.
7	Penandaan batas blok kawasan SM Ale Aisio (3 Km) dan TWA Menipo (3 Km)												
8	Penandaan batas blok kawasan SM Harlu (6 Km)												
9	Penandaan batas blok kawasan TWA Ruteng (8 Km)												
B	Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi												
1	Inventarisasi Komodo di CA Wae Wuul, CA Riung, CA Wolo Tado (5.917,84 Ha)												
2	Inventarisasi Tumbuhan di CA Mutis Timau (12.315,61 Ha)												
3	Verifikasi potensi permasalahan kawasan												
4	Penafsiran Citra Satelit Untuk Update Data Penutupan Lahan (Open Area) di SM Kateri												
5	Groundcheck Data Penutupan Lahan (Open Area) di SM Kateri												
6	Pembuatan Peta Tematik SM Kateri												
7	Penyusunan Laporan												

V. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Alokasi anggaran kegiatan pencapaian pada tahun 2021 dengan rincian sebagaimana pada Tabel berikut :

Tabel 80.

Rencana Anggaran Biaya (RAB) Kerangka Acuan Kerja (KAK)/Term of Reference Output Kebijakan Bidang Kehutanan (5420.PBV) Dan Output Data Dan Informasi Publik (5420.QMA)

KODE	URAIAN	VOL.	SAT.	HARGA SAT.	JUMLAH	SD
5420. PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	2	<u>Rekomendasi Kebijakan</u>		60.344.000	
5420. PBV.002	Kawasan konservasi yang dilakukan pemantapan (prakondisi) status dan fungsi	2	<u>Unit</u>		60.344.000	
051	Penataan dan Penandaan Zonasi atau Blok Kawasan Konservasi				36.400.000	
A	Revisi Blok Pengelolaan TWA Ruteng				1.600.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan				1.600.000	RM
	• Upah buruh pembantu lapangan [4 Org x 4 hari]	16	HOK	100.000	1.600.000	
D	Penyusunan Dokumen Penataan Blok Pengelolaan Kawasan SM Danau Tuakdale				34.800.000	
521211	Belanja Bahan				9.200.000	RM
	>> GROUND CHEK DAN PENGAMBILAN DATA LAPANGAN				4.800.000	
	• Alat dan Bahan	1	KEG	2.000.000	2.000.000	
	• Perlengkapan Lapangan	1	KEG	2.000.000	2.000.000	
	• Bahan makan buruh [4 Org x 4 hari]	16	OH	50.000	800.000	
	>> KONSULTASI PUBLIK			0	4.400.000	
	• Alat dan Bahan	1	KEG	2.000.000	2.000.000	
	• Konsumsi rapat pembahasan di pusat	20	OH	80.000	1.600.000	
	• Penggandaan draft	2000	LEMBAR	400	800.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan				1.600.000	RM
	• Upah buruh pembantu lapangan [4 Org x 4 hari]	16	HOK	100.000	1.600.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				24.000.000	RM
	> GROUND CHEK DAN PENGAMBILAN DATA LAPANGAN				24.000.000	
	• Perjalanan petugas dari balai	3	OT	3.500.000	10.500.000	
	• Perjalanan petugas dari bidang/seksi	1	OT	2.000.000	2.000.000	
	• Perjalanan petugas dari resort	3	OT	1.500.000	4.500.000	
	• Perjalanan dalam rangka supervisi	2	OT	3.500.000	7.000.000	

KODE	URAIAN	VOL.	SAT.	HARGA SAT.	JUMLAH	SD
053	Pemantauan dan Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan Konservasi				23.944.000	
A	Pemantauan/monitoring fungsi di SM Kateri				7.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				7.000.000	RM
	• Perjalanan dalam rangka monitoring fungsi di SM Kateri	2	OT	3.500.000	7.000.000	
B	Evaluasi Kesesuaian Fungsi Kawasan SM Harlu				16.944.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				16.944.000	RM
	• Perjalanan dalam rangka pengumpulan data sekunder/koordinasi	4	OT	4.236.000	16.944.000	
5420. QMA	Data dan Informasi Publik	156.184	LAYANAN		506.350.000	
5420. QMA.001	Kawasan Konservasi dengan nilai keanekaragaman hayati tinggi	156.184	HEKTAR		506.350.000	
051	Inventarisasi, Verifikasi Potensi dan Permasalahan KK				427.000.000	
A	Inventarisasi Komodo di CA Wae Wuul, CA Riung, CA Wolo Tado (5.917,84 Ha)				84.150.000	
521211	Belanja Bahan				7.500.000	PNP
	• Bahan dan pelaporan	3	KEG	750.000	2.250.000	
	• Bahan makan buruh lapangan [2 Org x 5 hari x 3 keg]	30	OH	50.000	1.500.000	
	• Obat-obatan	3	KEG	500.000	1.500.000	
	• Perlengkapan lapangan [5 Org x 3 keg]	15	ORG	150.000	2.250.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				3.000.000	PNP
	• Upah buruh [2 Org x 5 hr x 3 keg]	30	OH	100.000	3.000.000	
522141	Belanja Sewa				6.000.000	PNP
	• Sewa transportasi ke lokasi	6	HARI	1.000.000	6.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				67.650.000	PNP
	• Perjalanan tim dari balai [2 Org x 3 keg]	6	OT	5.000.000	30.000.000	
	• Perjalanan tim dari bidang/seksi [2 Org x 3 keg]	6	OT	3.500.000	21.000.000	
	• Perjalanan tim dari resort [3 Org x 3 keg]	9	OT	1.850.000	16.650.000	

KODE	URAIAN	VOL.	SAT.	HARGA SAT.	JUMLAH	SD
B	Inventarisasi Tumbuhan di CA Mutis Timau (12.315,61 Ha)				27.100.000	
521211	Belanja Bahan				2.550.000	PNP
	• Bahan dan pelaporan	1	KEG	800.000	800.000	
	• Bahan makan buruh lapangan [2 Org x 5 hari x 1 keg]	10	OH	50.000	500.000	
	• Obat-obatan	1	KEG	500.000	500.000	
	• Perlengkapan lapangan [5 Org x 1 keg]	5	ORG	150.000	750.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				1.000.000	PNP
	• Upah buruh [2 Org x 5 hr]	10	OH	100.000	1.000.000	
522141	Belanja Sewa				2.000.000	PNP
	• Sewa transportasi ke lokasi	2	HARI	1.000.000	2.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				21.550.000	PNP
	• Perjalanan tim dari balai [2 Org x 1 keg]	2	OT	5.000.000	10.000.000	
	• Perjalanan tim dari bidang/seksi [2 Org x 1 keg]	2	OT	3.000.000	6.000.000	
	- Perjalanan tim dari resort [3 Org x 1 keg]	3	OT	1.850.000	5.550.000	
C	Verifikasi potensi permasalahan kawasan				315.750.000	
521211	Belanja Bahan				9.750.000	PNP
	• Alat dan bahan	13	KEG	750.000	9.750.000	
522141	Belanja Sewa				4.500.000	PNP
	• Sewa Perahu	3	KEG	1.500.000	4.500.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				301.500.000	PNP
	• Perjalanan dari Resort Pulau Timor dalam rangka pengumpulan data [4 org x 3 lks]	12	OT	1.500.000	18.000.000	
	• Perjalanan dari Resort Pulau Timor dan Rote Ndao dalam rangka pengumpulan data [4 org x 3 lks]	12	OT	1.350.000	16.200.000	
	• Perjalanan dari Bidang/Seksi Wilayah dalam rangka pengumpulan data di Wae Wuul	2	OT	4.000.000	8.000.000	
	• Perjalanan dari Bidang/Seksi Wilayah dalam rangka pengumpulan data di Ruteng	2	OT	3.150.000	6.300.000	

KODE	URAIAN	VOL.	SAT.	HARGA SAT.	JUMLAH	SD
	• Perjalanan dari Seksi Wilayah dalam rangka pengumpulan data di TWAL Gugus Pulau Teluk Maumere	4	OT	1.500.000	6.000.000	
	• Perjalanan dari Bidang/Seksi Wilayah dalam rangka pengumpulan data di CA Ndeti Klikima	2	OT	3.000.000	6.000.000	
	• Perjalanan dari Bidang/Seksi Wilayah dalam rangka pengumpulan data di CA Riung	2	OT	3.500.000	7.000.000	
	• Perjalanan dari Bidang/Seksi Wilayah dalam rangka pengumpulan data di TWA Tuti Adagage	1	OT	7.000.000	7.000.000	
	• Perjalanan dari Bidang/Seksi Wilayah dalam rangka pengumpulan data di TWA Pulau Lapang	1	OT	7.000.000	7.000.000	
	• Perjalanan dari Bidang/Seksi Wilayah dalam rangka pengumpulan data di SM Kateri	2	OT	3.000.000	6.000.000	
	• Perjalanan dari Bidang/Seksi Wilayah dalam rangka pengumpulan data di SM Harlu	2	OT	4.000.000	8.000.000	
	• Perjalanan dari Bidang/Seksi Wilayah dalam rangka pengumpulan data di TWA Bipolo	2	OT	2.000.000	4.000.000	
	• Perjalanan dari Bidang/Seksi Wilayah dalam rangka pengumpulan data di SM Danau Tuakdale	2	OT	2.000.000	4.000.000	
	• Perjalanan dari Bidang Wilayah dalam rangka pengumpulan data di CA Mutis	2	OT	1.350.000	2.700.000	
	• Perjalanan dari Seksi Wilayah dalam rangka pengumpulan data di CA Mutis	2	OT	3.000.000	6.000.000	
	• Perjalanan dari Bidang Wilayah dalam rangka pengumpulan data di SM Ale Aisio	2	OT	2.000.000	4.000.000	
	• Perjalanan dari Seksi Wilayah dalam rangka pengumpulan data di SM Ale Aisio	2	OT	3.000.000	6.000.000	
	• Perjalanan tenaga teknis dari Balai/ supervisi kegiatan [2 Org x 6 lks]	12	OT	4.000.000	48.000.000	

LAMPIRAN RENCANA KERJA BALAI BESAR KSDA NTT TAHUN 2021
RENCANA KERJA TAHUN ANGGARAN 2021

KODE	URAIAN	VOL.	SAT.	HARGA SAT.	JUMLAH	SD
	• Perjalanan dari Resort di Pulau Flores dan Alor dalam rangka pengumpulan data	28	OT	1.350.000	37.800.000	
	• Perjalanan tenaga teknis dari Balai/ supervisi kegiatan di TWA Ruteng	2	OT	8.000.000	16.000.000	
	• Perjalanan tenaga teknis dari Balai/ supervisi kegiatan di Alor	5	OT	5.900.000	29.500.000	
	• Perjalanan tenaga teknis dari Balai/ supervisi kegiatan di Pulau Flores (2 org x 4 lokasi)	8	OT	6.000.000	48.000.000	
052	Penyusunan Data Spasial Potensi dan Permasalahan				79.350.000	
A	Penafsiran Citra Satelit Untuk Update Data Penutupan Lahan (Open Area) di SM Kateri				13.100.000	
521211	Belanja Bahan				13.100.000	PNP
	• ATK	1	KEG	500.000	500.000	
	• Proses pengolahan citra satelit	1	SCENE	2.000.000	2.000.000	
	• Proses deleniasi/pencermatan objek	1	SCENE	3.000.000	3.000.000	
	• Editing dan pemberian/perbaikan atribut	3	SCENE	1.500.000	4.500.000	
	• Perhitungan luas	1	SCENE	900.000	900.000	
	• Perbaikan dan penyempurnaan	1	SCENE	1.000.000	1.000.000	
	• Penyusunan layout untuk bahan cek lapangan	1	SCENE	1.200.000	1.200.000	
B	Groundcheck Data Penutupan Lahan (Open Area) di SM Kateri				55.150.000	
521211	Belanja Bahan				1.200.000	PNP
	• Dokumentasi	1	KEG	200.000	200.000	
	• Perlengkapan kerja lapangan	5	ORG	200.000	1.000.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				2.000.000	PNP
	• Upah buruh [2 Org x 10 hr]	20	OH	100.000	2.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				51.950.000	PNP
	• Uang harian pelaksana kegiatan [5 Org x 10 hr]	50	OH	370.000	18.500.000	
	• Biaya penginapan pelaksana kegiatan [5 Org x 9 mlm]	45	OH	400.000	18.000.000	

KODE	URAIAN	VOL.	SAT.	HARGA SAT.	JUMLAH	SD
	• Sewa kendaraan selama kegiatan	10	HARI	960.000	9.600.000	
	• Perjalanan Dalam rangka Validasi/ Konsultasi/Koordinasi Penutupan Lahan (Open Area)	2	OT	2.925.000	5.850.000	
C	Pembuatan Peta Tematik SM Kateri				3.800.000	
521211	Belanja Bahan				1.935.000	RM
	• ATK	1	KEG	1.935.000	1.935.000	
	> PEMBUATAN PETA DIGITASI				1.005.000	
	• Digitasi peta on screen	1	LAYER	505.000	505.000	
	• Adjustment	1	LAYER	195.000	195.000	
	• Analisa data spasial	1	LAYER	305.000	305.000	
	>> KENDALI MUTU DAN DISTRIBUSI PETA			0	860.000	
	• Kendali mutu	1	LEMBAR	60.000	60.000	
	• Penggandaan peta	5	EKSPL	150.000	750.000	
	• Distribusi peta	1	LEMBAR	50.000	50.000	
D	Penyusunan Laporan				7.300.000	
521211	Belanja Bahan				300.000	RM
	- Penggandaan laporan	5	EKSPL	60.000	300.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				7.000.000	RM
	- Koordinasi dan konsultasi ke pusat	1	OT	7.000.000	7.000.000	

VI. TARGET CAPAIAN KINERJA KEGIATAN

Tercapainya program dan kegiatan pemolaan dan informasi kawasan pada tahun 2021.

E. OUTPUT PENGELOLAAN KAWASAN KONSERVASI (5421) TAHUN ANGGARAN 2021

JUMLAH ANGGARAN : Rp 3.100.076.000,-

I. LATAR BELAKANG

1. Dasar Hukum
 - a. Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2011 tentang Pengelolaan KSA dan KPA PP 108 tahun 2015
 - b. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 - 2019
 - c. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2011 tentang Rencana Kehutanan Tingkat Nasional (RKTN) Tahun 2011 - 2030
 - d. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/MenLHK-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan
 - e. Peraturan Direktur Jenderal PHKA No. 9/IV-KKBHL/2012 tentang Juknis Pendampingan Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga Kawasan Konservasi.
 - f. Peraturan Direktur Jenderal PHKA No. 10/IV-KKBHL/2012 tentang Juknis Monitoring dan Evaluasi Pemberdayaan Masyarakat Daerah Penyangga Kawasan Konservasi.
 - g. SK Dirjen KSDAE Nomor: SK.80/KSDAE/SET/KSA.1/2/2017 tentang Penetapan Desa Binaan dan Pendamping pada Daerah Penyangga Kawasan Konservasi
 - h. Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE 2015 - 2019

II. Gambaran Umum Proyek

1. Latar Belakang

Pengelolaan kawasan konservasi tidak dapat dilepaskan dari masyarakat yang tinggal dan hidup di daerah penyangganya. Pada hakikatnya, daerah penyangga kawasan konservasi mempunyai fungsi untuk menjaga Kawasan Suaka Alam dan atau Kawasan Pelestarian Alam dari segala bentuk tekanan dan gangguan yang berasal dari luar dan atau dari dalam kawasan yang dapat mengakibatkan perubahan keutuhan dan perubahan fungsi kawasan. Peraturan Pemerintah No 28 Tahun 2011 sebagaimana telah diubah pada PP No. 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan KSA dan KPA menyatakan bahwa Pemerintah dan Pemda harus menetapkan wilayah yang berbatasan dengan wilayah KSA dan KPA sebagai daerah penyangga untuk menjaga keutuhan KSA dan KPA.

Keberadaan daerah penyangga kawasan konservasi tidak dapat dilepaskan dengan kegiatan pemberdayaan masyarakat di desa-desa penyangga kawasan. Menurut data dari PIKA tahun 2015, setidaknya terdapat

sekitar 6.100 desa berada di sekitar kawasan konservasi. Keberadaan masyarakat desa di sekitar kawasan konservasi merupakan tantangan sekaligus peluang dalam meningkatkan pengelolaan kawasan konservasi. Untuk itu pemerintah perlu untuk melibatkan masyarakat melalui pemberdayaan masyarakat desa daerah penyangga kawasan konservasi.

Renstra Direktorat Jenderal KSDAE Tahun 2015-2019 menyatakan bahwa dalam rangka mendukung salah satu program konservasi sumber daya alam dan ekosistem terdapat indikator kinerja kegiatan (IKK) terkait pengelolaan daerah penyangga dan pemanfaatan kawasan konservasi dengan masyarakat, yang kemudian dinyatakan kembali dalam Pedoman Pelaksanaan Pencapaian IKK Program KSDAE Tahun 2015-2019, yaitu “Jumlah desa di daerah penyangga kawasan konservasi yang dibina sebanyak 77 desa selama 5 tahun”. Hal ini sejalan dengan amanat Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 108 Tahun 2015 Tentang Pengelolaan KSA dan KPA Pasal 49 ayat (2) bahwa “Pemerintah, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota harus memberdayakan masyarakat di sekitar KSA dan KPA dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya.”

Salah satu langkah yang diambil oleh Ditjen KSDAE adalah program pembinaan desa binaan pada UPT lingkup ditjen KSDAE. Desa binaan yang telah ditetapkan dengan Surat Keputusan Direktur Jenderal berjumlah 159 desa dengan 143 pendamping. Desa-desa tersebut diharapkan dilakukan pembinaan secara kontinyu dan komprehensif sampai dengan tahun 2019 dan keberhasilannya diharapkan dapat menjadi model pembinaan bagi desa-desa yang lain di sekitar kawasan konservasi.

2. Tujuan

Tujuan kegiatan Identifikasi dan verifikasi wilayah kemitraan konservasi dan Pemberian akses kelola kepada masyarakat adalah sebagai berikut:

- a. Mengurangi ketergantungan masyarakat atas sumber daya alam di kawasan konservasi
- b. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dalam pemenuhan kebutuhan sandang, pangan dan papan
- c. Membantu masyarakat menggali dan mengembangkan peluang-peluang yang ada bagi pengembangan ekonomi produktif
- d. Memperkuat kelembagaan masyarakat
- e. Meningkatkan pemahaman masyarakat atas manfaat dan kepentingan keberadaan kawasan konservasi

3. Ruang Lingkup

Ruang Lingkup kegiatan Identifikasi dan verifikasi wilayah kemitraan konservasi dan Pemberian akses kelola kepada masyarakat ini meliputi kegiatan pemberian akses kemitraan Konservasi bagi masyarakat.

III. PENERIMA MANFAAT

Berhasilnya kegiatan Identifikasi dan verifikasi wilayah kemitraan konservasi dan Pemberian akses kelola kepada masyarakat adalah:

- a. pengelola kawasan konservasi dalam hal berkurangnya interaksi negatif masyarakat dengan kawasan dan;
- b. masyarakat (peningkatan pendapatan masyarakat di daerah penyangga kawasan konservasi)

IV. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan
UPT KSDA

Komponen	Keterangan
Pengumpulan data dan informasi potensi desa	Dilakukan dengan cara mengumpulkan data dan informasi potensi desa yang akan berkolaborasi
Penyusunan rencana Kemitraan dengan masyarakat desa di daerah penyangga kawasan konservasi	Dilaksanakan oleh UPT, melibatkan kelompok binaan dengan target tersusunnya Rencana Pemberdayaan Masyarakat desa binaan selama 5 tahun
Perjanjian Kerjasama	Melakukan kesepakatan Perjanjian Kerjasama

V. KURUN WAKTU PENCAPAIAN KELUARAN

Pencapaian indikator kinerja kegiatan ini akan dilaksanakan dalam rentang waktu 1 (satu) tahun selama tahun 2021

I.	Program/Kegiatan/Strategi	Periode											
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	Identifikasi dan verifikasi wilayah kemitraan konservasi												
2	Pemberian akses kelola kepada masyarakat												

VI. USULAN ANGGARAN PELAKSANAAN PROYEK

Alokasi anggaran kegiatan pencapaian pada tahun 2021 dengan rincian sebagaimana pada Tabel berikut :

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
5421.AED	Perjanjian	840	PERJANJIAN		2.366.000.000	
5421.AED.001	Akses Pemanfaatan Kemitraan Konservasi di Kawasan Konservasi	840	HEKTAR		2.366.000.000	
051	Identifikasi dan verifikasi wilayah kemitraan konservasi				1.350.000.000	
A	Inventarisasi dan Verifikasi Kegiatan Pemanfaatan Kawasan Konservasi				841.000.000	
521211	Belanja Bahan				14.000.000	RM
	• Bahan dan pelaporan	5	KEG	1.000.000	5.000.000	
	• Konsumsi rapat dengan masyarakat [30 org x 5 lks]	150	OH	60.000	9.000.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				378.000.000	PNP
	• Operasional personel resort [30 org x 7 hari x 5 keg]	1050	ORANG	360.000	378.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				449.000.000	PNP
	• Perjalanan tenaga teknis balai [8 org x 5 keg]	40	OT	5.000.000	200.000.000	
	• Perjalanan tenaga teknis bidang/ seksi [8 org x 5 keg]	40	OT	2.000.000	80.000.000	
	• Perjalanan supervisi dari balai dan bidang [6 org x 5 keg]	30	OT	2.500.000	75.000.000	
	• Perjalanan pimpinan untuk konsultasi ke pusat	10	OT	9.400.000	94.000.000	
B	Pembentukan kelompok kemitraan				379.500.000	
521211	Belanja Bahan				9.500.000	RM
	• Bahan dan pelaporan	5	KEG	1.000.000	5.000.000	
	• Konsumsi [15 org x 5 lks]	75	OH	60.000	4.500.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				12.500.000	PNP
	• Pembuatan dan pemasangan papan nama kelompok	5	UNIT	2.500.000	12.500.000	
522151	Belanja Jasa Profesi				17.500.000	RM

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
	• Honor narasumber pemerintah setempat	35	OJ	500.000	17.500.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				340.000.000	RM
	• Perjalanan fasilitator dari perguruan tinggi/LSM [6 org x 5 keg]	30	OT	2.500.000	75.000.000	
	• Perjalanan panitia dalam pembentukan kelompok di Timor [5 org x 2 keg]	10	OT	2.500.000	25.000.000	
	• Perjalanan panitia dalam pembentukan kelompok di Flores [6 org x 3 keg]	18	OT	6.000.000	108.000.000	
	• Perjalanan pelaksana kegiatan dari bidang/seksi/resort [6 org x 5 keg]	30	OT	2.500.000	75.000.000	
	• Perjalanan supervisi di Flores	6	OT	6.000.000	36.000.000	
	• Perjalanan supervisi di Timor	7	OT	3.000.000	21.000.000	
C	Inventarisasi sosek masyarakat di sekitar TWAL Teluk Maumere				32.900.000	
521211	Belanja Bahan				2.650.000	RM
	• Bahan dan pelaporan	1	KEG	750.000	750.000	
	• Obat-obatan	1	KEG	500.000	500.000	
	• Personal use [7 org]	7	ORG	200.000	1.400.000	
522141	Belanja Sewa				7.250.000	RM
	• Sewa Perahu	1	KEG	7.250.000	7.250.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				23.000.000	RM
	• Perjalanan tim dari bidang	2	OT	5.000.000	10.000.000	
	• Perjalanan tim dari seksi	2	OT	3.500.000	7.000.000	
	• Perjalanan tim dari resort	3	OT	2.000.000	6.000.000	
D	Inventarisasi sosek masyarakat di sekitar TWAL 17 Pulau				25.900.000	
521211	Belanja Bahan				2.900.000	RM
	• Bahan dan pelaporan	1	KEG	1.000.000	1.000.000	

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
	• Obat-obatan	1	KEG	500.000	500.000	
	• Personal use [7 org]	7	ORG	200.000	1.400.000	
522141	Belanja Sewa				3.000.000	RM
	• Sewa Perahu	1	KEG	3.000.000	3.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				20.000.000	RM
	• Perjalanan tim dari bidang	2	OT	4.000.000	8.000.000	
	• Perjalanan tim dari seksi	2	OT	3.000.000	6.000.000	
	• Perjalanan tim dari resort	3	OT	2.000.000	6.000.000	
E	Inventarisasi sosek masyarakat di sekitar TWAL Teluk Kupang				24.900.000	
521211	Belanja Bahan				2.900.000	RM
	• Bahan dan pelaporan	1	KEG	1.000.000	1.000.000	
	• Obat-obatan	1	KEG	500.000	500.000	
	• Personal use [7 org]	7	ORG	200.000	1.400.000	
522141	Belanja Sewa				2.500.000	RM
	• Sewa Perahu	1	KEG	2.500.000	2.500.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				19.500.000	RM
	• Perjalanan tim dari bidang	2	OT	3.500.000	7.000.000	
	• Perjalanan tim dari seksi	2	OT	2.500.000	5.000.000	
	• Perjalanan tim dari resort	3	OT	2.500.000	7.500.000	
F	Inventarisasi sosek masyarakat di sekitar TWA Bipolo				23.400.000	
521211	Belanja Bahan				2.900.000	RM
	• Bahan dan pelaporan	1	KEG	1.000.000	1.000.000	
	• Obat-obatan	1	KEG	500.000	500.000	
	• Personal use [7 org]	7	ORG	200.000	1.400.000	
522141	Belanja Sewa				2.500.000	RM
	• Sewa Kendaraan	1	KEG	2.500.000	2.500.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				18.000.000	RM
	• Perjalanan tim dari bidang	2	OT	2.500.000	5.000.000	
	• Perjalanan tim dari seksi	2	OT	3.500.000	7.000.000	

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
	• Perjalanan tim dari resort	3	OT	2.000.000	6.000.000	
G	Inventarisasi sosek masyarakat di sekitar TB Bena				22.400.000	
521211	Belanja Bahan				2.900.000	RM
	• Bahan dan pelaporan	1	KEG	1.000.000	1.000.000	
	• Obat-obatan	1	KEG	500.000	500.000	
	• Personal use	7	ORG	200.000	1.400.000	
522141	Belanja Sewa				2.500.000	RM
	• Sewa kendaraan	1	KEG	2.500.000	2.500.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				17.000.000	RM
	• Perjalanan tim dari bidang	2	OT	2.500.000	5.000.000	
	• Perjalanan tim dari seksi	2	OT	3.000.000	6.000.000	
	• Perjalanan tim dari resort	3	OT	2.000.000	6.000.000	
052	Pemberian akses kelola kepada masyarakat				1.016.000.000	
A	Penandatanganan PKS dalam rangka pemanfaatan kawasan melalui skema kemitraan				608.000.000	
521211	Belanja Bahan				23.000.000	RM
	• Bahan dan pelaporan	5	KEG	2.500.000	12.500.000	
	• Konsumsi [30 org x 5 keg]	150	OH	60.000	9.000.000	
	• Spanduk [5 keg x 4 m2]	20	M2	75.000	1.500.000	
522141	Belanja Sewa				5.000.000	RM
	• Sewa ruangan dalam rangka penandatanganan PKS	5	KEG	1.000.000	5.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi				35.000.000	RM
	• Honor narasumber pemerintah setempat dan tokoh masyarakat	35	OJ	1.000.000	35.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				515.000.000	PNP
	• Perjalanan dalam rangka penandatanganan PKS dari balai ke Flores [10 org x 3 keg]	30	OT	6.500.000	195.000.000	

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
	• Perjalanan dalam rangka penandatanganan PKS dari balai ke Timor [10 org x 2 keg]	20	OT	3.500.000	70.000.000	
	• Perjalanan dalam rangka penandatanganan PKS dari bidang/ seksi [10 org x 5 keg]	50	OT	4.000.000	200.000.000	
	• Perjalanan dalam rangka penandatanganan PKS dari RKW [5 org x 5 keg]	25	OT	2.000.000	50.000.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				30.000.000	RM
	• Uang Saku Peserta	150	OH	100.000	15.000.000	
	• Uang Trasport Peserta	150	OH	100.000	15.000.000	
B	Supervisi kemitraan konservasi di Bidang KSDA Wilayah I dan II				408.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				408.000.000	RM
	• Perjalanan dinas ke Bidang Wilayah I (supervisi kegiatan identifikasi dan verifikasi kemitraan konservasi)	6	OT	3.500.000	21.000.000	
	• Perjalanan dinas ke Bidang Wilayah II (supervisi kegiatan identifikasi dan verifikasi kemitraan konservasi)	6	OT	6.500.000	39.000.000	
	• Perjalanan dinas ke Bidang Wilayah I (supervisi kegiatan identifikasi dan verifikasi kemitraan konservasi)	6	OT	3.500.000	21.000.000	
	• Perjalanan dinas ke Bidang Wilayah II (supervisi kegiatan identifikasi dan verifikasi kemitraan konservasi)	6	OT	3.500.000	21.000.000	
	• Perjalanan pimpinan untuk konsultasi ke pusat/provinsi lain	30	OT	10.200.000	306.000.000	
5421.BDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	10	LEMBAGA		1.398.000.000	
5421. BDB.001	Fasilitasi Usaha Ekonomi Produktif di Kawasan Konservasi	10	DESA		1.398.000.000	

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
051	Pengembangan Kelembagaan/ Kelompok Masyarakat di sekitar KK				240.000.000	
A	Inventarisasi dan Identifikasi Potensi Blok Tradisional (Timor dan Flores)				87.650.000	
521211	Belanja Bahan				6.650.000	RM
	• Alat bahan	2	KEG`	1.325.000	2.650.000	
	• Konsumsi rapat	40	OH	60.000	2.400.000	
	• Penggandaan bahan/laporan	1500	LBR	400	600.000	
	• Pendjilidan laporan	20	EKSPL	50.000	1.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				81.000.000	RM
	• Perjalanan dari bidang/seksi [9 org x 2 keg]	18	OT	3.000.000	54.000.000	
	• Perjalanan dari resort	9	OT	1.500.000	13.500.000	
	• Perjalanan dari 3 pilar	9	OT	1.500.000	13.500.000	
B	Pembahasan dalam rangka verifikasi				51.800.000	
521211	Belanja Bahan				3.800.000	RM
	• Alat bahan	2	KEG`	700.000	1.400.000	
	• Konsumsi rapat	40	OH	60.000	2.400.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				40.000.000	RM
	• Perjalanan dari Bidang	10	OT	2.500.000	25.000.000	
	• Perjalanan dari seksi	10	OT	1.500.000	15.000.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				8.000.000	RM
	• Uang Saku masyarakat	40	OH	100.000	4.000.000	
	• Uang Transport masyarakat	40	OH	100.000	4.000.000	
C	Penguatan Kapasitas Kelembagaan Kelompok Mitra Konservasi				55.100.000	
521211	Belanja Bahan				4.100.000	RM
	• Alat bahan	2	KEG`	700.000	1.400.000	
	• Konsumsi rapat	40	OH	55.000	2.200.000	
	• Penggandaan bahan/laporan	500	LBR	400	200.000	
	• Pendjilidan laporan	6	EKSPL	50.000	300.000	

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
522151	Belanja Jasa Profesi				8.000.000	RM
	• Honor Narasumber dari instansi terkait	16	OJ	500.000	8.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				35.000.000	RM
	• Perjalanan dari bidang	8	OT	2.500.000	20.000.000	
	• Perjalanan dari seksi	10	OT	1.500.000	15.000.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				8.000.000	RM
	• Uang Saku Peserta	40	OH	100.000	4.000.000	
	• Uang Transport Peserta	40	OH	100.000	4.000.000	
D	Pembentukan Kelompok Binaan di Flores				17.250.000	
521211	Belanja Bahan				2.750.000	RM
	• Alat bahan	2	KEG`	700.000	1.400.000	
	• Konsumsi rapat	20	OH	60.000	1.200.000	
	• Penggandaan bahan/laporan	127	LBR	400	50.000	
	• Pendjilidan laporan	2	EKSPL	50.000	100.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				10.500.000	RM
	• Perjalanan dari resort	4	OT	1.500.000	6.000.000	
	• Perjalanan Unsur 3 Pilar	3	OT	1.500.000	4.500.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				4.000.000	RM
	• Uang Saku Peserta	20	OH	100.000	2.000.000	
	• Uang Transport Peserta	20	OH	100.000	2.000.000	
E	Penyusunan RKT Kelompok Binaan di Flores				6.600.000	
521211	Belanja Bahan				2.600.000	RM
	• Alat bahan	2	KEG`	700.000	1.400.000	
	• Konsumsi rapat	20	OH	60.000	1.200.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				4.000.000	RM
	• Uang Saku Peserta	20	OH	100.000	2.000.000	

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
	• Uang Transport Peserta	20	OH	100.000	2.000.000	
F	Evaluasi Kemitraan Konservasi				21.600.000	
521211	Belanja Bahan				2.600.000	RM
	• Alat bahan	2	KEG`	700.000	1.400.000	
	• Konsumsi rapat	20	OH	60.000	1.200.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				15.000.000	RM
	• Perjalanan dari Balai	2	OT	5.000.000	10.000.000	
	• Perjalanan dari Bidang	2	OT	2.500.000	5.000.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				4.000.000	RM
	• Uang Saku Peserta	20	OH	100.000	2.000.000	
	• Uang Transport Peserta	20	OH	100.000	2.000.000	
052	Pendampingan dalam rangka pemberdayaan masyarakat (kumulatif)				258.000.000	
A	Pelatihan keterampilan dan pendampingan desa binaan di Timor dan Flores				194.600.000	
521211	Belanja Bahan				56.400.000	RM
	• Pembuatan materi pelatihan	2	KEG`	5.000.000	10.000.000	
	• Pembuatan buku pelatihan	2	KEG	10.000.000	20.000.000	
	• Personal use	60	UNIT	200.000	12.000.000	
	• Konsumsi peserta [30 org x 2 hari x 2 lks x 2 keg	240	OH	60.000	14.400.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan				25.200.000	RM
	• Honor tenaga pendamping dari instansi terkait [3 org x 12 bln x 2 keg]	72	OB	350.000	25.200.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				113.000.000	RM
	• Perjalanan narasumber pelatihan ke Timor	6	OT	2.500.000	15.000.000	
	• Perjalanan narasumber pelatihan ke Flores	6	OT	5.000.000	30.000.000	

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
	• Perjalanan panitia bidang/seksi di Timor	6	OT	1.500.000	9.000.000	
	• Perjalanan panitia bidang/seksi di Flores	6	OT	1.500.000	9.000.000	
	• Perjalanan panitia dari balai di Timor	6	OT	3.000.000	18.000.000	
	• Perjalanan panitia dari balai di Flores	4	OT	5.000.000	20.000.000	
	• Perjalanan Operasional Petugas Pendamping	24	OT	500.000	12.000.000	
B	Pelatihan Ekonomi Produktif Budidaya Rumput Laut di TWAL Teluk Kupang				63.400.000	
521211	Belanja Bahan				7.950.000	RM
	• Alat dan bahan	1	KEG`	5.000.000	5.000.000	
	• Konsumsi peserta	30	ORG	60.000	1.800.000	
	• Penggandaan bahan/laporan	1500	LBR	400	600.000	
	• Pendjilidan laporan	11	EKSPL	50.000	550.000	
522151	Belanja Jasa Profesi				4.200.000	RM
	• Narasumber dari instansi terkait [3 org x 2 jam]	6	OJ	700.000	4.200.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				51.250.000	RM
	• Perjalanan petugas Balai	6	OT	2.500.000	15.000.000	
	• Perjalanan petugas dari BKW I	7	OT	2.500.000	17.500.000	
	• Perjalanan petugas dari seksi/ resort	7	OT	1.250.000	8.750.000	
	• Perjalanan pimpinan dalam rangka koordinasi/konsultasi ke pusat/ provinsi lain	1	OT	10.000.000	10.000.000	
053	Pengelolaan Usaha Ekonomi Produktif Masyarakat Desa di sekitar KK				900.000.000	
A	Bantuan ekonomi produktif				900.000.000	
526122	Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang				900.000.000	RM

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
	• Bantuan ekonomi produktif di Timor (Sulamu, Camplong II, Baumata, Oekiu, Bena)	5	KEG	90.000.000	450.000.000	
	• Bantuan ekonomi produktif di Flores (Colol, Gololoni, Kloangpopot, Koja Doi, Latung)	5	KEG	90.000.000	450.000.000	
5421.PBV	Kebijakan Bidang Kehutanan	3.626	Rekomendasi Kebijakan		4.098.000.000	
5421.PBV.002	Area terbuka (Opened Area) di kawasan konservasi yang ditangani	3.626	Hektar		1.873.000.000	
051	Penyelesaian Konflik Tenurial di Kawasan Konservasi				1.050.000.000	
A	Penyelesaian Konflik Tenurial berbasis 3 pilar di TWA Ruteng seluas 449,74 Ha				215.700.000	
521211	Belanja Bahan				35.000.000	RM
	• Alat dan bahan	10	KEG	1.200.000	12.000.000	
	• Konsumsi rapat masyarakat [40 ORG x 10 KEG]	400	OH	50.000	20.000.000	
	• Spanduk [4 M2 x 10 KEG]	40	M2	75.000	3.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi				56.000.000	RM
	• Honor narasumber pemda, agama, adat [2 jpl x 2 org x 10 keg]	40	OJ	900.000	36.000.000	
	• Honor moderator pemerintah daerah [2 ok x 2 org x 10 keg]	40	OJ	500.000	20.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				18.700.000	RM
	• Perjalanan Petugas dari Bidang dan Seksi [5 org x 10 keg]	50	OT	170.000	8.500.000	
	• Perjalanan Petugas dari resort [2 org x 10 keg]	20	OT	170.000	3.400.000	
	• Perjalanan Petugas untuk koordinasi [2 org x 2 hari x 10 keg]	40	OT	170.000	6.800.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				106.000.000	RM

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
	• Uang saku peserta [35 org x 10 keg]	350	OH	100.000	35.000.000	
	• Transport peserta [35 org x 10 keg]	350	OH	100.000	35.000.000	
	• Transport peserta dari ruteng [4 org x 10 keg]	40	OH	300.000	12.000.000	
	• Transport peserta dari borong [4 org x 10 keg]	40	OH	300.000	12.000.000	
	• Transport peserta dari kecamatan [4 org x 10 keg]	40	OH	300.000	12.000.000	
B	Pelatihan Budidaya Ikan Lele masyarakat sekitar di SM Kateri				377.700.000	
521211	Belanja Bahan				34.650.000	RM
	• Alat dan bahan	3	KEG	2.000.000	6.000.000	
	• Personal use	60	ORG	200.000	12.000.000	
	• Biaya konsumsi fasilitasi/ pendampingan (20 orang, 2 kali makan dan snack selama 2 hari)	240	OH	60.000	14.400.000	
	• Penggandaan bahan/materi	1500	LBR	400	600.000	
	• Pendjilidan laporan	15	EKSPL	50.000	750.000	
	• Spanduk	12	M2	75.000	900.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan				5.250.000	RM
	• Penanggungjawab	3	OK	450.000	1.350.000	
	• Ketua	3	OK	400.000	1.200.000	
	• Sekretaris	3	OK	300.000	900.000	
	• Anggota	6	OK	300.000	1.800.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				15.000.000	RM
	• Perlengkapan fasilitasi/ pendampingan	3	PKT	5.000.000	15.000.000	
522141	Belanja Sewa				6.000.000	RM
	• Sewa ruangan [2 hr x 3 keg]	6	HR	1.000.000	6.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi				52.800.000	RM

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
	• Honor Pengajar Teori dari Luar Instansi Penyelenggara [6 jpl x 3 keg]	18	OJ	1.000.000	18.000.000	
	• Honor narasumber instansi terkait	12	OJ	900.000	10.800.000	
	• Honor Pengajar Praktek dari Luar Instansi Penyelenggara	18	OJ	1.000.000	18.000.000	
	• Honor Moderator instansi terkait	12	OK	500.000	6.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				108.000.000	RM
	• Perjalanan dinas dalam rangka pelatihan/peningkatan kapasitas (panitia lokal)	12	OT	1.500.000	18.000.000	
	• Perjalanan dinas dalam rangka pelatihan/peningkatan kapasitas (pengajar)	6	OT	8.000.000	48.000.000	
	• Supervisi kegiatan dari Balai Besar / Bidang ke lokasi pembibitan	6	OT	3.000.000	18.000.000	
	• Supervisi kegiatan dari Seksi ke lokasi pembibitan	6	OT	3.000.000	18.000.000	
	• Perjalanan petugas dalam rangka pelaksanaan kegiatan	6	OT	1.000.000	6.000.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				6.000.000	RM
	• Uang saku peserta [10 org x 2 HARI x 3 keg]	60	OH	100.000	6.000.000	
526122	Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang				150.000.000	RM
	• Bantuan bibit dan peralatan budidaya lele	3	KEG	50.000.000	150.000.000	
C	Pembuatan Tempat Pengamatan Satwa (Rumah Pohon) di SM Kateri				98.020.000	
521211	Belanja Bahan				37.520.000	RM
	• Alat dan bahan	2	KEG	1.000.000	2.000.000	
	• Bahan makanan tenaga lapangan [5 org x 15 hr x 2 lks]	150	OH	50.000	7.500.000	

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
	• Balok kayu untuk kerangka rumah (8 cm x 12 cm) [20 btg x 2 lks]	40	BUAH	150.000	6.000.000	
	• Papan kayu (4 cm x 8 cm) [60 btg x 2 lks]	120	BUAH	125.000	15.000.000	
	• Alang-alang/rumbia/daun lontar [40 lbr x 2 lks]	80	BUAH	7.500	600.000	
	• Paku 5 [3 kg x 2 lks]	6	KG	50.000	300.000	
	• Paku 7 [3 kg x 2 lks]	6	KG	40.000	240.000	
	• Paku 10 [3 kg x 2 lks]	6	KG	30.000	180.000	
	• Tali Hekena (gewang) untuk ikat [7 glng x 2 lks]	14	GLNG	50.000	700.000	
	• Balok kayu untuk tangga dan pagar rumah [15 buah x 2 lks]	30	BUAH	150.000	4.500.000	
	• Pendjilidan laporan [5 ekspl x 2 keg]	10	EKSPL	50.000	500.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				22.500.000	RM
	• Honor tenaga kerja untuk pembuatan rumah pohon [5 org x 15 hr x 2 lks]	150	HOK	100.000	15.000.000	
	• Pembuatan gambar / desain Rumah Pohon	1	PKT	7.500.000	7.500.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				38.000.000	RM
	• Supervisi kegiatan dari Balai Besar / Bidang [2 org x 2 lks]	4	OT	5.500.000	22.000.000	
	• Supervisi kegiatan dari Bidang [2 org x 2 lks]	4	OT	3.000.000	12.000.000	
	• Perjalanan petugas dalam rangka pelaksanaan kegiatan [2 org x 2 lks]	4	OT	1.000.000	4.000.000	
D	Pembentukan kelompok budidaya bambu di SM kateri				131.640.000	
521211	Belanja Bahan				11.500.000	RM
	• Alat dan bahan	1	KEG	2.000.000	2.000.000	
	• Personal use	20	ORG	200.000	4.000.000	

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
	• Biaya konsumsi fasilitasi/ pendampingan (panitia, narasumber, moderator dan peserta), (20 orang, 2 kali makan dan snack selama 2 hari)	80	OH	60.000	4.800.000	
	• Penggandaan bahan/materi	500	LBR	400	200.000	
	• Pendjilidan laporan	4	EKSPL	50.000	200.000	
	• Spanduk	4	M2	75.000	300.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan				1.750.000	RM
	• Penanggungjawab	1	OK	450.000	450.000	
	• Ketua	1	OK	400.000	400.000	
	• Sekretaris	1	OK	300.000	300.000	
	• Anggota	2	OK	300.000	600.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				5.000.000	RM
	• Perlengkapan fasilitasi/ pendampingan	1	PKT	5.000.000	5.000.000	
522141	Belanja Sewa				2.000.000	RM
	• Sewa ruangan [2 hr]	2	OH	1.000.000	2.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi				18.000.000	RM
	• Honor Pengajar Teori dari Luar Instansi Penyelenggara	6	OJ	1.000.000	6.000.000	
	• Honor narasumber instansi terkait	4	OJ	1.000.000	4.000.000	
	• Honor Pengajar Praktek dari Luar Instansi Penyelenggara	6	OJ	1.000.000	6.000.000	
	• Honor Moderator instansi terkait	4	OK	500.000	2.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				36.000.000	RM
	• Perjalanan dinas dalam rangka pelatihan/peningkatan kapasitas (panitia lokal)	4	OT	1.500.000	6.000.000	
	• Perjalanan dinas dalam rangka pelatihan/peningkatan kapasitas (pengajar)	2	OT	8.000.000	16.000.000	

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
	• Supervisi kegiatan dari Balai Besar / Bidang ke lokasi pembibitan	2	OT	3.000.000	6.000.000	
	• Supervisi kegiatan dari Seksi ke lokasi pembibitan	2	OT	3.000.000	6.000.000	
	• Perjalanan petugas dalam rangka pelaksanaan kegiatan	2	OT	1.000.000	2.000.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				2.000.000	RM
	• Uang saku peserta [10 org x 2 HARI]	20	OH	100.000	2.000.000	
526122	Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ Pemda dalam bentuk uang				55.390.000	RM
	• Bantuan ekonomi produktif budidaya bambu	1	KEG	55.390.000	55.390.000	
E	Pembuatan Jalur Tracking Wisata pada kawasan Suaka Margasatwa Kateri				102.090.000	
521211	Belanja Bahan				58.500.000	RM
	• Alat Bahan dan Peralatan	3	KEG	1.500.000	4.500.000	
	• Bahan makanan tenaga lapangan [30 ORG x 9 HR]	270	OH	50.000	13.500.000	
	• Bahan-bahan pengerasan jalur tracking	3	KM	10.000.000	30.000.000	
	• Pembuatan papan informasi interpretasi	5	BUAH	2.000.000	10.000.000	
	• Pendjilidan laporan	10	EKSPL	50.000	500.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				31.590.000	RM
	• Upah Kerja untuk pembuatan tracking 3 km [30 org x 9 hari]	270	HOK	100.000	27.000.000	
	• Honor pengawas kegiatan [9 org x 3 hari]	27	HOK	170.000	4.590.000	
524111	• Belanja Perjalanan Dinas Biasa				12.000.000	RM
	• Supervisi dan pengawasan kegiatan jalur tracking	6	OT	2.000.000	12.000.000	

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
F	Pelatihan Budidaya Lebah madu masyarakat sekitar di SM Kateri				124.850.000	
521211	Belanja Bahan				10.500.000	RM
	• Alat dan bahan	1	KEG	1.000.000	1.000.000	
	• Personal use	20	ORG	200.000	4.000.000	
	• Biaya konsumsi fasilitasi/ pendampingan (panitia, narasumber, moderator dan peserta), (20 orang, 2 kali makan dan snack selama 2 hari)	80	OH	60.000	4.800.000	
	• Penggandaan bahan/materi	500	LBR	400	200.000	
	• Pendjilidan laporan	4	EKSPL	50.000	200.000	
	• Spanduk	4	M2	75.000	300.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan				1.750.000	RM
	• Penggungjawab	1	OK	450.000	450.000	
	• Ketua	1	OK	400.000	400.000	
	• Sekretaris	1	OK	300.000	300.000	
	• Anggota	2	OK	300.000	600.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				5.000.000	RM
	• Perlengkapan fasilitasi/ pendampingan	1	PKT	5.000.000	5.000.000	
522141	Belanja Sewa				2.000.000	RM
	• Sewa ruangan [2 hr]	2	HR	1.000.000	2.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi				17.600.000	RM
	• Honor Pengajar Teori dari Luar Instansi Penyelenggara	6	OJ	1.000.000	6.000.000	
	• Honor narasumber instansi terkait	4	OJ	900.000	3.600.000	
	• Honor Pengajar Praktek dari Luar Instansi Penyelenggara	6	OJ	1.000.000	6.000.000	
	• Honor Moderator instansi terkait	4	OK	500.000	2.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				36.000.000	RM

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
	• Perjalanan dinas dalam rangka pelatihan/peningkatan kapasitas (panitia lokal)	4	OT	1.500.000	6.000.000	
	• Perjalanan dinas dalam rangka pelatihan/peningkatan kapasitas (pengajar)	2	OT	8.000.000	16.000.000	
	• Supervisi kegiatan dari Balai Besar / Bidang ke lokasi pembibitan	2	OT	3.000.000	6.000.000	
	• Supervisi kegiatan dari Seksi ke lokasi pembibitan	2	OT	3.000.000	6.000.000	
	• Perjalanan petugas dalam rangka pelaksanaan kegiatan	2	OT	1.000.000	2.000.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				2.000.000	RM
	• Uang saku peserta [10 org x 2 HARI]	20	OH	100.000	2.000.000	
526122	Belanja Peralatan dan Mesin Untuk Diserahkan kepada Masyarakat/ emda dalam bentuk uang				50.000.000	RM
	• Bantuan ekonomi produktif budidaya lebah madu	1	KEG	50.000.000	50.000.000	
052	Pemulihan Ekosistem di Kawasan Konservasi bersama Masyarakat Desa				823.000.000	
A	Kajian Pemulihan ekosistem di SM Kateri, TWA Bipolo, TWA Baumata, TWA Menipo				70.400.000	
521211	Belanja Bahan				6.000.000	RM
	• Bahan dan pelaporan	4	PAKET	500.000	2.000.000	
	• Obat-obatan	4	REGU	250.000	1.000.000	
	• Bahan makanan buruh [3 orang x 5 hari x 4 keg]	60	OH	50.000	3.000.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				8.400.000	RM
	• Upah buruh [3 org x 5 hari x 4 keg]	60	OH	100.000	6.000.000	

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
	• Perlengkapan lapangan	4	REGU	600.000	2.400.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				56.000.000	RM
	• Perjalanan Tenaga Ahli/Akademisi [1 org x 4 keg]	4	OT	3.000.000	12.000.000	
	• Perjalanan pelaksana teknis dari Balai [2 org x 4 keg]	8	OT	3.000.000	24.000.000	
	• Perjalanan pelaksana teknis dari Bidang/seksi/resort [2 org x 4 keg]	8	OT	2.500.000	20.000.000	
B	Penyusunan Rencana Pemulihan ekosistem di SM Kateri, TWA Bipolo, TWA Baumata, TWA Menipo				36.200.000	
521211	Belanja Bahan				5.600.000	RM
	• Bahan dan pelaporan	1	KEG	2.000.000	2.000.000	
	• Konsumsi rapat pembahasan hasil dengan pihak pemerintah daerah, pihak agama, pihak adat, masyarakat [60 org x 1 hari x 1 keg]	60	OH	60.000	3.600.000	
522151	Belanja Jasa Profesi				3.600.000	RM
	• Narasumber tenaga ahli	4	OJ	900.000	3.600.000	
524111	• Belanja Perjalanan Dinas Biasa				27.000.000	RM
	• Perjalanan pelaksana teknis dari Bidang/seksi/resort [7 org x 1 keg]	7	OT	3.000.000	21.000.000	
	• Transport lokal [60 org x 1 keg]	60	OH	100.000	6.000.000	
C	Penyusunan RKT PE kawasan SM Kateri, TWA Bipolo, TWA Baumata, TWA Menipo				32.600.000	
521211	Belanja Bahan				5.600.000	RM
	• Bahan dan pelaporan	1	KEG	2.000.000	2.000.000	
	• Konsumsi rapat pembahasan RKT PE dengan pihak pemerintah daerah, pihak agama, pihak adat, masyarakat [60 org x 1 hari x 1 keg]	60	OH	60.000	3.600.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				27.000.000	RM

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
	• Perjalanan pelaksana teknis dari Bidang/seksi/resort [7 org x 1 keg]	7	OT	3.000.000	21.000.000	
	• Transport lokal [60 org x 1 keg]	60	OH	100.000	6.000.000	
D	Penanaman Pengkayaan di TWA Camplong, TB Bena, SM Egon Ilemedo dan TWAL 17 pulau seluas 324 Ha				595.380.000	
521211	Belanja Bahan				143.700.000	RM
	• Pengadaan ajir [324 ha x 500 btg]	162.000	BTG	250	40.500.000	
	• Bahan peralatan kerja	4	KEG	1.500.000	6.000.000	
	• Konsumsi buruh	1600	OH	60.000	96.000.000	
	• Pembuatan papan nama	4	UNIT	300.000	1.200.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan				340.000.000	RM
	• Upah penyiapan lahan	400	OH	100.000	40.000.000	
	• Upah pemasangan ajir	200	OH	100.000	20.000.000	
	• Upah pembuatan lubang tanaman	1600	HOK	100.000	160.000.000	
	• Upah pengangkutan bibit dan ajir ke lubang tanaman	200	HOK	100.000	20.000.000	
	• Upah pengangkutan bibit dari tempat persemaian ke tempat transit (Lokasi penanaman pengayaan) dan ajir	200	HOK	100.000	20.000.000	
	• Upah penanaman	800	HOK	100.000	80.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				111.680.000	RM
	• Uang harian pelaksana teknis dilapangan/supervisi	150	OH	250.000	37.500.000	
	• Transport lokal	40	KALI	200.000	8.000.000	
	• Perjalanan supervisi Balai	8	OT	3.500.000	28.000.000	
	• Perjalanan koordinasi/ konsultasi` pimpinan ke pusat/ provinsi lain	4	OT	9.545.000	38.180.000	
E	Pemulihan Terumbu Karang di TWAL Gugus Pulau Teluk Maumere dan TWA 17 Pulau (16 M2)				57.900.000	

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
521211	Belanja Bahan				34.000.000	RM
	• Bahan dan perlengkapan (media dan bibit tanam)	200	RAK	150.000	30.000.000	
	• Bahan dan pelaporan	2	KEG	500.000	1.000.000	
	• Konsumsi buruh [5 org x 5 hari x 2 keg]	50	OH	60.000	3.000.000	
521219	• Belanja Barang Non Operasional Lainnya				23.900.000	RM
	• Upah buruh [5 ORANG x 5 HARI x 2 KEG] [5 org x 5 hari x 2 keg]	50	OH	100.000	5.000.000	
	• Uang harian pelaksana teknis di lapangan [3 org x 5 hari x 2 keg]	30	OH	230.000	6.900.000	
	• BBM kapal ke lapangan	2	KEG	6.000.000	12.000.000	
F	Monitoring dan Evaluasi Pemulihan Ekosistem				30.520.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				30.520.000	RM
	• Monitoring dan evaluasi PE ke SM Kateri	3	OT	3.000.000	9.000.000	
	• Monitoring dan evaluasi PE ke TWA Menipo	3	OT	2.500.000	7.500.000	
	• Monitoring dan evaluasi PE ke TWA Baumata	3	OT	1.500.000	4.500.000	
	• Monitoring dan evaluasi PE ke TWA Bipolo	3	OT	2.000.000	6.000.000	
	• Perjalanan dari resort untuk monitoring dan evaluasi PE [4 org x 4 keg]	16	OT	220.000	3.520.000	
5421. PBV.006	Kawasan Konservasi yang ditingkatkan efektivitas pengelolaannya	1	Unit KK		2.225.000.000	
051	Penilaian efektivitas pengelolaan kawasan konservasi				375.000.000	
A	Workshop Penilaian Efektifitas Pengelolaan Kawasan (15 Kawasan)				375.000.000	

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
521211	Belanja Bahan				19.350.000	PNP
	• Alat dan bahan	1	KEG	4.600.000	4.600.000	
	• Personal use	70	ORANG	200.000	14.000.000	
	• Backdrop	1	UNIT	750.000	750.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan				2.050.000	PNP
	• Honorarium ketua panitia	1	ORG	450.000	450.000	
	• Honorarium sekretaris	1	ORG	400.000	400.000	
	• Honorarium anggota	4	ORG	300.000	1.200.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				1.320.000	PNP
	• Penggandaan bahan/laporan	800	LMBR	400	320.000	
	• Pendjilidan laporan	20	EKSPL	50.000	1.000.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				352.280.000	PNP
	• Paket Fullboard peserta dari luar kota Kupang [52 orang x 3 hari]	156	OH	700.000	109.200.000	
	• Paket Fullday peserta dari kota Kupang [28 org x 3 hari]	84	OH	375.000	31.500.000	
	• Uang harian H-1 dan H+1 [52 org x 2 hari]	104	OH	430.000	44.720.000	
	• Penginapan H-1 dan H+1 [52 org x 2 hari]	104	OH	500.000	52.000.000	
	• Uang saku meeting dalam kota [50 ORG x 2 HARI]	100	ORG	140.000	14.000.000	
	• Uang saku meeting luar kota [28 ORG x 3 HARI]	84	ORG	140.000	11.760.000	
	• Transportasi dari Kabupaten Alor	3	ORG	1.500.000	4.500.000	
	• Transportasi dari Kabupaten Belu	2	ORG	600.000	1.200.000	
	• Transportasi dari Kabupaten Ngada (Bajawa)	4	ORG	2.000.000	8.000.000	
	• Transportasi dari Kabupaten Malaka	4	ORG	600.000	2.400.000	

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
	• Transportasi dari Kabupaten Kupang (Camplong)	2	ORG	200.000	400.000	
	• Transportasi dari Kabupaten Ende	2	ORG	1.500.000	3.000.000	
	• Transportasi dari Kabupaten Manggarai Barat (Labuan Bajo)	2	ORG	3.000.000	6.000.000	
	• Transportasi dari Kabupaten Sikka	5	ORG	1.500.000	7.500.000	
	• Transportasi dari Kabupaten Kupang (Menipo)	2	ORG	300.000	600.000	
	• Transportasi dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (Bena)	2	ORG	300.000	600.000	
	• Transportasi dari Kabupaten Ngada (Riung)	3	ORG	2.000.000	6.000.000	
	• Transportasi dari Kabupaten Rote Ndao	2	ORG	400.000	800.000	
	• Transportasi dari Kabupaten Manggarai (Ruteng)	8	ORG	3.000.000	24.000.000	
	• Transportasi dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (Soe)	2	ORG	300.000	600.000	
	• Transportasi dari Kabupaten Timor Tengah Selatan (Eban)	2	ORG	300.000	600.000	
	• Perjalanan Narasumber/Fasilitator dari pusat	2	OT	11.450.000	22.900.000	
052	Perencanaan kelola Kawasan Konservasi Jangka Panjang				400.000.000	
A	Penyusunan RPJP Pulau Rusa				97.060.000	
521211	Belanja Bahan				2.810.000	RM
	• Alat bahan	1	KEG	1.500.000	1.500.000	
	• Penggandaan draft RPJP	627	LBR	400	250.000	
	• Pendjilidan dokumen RPJP	10	EKSPL	50.000	500.000	
	• Bahan makan buruh	16	OH	35.000	560.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan				1.600.000	RM
	• Upah buruh pembantu lapangan	16	HOK	100.000	1.600.000	
522141	Belanja Sewa				1.000.000	RM

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
	• Sewa ruangan	1	KEG	1.000.000	1.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi				2.400.000	RM
	• Narasumber instansi terkait dalam pembahasan laporan di kabupaten	2	OJ	700.000	1.400.000	
	• Moderator instansi terkait dalam pembahasan laporan di kabupaten	2	OK	500.000	1.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				72.000.000	RM
	• Perjalanan dari seksi untuk pembahasan di kabupaten	2	OT	3.000.000	6.000.000	
	• Perjalanan dari Seksi untuk kajian lapangan	2	OT	3.000.000	6.000.000	
	• Perjalanan dari Resort untuk kajian lapangan	4	OT	1.000.000	4.000.000	
	• Perjalanan tim dari Balai untuk pembahasan di kabupaten	3	OT	4.500.000	13.500.000	
	• Perjalanan dalam rangka supervisi	2	OT	4.500.000	9.000.000	
	• Perjalanan dari Kupang untuk kajian lapangan	3	OT	4.500.000	13.500.000	
	• Perjalanan pimpinan dalam rangka konsultasi/ koordinasi	2	OT	10.000.000	20.000.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				17.250.000	RM
	• Paket fullday rapat pembahasan di kabupaten	30	OH	375.000	11.250.000	
	• Bantuan transport peserta pembahasan di kabupaten	30	OH	100.000	3.000.000	
	• Bantuan uang saku peserta pembahasan di kabupaten	30	OH	100.000	3.000.000	
B	Penyusunan RPJP TWA Tuti Adagae				96.060.000	
521211	Belanja Bahan				2.810.000	RM
	• Alat bahan	1	KEG	1.500.000	1.500.000	
	• Penggandaan draft RPJP	625	LBR	400	250.000	
	• Pendjilidan dokumen RPJP	10	EKSPL	50.000	500.000	

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
	• Bahan makan buruh	16	OH	35.000	560.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan				1.600.000	RM
	• Upah buruh pembantu lapangan	16	HOK	100.000	1.600.000	
522141	Belanja Sewa				1.000.000	RM
	• Sewa ruangan	1	KEG	1.000.000	1.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi				2.400.000	RM
	• Narasumber instansi terkait pembahasan laporan di kabupaten	2	OJ	700.000	1.400.000	
	• Moderator instansi terkait pembahasan laporan di kabupaten	2	OK	500.000	1.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				71.000.000	RM
	• Perjalanan dari seksi untuk pembahasan di kabupaten	2	OT	3.000.000	6.000.000	
	• Perjalanan dari Seksi untuk kajian lapangan	2	OT	3.000.000	6.000.000	
	• Perjalanan dari Resort untuk kajian lapangan	4	OT	1.000.000	4.000.000	
	• Perjalanan tim dari Balai untuk pembahasan di kabupaten	3	OT	4.500.000	13.500.000	
	• Perjalanan dalam rangka supervisi	2	OT	4.500.000	9.000.000	
	• Perjalanan dari Kupang untuk kajian lapangan	3	OT	4.500.000	13.500.000	
	• Perjalanan pimpinan dalam rangka konsultasi/ koordinasi	2	OT	9.500.000	19.000.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				17.250.000	RM
	• Paket fullday rapat pembahasan di kabupaten	30	OH	375.000	11.250.000	
	• Bantuan transport peserta pembahasan di kabupaten	30	OH	100.000	3.000.000	
	• Bantuan uang saku peserta pembahasan di kabupaten	30	OH	100.000	3.000.000	
C	Penyusunan RPJP TWA Pulau Lapang dan TWA Pulau Batang				95.860.000	

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
521211	Belanja Bahan				2.810.000	RM
	• Alat bahan	1	KEG	1.500.000	1.500.000	
	• Penggandaan draft RPJP	625	LBR	400	250.000	
	• Pendjilidan dokumen RPJP	10	EKSPL	50.000	500.000	
	• Bahan makan buruh	16	OH	35.000	560.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan				1.600.000	RM
	• Upah buruh pembantu lapangan	16	HOK	100.000	1.600.000	
522141	Belanja Sewa				1.000.000	RM
	• Sewa ruangan	1	KEG	1.000.000	1.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi				2.400.000	RM
	• Narasumber instansi terkait pembahasan laporan di kabupaten	2	OJ	700.000	1.400.000	
	• Moderator instansi terkait pembahasan laporan di kabupaten	2	OK	500.000	1.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				70.800.000	RM
	• Perjalanan dari seksi untuk pembahasan di kabupaten	2	OT	3.000.000	6.000.000	
	• Perjalanan dari Seksi untuk kajian lapangan	2	OT	3.000.000	6.000.000	
	• Perjalanan dari Resort untuk kajian lapangan	4	OT	950.000	3.800.000	
	• Perjalanan tim dari Balai untuk pembahasan di kabupaten	3	OT	4.500.000	13.500.000	
	• Perjalanan dalam rangka supervisi	2	OT	4.500.000	9.000.000	
	• Perjalanan dari Kupang untuk kajian lapangan	3	OT	4.500.000	13.500.000	
	• Perjalanan pimpinan dalam rangka konsultasi/ koordinasi	2	OT	9.500.000	19.000.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				17.250.000	RM
	• Paket fullday rapat pembahasan di kabupaten	30	OH	375.000	11.250.000	

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
	• Bantuan transport peserta pembahasan di kabupaten	30	OH	100.000	3.000.000	
	• Bantuan uang saku peserta pembahasan di kabupaten	30	OH	100.000	3.000.000	
D	Penyusunan RPJP CA Wae Wuul				111.020.000	
521211	Belanja Bahan				2.970.000	RM
	• Alat bahan	1	KEG	1.420.000	1.420.000	
	• Penggandaan draft RPJP	625	LBR	400	250.000	
	• Pendjilidan dokumen RPJP	10	EKSPL	50.000	500.000	
	• Bahan makan buruh	16	OH	50.000	800.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan				1.600.000	RM
	• Upah buruh pembantu lapangan	16	HOK	100.000	1.600.000	
522141	Belanja Sewa				1.500.000	RM
	• Sewa ruangan	1	KEG	1.500.000	1.500.000	
522151	Belanja Jasa Profesi				2.400.000	RM
	• Narasumber instansi terkait pembahasan laporan di kabupaten	2	OJ	700.000	1.400.000	
	• Moderator instansi terkait pembahasan laporan di kabupaten	2	OK	500.000	1.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				85.300.000	RM
	• Perjalanan dari seksi untuk pembahasan di kabupaten	2	OT	3.500.000	7.000.000	
	• Perjalanan dari Seksi untuk kajian lapangan	2	OT	3.500.000	7.000.000	
	• Perjalanan dari Resort untuk kajian lapangan	3	OT	1.100.000	3.300.000	
	• Perjalanan tim dari Balai untuk pembahasan di kabupaten	3	OT	6.000.000	18.000.000	
	• Perjalanan dalam rangka supervisi	2	OT	6.000.000	12.000.000	
	• Perjalanan dari Kupang untuk kajian lapangan	3	OT	6.000.000	18.000.000	
	• Perjalanan pimpinan dalam rangka konsultasi/ koordinasi	2	OT	10.000.000	20.000.000	

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				17.250.000	RM
	• Paket fullday rapat pembahasan di kabupaten	30	OH	375.000	11.250.000	
	• Bantuan transport peserta pembahasan di kabupaten	30	OH	100.000	3.000.000	
	• Bantuan uang saku peserta pembahasan di kabupaten	30	OH	100.000	3.000.000	
053	Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi				850.000.000	
A	Patroli Rutin Pengamanan Kawasan (Smart Patrol) Pada Seksi Konservasi Wilayah I				76.500.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				76.500.000	RM
	• Biaya operasional tim [5 rst x 3 bln]	15	OH	300.000	4.500.000	
	• Biaya operasional petugas [24 org x 4 hari x 3 bln]	288	OH	250.000	72.000.000	
B	Patroli Rutin Pengamanan Kawasan (Smart Patrol) Pada Seksi Konservasi Wilayah II				115.500.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				115.500.000	RM
	• Biaya operasional tim RKW TWA Menipo, TWA Camplong, TWAL Teluk Kupang, TWA Baumata dan Bandara El Tari [4 rst x 3 bln]	12	OH	300.000	3.600.000	
	• Biaya operasional tim resort Rote [1 rst x 3 bln]	3	OH	1.300.000	3.900.000	
	• Biaya operasional petugas [36 org x 4 hari x 3 bln]	432	OH	250.000	108.000.000	
C	Patroli Rutin Pengamanan Kawasan (Smart Patrol) di Kawasan Hutan Terrestrial				95.850.000	

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				95.850.000	RM
	• Biaya operasional petugas [3 bln x 9 kws x 4 org x 4 hari)	432	OH	200.000	86.400.000	
	• Biaya operasional tim [9 keg x 3 bln]	27	OH	350.000	9.450.000	
D	Patroli Rutin Pengamanan Kawasan (Smart Patrol) di Kawasan Hutan Perairan				75.000.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				75.000.000	RM
	• Biaya operasional petugas [3 bln x 5 kws x 4 bln x 4 hari	240	OH	200.000	48.000.000	
	• Biaya operasional Tim Alor [3 keg x 3 bln]	9	OH	2.500.000	22.500.000	
	• Biaya operasional Tim Maumere [1 keg x 3 bln]	3	OH	1.500.000	4.500.000	
E	• Koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait				40.000.000	
524111	• Belanja Perjalanan Dinas Biasa				40.000.000	RM
	• Perjalanan dalam rangka koordinasi pengamanan kawasan dengan instansi terkait di SKW I dan II	2	OT	2.000.000	4.000.000	
	• Perjalanan dalam rangka koordinasi pengamanan kawasan dengan instansi terkait di SKW III dan IV	2	OT	2.000.000	4.000.000	
	• Perjalanan dalam rangka supervisi dan koordinasi pengamanan di Flores	2	OT	4.000.000	8.000.000	
	• Perjalanan dalam rangka supervisi dan koordinasi pengamanan di Timor	2	OT	2.000.000	4.000.000	

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
	<ul style="list-style-type: none"> Perjalanan koordinasi/konsultasi pimpinan dalam rangka pengamanan kawasan 	2	OT	10.000.000	20.000.000	
F	Patroli perlindungan dan pengamanan kawasan bersama MMP				247.200.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				247.200.000	RM
	<ul style="list-style-type: none"> Biaya operasional petugas dalam rangka patroli bersama masyarakat [24 KEG x 2 BLN x 4 ORG x 4 HARI) 	768	OH	200.000	153.600.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Upah kegiatan pengamanan bagi anggota MMP [24 keg X 2 BLN x 4 ORG x 4 HARI) 	768	OH	100.000	76.800.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Biaya operasional petugas [24 keg x 2 bln] 	48	KEG	350.000	16.800.000	
G	Pengurusan Administrasi Penggunaan Senjata Api				99.055.000	
521211	Belanja Bahan				38.555.000	RM
	<ul style="list-style-type: none"> Alat dan bahan 	1	KEG	3.105.000	3.105.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Kartu izin penguasaan pinjam pakai senjata api 	30	ORANG	150.000	4.500.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Pesonal use 	1	PKT	4.000.000	4.000.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Tes kesehatan 	30	ORANG	100.000	3.000.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Tes psikologi 	30	ORANG	300.000	9.000.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Koordinasi dan pengendalian 	3	KEG	1.000.000	3.000.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Perpanjangan Buku Pas Senpi tahunan 	29	PCK	150.000	4.350.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Pemeliharaan senjata api 	29	PCK	200.000	5.800.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Konsumsi test kesehatan dan psikologi [30 org] 	60	OH	30.000	1.800.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				60.500.000	RM

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
	• Transportasi personil dalam rangka mengikuti test psikologi dari Labuan Bajo Ruteng, Bajawa	6	OT	5.000.000	30.000.000	
	• Transportasi personil dalam rangka mengikuti test psikologi dari Maumere, Ende, Alor	5	OT	4.000.000	20.000.000	
	• Transportasi personil dalam rangka mengikuti test psikologi dari Belu dan Soe	6	OT	1.500.000	9.000.000	
	• Transportasi personil dalam rangka mengikuti test psikologi dari Kupang	15	OT	100.000	1.500.000	
H	Peningkatan Kapasitas Polhut (Menembak)				85.215.000	
521211	Belanja Bahan				23.965.000	RM
	• Alat dan bahan	1	KEG	1.200.000	1.200.000	
	• Personal use	60	ORANG	200.000	12.000.000	
	• Sertifikat menembak	35	ORANG	25.000	875.000	
	• Alin alongin (sasaran tembak)	1	PKT	4.930.000	4.930.000	
	• Konsumsi [40 org]	80	OH	62.000	4.960.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				61.250.000	RM
	• Transportasi personil dalam rangka mengikuti test psikologi dari Labuan Bajo Ruteng, Bajawa	6	OT	5.000.000	30.000.000	
	• Transportasi personil dalam rangka mengikuti test psikologi dari Maumere, Ende, Alor	5	OT	4.000.000	20.000.000	
	• Perjalanan peserta dari daratan Timor	6	OT	1.500.000	9.000.000	
	• Transportasi personil dalam rangka mengikuti test psikologi dari Kupang	15	OT	150.000	2.250.000	
I	Pengadaan Pakaian Seragam Polhut				15.680.000	
521211	Belanja Bahan				15.680.000	RM

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
	• Pengadaan seragam polhut dan ongkos jahit	28	PSNG	560.000	15.680.000	
054	Pengendalian Kebakaran Hutan				600.000.000	
A	Groundcheck Hotspot dan atau Informasi Kebakaran				114.450.000	
521211	Belanja Bahan				9.450.000	RM
	• Pencetakan/ penggandaan peta kerja	21	LBR	100.000	2.100.000	
	• Penggandaan dan penjilidan	21	EKPL	50.000	1.050.000	
	• Konsumsi rapat evaluasi hasil	105	OH	60.000	6.300.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				105.000.000	RM
	• Transport Perjalanan Dinas	210	OH	100.000	21.000.000	
	• Uang Harian Perjalanan Dinas	210	OH	400.000	84.000.000	
B	Patroli Pencegahan Kebakaran Hutan				28.890.000	
521211	Belanja Bahan				12.390.000	RM
	• Konsumsi rapat persiapan dengan pihak terkait	105	OH	50.000	5.250.000	
	• Belanja Bahan	21	KEG	40.000	840.000	
	• Penggandaan dan penjilidan	21	EKPL	50.000	1.050.000	
	• Konsumsi rapat evaluasi hasil	105	OH	50.000	5.250.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				16.500.000	RM
	• Biaya Operasional Pengamanan Hutan oleh Pegawai ASN/PTT/ Pelaksana Patroli [5 org x 3 hr x 4 kali]	60	OH	170.000	10.200.000	
	• Makanan penambah daya tahan tubuh [5 org x 21 rst x 3 hari]	315	OH	20.000	6.300.000	
C	Patroli Terpadu bersama Masyarakat dan Pihak/Instansi terkait lainnya				456.660.000	
521211	Belanja Bahan				9.975.000	RM
	• Pencetakan/penggandaan Peta Kerja Tim Patroli	21	LBR	100.000	2.100.000	

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
	• Spanduk posko 4 m2	21	RSRT	75.000	1.575.000	
	• Penggandaan dan penjiilidan	21	EKPL	50.000	1.050.000	
	• Konsumsi rapat evaluasi hasil	105	OH	50.000	5.250.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				120.150.000	RM
	• Biaya Operasional Pengamanan Hutan oleh Pegawai ASN/PTT/ Pelaksana Patroli [5 org x 3 hr x 3 kl]	45	OH	150.000	6.750.000	
	• Upah harian dan konsumsi untuk MMP [4 org x 3 hr x 21 desa x 3 kALI]	756	OH	150.000	113.400.000	
522141	Belanja Sewa				63.000.000	RM
	• Sewa rumah untuk Posko Desa [21 rsr x 3 bln]	63	BLN	1.000.000	63.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				263.535.000	RM
	• Perjalanan koordinasi pimpinan ke pusat	6	OT	11.422.500	68.535.000	
	• Transport Perjalanan Dinas supervisi (Instansi/ pihak terkait lainnya) di Pulau Timor [5 rsrt x 2 org x 3 kali]	30	OT	2.500.000	75.000.000	
	• Transport Perjalanan Dinas supervisi (Instansi/ pihak terkait lainnya) di Pulau Flores [5 rsrt x 2 org x 3 kali]	30	OT	4.000.000	120.000.000	

VII. LOKASI DAN TARGET PELAKSANAAN PROYEK

Pelaksanaan Kegiatan di Kawasan Konservasi Lingkup BBKSDA NTT

F. OUTPUT KONSERVASI SPESIES DAN GENETIK (5422) TAHUN ANGGARAN 2021

JUMLAH ANGGARAN : Rp 1.081.360.000,00

I. GAMBARAN UMUM

Kawasan TN dikelola oleh Balai Besar/ Balai Taman Nasional, sedangkan kawasan CA, SM, TWA dan TB dikelola oleh Balai Besar/Balai Konservasi Sumberdaya Alam. Khusus Taman Hutan Raya (TAHURA), sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 62 tahun 1998 tentang Penyerahan Sebagian Urusan di Bidang Kehutanan Kepada Daerah, TAHURA dikelola oleh pemerintah propinsi. Berdasarkan data yang tertuang di dalam Rencana Strategis Direktorat Jenderal KSDAE periode tahun 2015 – 2019 bahwa luasan kawasan konservasi adalah 27.190.992 Ha terdiri dari 527 unit berupa 50 unit Taman Nasional, 118 Taman Wisata Alam, 22 Taman Hutan Raya, 14 Taman Buru, 248 Cagar Alam, dan 75 Suaka Margasatwa.

Saat ini, kawasan hutan di Indonesia, termasuk kawasan hutan konservasi mengalami kerusakan hutan yang cukup besar. Dirjen Planologi Kehutanan, (2013) mencatat bahwa hingga akhir tahun 2011 kerusakan hutan yang terjadi di kawasan hutan seluas 41,17 juta ha yang terbagi menjadi kerusakan hutan di kawasan hutan konservasi seluas 5,25 juta ha, kerusakan hutan di kawasan hutan lindung seluas 7,45 juta ha, dan kerusakan hutan di kawasan hutan produksi seluas 28,47 juta ha. Lebih lanjut, Dirjen Planologi, (2013) menyebutkan bahwa laju deforestasi di kawasan hutan periode 2009- 2011 adalah sebesar 330.193,8 ha/tahun yang terbagi menjadi laju deforestasi di kawasan hutan konservasi sebesar 9.634,5 ha/tahun, laju deforestasi di kawasan hutan lindung sebesar 20.895,2 ha/tahun, dan laju deforestasi di kawasan hutan produksi sebesar 299.664,1 ha/tahun.

Sementara itu, berdasarkan data Ditjen PHKA, (2012) menyebutkan bahwa kerusakan kawasan konservasi berdasarkan laporan yang masuk dari Unit Pelaksana Teknis (UPT) di daerah (Konservasi Sumber Daya Alam dan Taman Nasional) mencapai 770.189 ha. Adapun kerusakan kawasan konservasi untuk setiap kategori adalah sebagai berikut: kerusakan kawasan taman buru mencapai 536,5 ha, kerusakan kawasan taman wisata alam mencapai 4.210,3 ha, dan kerusakan kawasan taman nasional mencapai 765.442,29 ha.

Berdasarkan data tersebut dan fakta di lapangan dapat diketahui bahwa sebagian besar kawasan hutan konservasi di Indonesia kini mengalami kerusakan kawasan hutan yang disebabkan oleh berbagai permasalahan, seperti: perambahan hutan, penebangan liar (illegal logging), penambangan liar (illegal mining), kebakaran hutan, dan perburuan satwaliar serta daya-daya alam. Untuk mengatasi kondisi tersebut, maka perlu dilakukan upaya-upaya perlindungan dan pengamanan kawasan hutan yang lebih bersifat preventif dan preemtiif.

Dalam RENSTRA KSDAE 2015-2019 Jumlah Pelaksanaan Kegiatan Perlindungan dan Pengamanan Kawasan Konservasi di 34 Propinsi menjadi salah satu dari 7 (tujuh) IKK Direktorat Kawasan Konservasi.

II. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari kegiatan ini adalah :

1. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE) dan UPT Balai Besar/Balai KSDA (berupa manfaat dalam pengambilan kebijakan pengelolaan kawasan konservasi dan pengelolaan kawasan konservasi yang efisien dan lestari).
2. Pemerintah Provinsi/Kabupaten/Kota setempat (berupa manfaat ekonomi dan berupa sosial budaya).
3. Dunia Pendidikan/Perguruan Tinggi, Peneliti, dll (manfaat dalam pengembangan ilmu pengetahuan).
4. Pihak Swasta (manfaat dalam peluang melakukan investasi di bidang pemanfaatan jasa lingkungan, pariwisata, tumbuhan obat, dll).
5. Masyarakat dan stakeholder lainnya (manfaat ekonomi, ekologi dan berupa sosial budaya).

III. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

1. Metode Pelaksanaan

Beberapa metode atau cara yang akan digunakan untuk membantu tercapainya hasil pada output kegiatan ini adalah :

- a. Intervensi Manajemen TSL di dalam Kawasan Konservasi terdiri dari :
 - Monitoring Populasi Kakatua Kecil Jambul Kuning di TWA Menipo dan SM Harlu (KPHK)
 - Pemantauan sarang Elang Flores di CA Wae Wuul, CA Watu Ata, CA Wolo Tado, CA Ndeti Kelikima dan CA Kimeng Boleng, TWAL Teluk Maumere dan SM Egon Ilemedo, TWA Ruteng
 - Monitoring Populasi Buaya di Teluk Kupang, TWA Menipo dan CA Maubesi Konservasi Penyau di Timor
 - Konservasi Penyau di Flores
- b. Intervensi Manajemen TSL di luar Kawasan Konservasi
 - Survey Potensi TSL terkait dasar usulan kuota pemanfaatan
 - Inventarisasi Tumbuhan Sonokeling (*Dalbergia latifolia*) di Kab Kupang, TTS, dan TTU
 - Survey dan Analisis Potensi TSL yang dimanfaatkan untuk pengusulan kuota (Walet Lembata)
 - Inventarisasi Komodo di Pulau Longos
- c. Penanganan Satwa Transit dan Konflik
 - Penguatan kapasitas Unit Penanganan Satwa
 - Operasional, Sosialisasi/Respon Konflik Satwa
 - Operasional pemeliharaan satwa di penampungan
 - Penanganan Barang Bukti Temuan dan Pelepasliaran Satwa Liar (Timor, Flores, Sumba)
 - Penanggulangan konflik antara manusia dan satwa liar

- d. Pengelolaan Zoonosis dan IAS
- Identifikasi dan inventarisasi spesies tumbuhan asing invasif di TWA Menipo dan TWA Ruteng
 - Pelaksanaan surveilans penyakit dan implementasi SEHATSATLI pada satwa

IV. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Alokasi anggaran kegiatan pencapaian pada tahun 2021 akan dibiayai oleh DIPA dengan rincian sebagai berikut.

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
5422	Konservasi Spesies dan Genetik				1.081.360.000	
5422.PBJ	Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	979,76	Rekomendasi Kebijakan		984.360.000	
5422. PBJ.001	Kawasan Perlindungan Keanekaragaman Spesies dan Genetik TSL	979,76	Hektar		984.360.000	
051	Intervensi Manajemen TSL di dalam Kawasan Konsevasi				232.250.000	
A	Monitoring Populasi Kakatua Kecil Jambul Kuning di TWA Menipo dan SM Harlu (KPHK)				14.000.000	
521211	Belanja Bahan				7.000.000	PNP
	• Alat bahan	2	KEG	1.000.000	2.000.000	
	• Penggandaan bahan/laporan	1000	LEMBAR	400	400.000	
	• Penjilidan laporan	12	EKSPL	50.000	600.000	
	• Konsumsi rapat pembahasan hasil	40	OH	60.000	2.400.000	
	• Bahan makan pembantu lapangan [4 Org x 5 hari x 2 keg]	40	OH	40.000	1.600.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan				4.000.000	PNP
	• Upah buruh pembantu lapangan [4 Org x 5 hari x 2 keg]	40	OH	100.000	4.000.000	
522141	Belanja Sewa				3.000.000	PNP
	• Sewa Perahu	1	KEG	1.000.000	1.000.000	
	• Sewa kendaraan roda 4	2	KEG	1.000.000	2.000.000	
B	Pemantauan sarang Elang Flores di CA Wae Wuul, CA Watu Ata, CA Wolo Tado, CA Ndeta Kelikima dan CA Kimeng Boleng, TWAL Teluk Mauwere dan SM Egon Ilemedo, TWA Ruteng				115.250.000	

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
521211	Belanja Bahan				11.250.000	PNP
	• Alat bahan	6	KEG	1.000.000	6.000.000	
	• Konsumsi rapat pembahasan hasil [20 Org x 6 keg]	120	OH	35.000	4.200.000	
	• Penggandaan bahan/laporan	1500	LEMBAR	400	600.000	
	• Pendjilidan laporan	9	EKSPL	50.000	450.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan				4.800.000	PNP
	• Upah buruh pembantu lapangan [2 Org x 4 hari x 6 keg]	48	OH	100.000	4.800.000	
522141	Belanja Sewa				3.200.000	PNP
	• Sewa Perahu	2	KEG	1.600.000	3.200.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				96.000.000	PNP
	• Perjalanan dinas dari BKW II ke Maumere	2	OT	4.000.000	8.000.000	
	• Perjalanan dinas dari BKW II [2 Org x 5 keg]	10	OT	3.000.000	30.000.000	
	• Perjalanan dinas dari SKW III	1	OT	3.000.000	3.000.000	
	• Perjalanan dinas dari SKW III	1	OT	2.000.000	2.000.000	
	• Perjalanan dinas dari SKW IV	1	OT	2.000.000	2.000.000	
	• Perjalanan dinas dari RKW [2 Org x 6 keg]	12	OT	2.000.000	24.000.000	
	• Perjalanan dinas para pihak	6	OT	2.000.000	12.000.000	
	• Perjalanan supervisi bidang/seksi	6	OT	2.500.000	15.000.000	
C	Monitoring Populasi Buaya di Teluk Kupang, TWA Menipo dan CA Maubesi				73.000.000	
521211	Belanja Bahan				5.100.000	PNP
	• Alat bahan	3	KEG	1.050.000	3.150.000	
	• Bahan makan pembantu lapangan [2 Org x 3 keg x 4 hari]	24	HOK	50.000	1.200.000	
	• Penggandaan bahan/laporan	1000	LEMBAR	400	400.000	
	• Pendjilidan laporan	7	EKSPL	50.000	350.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan				2.400.000	PNP

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
	• Upah buruh pembantu lapangan [2 Org x 4 hari x 3 keg]	24	OH	100.000	2.400.000	
522141	Belanja Sewa				4.000.000	PNP
	• Sewa Perahu	2	KEG	2.000.000	4.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				61.500.000	PNP
	• Perjalanan Petugas dari Balai	3	OT	3.500.000	10.500.000	
	• Perjalanan Petugas dari Balai [3 Org x 2 keg]	6	OT	3.000.000	18.000.000	
	• Perjalanan Petugas dari Bidang	3	OT	3.000.000	9.000.000	
	• Perjalanan Petugas dari seksi	3	OT	3.000.000	9.000.000	
	• Perjalanan Petugas dari resort [2 Org x 3 keg]	6	OT	1.000.000	6.000.000	
	• Perjalanan dalam rangka supervisi	3	OT	3.000.000	9.000.000	
D	Konservasi Penyu di Pulau Timor				23.000.000	
521211	Belanja Bahan				23.000.000	PNP
	• Alat dan bahan kegiatan konservasi penyu di TB Bena, TWA Menipo dan CA Maubesi	3	KEG	7.000.000	21.000.000	
	• Pemeliharaan kandang penetasan penyu di TB Bena dan Menipo	2	KEG	1.000.000	2.000.000	
E	Konservasi Penyu di TWAL Teluk Maumere				7.000.000	
521211	Belanja Bahan				7.000.000	PNP
	• Alat bahan dalam rangka identifikasi lokasi pendaratan penyu di TWAL Teluk Maumere	1	KEG	7.000.000	7.000.000	
052	Intervensi Manajemen TSL di luar Kawasan Konservasi				153.900.000	
A	Survey Potensi TSL terkait dasar usulan kuota pemanfaatan				43.000.000	
521211	Belanja Bahan				2.800.000	PNP
	• Bahan dan pelaporan	1	KEG	1.000.000	1.000.000	
	• Personal use	4	ORG	200.000	800.000	
	• Konsumsi pembahasan hasil	20	OH	50.000	1.000.000	

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				200.000	PNP
	• Pembuatan peta hasil	1	LAYER	200.000	200.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				40.000.000	PNP
	• Perjalanan dalam rangka survei potensi TSL di Pulau Timor, Flores, Sumba, Rote, Alor	8	OT	5.000.000	40.000.000	
C	Inventarisasi Tumbuhan Sonokeling (Dalbergia latifolia) di Kab Kupang, TTS, dan TTU				58.300.000	
521211	Belanja Bahan				4.700.000	PNP
	• Alat bahan	2	KEG	775.000	1.550.000	
	• Bahan makanan tenaga lapangan [4 Org x 4 HARI x 2 KEG)	32	OH	50.000	1.600.000	
	• Konsumsi rapat pembahasan hasil kegiatan bersama Dinas LHK	1	PAKET	1.100.000	1.100.000	
	• Penggandaan bahan/laporan	625	LEMBAR	400	250.000	
	• Pendjilidan laporan	4	EKSPL	50.000	200.000	
521211	Belanja Bahan				200.000	RM
	• Alat bahan	2	KEG	100.000	200.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				2.400.000	RM
	• Upah tenaga lapangan [3 Org x 4 hari x 2 keg]	24	OH	100.000	2.400.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				48.000.000	PNP
	• Perjalanan pelaksana teknis [4 Org x 2 keg]	8	OT	4.000.000	32.000.000	
	• Perjalanan pelaksana teknis [4 Org x 2 keg]	8	OT	2.000.000	16.000.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				3.000.000	PNP
	• Uang saku peserta rapat	30	OH	100.000	3.000.000	
D	Survey dan Analisis Potensi TSL yang dimanfaatkan untuk pengusulan kuota (Walet Lembata)				19.850.000	
521211	Belanja Bahan				1.350.000	PNP
	• Alat bahan	1	KEG	1.000.000	1.000.000	

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
	• Penggandaan Laporan	10	EKSPL	35.000	350.000	
522141	Belanja Sewa				2.500.000	PNP
	• Sewa kendaraan	1	KEG	2.500.000	2.500.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				16.000.000	RM
	• Perjalanan Dinas dari balai	2	OT	5.000.000	10.000.000	
	• Perjalanan Dinas dari SKW IV	2	OT	3.000.000	6.000.000	
E	Inventarisasi Komodo di Pulau Longos				32.750.000	
521211	Belanja Bahan				2.250.000	PNP
	• Bahan dan pelaporan	1	KEG	750.000	750.000	
	• Perkengkapan lapangan	1	KEG	500.000	500.000	
	• Obat-Obatan	1	KEG	500.000	500.000	
	• Bahan makan pembantu lapangan [2 Org x 5 hari x 1 keg]	10	HOK	50.000	500.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan				1.000.000	PNP
	• Upah buruh pembantu lapangan [2 Org x 5 hari x 1 keg]	10	OH	100.000	1.000.000	
522141	Belanja Sewa				2.500.000	PNP
	• Sewa perahu	1	KEG	2.500.000	2.500.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				27.000.000	PNP
	• Biaya perjalanan tim dari balai ke Pulau Longos	2	OT	5.000.000	10.000.000	
	• Biaya perjalanan tim bidang ke Pulau Longos	2	OT	2.500.000	5.000.000	
	• Biaya perjalanan tim seksi ke Pulau Longos	2	OT	3.000.000	6.000.000	
	• Biaya perjalanan tim resort	4	OT	1.500.000	6.000.000	
053	Penanganan Satwa Transit dan Konflik				598.210.000	
A	Penguatan kapasitas Unit Penanganan Satwa				25.000.000	
532111	Belanja Modal Peralatan dan Mesin				25.000.000	PNP
	• Pembuatan papan informasi	10	UNIT	2.500.000	25.000.000	
B	Operasional, Sosialisasi/Respon Konflik Satwa				469.300.000	

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
521211	Belanja Bahan				69.000.000	PNP
	• Konsumsi bersama masyarakat, sosialisasi, briefing, perencanaan, evaluasi operasi dan pelatihan kesamaptaan	20	KALI	1.000.000	20.000.000	
	• Bahan perlengkapan patroli/operasi penanganan/penangkapan	1	TAHUN	49.000.000	49.000.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				209.600.000	PNP
	• Uang operasional petugas	524	OH	400.000	209.600.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				18.000.000	RM
	• Santunan korban konflik	12	KALI	1.500.000	18.000.000	
521832	Belanja Barang Persediaan Lainnya				5.700.000	PNP
	• Pembuatan leflet/brosur UPS	1	KEG	5.700.000	5.700.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				167.000.000	PNP
	• Transport tim pulau timor dan sekitarnya	20	KALI	1.500.000	30.000.000	
	• Transport tim pulau rote dan sekitarnya	1	KALI	4.000.000	4.000.000	
	• Perjalanan ke pulau flores, sumba dan sekitarnya	5	OT	6.000.000	30.000.000	
	• Transport tim ke Sabu	2	KALI	3.000.000	6.000.000	
	• Perjalanan dalam rangka koordinasi dan respon konflik ke Timor dan sekitarnya	5	OT	3.000.000	15.000.000	
	• Perjalanan dalam rangka koordinasi dan respon konflik ke Flores dan sekitarnya	4	OT	5.000.000	20.000.000	
	• Perjalanan dinas pimpinan dalam rangka koordinasi/konsultasi ke pusat/ luar provinsi	2	OT	12.250.000	24.500.000	
	• Perjalanan dinas dalam rangka respon konflik di Timor	6	OT	3.000.000	18.000.000	
	• Perjalanan dinas dalam rangka respon konflik	3	OT	6.500.000	19.500.000	
C	Operasional pemeliharaan satwa di penampungan				69.210.000	
521211	Belanja Bahan				69.210.000	RM

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
	• Pembelian alat-alat kesehatan satwa dan obat-obatan	1	KEG	5.260.000	5.260.000	
	• Pemeriksaan kesehatan satwa	5	KALI	2.500.000	12.500.000	
	• Biaya pemeliharaan satwa di penampungan	12	BULAN	4.287.500	51.450.000	
D	Penanganan Barang Bukti Temuan dan Pelepasliaran Satwa Liar				34.700.000	
521211	Belanja Bahan				9.600.000	RM
	• Alat dan bahan	3	KEG	3.000.000	9.000.000	
	• Bahan makan buruh [2 Org x 1 hari x 3 keg]	6	OH	100.000	600.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan				600.000	RM
	• Upah buruh pembantu lapangan [2 Org x 1 hari x 3 keg]	6	HOK	100.000	600.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				11.000.000	RM
	• Biaya Pengiriman/Pengangkutan/ Penanganan Barang Bukti	2	KEG	5.500.000	11.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				13.500.000	RM
	• Perjalanan petugas dari Balai untuk Timor, Rote [1 Org x 1 keg]	1	OT	3.000.000	3.000.000	
	• Perjalanan petugas dari Balai untuk Flores, Sumba, Sabu [1 Org x 1 keg]	1	OT	6.000.000	6.000.000	
	• Perjalanan petugas dari Bidang Wilayah/ Seksi [4 Org x 1 keg]	3	OT	1.500.000	4.500.000	
5422. QDB	Fasilitasi dan Pembinaan Lembaga	7	LEMBAGA		97.000.000	
5422. QDB.002	Entitas Pemanfaatan keanekaragaman spesies dan genetik TSL yang dikembangkan (koperasi, BUMN, dan Badan Usaha Swasta)	7	LEMBAGA		97.000.000	
051	Intervensi Manajemen TSL Peredaran dan Penangkaran				97.000.000	
A	Penilaian kelayakan izin edar dalam negeri (2 pemegang izin)				3.400.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				3.400.000	PNP

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
	• Perjalanan dalam rangka penilaian kelayakan izin edar dalam negeri [10 Org x 2 hari]	20	OT	170.000	3.400.000	
B	Monitoring dan evaluasi izin penangkaran (5 izin penangkaran)				50.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				50.000.000	PNP
	• Perjalanan dalam rangka penilaian kelayakan izin penangkaran di Alor	2	OT	4.000.000	8.000.000	
	• Perjalanan dari resort dalam rangka penilaian kelayakan izin penangkaran di Alor [2 Org x 2 HARI]	4	OT	500.000	2.000.000	
	• Perjalanan dalam rangka penilaian kelayakan izin penangkaran Ke Ngada	2	OT	5.000.000	10.000.000	
	• Perjalanan dari resort dalam rangka penilaian kelayakan izin penangkaran Ke Ngada [2 Org x 2 hari]	4	OT	500.000	2.000.000	
	• Perjalanan dalam rangka penilaian kelayakan izin penangkaran Ke Rote Ndao	2	OT	4.000.000	8.000.000	
	• Perjalanan resort dalam rangka penilaian kelayakan izin penangkaran Ke Rote Ndao [2 Org x 2 hari]	4	OT	500.000	2.000.000	
	• Perjalanan dalam rangka penilaian kelayakan izin penangkaran Ke TTS	2		3.500.000	7.000.000	
	• Perjalanan resort dalam rangka penilaian kelayakan izin penangkaran di TTS [2 Org x 2 hari]	4	OT	500.000	2.000.000	
	• Perjalanan resort dalam rangka penilaian kelayakan izin penangkaran di Kabupaten Kupang	2	OT	3.500.000	7.000.000	
	• Perjalanan resort dalam rangka penilaian kelayakan izin penangkaran ke Kabupaten Kupang [2 Org x 2 hari]	4	OT	500.000	2.000.000	
C	Survei kuota tangkap				43.600.000	
521211	Belanja Bahan				2.900.000	RM

KODE	PROGRAM/ AKTIVITAS/ KRO/ RO/ KOMPONEN/ SUBKOMP/ DETIL	VOLUME	SATUAN	HARGA SATUAN	JUMLAH	SD
	• Bahan dan pelaporan	1	KEG	2.900.000	2.900.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				200.000	RM
	• Pembuatan peta hasil	1	LAYER	200.000	200.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				40.500.000	RM
	• Perjalanan dalam rangka survei kuota tangkap TSL	9	OT	4.500.000	40.500.000	

G. OUTPUT PEMANFAATAN JASA LINGKUNGAN KAWASAN KONSERVASI (5423) TAHUN ANGGARAN 2021

JUMLAH ANGGARAN : Rp 3.013.640,00

I. GAMBARAN UMUM PROYEK

Rencana pembangunan bidang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati tahun 2018 mengacu pada beberapa pendekatan yaitu: 1) Perkuatan Pelaksanaan Kebijakan *Money Follow Program*; 2) Penguatan tersebut dilaksanakan dengan pendekatan Holistik-Tematik, Integratif dan Spasial dengan memperhatikan pada: Pengendalian perencanaan, Perkuatan perencanaan dan penganggaran untuk Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2018, Perkuatan perencanaan berbasis kewilayahan, Perkuatan integrasi sumber pendanaan. Perkuatan Implementasi *Money Follow Program* dalam RKP 2018 meliputi 3 hal yaitu menajamkan prioritas nasional, memastikan pelaksanaan program dan menajamkan integrasi sumber pendanaan. Tema RKP Tahun 2018 adalah Memacu Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas.

Rancangan RKP tahun 2018 terdiri dari 10 Prioritas Nasional (PN) yang dijabarkan dalam 30 Program Prioritas (PP) Tahun 2018. Kesepuluh PN tersebut yaitu pendidikan; kesehatan; perumahan dan permukiman; pengembangan dunia usaha dan pariwisata; ketahanan energi; ketahanan pangan; penanggulangan kemiskinan; infrastruktur, konektifitas dan kemaritiman; pembangunan wilayah; dan politik, hukum, pertahanan dan keamanan. Dari 10 PN tersebut yang terkait dengan program KSDAE sebanyak 5 PN yaitu pengembangan dunia usaha dan pariwisata; infrastruktur, konektifitas dan kemaritiman; ketahanan energi; pembangunan wilayah; dan pembangunan kesehatan. Diantara 5 PN tersebut, terdapat 3 PN yang berhubungan dengan pemanfaatan jasa lingkungan di kawasan konservasi. Salah satunya adalah PN Pengembangan dunia Usaha dan Pariwisata.

Sektor pariwisata nasional pada tahun 2014 telah menghasilkan devisa sebesar Rp 120 triliun atau berkontribusi sebesar 4,2% terhadap PDB nasional. Target devisa sektor pariwisata pada 5 tahun mendatang (2015-2019) adalah 240 triliun atau berkontribusi sebesar 8% terhadap PDB nasional. Sektor pariwisata juga telah berkontribusi terhadap penyerapan kesempatan kerja sebesar 11 juta tenaga kerja pada tahun 2014 dan pada tahun 2019 ditargetkan jumlah kontribusi tersebut meningkat menjadi 13 juta tenaga kerja. Berdasarkan *World Economic Forum (WEF)*, Indeks daya saing kepariwisataan Indonesia juga meningkat pada tahun 2014 menjadi peringkat 70, dan pada tahun 2019 ditargetkan menjadi peringkat 30. Indonesia mempunyai kekuatan pariwisata pada tiga unsur yakni *nature*, *culture*, dan *manmade*. Enam puluh persen (60%) kekuatan utama pariwisata alam Indonesia terletak pada potensi alam yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, diantaranya berada pada kawasan konservasi yang terdiri dari 52 Taman Nasional, 118 Taman Wisata Alam dan 11 Taman Buru.

Tujuan penyusunan TOR ini adalah untuk menjadi acuan dalam pelaksanaan output pengembangan destinasi wisata alam prioritas di Provinsi Nusa Tenggara Timur, yang mendukung destinasi pariwisata prioritas, kawasan ekonomi khusus dan kawasan strategis pariwisata nasional.

II. PENERIMA MANFAAT

Penerima manfaat dari pengembangan destinasi wisata alam prioritas yang mendukung destinasi pariwisata prioritas, kawasan ekonomi khusus dan kawasan strategis pariwisata nasional untuk tahun anggaran 2020 adalah :

1. Pemerintah pusat dan daerah terutama Pemerintah Daerah (Pemprov dan PemKab/Pemkot) dalam bentuk PNBP dan penerimaan lain dari multiplier effect dari kegiatan pariwisata antara lain pajak hotel dan restoran dan lapangan pekerjaan
2. Swasta berupa kesempatan berinvestasi
3. Masyarakat lokal berupa kesempatan membuka usaha di berbagai sektor wisata alam (antara lain homestay, porter, jasa informasi pariwisata, jasa pramu wisata (interpreter dan pemandu), jasa transportasi, jasa perjalanan wisata, jasa makanan dan minuman dan jasa cinderamata)
4. Masyarakat umum sebagai pengunjung/wisatawan baik wisatawan nusantara maupun wisatawan mancanegara

III. STRATEGI PENCAPAIAN KELUARAN

Metode pelaksanaan kegiatan Pengembangan Destinasi Wisata Alam Prioritas yang mendukung Destinasi pariwisata Prioritas, Kawasan Ekonomi Khusus dan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional sebagai berikut :

Komponen	Keterangan
Pemanfaatan Jasa Lingkungan Air/ Energi Air	Dilakukan dengan tahapan : 1. Inventarisasi pemanfaatan air di Baumata, Camplong, Ruteng
Pembangunan Sarana Prasarana Wisata di Kawasan Konservasi	Dilakukan dengan tahapan : 1. Pembuatan Jalur Tracking Wisata di TWA Baumata 2. Pembuatan Jalur Tracking Wisata di TWA Bipolo 3. Pembangunan Pos Jaga di TWA Pulau Rusa 4. Pembuatan Jalur Tracking Wisata di SM Harlu
Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata di Kawasan Konservasi	Dilakukan dengan tahapan : 1. Pembersihan Jalur Tracking Wisata di TWA Ruteng (Ranameese, Nampar Nos dan Poco Ranaka) 2. Pembersihan Jalur Tracking Wisata di TWA Camplong dan Pembersihan Kolam Oenaek 3. Pembersihan Jalur Wisata dan bersih-bersih sampah di TWAL Teluk Maumere 4. Pembersihan Jalur Tracking Wisata di TWAL 17 Pulau 5. PENYELENGGARAAN HARI KONSERVASI ALAM NASIONAL (HKAN) TAHUN 2021

Tata waktu pelaksanaan kegiatan pada tahun 2021 sebagai berikut :

No	Tahapan Kegiatan	2021			
		Triwulan 1	Triwulan 2	Triwulan 3	Triwulan 4
1.	Pembangunan Sarana Prasarana Wisata Alam				
2.	Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata Alam				

IV. ANALISIS KELAYAKAN

Koridor / Kriteria	Penjelasan Singkat
Merupakan kegiatan yang signifikan untuk mencapai sasaran RKP/RPJM	Pembangunan sarana dan prasarana wisata alam yang layak dan memadai di TWA dan sangat signifikan dengan RKP tahun 2018 dalam rangka mendukung Investasi dan Memantapkan Pembangunan Infrastruktur untuk Percepatan Pertumbuhan Ekonomi yang Berkualitas.
Bukan kegiatan rutin/berulang-ulang atau kegiatan yang bersifat administratif/operasional	Bangunan sarana prasarana wisata alam mempunyai umur teknis tertentu, sehingga tidak pengerjaan suatu sarpras tidak dilakukan berulang untuk jenis sarpras yang sama.

Koridor / Kriteria	Penjelasan Singkat
Sesuai dengan Tusi & Kewenangan	Berdasarkan PP Nomor 28 Tahun 2011 Jo PP Nomor 108 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam, PP Nomor 36 tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam, dan Peraturan Direktur Jenderal PHKA Nomor P.3/IV-Set/2011 jo P.5/IV-SET/2015 tentang Pedoman Penyusunan Desain Tapak Pengelolaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya dan Taman Wisata Alam, pembangunan sarana dan prasarana wisata alam dilaksanakan oleh pengelola kawasan. Sedangkan NSPK terkait pembangunan sarpras wisata alam merupakan kewenangan pusat.
Memiliki muatan proyek yang memiliki tahapan (siklus) perencanaan-pelaksanaan-monev	Tahapan-tahapan dalam Pembangunan sarana dan prasarana wisata adalah perencanaan, pelaksanaan dan monitoring dan evaluasi.
Bukan kegiatan yang selesai dilakukan dalam jangka waktu sangat pendek (satu titik)	Tahapan-tahapan dalam pembangunan sarana dan prasarana wisata alam membutuhkan waktu lebih dari 1 tahun.

V. ANALISIS KESIAPAN IMPLEMENTASI DI TAHUN 2021

- Untuk Proyek yang Bersifat Fisik/Konstruksi
Tidak terdapat proyek yang bersifat fisik/konstruksi pada tahun 2021
- Untuk Proyek yang Bersifat Non Fisik

Koridor / Kriteria	Penjelasan Singkat
Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> Masyarakat adat sangat mendukung adanya pengelolaan wisata alam di TWAL 17 Pulau dan TWAL Teluk Maumere
Pemerintah Daerah	<ul style="list-style-type: none"> Pemerintah Daerah Kabupaten Ngada dan Kabupaten Sikka sangat mendukung dalam pengembangan pariwisata
PNBP	<ul style="list-style-type: none"> Telah dilaksanakan pemungutan masuk objek wisata alam di TWAL 17 Pulau dan TWAL Teluk Maumere

VI. BIAYA YANG DIPERLUKAN

Kegiatan ini memerlukan biaya dengan sumber dana anggaran DIPA BA 29 Tahun 2021 dengan rincian sebagaimana pada Tabel :

KODE	URAIAN	Vol	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	SD
5423	Pemanfaatan Jasa Lingkungan Kawasan Konservasi				3.013.640.000	
5423.RAG	Sarana Bidang Pertanian, Kehutanan dan Lingkungan Hidup	1	UNIT		3.013.640.000	
5423.RAG.004	Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Konservasi	1	UNIT		2.963.400.000	
052	Pembangunan Sarana Prasarana Wisata di Kawasan Konservasi				137.960.000	
A	Pembuatan Jalur Tracking Wisata di TWA Baumata				137.960.000	
521211	Belanja Bahan				9.960.000	RM
	• Alat Bahan dan Peralatan	1	KEG	9.460.000	9.460.000	
	• Pembuatan laporan	1	KEG	500.000	500.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				8.000.000	RM
	• Supervisi pembuatan jalur tracking	8	OT	1.000.000	8.000.000	
533111	Belanja Modal Gedung dan Bangunan				120.000.000	RM
	• Pos jaga di TWA Baumata	1	UNIT	70.000.000	70.000.000	
	• Lopo di TWA Baumata	2	UNIT	25.000.000	50.000.000	
053	Informasi dan Promosi Pengelolaan Wisata di Kawasan Konservasi				2.825.440.000	
B	Pembersihan Jalur Tracking Wisata di TWA Camplong dan Pembersihan Kolam Oenaek				18.800.000	
521211	Belanja Bahan				9.800.000	RM
	• Alat Bahan dan Peralatan	1	KEG	9.300.000	9.300.000	
	• Pembuatan laporan	1	KEG	500.000	500.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				9.000.000	RM
	• Supervisi pembuatan jalur tracking	3	OT	3.000.000	9.000.000	
E	PENYELENGGARAAN HARI KONSERVASI ALAM NASIONAL (HKAN) TAHUN 2021				2.806.640.000	

KODE	URAIAN	Vol	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	SD
521211	Belanja Bahan				546.840.000	RM
	• ATK	1	KEG	2.140.000	2.140.000	
	• Alat dan bahan rapat harmonisasi Ring Of Beauty With 3A	1	KEG	10.450.000	10.450.000	
	• Konsumsi tambahan rapat harmonisasi ring of beauty with 3A	1	KEG	2.100.000	2.100.000	
	• Bahan publikasi (Tanda Peserta, Cetak Buku Panduan, Baliho, Spanduk, Banner, Poster HKAN, Undangan daerah, Promosi/ Iklan HKAN di Media Massa)	1	KEG	80.000.000	80.000.000	
	• Konsumsi Panitia H-1 dan H+1 [100 Org x 3 mkn x 2 kali]	600	KOTAK	25.000	15.000.000	
	• Konsumsi Panitia H-1 dan H+1 [100 Org x 2 snack x 2 kali]	400	KOTAK	12.500	5.000.000	
	• Konsumsi peserta dan Panitia [500 Org x 3 mkn x 3 kali]	4500	KOTAK	25.000	112.500.000	
	• Konsumsi peserta dan Panitia [500 Org x 2 snack x 3 kali]	3000	KOTAK	12.500	37.500.000	
	• Konsumsi tamu Undangan Upacara pembukaan Jambore (makan)	400	KOTAK	40.000	16.000.000	
	• Konsumsi tamu Undangan Upacara pembukaan Jambore (snack)	400	KOTAK	18.000	7.200.000	
	• Konsumsi Tamu Undangan dan panitia Upacara peringatan HKAN VIP (makan)	400	KOTAK	40.000	16.000.000	
	• Konsumsi Tamu Undangan dan panitia Upacara peringatan HKAN VIP (snack)	400	KOTAK	18.000	7.200.000	
	• Konsumsi Tamu Undangan dan panitia Upacara peringatan HKAN non VIP (makan)	1100	KOTAK	25.000	27.500.000	
	• Konsumsi Tamu Undangan dan panitia Upacara peringatan HKAN non VIP (snack)	1100	KOTAK	12.500	13.750.000	
	• Personal Use (Kaos dan Topi) untuk Tamu Undangan VIP	500	SET	175.000	87.500.000	
	• Personal Use (Kaos dan Topi) untuk Tamu Undangan Non VIP	500	SET	150.000	75.000.000	

KODE	URAIAN	Vol	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	SD
	<ul style="list-style-type: none"> Personal Use rapat harmonisasi ring of beauty with 3A (Field shield, hand sanitiser, godybag, baju kaos) 	160	SET	200.000	32.000.000	
521213	Belanja Honor Output Kegiatan				27.850.000	RM
	> PANITIA LOKAL (Pameran, jelajah pantai, lomba foto video, kemah konservasi, jambore)				26.500.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Penanggungjawab 	10	OK	450.000	4.500.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Ketua dan Wakil Ketua 	10	OK	400.000	4.000.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Sekretaris 	10	OK	300.000	3.000.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Anggota 	50	OK	300.000	15.000.000	
	>> PANITIA LELANG DAN PANITIA PENERIMA BARANG			0	1.350.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Honor Panitia lelang 	3	OK	450.000	1.350.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				769.971.000	RM
	<ul style="list-style-type: none"> Pembuatan Gapura peringatan HKAN 2021 	1	UNIT	36.000.000	36.000.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Penyediaan Air Bersih dan Instalasi Air 	1	KEG	68.000.000	68.000.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Toilet Portable 	8	UNIT	21.500.000	172.000.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Pengadaan perlengkapan kesehatan dan obat-obatan 	1	KEG	52.850.000	52.850.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Perlengkapan pendukung field trip (Goody bag) 	1300	BUAH	66.826	86.873.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Perlengkapan pendukung field trip (Lunch Box) 	1300	BUAH	66.826	86.873.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Perlengkapan pendukung field trip (Tumbler) 	1300	BUAH	60.750	78.975.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Umbul-umbul 	200	BUAH	150.000	30.000.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Peralatan kebersihan penataan Jalur track field trip TWAL Teluk Kupang (Pantai Lasiana) 	90	SET	200.000	18.000.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Upah buruh pembersihan Camping Ground dan Jambore TWAL Teluk Kupang [80 Org x 4 hari] 	320	HOK	135.000	43.200.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Upah buruh pembersihan Pantai Lasiana [80 Org x 4 hari] 	320	HOK	135.000	43.200.000	

KODE	URAIAN	Vol	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	SD
	<ul style="list-style-type: none"> Upah Buruh pembersihan dan penataan jalur track Field Trip, jelajah laut dan fun game [100 Org x 4 hari] 	400	HOK	135.000	54.000.000	
522141	Belanja Sewa				736.279.000	RM
	<ul style="list-style-type: none"> Sewa kendaraan penjemputan tamu 	1	KEG	78.000.000	78.000.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Sewa kelengkapan bahan dan peralatan panggung, tenda, sound system, peralatan kamera/CCTV, video trone, jimi jeep, panggung jambore konservasi 	1	KEG	598.279.000	598.279.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Sewa Alat Berat untuk pembersihan dan penataan lokasi HKAN 	1	KEG	50.000.000	50.000.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Sewa hosting 	1	KEG	10.000.000	10.000.000	
522151	Belanja Jasa Profesi				400.800.000	RM
	<ul style="list-style-type: none"> Honor Fasilitator Jelajah laut dan Fun Game 	4	OH	500.000	2.000.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Honor Tenaga Medis [24 Org x 4 hr] 	96	OH	200.000	19.200.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Honor Hiburan Kesenian Daerah 	7	KEG	3.000.000	21.000.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Honor Keamanan TNI dan POLRI [82 Org x 4 hari] 	328	OH	300.000	98.400.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Honor Pembawa Acara Jambore, Talk Show dan Workshop HKAN 2021 (host kelas menengah) 	2	OK	20.000.000	40.000.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Honor Narasumber Talk Show dan Workshop HKAN 2021 	15	OJ	1.400.000	21.000.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Dialog Interaktif di TV Nasional maupun Swasta (durasi kurang dari 30 Menit) 	1	PAKET	80.000.000	80.000.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Dialog Interaktif di TV Nasional maupun Swasta (durasi kurang dari 30 Menit) 	1	PAKET	20.000.000	20.000.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Honor Moderator Talk Show dan Workshop HKAN 2021 	5	OK	700.000	3.500.000	
	<ul style="list-style-type: none"> EO (Event Oganiser) Kegiatan HKAN 2021 	1	KEG	90.000.000	90.000.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Honor narasumber pembahasan buku Ring Of Beauty 	1	OJ	1.000.000	1.000.000	
	<ul style="list-style-type: none"> Honor moderator pembahasan buku Ring Of Beauty 	1	OK	700.000	700.000	

KODE	URAIAN	Vol	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	SD
	• Honor pemain sasando rapat harmonisasi ring of beauty with 3A	1	KEG	1.000.000	1.000.000	
	• Honor pembawa tari-tarian rapat harmonisasi ring of beauty with 3A	1	KEG	2.000.000	2.000.000	
	• Honor Pembawa Acara rapat harmonisasi ring of beauty with 3A	1	KEG	1.000.000	1.000.000	
524111	Belanja Perjalanan Dinas Biasa				231.000.000	RM
	• Perjalanan Koordinasi dan Konsultasi Provinsi NTT dengan Pemerintah Daerah, Instansi Terkait dalam Mitra dalam rangka Road To HKAN	6	OT	2.000.000	12.000.000	
	• Perjalanan Koordinasi dan Konsultasi luar kota dengan Pemerintah Daerah, Instansi Terkait dan Mitra (dari dan ke Kupang) dalam Mitra dalam rangka Road To HKAN	6	OT	4.500.000	27.000.000	
	• Biaya perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan bahan/materi/fiedtrip dalam rangka Road To HKAN	21	OT	4.000.000	84.000.000	
	• Biaya Perjalanan Dinas koordinasi dan konsultasi	9	OT	12.000.000	108.000.000	
524113	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota				37.150.000	RM
	• Perjalanan Koordinasi dan Konsultasi dalam kota Kupang dengan Pemerintah Daerah, Instansi Terkait dan Mitra (Road To HKAN)	127	OJ	170.000	21.590.000	
	• Transportasi lokal road to HKAN	37	OH	200.000	7.400.000	
	• Operasional keamanan (tim BBKSDA NTT) [12 Org x 4 hari]	48	OH	170.000	8.160.000	
524114	Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota				56.750.000	RM
	• Paket meeting half day harmony ring of beauty with 3A	150	OH	280.000	42.000.000	
	• Paket meeting fullboard harmony ring of beauty with 3A	15	OH	850.000	12.750.000	

KODE	URAIAN	Vol	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	SD
	• Bantuan transport rapat harmonisasi ring of beauty with 3A dari TTU-Kupang PP	5	OH	400.000	2.000.000	
5423.RAG.007	Pengembangan Wisata Alam di Kawasan Konservasi (PEN)	1	UNIT		50.240.000	
51	Pembangunan Sarana Prasarana Wisata di Kawasan Konservasi				50.240.000	
A	Pembuatan Jalur Tracking Wisata di TWA Baumata				2.400.000	
521211	Belanja Bahan				900.000	
	• Bahan makanan tenaga lapangan [5 Org x 3 hari]	15	OH	60.000	900.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				1.500.000	
	• Honor tenaga kerja untuk pembuatan tracking 2 km [5 Org x 3 hari]	15	OH	100.000	1.500.000	
B	Pembuatan Jalur Tracking Wisata di TWA Bipolo				5.600.000	
521211	Belanja Bahan				2.100.000	
	• Bahan makanan tenaga lapangan [7 Org x 5 hari]	35	OH	60.000	2.100.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				3.500.000	
	• Honor tenaga kerja untuk pembuatan tracking 3 km [7 Org x 5 hari]	35	OH	100.000	3.500.000	
C	Pembuatan Jalur Tracking Wisata di SM Harlu				5.120.000	
521211	Belanja Bahan				1.920.000	
	• Bahan makanan tenaga lapangan [8 Org x 4 hari]	32	OH	60.000	1.920.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				3.200.000	
	• Honor tenaga kerja untuk pembuatan tracking 4 km [8 Org x 4 hari]	32	OH	100.000	3.200.000	
D	Pembersihan Jalur Tracking Wisata di TWA Ruteng (Ranamese, Nampar Nos dan Poco Ranaka)				10.240.000	
521211	Belanja Bahan				3.840.000	

KODE	URAIAN	Vol	SATUAN	HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH	SD
	• Bahan makanan tenaga lapangan [8 Org x 8 hari]	64	OH	60.000	3.840.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				6.400.000	
	• Honor tenaga kerja untuk pembuatan tracking 1,5 km [8 Org x 8 hari]	64	OH	100.000	6.400.000	
E	Pembersihan Jalur Tracking Wisata di TWA Camplong dan Pembersihan Kolam Oenaek				10.240.000	
521211	Belanja Bahan				3.840.000	
	• Bahan makanan tenaga lapangan [8 Org x 8 hari]	64	OH	60.000	3.840.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				6.400.000	
	• Honor tenaga kerja untuk pembuatan tracking 2 km [8 Org x 8 hari]	64	OH	100.000	6.400.000	
F	Pembersihan Jalur Wisata dan bersih-bersih sampah di TWAL Teluk Maumere				6.400.000	
521211	Belanja Bahan				2.400.000	
	• Bahan makanan tenaga lapangan [8 Org x 5 hari]	40	OH	60.000	2.400.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				4.000.000	
	• Honor tenaga kerja untuk pembuatan tracking 1,5 km [8 Org x 5 hari]	40	OH	100.000	4.000.000	
G	Pebersihan Jalur Tracking Wisata Puncak Pulau Rutong dan Pulau Ontoloe serta Bersih-bersih sampah di TWA Tujuh Belas Pulau				10.240.000	
521211	Belanja Bahan				3.840.000	
	• Bahan makanan tenaga lapangan [8 Org x 8 hari]	64	OH	60.000	3.840.000	
521219	Belanja Barang Non Operasional Lainnya				6.400.000	
	• Honor tenaga kerja untuk pembuatan tracking 1,5 km [8 Org x 8 hari]	64	OH	100.000	6.400.000	

VII. LOKASI DAN TARGET PELAKSANAAN PROYEK

Lokasi pelaksanaan kegiatan adalah kawasan konservasi khususnya di TWA Baumata, TWA Bipolo, TWA Ruteng, TWAL 17 Pulau, TWA Camplong dan wilayah kerja BBKSDA NTT.





**BALAI BESAR KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM
NUSA TENGGARA TIMUR**

Jl.S.K. Lerik, Kelapa Lima. Kota Kupang



081138104999



bbksda_ntt



bbksdantnt_official



bbksdantnt